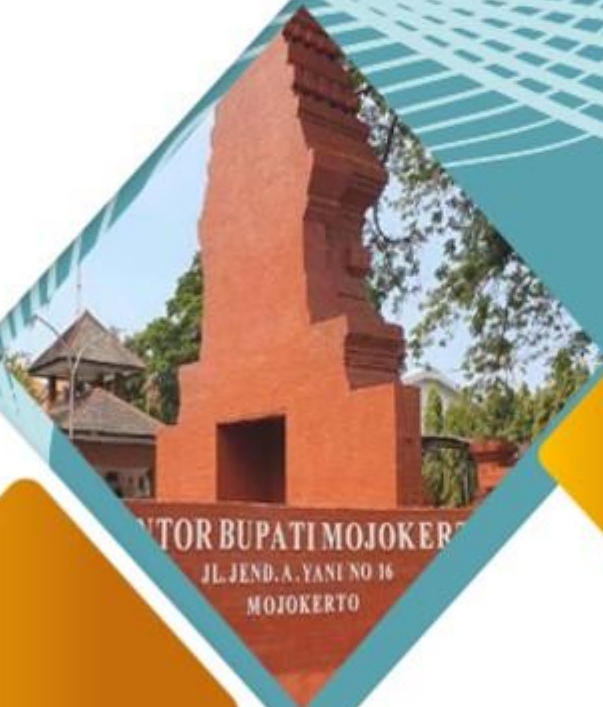


LAPORAN AKHIR

Penyusunan Dokumen

ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
KABUPATEN MOJOKERTO
DAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto yang bekerja sama dengan LPPM Universitas Brawijaya dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang merupakan bagian dari serangkaian kegiatan Analisis Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.

Dalam penyusunan rangkaian analisis ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan Dokumen Analisis Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023. Karena berkat partisipasi dan kerjasama dari banyak pihak, Dokumen Analisis Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Demikian Laporan Akhir Dokumen Analisis Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 tersusun, kami harapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan yang dapat menyetarakan gender di Kabupaten Mojokerto.

Malang, Juni 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

COVER	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Ruang Lingkup	3
1.3.1 Ruang Lingkup Materi	4
1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah	4
1.4 Sumber Pembiayaan	5
1.5 Referensi Hukum	5
1.6 Keluaran	6
1.7 Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	7
BAB 2 TINJAUAN TEORI	8
2.1 Definisi Gender	8
2.2 Teori Gender	9
2.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	11
2.4 Penelitian Sebelumnya	12
2.5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	13
BAB 3 METODOLOGI	14
3.1 Tahapan Kegiatan	14
3.2 Metode Pengumpulan Data	14
3.3 Teknik Pengumpulan Data	15
3.4 Metode Pengolahan Data	17
3.3.1 Analisis Hierarki Proses (AHP)	17
3.3.2 Analisis Konten	21
3.3.3 Analisis Pemetaan Aktor/Social Networ Analysis (SNA)	22
BAB 4 ANALISA DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur	25
4.1.1 Administrasi dan Geografi	25
4.1.2 Kependudukan	25
4.1.3 Perekonomian	28

4.2	Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto	28
4.2.1	Administrasi dan Geografi.....	28
4.2.2	Kondisi Fisik Dasar	30
4.2.3	Kependudukan Kabupaten Mojokerto.....	31
4.3	Gambaran Umum Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Mojokerto.....	36
4.3.1	Kondisi Tingkat Pendidikan	36
4.3.2	Kesehatan	38
4.3.3	Ketenagakerjaan.....	39
4.3.4	Kesejahteraan	40
4.3.5	Karakteristik Perekonomian.....	41
4.3.6	Kemiskinan.....	43
4.4	Gambaran Umum Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Mojokerto...	44
4.4.1	Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen	44
4.4.2	Perempuan sebagai Tenaga Profesional	48
4.4.3	Sumbangan Pendapatan Perempuan	52
4.5	Analisis Perkembangan IPG dan IDG di Kabupaten Mojokerto	55
4.5.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mojokerto	55
4.5.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Mojokerto	63
4.5.3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Mojokerto.....	67
4.6	Analisis Ketimpangan Gender di Kabupaten Mojokerto	76
4.7	Analisis Faktor-Faktor yang Membentuk dan Mempengaruhi IPG dan IDG di Kabupaten Mojokerto	79
4.7.1	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dan Membentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG)	79
4.7.2	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)....	95
4.8	Analisis Tingkat Kesesuaian Program Upaya Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Gender di Kabupaten Mojokerto.....	96
4.9	Analisis Jaringan Sosial (Social Network Analysis) Dalam Indeks Pembangunan & Pemberdayaan Gender di Kabupaten Mojokerto.....	99
4.10	Analisis Perumusan Strategi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Gender di Kabupaten Mojokerto	107
4.10.1	Penentuan Program Prioritas Peningkatan IPG dan IDG di Kabupaten Mojokerto	108
4.10.2	Penentuan Aktor Utama dalam Pelaksanaan Program Prioritas.....	313

4.10.3 Strategi Inovatif/Strategi Lainnya Dalam Peningkatan Kesetaraan Gender yang dapat diaplikasikan di Kabupaten Mojokerto	322
Lampiran	329

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tingkat Kepentingan.....	20
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.....	26
Tabel 4. 2 Luas Wilayah Kabupaten Mojokerto Menurut Kecamatan.....	28
Tabel 4. 3 Jumlah Kelurahan, RW, dan RT Kabupaten Mojokerto.....	29
Tabel 4. 4 Kemiringan Tanah Kabupaten Mojokerto	30
Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Kabupten Mojokerto	32
Tabel 4. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	32
Tabel 4. 7 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mojokerto	33
Tabel 4. 8 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mojokerto	34
Tabel 4. 9 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Tahun 2021.....	34
Tabel 4. 10 Kepadatan Penduduk Kabupaten Mojokerto	35
Tabel 4. 11 Banyaknya Kelahiran Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	35
Tabel 4. 12 Banyaknya Kematian Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	36
Tabel 4. 13 Karakteristik Pendidikan Kabupaten Mojokerto	37
Tabel 4. 14 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2022 Kabupaten Mojokerto.....	37
Tabel 4. 15 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2022 Kabupaten Mojokerto	38
Tabel 4. 16 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2022 Kabupaten Mojokerto.....	38
Tabel 4. 17 Karakteristik Pendidikan Kepala Rumah Tangga Tahun 2020	38
Tabel 4. 18 Akses Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020	39
Tabel 4. 19 Jumlah Penduduk Usia > 15 Tahun Menurut Kegiatan Utama di Kabupaten Mojokerto Tahun 2021	39
Tabel 4. 20 Jumlah Penduduk Usia > 15 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2021.....	39
Tabel 4. 21 Jumlah Penduduk Usia > 15 Tahun Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2021	40
Tabel 4. 22 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Mojokerto, 2018 - 2021.....	41
Tabel 4. 23 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar rupiah)	42
Tabel 4. 24 Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021	43
Tabel 4. 25 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto	43
Tabel 4. 26 Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen Kabupaten/Kota.....	45
Tabel 4. 27 Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen Kabupaten Mojokerto	47



Tabel 4. 28 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022	48
Tabel 4. 29 Perempuan sebagai Tenaga Profesional di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2022	49
Tabel 4. 30 Perempuan Sebagai Tenaga Profesional di Kabupaten Mojokerto	50
Tabel 4. 31 Perempuan Sebagai Tenaga Profesional di Kabupaten Mojokerto	51
Tabel 4. 32 Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2022	53
Tabel 4. 33 Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kabupaten Mojokerto.....	54
Tabel 4. 34 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mojokerto	55
Tabel 4. 35 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Mojokerto.....	57
Tabel 4. 36 Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Mojokerto	58
Tabel 4. 37 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Mojokerto	60
Tabel 4. 38 Pengeluaran di Kabupaten Mojokerto	61
Tabel 4. 39 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Mojokerto & Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2022	64
Tabel 4. 40 Perbandingan IPG Kabupaten Mojokerto dengan IPG Kabupaten yang berbatasan langsung Tahun 2022.....	66
Tabel 4. 41 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.....	67
Tabel 4. 42 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2021	68
Tabel 4. 43 Perbandingan IDG dengan Kabupaten/Kota disekitarnya Tahun 2022.....	69
Tabel 4. 44 Indikator Penyusun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Mojokerto berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021 dan 2022.....	70
Tabel 4. 45 Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen di Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010-2022.....	72
Tabel 4. 46 Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional di Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010-2022	74
Tabel 4. 47 Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010-2022	75
Tabel 4. 48 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.....	77
Tabel 4. 49 Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022	82
Tabel 4.50 Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.....	83



Tabel 4. 51 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.....	85
Tabel 4. 52 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.....	87
Tabel 4. 53 Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022	88
Tabel 4. 54 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.....	91
Tabel 4. 55 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2022 Kabupaten Mojokerto.....	92
Tabel 4. 56 Angka Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2022	94
Tabel 4. 57 Jumlah Orang Menganggur di Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2022	94
Tabel 4. 58 Jumlah Pengajuan Pernikahan Dini di Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2022.....	94
Tabel 4. 59 Program Upaya Peningkatan IPG dan IDG di Kabupaten Mojokerto	97
Tabel 4. 60 Daftar Identifikasi OPD di Kabupaten Mojokerto	101
Tabel 4. 61 Analisis SNA OPD di Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan metode Degree Centrality	104
Tabel 4. 62 Analisis SNA OPD di Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan metode Closeness Centrality	105
Tabel 4. 63 Analisis SNA OPD di Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan metode Betwenneess Centrality	106
Tabel 4. 64 Faktor yang Mempengaruhi IPG dan IDG di Kabupaten Mojokerto	109
Tabel 4. 65 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Angka Harapan Hidup (AHH)	117
Tabel 4. 66 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Angka Harapan Hidup (AHH) Responden Pertama	118
Tabel 4. 67 Hasil Eigen Value dan Prioritas Angka Harapan Hidup (AHH)	119
Tabel 4. 68 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Angka Harapan Hidup (AHH) ...	119
Tabel 4. 69 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Angka Harapan Hidup (AHH) Responden Kedua	120
Tabel 4. 70 Hasil Eigen Value dan Prioritas Angka Harapan Hidup (AHH)	120
Tabel 4. 71 Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Kriteria	121
Tabel 4. 72 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Angka Harapan Hidup (AHH).....	121
Tabel 4. 73 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Angka Harapan Hidup (AHH).....	122
Tabel 4. 74 Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Risiko Kematian Bayi Narasumber Pertama	123



Tabel 4. 75 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Risiko Kematian Bayi Narasumber Pertama	124
Tabel 4. 76 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Risiko Kematian Bayi	125
Tabel 4. 77 Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Risiko Kematian Bayi Narasumber Kedua	126
Tabel 4. 78 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Risiko Kematian Bayi Narasumber Kedua	126
Tabel 4. 79 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Risiko Kematian Bayi	127
Tabel 4. 80 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Risiko Kematian Bayi.....	128
Tabel 4. 81 Matriks Gabungan Eigen Value Alternatif Program Risiko Kematian Bayi	129
Tabel 4. 82 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Risiko Kematian Bayi	129
Tabel 4. 83 Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Risiko Kematian Ibu Narasumber Pertama	131
Tabel 4. 84 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Risiko Kematian Ibu Narasumber Pertama	131
Tabel 4. 85 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Risiko Kematian Ibu	132
Tabel 4. 86 Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Risiko Kematian Ibu Narasumber Kedua	132
Tabel 4. 87 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Risiko Kematian Ibu Narasumber Kedua	133
Tabel 4. 88 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Risiko Kematian Ibu	134
Tabel 4. 89 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Risiko Kematian Ibu	135
Tabel 4. 90 Matriks Gabungan Eigen Value Alternatif Program Risiko Kematian Ibu	135
Tabel 4. 91 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Risiko Kematian Ibu	135
Tabel 4. 92 Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Kesehatan Reproduksi Narasumber Pertama.....	137
Tabel 4. 93 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Tingkat Kesehatan Reproduksi Narasumber Pertama.....	137
Tabel 4. 94 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Tingkat Kesehatan Reproduksi	138
Tabel 4. 95 Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Kesehatan Reproduksi Narasumber Kedua.....	138



Tabel 4. 96 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Tingkat Kesehatan Reproduksi Narasumber Kedua.....	139
Tabel 4. 97 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Tingkat Kesehatan Reproduksi	139
Tabel 4. 98 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Tingkat Kesehatan Reproduksi	140
Tabel 4. 99 Eigen Value Alternatif Program Tingkat Kesehatan Reproduksi.....	140
Tabel 4. 100 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Tingkat Kesehatan Reproduksi	141
Tabel 4. 101 Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kualitas Hidup Manula Narasumber Pertama.....	142
Tabel 4. 102 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Kualitas Hidup Manula Narasumber Pertama.....	142
Tabel 4. 103 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Kualitas Hidup Manula	143
Tabel 4. 104 Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kualitas Hidup Manula Narasumber Kedua.....	144
Tabel 4. 105 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Kualitas Hidup Manula Narasumber Kedua.....	144
Tabel 4. 106 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Kualitas Hidup Manula	145
Tabel 4. 107 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kualitas Hidup Manula.....	146
Tabel 4. 108 Matriks Gabungan Eigen Value Alternatif Program Kualitas Hidup Manula	146
Tabel 4. 109 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Kualitas Hidup Manula.....	147
Tabel 4. 110 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria HLS dan RLS Responden Pertama	150
Tabel 4. 111 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan HLS Dan RLS Responden Pertama	151
Tabel 4. 112 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria HLS dan RLS Responden Pertama	152
Tabel 4. 113 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria HLS Dan RLS Responden Kedua	152
Tabel 4. 114 Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Kriteria HLS dan RLS	153
Tabel 4. 115 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Kriteria HLS dan RLS.....	153
Tabel 4. 116 Hasil AHP Kriteria Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah.....	154



Tabel 4. 117 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Akses dan Ketersediaan Pendidikan Responden Pertama	156
Tabel 4. 118 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Akses dan Ketersediaan Pendidikan Responden Pertama.....	157
Tabel 4. 119 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Akses dan Ketersediaan Pendidikan Responden Kedua	160
Tabel 4. 120 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Akses dan Ketersediaan Pendidikan Responden Kedua.....	161
Tabel 4. 121 Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Akses dan Ketersediaan Pendidikan.....	164
Tabel 4. 122 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Akses dan Ketersediaan Pendidikan.....	165
Tabel 4. 123 Hasil AHP Alternatif Program Akses dan Ketersediaan Pendidikan.....	167
Tabel 4. 124 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kesempatan yang sama Bagi Perempuan Untuk Bersekolah Responden Pertama	169
Tabel 4. 125 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kesempatan yang sama Bagi Perempuan Untuk Bersekolah Responden Pertama.....	169
Tabel 4. 126 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kesempatan yang sama Bagi Perempuan Untuk Bersekolah Responden Kedua	172
Tabel 4. 127 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kesempatan yang sama Bagi Perempuan Untuk Bersekolah Responden Kedua.....	172
Tabel 4. 128 Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Kesempatan yang sama Bagi Perempuan Untuk Bersekolah.....	175
Tabel 4. 129 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Kesempatan yang sama Bagi Perempuan Untuk Bersekolah.....	176
Tabel 4. 130 Hasil AHP Alternatif Program Kesempatan yang sama Bagi Perempuan Untuk Bersekolah	177
Tabel 4. 131 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik Responden Pertama	178
Tabel 4. 132 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik Responden Pertama	179
Tabel 4. 133 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik Responden Kedua	180
Tabel 4. 134 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik Responden Kedua	180



Tabel 4. 135 Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Porgram Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik	182
Tabel 4. 136 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik	182
Tabel 4. 137 Hasil AHP Alternatif Program Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik	183
Tabel 4. 138 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kualitas Pendidikan Responden Pertama	185
Tabel 4. 139 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kualitas Pendidikan Responden Pertama	185
Tabel 4. 140 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kualitas Pendidikan Responden Kedua	186
Tabel 4. 141 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kualitas Pendidikan Responden Kedua	186
Tabel 4. 142 Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Porgram Kualitas Pendidikan	187
Tabel 4. 143 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Kualitas Pendidikan	188
Tabel 4. 144 Hasil AHP Alternatif Program Kualitas Pendidikan.....	188
Tabel 4. 145 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Pengeluaran Per Kapita Narasumber Pertama	190
Tabel 4. 146 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Pengeluaran Per Kapita Narasumber Pertama.....	191
Tabel 4. 147 Hasil Eigen Value dan Kriteria Pengeluaran Per Kapita.....	191
Tabel 4. 148 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Pengeluaran Per Kapita Narasumber Pertama	192
Tabel 4. 149 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Pengeluaran Per Kapita Narasumber Kedua.....	192
Tabel 4. 150 Hasil Eigen Value dan Kriteria Pengeluaran Per Kapita.....	193
Tabel 4. 151 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Kriteria Pengeluaran Per Kapita	193
Tabel 4. 152 Matriks Gabungan Eigen Value Pengeluaran Per Kapita	193
Tabel 4. 153 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan.....	194
Tabel 4. 154 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Perempuan Narasumber Pertama	196



Tabel 4. 155 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tenaga Kerja Perempuan Narasumber Pertama	197
Tabel 4. 156 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Pengeluaran Per Kapita.....	198
Tabel 4. 157 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Perempuan Narasumber Kedua.....	199
Tabel 4. 158 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tenaga Kerja Perempuan Narasumber Kedua	200
Tabel 4. 159 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Pengeluaran Per Kapita.....	201
Tabel 4. 160 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Perempuan.....	202
Tabel 4. 161 Matriks Gabungan Eigen Value Alternatif Program Tenaga Kerja Perempuan	203
Tabel 4. 162 Hasil Gabungan Eigen Value dan Alternatif Program Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Perempuan	204
Tabel 4. 163 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kesempatan Kerja Perempuan Narasumber Pertama	206
Tabel 4. 164 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kesempatan Kerja Perempuan Narasumber Pertama.....	207
Tabel 4. 165 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Kesempatan Kerja Perempuan.....	208
Tabel 4. 166 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kesempatan Kerja Perempuan Narasumber Kedua	209
Tabel 4. 167 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kesempatan Kerja Perempuan Narasumber Kedua.....	210
Tabel 4. 168 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Kesempatan Kerja Perempuan.....	211
Tabel 4. 169 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kesempatan Kerja Perempuan	212
Tabel 4. 170 Matriks Gabungan Eigen Value Alternatif Program Kesempatan Kerja Perempuan	213
Tabel 4. 171 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Kesempatan Kerja Perempuan.....	214
Tabel 4. 172 Perbandingan Berpasangan Kriteria Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen	215
Tabel 4. 173 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen Narasumber Pertama	216
Tabel 4. 174 Hasil Eigen Value dan Kriteria Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen	216
Tabel 4. 175 Perbandingan Berpasangan Kriteria Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen	217



Tabel 4. 176 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen Narasumber Kedua	217
Tabel 4. 177 Hasil Eigen Value dan Kriteria Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen	218
Tabel 4. 178 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Kriteria Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen.....	218
Tabel 4. 179 Matriks Gabungan Nilai Eigen Value.....	218
Tabel 4. 180 Hasil Eigen Value dan Kriteria Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen	219
Tabel 4. 181 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Jumlah Perempuan dalam Parlemen Narasumber Pertama	221
Tabel 4. 182 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Jumlah Perempuan dalam Parlemen Narasumber Pertama.....	222
Tabel 4. 183 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen.....	223
Tabel 4. 184 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Jumlah Perempuan dalam Parlemen Narasumber Kedua	224
Tabel 4. 185 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Jumlah Perempuan dalam Parlemen Narasumber Kedua.....	225
Tabel 4. 186 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen.....	226
Tabel 4. 187 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Jumlah Perempuan dalam Parlemen	227
Tabel 4. 188 Matriks Gabungan Nilai Eigen Value.....	228
Tabel 4. 189 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Jumlah Perempuan dalam Parlemen	229
Tabel 4. 190 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi Narasumber Pertama	230
Tabel 4. 191 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi Narasumber Pertama.....	231
Tabel 4. 192 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi	231
Tabel 4. 193 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi Narasumber Kedua	232
Tabel 4. 194 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi Narasumber Kedua.....	233



Tabel 4. 195 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi	233
Tabel 4. 196 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi	234
Tabel 4. 197 Matriks Gabungan Nilai Eigen Value.....	235
Tabel 4. 198 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi	235
Tabel 4. 199 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi Narasumber Pertama	236
Tabel 4. 200 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi Narasumber Pertama.....	237
Tabel 4. 201 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi	237
Tabel 4. 202 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi Narasumber Kedua	238
Tabel 4. 203 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi Narasumber Kedua.....	238
Tabel 4. 204 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi	239
Tabel 4. 205 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan	239
Tabel 4. 206 Matriks Gabungan Nilai Eigen Value.....	240
Tabel 4. 207 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi	240
Tabel 4. 208 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Kesempatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional Responden Pertama.....	242
Tabel 4. 209 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Kesempatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional Responden Pertama.....	242
Tabel 4. 210 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional Responden Kedua.....	243
Tabel 4. 211 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional Responden Kedua.....	244
Tabel 4. 212 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional Responden Ketiga.....	245
Tabel 4. 213 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional Responden Kedua.....	245



Tabel 4. 214 Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Kriteria Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional.....	246
Tabel 4. 215 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Kriteria Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional.....	247
Tabel 4. 216 Hasil AHP Kriteria Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional	247
Tabel 4. 217 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Pendidikan Perempuan Responden Pertama.....	249
Tabel 4. 218 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Pendidikan Perempuan Responden Pertama	250
Tabel 4. 219 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Pendidikan Perempuan Responden Kedua.....	252
Tabel 4. 220 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Pendidikan Perempuan Responden Kedua	252
Tabel 4. 221 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Pendidikan Perempuan Responden Ketiga.....	255
Tabel 4. 222 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Pendidikan Perempuan Responden Ketiga	255
Tabel 4. 223 Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Tingkat Pendidikan Perempuan	258
Tabel 4. 224 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Tingkat Pendidikan Perempuan	259
Tabel 4. 225 Hasil AHP Alternatif Program Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik	261
Tabel 4. 226 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka Responden Pertama.....	262
Tabel 4. 227 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka Responden Pertama.....	263
Tabel 4. 228 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka Responden Kedua.....	264
Tabel 4. 229 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka Responden Kedua.....	265
Tabel 4. 230 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka Responden Ketiga.....	266
Tabel 4. 231 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka Responden Ketiga.....	266



Tabel 4. 232 Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Porgram Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka.....	268
Tabel 4. 233 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka	268
Tabel 4. 234 Hasil AHP Alternatif Program Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka	269
Tabel 4. 235 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah Perempuan Responden Pertama	271
Tabel 4. 236 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah Perempuan Responden Pertama	271
Tabel 4. 237 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah Perempuan Responden Kedua	272
Tabel 4. 238 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah Perempuan Responden Kedua	273
Tabel 4. 239 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah Perempuan Responden Ketiga	274
Tabel 4. 240 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah Perempuan Responden Ketiga	274
Tabel 4. 241 Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Porgram Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah.....	275
Tabel 4. 242 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah.....	276
Tabel 4. 243 Hasil AHP Alternatif Program Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah.....	277
Tabel 4. 244 Hasil AHP Alternatif Program Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah Perempuan.....	277
Tabel 4. 245 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Sumbangan Pendapatan Perempuan Responden Pertama	278
Tabel 4. 246 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Sumbangan Pendapatan Perempuan Responden Pertama.....	278
Tabel 4. 247 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Sumbangan Pendapatan Perempuan Responden Kedua	280
Tabel 4. 248 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional Responden Kedua.....	280
Tabel 4. 249 Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Kriteria Sumbangan Pendapatan Perempuan.....	281



Tabel 4. 250 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Kriteria Sumbangan Pendapatan Perempuan.....	281
Tabel 4. 251 Hasil AHP Kriteria Sumbangan Pendapatan Perempuan	282
Tabel 4. 252 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan Responden Pertama	283
Tabel 4. 253 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan Responden Pertama.....	284
Tabel 4. 254 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan Responden Kedua	285
Tabel 4. 255 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan Responden Kedua.....	286
Tabel 4. 256 Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan.....	288
Tabel 4. 257 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan	289
Tabel 4. 258 Hasil AHP Alternatif Program Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan	290
Tabel 4. 259 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan Responden Pertama	291
Tabel 4. 260 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan Responden Pertama	291
Tabel 4. 261 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan Responden Kedua	293
Tabel 4. 262 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan Responden Kedua	294
Tabel 4. 263 Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan	295
Tabel 4. 264 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan	296
Tabel 4. 265 Hasil AHP Alternatif Program Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan	296
Tabel 4. 266 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan Responden Pertama	298
Tabel 4. 267 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan Responden Pertama.....	298
Tabel 4. 268 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan Responden Kedua	300



Tabel 4. 269 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan Responden Kedua.....	301
Tabel 4. 270 Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan.....	303
Tabel 4. 271 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan.....	304
Tabel 4. 272 Hasil AHP Alternatif Program Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan	305
Tabel 4. 273 Program Prioritas	313
Tabel 4. 274 Program Pendukung.....	314
Tabel 4. 275 Analisis AHP Perbandingan Berpasangan Kriteria Angka Harapan Hidup (AHH)	329
Tabel 4. 276 Analisis AHP Perbandingan Berpasangan Kriteria Angka Harapan Hidup (AHH)	329
Tabel 4. 277 Analisis AHP Perbandingan Berpasangan Unsur Risiko Kematian Bayi	330
Tabel 4. 278 Analisis AHP Perbandingan Berpasangan Unsur Risiko Kematian Bayi	331
Tabel 4. 279 Analisis AHP Perbandingan Berpasangan Unsur Risiko Kematian Ibu.....	332
Tabel 4. 280 Analisis AHP Perbandingan Berpasangan Unsur Risiko Kematian Ibu.....	333
Tabel 4. 281 Analisis AHP Perbandingan Berpasangan Unsur Tingkat Kesehatan Reproduksi	335
Tabel 4. 282 Analisis AHP Perbandingan Berpasangan Unsur Tingkat Kesehatan Reproduksi	335
Tabel 4. 283 Analisis AHP Perbandingan Berpasangan Unsur Tingkat Kualitas Hidup Manula	336
Tabel 4. 284 Analisis AHP Perbandingan Berpasangan Unsur Tingkat Kualitas Hidup Manula	336
Tabel 4. 285 Analisis AHP Perbandingan Berpasangan Kriteria Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen.....	337
Tabel 4. 286 Analisis AHP Perbandingan Berpasangan Kriteria Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen.....	338
Tabel 4. 287 Analisis AHP Perbandingan Berpasangan Unsur Jumlah Perempuan dalam Parlemen Tinggi.....	338
Tabel 4. 288 Analisis AHP Perbandingan Berpasangan Unsur Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Parlemen.....	340

Tabel 4. 289 Analisis AHP Perbandingan Berpasaran Unsur Jumlah Perempuan dalam Parlemen Tinggi.....	341
Tabel 4. 290 Analisis AHP Perbandingan Berpasaran Unsur Kesadaran Politik Perempuan dalam Parlemen.....	342
Tabel 4. 291 Analisis AHP Perbandingan Berpasaran Unsur Kesadaran Politik Perempuan dalam Parlemen.....	343

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender di Website BPS.....	3
Gambar 3. 1 Contoh 1 Struktur Hierarki AHP	19
Gambar 3. 2 Contoh 2 Struktur Hierarki AHP	19
Gambar 4. 1 Jumlah Penduduk di Jawa Timur Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin	27
Gambar 4. 2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) di Kabupaten Mojokerto Tahun 2021	42
Gambar 4. 3 Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Mojokerto	47
Gambar 4. 4 Jumlah Anggota DPRD di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.....	48
Gambar 4. 5 Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Mojokerto.....	51
Gambar 4. 6 Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Mojokerto.....	52
Gambar 4. 7 Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kabupaten Mojokerto	54
Gambar 4. 8 IPM di Kabupaten Mojokerto	56
Gambar 4. 9 Grafik Usia Harapan Hidup di Kabupaten Mojokerto	57
Gambar 4. 10 Grafik Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Mojokerto.....	59
Gambar 4. 11 Grafik Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Mojokerto	60
Gambar 4. 12 Grafik Pengeluaran di Kabupaten Mojokerto	62
Gambar 4. 13 Skema IPM.....	63
Gambar 4. 14 Rumus Penyusun IPG.....	64
Gambar 4. 15 Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Mojokerto & Provinsi Jawa Timur	65
Gambar 4. 16 Perbandingan IPG di Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten yang Berbatasan.....	66
Gambar 4. 17 IDG di Kabupaten Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur.....	68
Gambar 4. 18 Perbandingan IDG Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten Yang Berbatasan	69
Gambar 4. 19 Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen di Kabupaten Mojokerto	70
Gambar 4. 20 Perempuan sebagai Tenaga Profesional di Kabupaten Mojokerto	70
Gambar 4. 21 Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kabupaten Mojokerto.....	71
Gambar 4. 22 Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen di Kabupaten Mojokerto	73
Gambar 4. 23 Keterlibatan Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Di Kabupaten Mojokerto	74
Gambar 4. 24 Sumbangan Pendapatan Perempuan Di Kabupaten Mojokerto	76

Gambar 4. 25 Skema Faktor yang Mempengaruhi IPG di Kabupaten Mojokerto	80
Gambar 4. 26 Jumlah Siswa Putus Sekolah di Indonesia 2020-2023	90
Gambar 4. 27 Skema Faktor yang Mempengaruhi IDG di Kabupaten Mojokerto	96
Gambar 4. 28 Graph Analisis SNA Degree Centrality OPD yang Mempengaruhi IPG & IDG di Kabupaten Mojokerto	104
Gambar 4. 29 Graph Analisis SNA Closeness Centrality OPD yang Mempengaruhi IPG & IDG di Kabupaten Mojokerto.....	105
Gambar 4. 30 Graph Analisis SNA Betweenness Centrality OPD yang Mempengaruhi IPG & IDG di Kabupaten Mojokerto	106
Gambar 4. 31 Skema AHP Faktor Penyusun IPG dan IDG	108
Gambar 4. 32 Skema AHP Angka Harapan Hidup.....	111
Gambar 4. 33 Skema AHP Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah	112
Gambar 4. 34 Skema AHP Pengeluaran Per Kapita.....	113
Gambar 4. 35 Skema AHP Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen	114
Gambar 4. 36 Skema AHP Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional	115
Gambar 4. 37 Skema AHP Sumbangan Pendapatan Perempuan.....	116
Gambar 4. 38 Grafik Kriteria Angka Harapan Hidup.....	122
Gambar 4. 39 Grafik Prioritas Program Unsur Risiko Kematian Bayi	130
Gambar 4. 40 Grafik Prioritas Program Unsur Risiko Kematian Ibu	136
Gambar 4. 41 Grafik Prioritas Program Unsur Tingkat Kesehatan Reproduksi	141
Gambar 4. 42 Grafik Prioritas Program Unsur Kualitas Hidup Manula	147
Gambar 4. 43 Hasil AHP Kriteria Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah...	155
Gambar 4. 44 Hasil AHP Alternatif Program Akses dan Ketersediaan Pendidikan.....	167
Gambar 4. 45 Hasil AHP Alternatif Program Kesempatan yang sama Bagi Perempuan Untuk Bersekolah	177
Gambar 4. 46 Hasil AHP Alternatif Program Akses dan Ketersediaan Pendidikan.....	184
Gambar 4. 47 Hasil AHP Alternatif Program Kualitas Pendidikan.....	189
Gambar 4. 48 Hasil AHP Kriteria Pengeluaran	194
Gambar 4. 49 Hasil AHP Alternatif Program Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Perempuan	204
Gambar 4. 50 Hasil AHP Alternatif Program Kesempatan Kerja Perempuan	214
Gambar 4. 51 Hasil AHP Kriteria Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen.....	219
Gambar 4. 52 Hasil AHP Alternatif Program Jumlah Perempuan di Parlemen	229
Gambar 4. 53 Hasil AHP Kriteria Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional ...	248
Gambar 4. 54 Hasil AHP Alternatif Program Akses dan Ketersediaan Pendidikan.....	261

Gambar 4. 55 Hasil AHP Alternatif Program Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka	270
Gambar 4. 56 Hasil AHP Kriteria Sumbangan Pendapatan Perempuan	282
Gambar 4. 57 Hasil AHP Alternatif Program Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan	290
Gambar 4. 58 Hasil AHP Alternatif Program Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan	297
Gambar 4. 59 Hasil AHP Alternatif Program Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan	306
Gambar 4. 60 Kesimpulan Prioritas Alternatif Program Analisis AHP Angka Harapan Hidup	307
Gambar 4. 61 Kesimpulan Prioritas Alternatif Program Analisis AHP Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah	308
Gambar 4. 62 Kesimpulan Prioritas Alternatif Program Analisis AHP Pengeluaran Per Kapita	309
Gambar 4. 63 Kesimpulan Prioritas Alternatif Program Analisis AHP Keterlibatan Perempuan dalam Perlemen	310
Gambar 4. 64 Kesimpulan Prioritas Alternatif Program Analisis AHP Angka Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional	311
Gambar 4. 65 Kesimpulan Prioritas Alternatif Program Analisis AHP Sumbangan Pendapatan Perempuan	312
Gambar 4. 66 Graph Penentuan Aktor Utama melalui Social Network Analyst (SNA)	321

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara dikatakan maju dapat dilihat dari tingginya pembangunan diseluruh aspek kehidupan bangsa dan negara. Dalam hal pembangunan manusia sering dibahas mengenai perbedaan gender, dimana berfokus pada bagaimana mencapai kesetaraan gender untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Dalam *Women Studies* Ensiklopedia dijelaskan bahwa gender merupakan suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Secara umum gender dapat didefinisikan sebagai perbedaan peran, kedudukan dan sifat yang dilekatkan pada kaum laki-laki maupun perempuan melalui konstruksi secara sosial maupun kultural. Perbedaan gender terlihat dari kecenderungan peran masing-masing, yaitu berperan dalam publik atau domestik. Peran publik diartikan dengan aktivitas yang dilakukan di luar rumah dan bertujuan mendapatkan penghasilan. Sedangkan peran domestik adalah aktivitas yang dilakukan di dalam rumah berkaitan dengan kerumahtanggaan dan tidak dimaksudkan untuk mendapat penghasilan

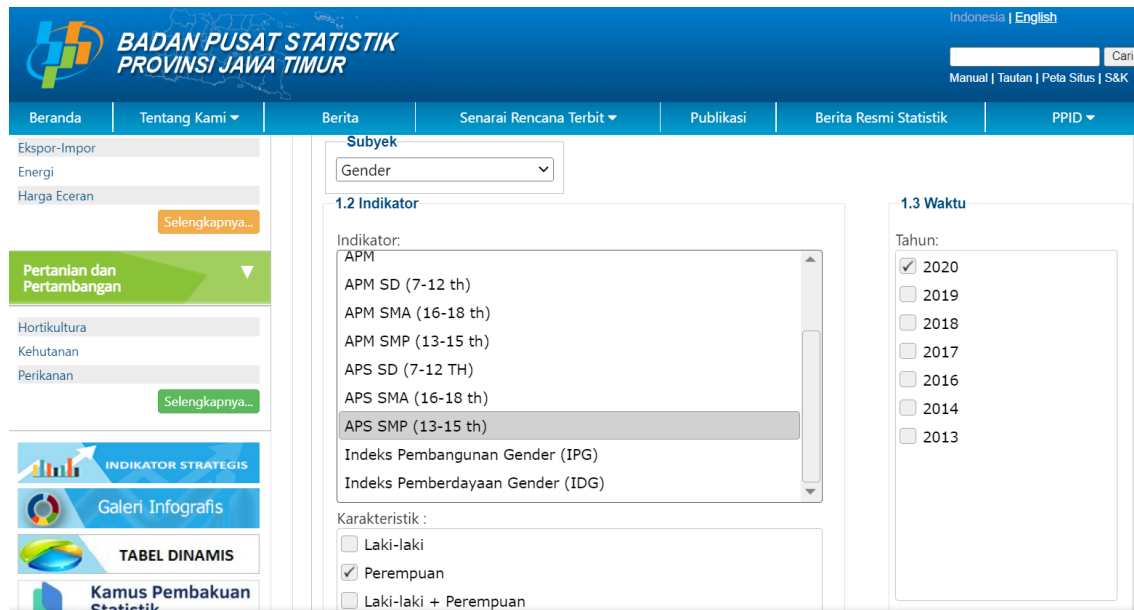
Tujuan kelima pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) adalah Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan. Gender merupakan isu yang multidimensi dan tercantum di hampir seluruh TPB. Dalam mengevaluasi hasil pembangunan yang berperspektif gender digunakan beberapa indikator diantaranya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan dua ukuran yang selalu digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan

gender. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpisah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi. Angka IPG yang mendekati 100 menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan perempuan hampir sama dengan laki-laki. Namun, kita perlu perhatikan level pencapaian IPM laki-laki dan perempuan di suatu wilayah yaitu apakah sama-sama tinggi atau sama-sama rendah

IPG memiliki komponen pembentuk yang menentukan nilai dari IPG. Komponen pembentuk tersebut sama dengan yang digunakan dalam pengukuran IPM, yakni komponen dari dimensi kesehatan, pengetahuan, dan ekonomi. Dari aspek kesehatan, kesenjangan gender dapat dilihat dari persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Dari aspek pengetahuan, kesenjangan gender dapat terlihat dari Angka Buta Huruf (ABH) serta Angka Partisipasi Sekolah (APS) di tiga jenjang pendidikan yaitu SD, SMP, dan SMA/ sederajat. Dari aspek ekonomi, kesenjangan gender dapat terlihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Sedangkan rasio jenis kelamin dan rasio jenis kelamin saat lahir merupakan indikator yang dapat menjelaskan mengenai orientasi gender

Kabupaten Mojokerto secara perkembangan dari tahun ke tahun memiliki tingkat IPG yang semakin meningkat namun belum mencapai nilai kesetaraan gender yang seimbang. Pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 IPG Kabupaten Mojokerto mencapai 90,39; 90,15; 90,65 ; 91,10 ; 91,24 dan 91,37. Apabila dibandingkan dengan IPG Jawa Timur, menunjukkan kondisi Kabupaten Mojokerto masih dibawah IPG Jawa Timur dengan capaian 90,76; 90,77; 90,91 ; 91,07 ; 91,67 dan 92,08 (sumber : BPS Propinsi Jawa Timur).



Gambar 1. 1 Data Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender di Website BPS

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan yang ingin dicapai terkait dengan Penelitian “Analisis Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Mojokerto Tahun 2023” adalah:

- 1) Teridentifikasinya perkembangan IPG, IDG dan tingkat Ketimpangan Gender di Kabupaten Mojokerto;
- 2) Teridentifikasinya faktor-faktor yang mempengaruhi IPG dan IDG;
- 3) Teridentifikasinya Aktor-aktor yang mempengaruhi pengembangan IPG;
- 4) Teridentifikasinya program dan tingkat kesesuaian program dengan upaya peningkatan pembangunan dan pemberdayaan Gender di Kabupaten Mojokerto
- 5) Terumuskannya strategi pengembangan program pembangunan dan pemberdayaan gender yang dapat meningkatkan nilai IPG dan IDG dan mencapai keseimbangan Gender

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam dalam “Analisis Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Mojokerto Tahun 2023” terdiri atas ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah.



1.3.1 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi pekerjaan Penelitian “Analisis Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Mojokerto Tahun 2023” terdiri dari :

- 1) Melakukan pengumpulan data kualitatif dan data kuantitatif yang diperoleh dari survei data sekunder berupa metode studi pustaka, studi terdahulu, dan data penunjang lainnya dengan SKPD terkait dari seperti BPS, Dinsos, dan lainnya dengan jenis data berupa data sekunder yang membentuk nilai IPG dan IDG. Survey primer juga diperlukan untuk melengkapi data-data melalui metode wawancara terstruktur dengan alat bantu kuesioner dengan sampling per kecamatan untuk menggali data-data kondisi penduduk yang akan dijadikan factor-faktor yang mempengaruhi apabila data dari sekunder dianggap kurang memenuhi.
- 2) Mengkaji gambaran kondisi IPG dan IDG Kabupaten Mojokerto dan menganalisis dengan metode komparatif per tahun maupun dengan Jawa Timur.
- 3) Melakukan analisis Ketimpangan gender dengan melihat elemen-elemen yang memiliki kesenjangan.
- 4) Melakukan analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap IPG dan IDG.
- 5) Melakukan telaah dan evaluasi terkait program-program yang telah dilakukan dan program-program yang direncanakan oleh OPD terkait yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengembangan Manusia/Gender, pemetaan actor-aktor yang berperan dalam pengembangan IPG dan IDG serta mengkomparasikan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap IPG dan IDG.
- 6) Menetapkan strategi pengembangan program pembangunan dan pemberdayaan gender yang dapat meningkatkan nilai IPG didasarkan pada hasil analisis kesesuaian program dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap IPG dan IDG.

1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam kegiatan Penelitian “Analisis Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Mojokerto Tahun 2023” adalah seluruh wilayah administrasi Kabupaten Mojokerto dengan unit pembahasan pada 1 kabupaten

1.4 Sumber Pembiayaan

Kegiatan penyusunan Dokumen Analisis Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

1.5 Referensi Hukum

Referensi hukum yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Dokumen Analisis Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 6) Instruksi Presiden/INPRES Pengarusutamaan Gender No. 9/2000, yang mengharuskan semua instansi pemerintah di tingkat nasional dan daerah, untuk mengarusutamakan gender ke dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan dan program;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri/Kepmendagri No. 15/2008 berisi pedoman untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender di tingkat provinsi dan kabupaten;
- 8) UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan;

- 9) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- 10) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- 15) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2022;
- 16) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Bagian Kelima Bidang Penelitian dan Pengembangan.

1.6 Keluaran

- 1. Laporan Pendahuluan** berisikan penjabaran KAK ke dalam item - item jenis dan urutan kegiatan yang menampilkan rencana kegiatan, struktur organisasi dan tata kerja personil yang bertanggung jawab, gambaran umum wilayah perencanaan, serta pendekatan dan metodologi yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.

Adapun spesifikasi buku laporan pendahuluan adalah sebagai berikut:

- Judul Buku : LAPORAN PENDAHULUAN
- Jumlah Buku : 3 (tiga) buku
- Ukuran Buku : A4 (29,7 x 21,5 cm²)
- Pengetikan : 1,5 spasi pada kertas HVS putih polos
- Cetak : berwarna
- Kulit/ Sampul : Hardcover Lem dengan finishing laminasi glossy

2. Laporan Akhir merupakan laporan tahap akhir setelah dilakukan penyempurnaan berdasar hasil diskusi. Laporan Akhir ini merupakan laporan tahap akhir setelah dilakukan penyempurnaan berdasar hasil diskusi. Laporan akhir ini merupakan laporan secara utuh dari dari proses analisis Analisis Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.

Adapun spesifikasi buku Laporan Akhir adalah sebagai berikut:

- Judul Buku : LAPORAN AKHIR
- Jumlah Buku:3 (tiga) buku
- Ukuran Buku : A4 (29,7 x 21,5 cm²)
- Pengetikan : 1,5 spasi pada kertas HVS putih polos
- Cetak : berwarna
- Kulit/ Sampul : Hardcover Lem dengan finishing laminasi glossy

3. Backup Data, Back up semua laporan dalam Flashdisk berisi seluruh file laporan baik materi tulisan maupun gambar sebagaimana hardcopy yang diserahkan bersama Laporan Akhir.

1.7 Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung semenjak ditandatangani Surat Perintah Kerja dan dituangkan dalam proposal dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan tahapan dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB 2 TINJAUAN TEORI

2.1 Definisi Gender

Kata gender berasal dari Bahasa Inggris yakni gender yang berarti jenis kelamin. Namun pada dasarnya jenis kelamin merupakan bagian anatomi biologis pemberian Tuhan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Istilah gender bagi para ilmuwan sosial yaitu menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan bersifat bawaan (kodrat) ketentuan Tuhan Yang Maha Esa, gender dapat terbentuk dari budaya yang dipahami dan diajarkan dalam lingkungan keluarga sejak kecil (Utaminingsih, 2017).

Definisi gender bagi Mansour Fakih adalah suatu sifat yang terdapat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dibangun menurut sosial ataupun kultural (Fakih, 2008). Sehingga pengertian gender bukan merujuk pada jenis kelamin, hal ini dikarenakan jenis kelamin ditentukan secara biologis yang melekat pada manusia. Konsep dari gender yaitu berkaitan dengan ciri dari sifat yang dapat dipertukarkan dan dapat mengalami perubahan baik perubahan antar waktu maupun perbedaan antar kelas.

Sri Hartati berpandangan bahwa gender merupakan suatu bentuk sosial yang dapat mengalami perubahan sesuai dengan wilayah, negara, ideologi, zaman, suku, ras, kultural, status sosial, pemahaman terhadap agama, ekonomi, hukum serta politik (Hartati, 2020). Sehingga dari pengertian ini gender bukanlah kodrat dari Tuhan, melainkan sifat yang terbentuk dari manusia, berdasarkan berbagai faktor yang mempengaruhinya dan gender dapat mengalami perubahan, bersifat relatif dan dapat dipertukarkan.

Agnes Vera Yanti Sitorus memandang gender sebagai suatu konsep yang bersumber pada suatu sistem peranan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan ditetapkan oleh perbedaan biologis, namun ditetapkan oleh lingkungan sosial budaya, ekonomi dan politik (Sitorus, 2016). Adapun kesetaraan gender yaitu status yang sama antara laki-laki dan perempuan serta mempunyai kondisi dan kemampuan yang sama untuk merealisasikan hak-haknya selaku manusia dan berkontribusi pada pembangunan nasional, politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Menurut Risky Puspita Sari dkk, pembangunan gender adalah salah satu indikator yang berfungsi untuk mengetahui keberhasilan atau pencapaian pembangunan (Sari, *et al*, 2016). Permasalahan yang menjadi pokok utama sebagai penghalang proses kesetaraan gender yaitu adanya pengabaian mengenai topik tentang kesetaraan dan keadilan gender. Ditambah permasalahan budaya yang menjadi penyebab terhambatnya pembangunan kesetaraan gender.

Ideologi gender yang berkembang masyarakat ini, berbicara mengenai tugas urusan rumah tangga atau ranah domestik tugas perempuan perempuan. sedangkan tugas yang menjadi ranah laki-laki yaitu tugas yang berkaitan dengan publik seperti memperoleh pendapatan. Persoalan inilah yang menjadi penyebab kontradiksi antara peran perempuan dan laki-laki yang melahirkan budaya patriarki, yaitu konsep yang menyatakan dominasi kaum laki-laki ditingkat sosial untuk memegang posisi kekuasaan baik politik, sosial, ekonomi, lingkungan pekerjaan, dan perempuan tidak memiliki akses untuk mencapai posisi tersebut.

Budaya patriarki inilah yang menjadi salah satu penyebab diskriminasi gender atau perbedaan perlakuan terhadap kaum laki-laki. Budaya patriarki ini memandang peranan perempuan dalam urusan rumah tangga tidak dinilai sebagai suatu pekerjaan, karena pekerjaan rumah tangga itu tidaklah termasuk pekerjaan yang menghasilkan pendapatan, sehingga perempuan sangat bertumpu pada penghasilan suaminya. Sedangkan di ranah publik, laki-laki mengabaikan peran perempuan dari jenis-jenis pekerjaan yang berpendapatan tinggi (Hartati, 2020).

Prinsip pokok dari pembangunan manusia yaitu meyakinkan manusia, baik laki-laki ataupun perempuan memiliki kebebasan dalam menentukan banyaknya pilihan dihidupnya, dapat mengetahui potensi atau kemampuan pada dirinya, dan dengan bebas menjalani kehidupan yang berharga dan terhormat. Dengan prinsip pokok tersebut maka pemberian kesempatan yang sama pada laki-laki maupun perempuan menjadi indikator untuk mengukur pembangunan manusia baik laki-laki maupun perempuan.

2.2 Teori Gender

Menurut World Health Organization (2012), gender adalah seperangkat peran, perilaku, kegiatan dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan.

Gender mengacu pada peran yang dikonstruksikan masyarakat dan perilaku-perilaku yang dipelajari serta harapan-harapan yang dikaitkan pada perempuan dan pada laki-laki. Seperti juga ras, suku, maupun kelas, gender merupakan kategori sosial yang paling menentukan kesempatan hidup dan peran serta seseorang dalam masyarakat dan ekonomi. Peran dan hubungan gender dapat sangat beragam antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Peran dan hubungan gender berkembang dari interaksi yang terjadi antara berbagai kendala biologis, teknologi, ekonomis dan kendala-kendala sosial lainnya. Terdapat beberapa teori yang berkembang dan dijadikan analisa dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan gender. Teori tersebut antara lain:

1. Teori Nurture

Menurut Teori nurture adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan perannya dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara. Perjuangan untuk persamaan diplopori oleh orang-orang yang konsen memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki (kaum feminism) yang cenderung mengejar kesamaan atau fifty-fifty yang kemudian dikenal dengan istilah kesamaan kuantitas (perfect equality). Perjuangan tersebut sulit dicapai karena berbagai hambatan dari nilai agama dan budaya (Styawati, 2016).

2. Teori Equilibrium

Teori equilibrium lebih memfokuskan pada konsep kemintraan dan keharmonisan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pandangan teori ini tidak mempertentangkan antara kaum laki-laki karena keduanya harus bekerjasama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu peneran kesetaraan gender harus kontekstual (yang ada pada waktu dan tempat tertentu) dan situasional bukan berdasarkan hitungan matematis dan tidak berlaku secara universal.

3. Teori Nature

Menurut teori nature adanya perbedaan laki-laki dan perempuan merupakan kodrat sehingga tidak dapat berubah dan bersifat universal. Perbedaan biologis

ini memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Menurut Talcoot dan Bales (1979) mengemukakan bahwa keluarga adalah unit sosial yang memberikan perbedaan peran suami istri untuk saling melengkapi dan membentuk satu sama lain. Keharmonisan hidup dapat diciptakan apabila pembagian peran dan tugas yang serasi antara perempuan dan laki-laki. Aliran itu melahirkan kepahaman yang menyetujui perbedaan peran, asal dilakukan secara demokratis dan dilandasi dengan kesepakatan (komitmen) antara suami istri dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Styawati, 2016).

Secara umum di Indonesia menempatkan gender pada teori nature, berdasarkan dengan adat-stiadat, norma dan aturan agama yang dianut dan dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia. Beberapa kasus menjelaskan bahwa teori nature kerap dijadikan “tameng” dalam upaya eksploitasi dan pengsubordinatan perempuan, hal ini dikarenakan tafsiran sempit dalam meterjemahkan dan mengaplikasikan nilai luhur dari teori nature tersebut.

2.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Dalam Women Studies Ensiklopedia dijelaskan bahwa gender merupakan suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013).

IPG memiliki komponen pembentuk yang menentukan nilai dari IPG. Komponen pembentuk tersebut sama dengan yang digunakan dalam pengukuran IPM, yakni angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pengetahuan), serta sumbangan pendapatan

(mewakili dimensi ekonomi) yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013).

- a. Indikator Angka Harapan hidup (AHH) adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang diperkirakan dapat ditempuh oleh seseorang. AHH merupakan indikator yang mencerminkan taraf kesehatan masyarakat di suatu wilayah sebagai dampak dari pelaksanaan hasil pembangunan khususnya di bidang kesehatan.
- b. Angka Melek Huruf (AMH) menggambarkan persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang mampu baca dan tulis. Sedangkan indikator rata-rata lama sekolah merepresentasikan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal.
- c. Indikator yang mewakili dimensi ekonomi yakni sumbangan pendapatan yang mencerminkan kontribusi perempuan di bidang ketenagakerjaan untuk sektor non pertanian. Meningkatnya gap upah antara laki-laki dan perempuan akan berpengaruh pada menurunnya nilai IPG.

2.4 Penelitian Sebelumnya

IPG memiliki komponen pembentuk yang menentukan nilai dari IPG. Komponen pembentuk tersebut sama dengan yang digunakan dalam pengukuran IPM, yakni angka harapan hidup, (mewakili dimensi kesehatan), angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pengetahuan), serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi ekonomi) yang disajikan menurut jenis kelamin (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013). Berdasarkan tiga dimensi pembentuk IPG, maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat mewakili dari ketiga dimensi pembentukan IPG. Variabel Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Buta Huruf (ABH) dapat mewakili dimensi pengetahuan. Dimensi Ekonomi dapat diwakili oleh variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), sedangkan dimensi kesehatan dapat diwakili oleh persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Untuk variabel rasio jenis kelamin dan rasio jenis kelamin saat lahir dapat menjelaskan tentang orientasi gender (Fitarisca, 2014).

Hafizh (2013) melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas gender di Jawa Timur dengan menggunakan pendekatan model probit, akan tetapi dalam penelitian tersebut tidak memperhatikan faktor budaya dan kondisi ekonomi. Berdasarkan hasil regresi probit, faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas gender adalah angka partisipasi sekolah (APS) tingkat SMP penduduk perempuan, persentase penduduk perempuan dengan pendidikan terakhir yang ditamatkan setingkat SMP, dan persentase penduduk perempuan yang bekerja di sektor formal.

Fitarisca (2014) melakukan analisis mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan menggunakan regresi probit. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi IPG pada penduduk laki-laki antarlain APS SD/ sederajat dan rasio jenis kelamin saat lahir. Sedangkan faktor yang mempengaruhi IPG pada penduduk perempuan yaitu APS SMA/ sederajat, TPAK, PPP, dan rasio jenis kelamin saat lahir.

2.5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial. Tiga indikator yang digunakan yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi.

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam penyusunan Dokumen Analisis Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 meliputi:

1) Tahapan Persiapan Dasar

Pada tahap ini, dilakukan pengkajian data, informasi, serta studi literatur yang telah ada sebagai salah satu data pendukung dalam penyusunan laporan;

2) Tahap Pengumpulan Data

Tahap kedua adalah tahap pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan mencakup, utamanya adalah data sekunder, yang disertai data primer berupa dokumentasi lokasi pada wilayah studi. Proses dokumentasi dilakukan dengan dokumentasi kondisi eksisting mencakup kondisi wilayah dan kependudukan

3) Tahap Pengolahan Data

Tahap ketiga adalah tahap pengolahan data. Tahap ini merupakan penilaian terhadap berbagai keadaan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pendekatan dan metode, serta teknik analisis studi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah maupun secara praktis sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.

4) Tahap Penyusunan Laporan

Tahap terakhir, yaitu penyusunan laporan, mencakup laporan pendahuluan dan laporan akhir.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu Dokumen "Analisis Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Di Kabupaten Mojokerto", yang sekurang-kurangnya memuat data berikut:

- 1) Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan Data series maksimum 5 tahun kebelakang. Data yang diambil merupakan data

publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia (RI) pada tahun 2013-2023. Unit observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 Kabupaten Mojokerto.

2) Kajian Terdahulu

Data sekunder tersebut mayoritas dikumpulkan tidak secara langsung atau melalui perantara pihak lain. Data hasil survei sekunder diperoleh dari studi literatur maupun dokumen dari instansi-instansi terkait.

A. Literatur

Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, ataupun catatan pribadi (Suraatmaja, 2015).

B. Instansi

Studi instansi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data ataupun dokumen-dokumen resmi yang didapat dari instansi atau lembaga terkait (Fathoni, 2011).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan pihak peneliti untuk dapat mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan penelitian yang mereka ambil.

A. Pengumpulan Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012). Data primer dapat dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain (Suharsimi, 2010). Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan secara daring yaitu menggunakan jaringan internet yang memiliki aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk saling berinteraksi (Sadikin, 2020).

1. Wawancara (Deep Interview)

Wawancara adalah suatu kegiatan atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan narasumber atau orang yang di wawancarai melalui komunikasi langsung (Yusuf, 2014). Wawancara juga merupakan proses

memperoleh data untuk tujuan penelitian III-3 dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara (Kawasati & Risky, 2018). Wawancara dilakukan dengan narasumber yang mampu menyampaikan informasi dengan baik dan akurat.

Pengertian wawancara-mendalam (In-depth Interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo 2006: 72). Ciri khusus/Kekhasan dari wawancara-mendalam ini adalah keterlibatannya dalam kehidupan responden/informan. Dalam wawancara-mendalam melakukan penggalian secara mendalam terhadap satu topik yang telah ditentukan (berdasarkan tujuan dan maksud diadakan wawancara tersebut) dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Penggalian yang dilakukan untuk mengetahui pendapat mereka berdasarkan perspective responden dalam memandang sebuah permasalahan. Teknik wawancara ini dilakukan oleh seorang pewawancara dengan mewawancarai satu orang secara tatap muka (face to face).

Dilakukan terhadap OPD OPD yang terkait dengan pengembangan program IPG dan IDG di Kabupaten Mojokerto. Tujuan dari deep interview adalah untuk mengetahui akar masalah dari rendahnya nilai indikator-indikator IPG dan IDG dan aktor-aktor yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pengembangan IPG dan IDG di Kabupaten Mojokerto.

OPD = bapak/ibu camat dari 18 kecamatan

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara memperoleh informasi lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya (Kawasati & Risky, 2018). Dokumentasi juga merupakan tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada atau pengumpulan data historis (Yusuf, 2014).

Dalam penelitian ini dokumentasi yang dilakukan adalah gambar eksisting yang diperoleh saat melakukan survei.

B. Pengumpulan Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber dari literatur, artikel, jurnal, serta situs internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan (Rokhmana, 2012). Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sudah tersedia. Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti pada penelitian ini.

3.4 Metode Pengolahan Data

Pada penelitian ini akan di teliti IPG di Kabupaten Mojokerto serta menganalisis kesesuaiannya dengan penerapan program-program pembangunan dengan faktor yang mempengaruhi IPG sehingga diketahui tingkat efektivitas dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam upaya peningkatan kesetaraan gender untuk dapat mewujudkan pembangunan yang adil dan merata dan yang terakhir dilakukan analisis pemetaan aktor dengan menggunakan Social Network Analysis.

3.3.1 Analisis Hierarki Proses (AHP)

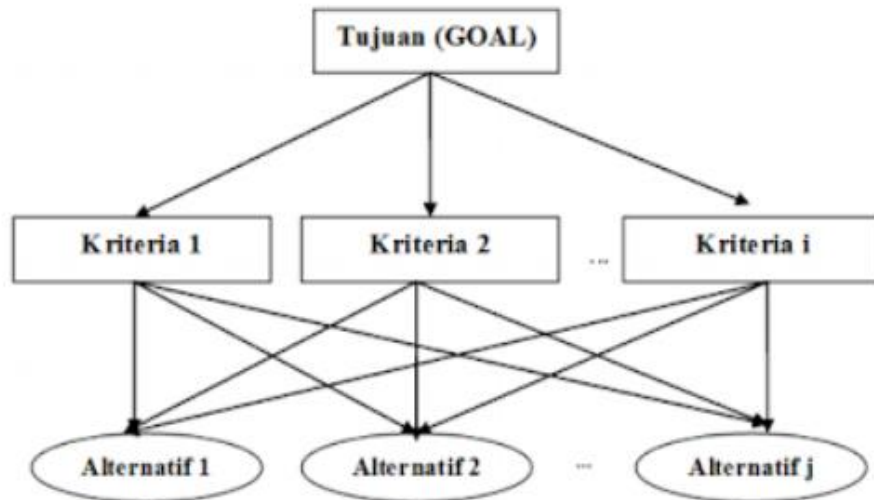
Analisis Hierarki Proses atau AHP adalah Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah Teknik yang digunakan sebagai penilaian untuk menentukan tingkatan, urutan prioritas dan kriteria yang terkuantifikasi sehingga dapat lebih valid untuk menarik kesimpulan penelitian. Dengan hirarki, suatu masalah kompleks dan tidak terstruktur dipecahkan ke dalam kelompok-kelompoknya dan diatur menjadi suatu bentuk hirarki. AHP memiliki kelebihan dan kekurangan dalam sistem analisisnya (Supriadi, Rustandi, Komarlina, & Ardiani, 2018). Struktur hierarki dalam AHP didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. AHP pada penelitian ini digunakan untuk menentukan urutan kriteria pembentuk IPG IDG, dan urutan alternatif program yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan indeks

Pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG). Analisis ini memformulasikan keputusan berdasarkan beberapa kriteria menggunakan matriks perbandingan berpasangan yang dipilih oleh responden ahli. Tidak ada perumusan dalam penentuan jumlah pakar dalam teknik analisis AHP, tetapi hanya terdapat batas minimum yaitu dua orang responden (Sutrasmawati dkk, 2018). Syarat sebagai responden ahli dalam penelitian ini adalah :

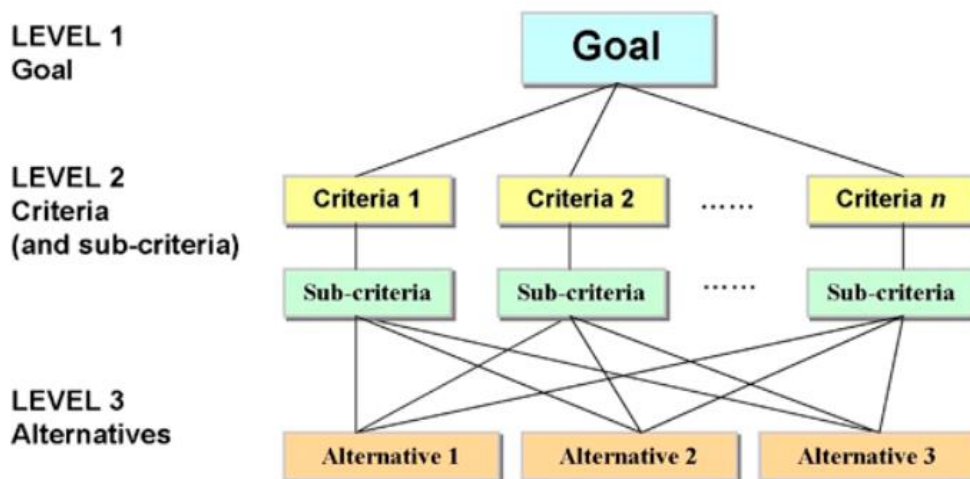
1. Pihak yang memahami permasalahan terkait IPG dan IDG di Kabupaten Mojokerto
2. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program peningkatan angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, keterlibatan perempuan dalam parlemen, keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan di Kabupaten Mojokerto.
3. Pihak yang terlibat dalam perencanaan program peningkatan angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, keterlibatan perempuan dalam parlemen, keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan di Kabupaten Mojokerto.

Dari ketiga persyaratan tersebut, dipilih sebelas pakar/responden yang dinilai sesuai untuk menjadi responden dalam penilaian AHP, yaitu :

1. Dua responden dari Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan
2. Dua responden dari Bidang Pengelola Data, Dinas Pendidikan
3. Penyuluh Penanganan Masalah Sosial, Dinas Sosial
4. Penyuluh Sosial Ahli Muda, Dinas Sosial
5. Dua responden dari Analis Kebijakan Bidang PP & PUG, DP2KBP2
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian, Sekretariat Dinas Tenaga Kerja
7. JF Perencanaan, Dinas Tenaga Kerja
8. JF Analis, Bidang Pelatihan, Dinas Tenaga Kerja



Gambar 3. 1 Contoh 1 Struktur Hierarki AHP



Gambar 3. 2 Contoh 2 Struktur Hierarki AHP

Analitycal Hierarchy Process (AHP) adalah teknik memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur kedalam beberapa komponen dalam susunan yang hirarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Proses pengambilan keputusan pada dasarnya adalah memilih suatu alternatif terbaik, seperti melakukan penstrukturan persoalan, penentuan alternatif-alternatif, penetapan nilai kemungkinan untuk variabel aleatori, penetapan nilai, persyaratan preferensi terhadap waktu, dan spesifikasi atas resiko. Walaupun luasnya alternatif yang dapat ditetapkan maupun terperinci pemberian nilai kemungkinan, keterbatasan yang tetap melingkupi adalah dasar



pembandingan berbentuk suatu kriteria yang tunggal (Cheaitou, 2017). Langkah-langkah analisa AHP:

1. Membuat struktur hieraki, dimulai penetapan tujuan utama sebagai level teratas atau terfokus, kemudian menyusun level hirarki yang berbeda dibawahnya. Alternatif didapat berdasarkan pada permasalahan paling prioritas atau yang berdampak paling besar.
2. Penilaian kriteria dan alternatif. Kriteria dan alternatif dilakukan dengan perbandingan berpasangan., untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik untuk mengekspresikan pendapat (Tabel 3.1)

Tabel 3. 1 Tingkat Kepentingan

Intensitas Kepentingan	Definisi	Penjelasan
1	Kedua elemen sama pentingnya	Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap tujuan
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting dari elemen lainnya	Pengalaman dan penilaian sedikit menyokong satu elemen atas yang lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting dari elemen lainnya	Pengalaman dan penilaian sangat kuat menyokong satu elemen dibandingkan elemen lainnya
7	Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya	Satu elemen yang kuat disokong dan dominan terlihat dalam praktik
9	Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya	Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan
2,4,6,8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan	Nilai ini diberikan jika ada dua kompromi diantara dua pilihan

3. Menentukan prioritas elemen dengan membuat matriks perbandingan berpasangan. Matriks tersebut diisi menggunakan bilangan untuk mempresentasikan kepentingan relatif dari suatu elemen terhadap elemen lainnya.
4. Sintesis
 - Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks
 - Membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks
 - Menjumlahkan nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata

5. Menghitung λ_{maks}

- Kalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama, nilai pada kolom kedua dengan prioritas relatif, elemen kedua dan seterusnya.
- Jumlah setiap baris
- Hasil dari penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas relatif yang bersangkutan
- Jumlahkan hasil bagi di atas dengan banyaknya elemen yang ada hasilnya disebut λ_{maks}

6. Menghitung *Consistency Index*, dengan rumus :

$$Ci = (\lambda_{maks} - n)/(n - 1)$$

Di mana n = banyak elemen

7. Menghitung *Consistency Ratio*, dengan rumus :

$$CR = CI/IR$$

di mana:

- CR= *Consistency Ratio*
- CI = *Consistency Index*
- IR = *Index Random Consistency*
- Memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilainya >10%, maka penilaian data judgment harus diperbaiki. Jika *Consistency Ratio* (CI/IR) 0.1, maka hasil perhitungan dinyatakan benar.

3.3.2 Analisis Konten

Analisis konten merupakan teknik analisis yang digunakan peneliti untuk mendapatkan inferensi yang dilakukan melalui proses identifikasi dan penafsiran (Yuniawati, 2015). Pada dasarnya, analisis ini dapat digunakan untuk menganalisa berbagai jenis muatan dan bentuk komunikasi, seperti yang terdapat dalam media cetak, media elektronik, makalah, peraturan, undang-undang, dan dokumen-dokumen lainnya (Arafat, 2018). Tujuan dilakukannya analisis konten adalah untuk menganalisis pengamatan, menguji hipotesis, mendapatkan informasi deksriptif tentang suatu hal, serta untuk memeriksa temuan penelitian lainnya (Yuniawati, 2015). Analisis konten

digunakan untuk menganalisis kesesuaian program-program yang dipetakan dan dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender.

Analisis konten merupakan metode dalam ilmu social yang mempelajari tentang komunikasi yang umumnya di gunakan untuk menganalisis teks yang berasal dari peraturan perundang-undangan, transkrip, dan institusi tertentu. Sebelum melakukan analisis isi (analisis content) perlu adanya unit analisis yang terdiri atas (Eriyanto, 2015):

1. Unit sample (sampling units) merupakan bagian objek yang diseleksi oleh peneliti untuk didalami. Unit ini ditentukan berdasarkan topik dan tujuan dalam riset. Melalui unit ini peneliti menentukan content yang akan diteliti.
2. Unit pencatatan (recording units) merupakan bagian yang mendasar dalam pencatatan dan analisis. Conten dalam suatu teks memiliki usur maupun bagian yang harus di definisikan sebagai dasar peneliti dalam melakukan pencatatan. Peneliti harus memilih bagian yang akan di catat. Bagian ini yang disebut sebagai unit pencatatan.
3. Unit konteks (context units) merupakan konteks dari peneliti untuk memahami atau memberi arti dari hasil pencatatan. Aspek-aspek yang terdapat di pencatatan harus diberi konteks tertentu yang di pilih oleh peneliti. Konteks tersebut dapat berupa social-politik, perturan, maupun budaya.

3.3.3 Analisis Pemetaan Aktor/Social Networ Analysis (SNA)

Aktor/stakeholders pihak yang bersinggungan langsung dengan isu dan permasalahan yang sedang terjadi atau berkembang di dalam masyarakat. Aktor atau Stakeholders dapat dibagi ke dalam tiga kelompok menurut Maryono dalam (Handayani & Warsono, 2017) antara lain:

a. Stakeholders primer

Stakeholder primer adalah stakeholder utama yang bersinggungan langsung dengan aktivitas, proyek atau pembangunan. Sehingga stakeholder atau aktor tersebut merasakan dalam langsung dampak baik positif maupun negatif dari suatu kegiatan. Stakeholder primer tentunya memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi terhadap suatu aktivitas di wilayah mereka. Dalam implementasi program atau kegiatan stakeholder utama sangat penting untuk

berpartisipasi dalam semua tahapan kegiatan dari perencanaan sampai pada review kegiatan.

b. Stakeholders kunci

Stakeholder kunci merupakan stakeholder dari unsur pemerintah atau state terutama ditingkat lokal, yang memiliki otoritas formal dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Stakeholder kunci dalam penelitian ini adalah stakeholder/OPD yang bertanggungjawab dalam program indeks pembangunan gender

c. Stakeholders sekunder atau pendukung

Stakeholder pendukung adalah individu, kelompok atau organisasi baik formal maupun informal yang tidak bersinggungan langsung dengan kegiatan atau sebuah proyek, tetapi memiliki perhatian atau kepentingan yang cukup besar terhadap suatu proyek tertentu. Misalkan kelompok NGO aktor pemerhati lingkungan dan lain sebagainya.

Dalam pemetaan aktor terkadang ditemukan aktor yang memiliki multi peran, sebagai individu, kelompok dan bahkan organisasi, biasanya aktor ini merupakan aktor yang paling berpengaruh didalam masyarakat. Berdasarkan pendalaman data dan informasi melalui wawancara mendalam dengan key informan, FGD, wawancara dengan aktor dan penyebaran kuesioner, teridentifikasi aktor-aktor (stakeholders) yang berpengaruh dan memiliki kepentingan dalam penentuan kebijakan dan program dalam indeks pembangunan gender di Kabupaten Mojokerto.

Untuk mempermudah proses pemetaan aktor, studi ini menggunakan *social network analysis* (SNA) dalam mengidentifikasi aktor dan struktur jejaring sosial. Manfaat menggunakan *social network analysis* adalah dengan memetakan seluruh jaringan, analisis ini dapat menunjukkan keseluruhan sistem yang dapat mengidentifikasi broker (menggunakan *betweenness centrality*). Social network analysis dapat mengidentifikasi aktor yang berada di luar *immediate circle* (lingkaran sosial terdekat). *Social network analysis* menunjukkan bagaimana seluruh sistem saling berhubungan dimana tidak ada individu yang dapat melihat kondisi tersebut secara utuh. Penggunaan *social network analysis* di dalam studi ini penting untuk mempelajari keterkaitan yang kompleks antara aktor-aktor yang berpengaruh. Penggunaan *social network analysis* secara visual dapat memilah-milah koneksi yang

kompleks dan menampilkan kekuatan hubungan antar aktor untuk mengidentifikasi aktor primer, aktor kunci dan aktor pendukung.

Social Network Analysis (SNA) bisa digunakan untuk membahas indeks pembangunan gender dengan melihat hubungan sosial dan interaksi antara individu dalam masyarakat. SNA dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan gender melalui analisis hubungan dan interaksi antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Misalnya, SNA dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis jaringan sosial yang terbentuk di antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Dalam hal ini, SNA dapat membantu mengungkapkan pola dan kecenderungan terkait partisipasi perempuan dan laki-laki dalam kegiatan ekonomi, politik, dan sosial.

Selain itu, SNA juga dapat membantu menganalisis pengaruh kebijakan publik terhadap partisipasi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Dalam hal ini, SNA dapat membantu mengidentifikasi jaringan kebijakan yang terbentuk dan mengukur sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut dapat mempengaruhi partisipasi perempuan dan laki-laki dalam kegiatan ekonomi, politik, dan social.

BAB 4 ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur

4.1.1 Administrasi dan Geografi

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dalam wilayah negara Republik Indonesia. Mengenai nama Jawa Timur, karena provinsi ini menempati wilayah paling timur Pulau Jawa. Di Pulau Jawa terdapat enam provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah D.I. Yogyakarta, serta Jawa Timur. Dengan luas wilayah 46.428,57 km² Provinsi Jawa Timur secara administratif terbagi menjadi 38 kabupaten/kota, dengan rincian 29 kabupaten dan 9 kota. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Barat	: Samudra Hindia
Sebelah Selatan	: Selat Bali
Sebelah Timur	: Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Timur terletak pada 111°00 hingga 114°40 Bujur Timur dan 7°120 hingga 8°480 Lintang Selatan. Lokasi Provinsi Jawa Timur berada di sekitar garis Khatulistiwa, maka seperti provinsi lainnya di Indonesia, wilayah ini mempunyai perubahan musim sebanyak 2 jenis setiap tahunnya, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Temperatur Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 tertinggi di bulan November (35,6°C) dan terendah di bulan Juli (32,2°C), dengan kelembaban 52 sampai 97 persen.

4.1.2 Kependudukan

Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki kondisi kependudukan terbesar atau terbanyak ke-dua setelah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan pada Tahun 2020, penduduk di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2023 berjumlah 41.416.407 Jiwa. Kabupaten atau Kota di Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk tertinggi pada Tahun 2023 terdapat pada Kota Surabaya yakni sebesar 2.893.698 Jiwa, sedangkan Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki



jumlah penduduk terkecil terdapat pada Kota Mojokerto yakni 135.414 Jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

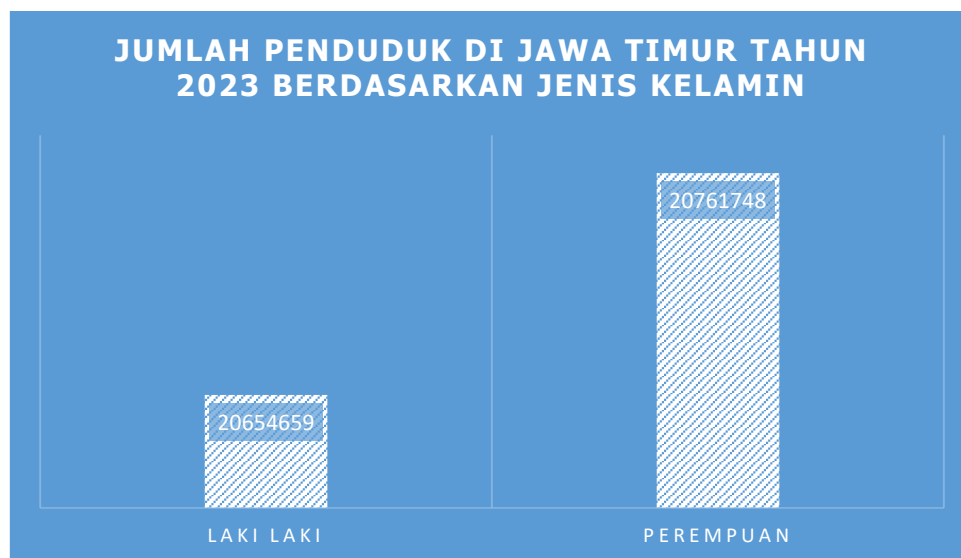
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur (Jiwa)					
	Laki-laki		Perempuan		Total	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Kabupaten Pacitan	297.014	298.826	295.902	297.823	592.916	596.649
Kabupaten Ponorogo	481.540	485.603	482.713	486.979	964.253	972.582
Kabupaten Trenggalek	371.527	373.810	368.142	370.548	739.669	744.358
Kabupaten Tulungagung	552.835	557.045	552.502	556.928	1.105.337	1.113.973
Kabupaten Blitar	624.631	629.127	615.691	620.370	1.240.322	1.249.497
Kabupaten Kediri	836.025	841.629	819.995	825.821	1.656.020	1.667.450
Kabupaten Malang	1.353.154	1.361.591	1.332.746	1.341.584	2.685.900	2.703.175
Kabupaten Lumajang	562.257	567.106	574.970	580.155	1.137.227	1.147.261
Kabupaten Jember	1.279.947	1.288.194	1.287.771	1.296.577	2.567.718	2.584.771
Kabupaten Banyuwangi	866.723	873.100	865.008	871.714	1.731.731	1.744.814
Kabupaten Bondowoso	384.676	385.966	396.741	398.226	781.417	784.192
Kabupaten Situbondo	339.230	340.547	352.030	353.534	691.260	694.081
Kabupaten Probolinggo	572.137	573.945	587.828	589.914	1.159.965	1.163.859
Kabupaten Pasuruan	809.968	813.307	809.067	812.722	1.619.035	1.626.029
Kabupaten Sidoarjo	1.058.552	1.063.973	1.044.849	1.050.615	2.103.401	2.114.588
Kabupaten Mojokerto	569.966	573.841	563.618	567.675	1.133.584	1.141.516
Kabupaten Jombang	673.386	678.250	662.586	667.636	1.335.972	1.345.886
Kabupaten Nganjuk	561.677	565.193	555.356	559.054	1.117.033	1.124.247
Kabupaten Madiun	375.368	378.994	382.297	386.141	757.665	765.135
Kabupaten Magetan	333.605	335.566	344.738	346.900	678.343	682.466
Kabupaten Ngawi	435.470	437.350	441.962	444.043	877.432	881.393
Kabupaten Bojonegoro	660.216	663.775	654.909	658.699	1.315.125	1.322.474
Kabupaten Tuban	603.875	606.876	605.668	608.919	1.209.543	1.215.795
Kabupaten Lamongan	686.117	693.701	685.392	693.240	1.371.509	1.386.941
Kabupaten Gresik	670.835	676.735	661.829	667.913	1.332.664	1.344.648

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur (Jiwa)					
	Laki-laki		Perempuan		Total	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Kabupaten Bangkalan	535.522	542.775	551.098	558.781	1.086.620	1.101.556
Kabupaten Sampang	488.673	492.572	495.489	499.638	984.162	992.210
Kabupaten Pamekasan	420.612	422.584	437.206	439.425	857.818	862.009
Kabupaten Sumenep	548.419	551.524	588.213	591.771	1.136.632	1.143.295
Kota Kediri	144.876	145.556	144.542	145.280	289.418	290.836
Kota Blitar	75.587	76.359	76.373	77.182	151.960	153.541
Kota Malang	420.897	421.340	425.229	425.842	846.126	847.182
Kota Probolinggo	120.545	121.500	122.655	123.674	243.200	245.174
Kota Pasuruan	105.753	106.709	105.744	106.741	211.497	213.450
Kota Mojokerto	66.611	67.125	67.739	68.289	134.350	135.414
Kota Madiun	97.370	98.460	101.822	103.000	199.192	201.460
Kota Surabaya	1.431.041	1.433.967	1.456.182	1.459.731	2.887.223	2.893.698
Kota Batu	109.119	110.138	107.616	108.664	216.735	218.802
Jawa Timur	20.525.756	20.654.659	20.624.218	20.761.748	41.149.974	41.416.407

Sumber : BPS Jawa Timur, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur apabila dilihat dari jenis kelamin memiliki jumlah yang cukup timpang. Di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2023 didominasi oleh penduduk perempuan dengan jumlah 20.761.748, jumlah tersebut apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki mengalami ketimpangan yang cukup tinggi. Adapun jumlah penduduk di Tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada diagram dibawah ini.



Gambar 4. 1 Jumlah Penduduk di Jawa Timur Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Kelamin

4.1.3 Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi yang terdapat di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku. Perekonomian Jawa Timur tumbuh Triwulan I-2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp712,63 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp448,95 triliun. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni Tahun 2022, perekonomian di Jawa Timur mengalami pertumbuhan sebesar 1,02 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 14,29 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 3,74 persen. Secara struktur, lapangan usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I-2023 dengan kontribusi sebesar 31,00 persen.

4.2 Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto

4.2.1 Administrasi dan Geografi

Kabupaten Mojokerto merupakan Kabupaten yang terletak di mengelilingi Kota Mojokerto, terbentang pada 7 18' Lintang Selatan dan 111 20' Bujur Timur. Berdasarkan geografis Kabupaten Mojokerto berada di wilayah daratan yang dikelilingi oleh sungai dan tidak memiliki pantai. Kabupaten Mojokerto memiliki luas wilayah 692,15 Ha, dengan wilayah administrasi terbagi 18 Kecamatan. Batas Wilayah administrasi Kota Mojokerto meliputi :

Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik

Sebelah Barat : Kabupaten Jombang

Sebelah Selatan : Kabupaten Malang

Sebelah Timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan

Tabel 4. 2 Luas Wilayah Kabupaten Mojokerto Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Presentase (%)
1	Jatirejo	32,98	4,76
2	Gondang	39,11	5,65
3	Pacet	45,16	6,52
4	Trawas	29,86	4,31
5	Ngoro	57,48	8,3
6	Pungging	48,14	6,96
7	Kutorejo	42,83	6,19

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Presentase (%)
8	Mojosari	26,65	3,85
9	Bangsals	24,06	3,48
10	Mojoanyar	23,02	3,33
11	Dlanggu	35,42	5,12
12	Puri	35,65	5,15
13	Trowulan	39,20	5,66
14	Sooko	23,46	3,39
15	Gedek	22,98	3,32
16	Kemlagi	50,05	7,23
17	Jetis	57,17	8,26
18	Dawar Blandong	58,93	8,51
Total		692,15	100

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2022

Secara administratif wilayah Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 Kecamatan, 299 desan, dan 5 Kelurahan, 1173 Dusun, 2093 RW dan 7118 RT. Luas Wilayah Kabupaten Mojokerto sebesar 692,15 Km². Kecamatan paling luas yang terdapat di Kabupaten Mojokerto adalah kecamatan Dawar Blandong dengan luas 58,93 km². Kabupaten Mojokerto tidak memiliki wilayah berupa perairan ataupun laut. Berikut merupakan Jumlah Kelurahan, RW, dan RT yang terdapat di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 4. 3 Jumlah Kelurahan, RW, dan RT Kabupaten Mojokerto

No	Kecamatan	Jumlah				
		Desa	Kelurahan	Dusun	RW	RT
1	Jatirejo	19		58	108	341
2	Gondang	18		71	82	278
3	Pacet	20		80	132	435
4	Trawas	13		29	80	251
5	Ngoro	19		68	103	552
6	Pungging	19		87	176	602
7	Kutorejo	17		108	141	351
8	Mojosari	14	5	53	150	570
9	Bangsals	17		49	74	296
10	Mojoanyar	12		44	69	262
11	Dlanggu	16		80	94	310
12	Puri	16		68	141	453
13	Trowulan	16		60	110	408
14	Sooko	15		42	110	419
15	Gedek	14		46	107	384
16	Kemlagi	20		76	136	372
17	Jetis	16		79	120	484
18	Dawar Blandong	18		75	160	350
Total		299	5	1173	2093	7118

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2022

4.2.2 Kondisi Fisik Dasar

A. Topografi dan Kelerengan

Topografi wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung cekung di bagian tengah dan tinggi dibagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan bagian pegunungan yang subur, meliputi kecamatan Pacet, Trawas, Gondang, dan Jatilejo. Bagian tengah merupakan bagian dataran, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang cenderung kurang subur.

Wilayah Kabupaten Mojokerto terletak pada ketinggian antara 36-240 meter di atas permukaan laut. Di bagian selatanm yaitu Kecamatan Pacet dan Kecamatan Trawas, merupakan daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 470 meter di atas permukaan laut. Sedangkan wilayah yang mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter mencapai 23,648 Ha dengan kemiringan tanah di atas 40 derajat.

Kemiringan tanah (kelerengan) merupakan sudut yang dibentuk oleh permukaan tanah dengan bidang horisontal dan dinyatakan dalam persen (%). Sekitar 30% dari wilayah Mojokerto kemiringan tanahnya lebih dari 15 derajat, sedangkan sisanya merupakan wilayah dataran dengan kemiringan kurang dari 15 derajat seperti tabel berikut.

Tabel 4. 4 Kemiringan Tanah Kabupaten Mojokerto

No	Kemiringan	Luas	
		Ha	%
1	0,0-2,0	45.886	47,34
2	2,0-15,0	22.072	22,77
3	15,0 – 40,0	8.474	8,74
4	Di atas 40,0	20.504	21,15
Total		96.936	100

Sumber : BPN Kabupaten Mojokerto

B. Klimatologi

Kabupaten Mojokerto mempunyai perubahan iklim 2 jenis setiap tahunnya yaitu musim kemarau (Mei – September) dan musim hujan (Oktober-april) dengan curah hujan rata-rata sebesar 259,61 mm. Kabupaten Mojokerto memiliki ketinggian rata-rata 64 mdpl. Curah hujan di Kabupaten Mojokerto selama tahun 2022 berkisar 1.300 – 1.900 mm. Per tahun Curah hujan terendah terjadi pada bulan agustus yaitu sebesar 9 mm, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan januari sebesar 376 mm. Sedangkan untuk jumlah hari hujan di Kabupaten Mojokerti berkisar antara

80-140 hari hujan pertahun. Hari hujan tertinggi pada bulan januari dengan jumlah 22 hari hujan serta hari hujan paling rendah pada bulan agustus dengan 1 hari hujan.

C. Geologi

Secara geografis Kabupaten Mojokerto terbagi atas empat macam batuan, yaitu aluvium, pliosen fassies sedimen, pliosen fasies batu gamping miosen fasies sedimen. Jenis batuan aluvium dan miosen fasies sedimen banyak dimanfaatkan masyarakat untuk tegalan dan sawah serta sebagian kecil batuan pliosen fasies sedimen untuk tegalan. Struktur primer (Berupa perlapisan batuan, lipatan antiklin – sinklin, dijumpai pada sisi utara). Struktur sekunder (berupa sesar normal, sesar geser, dengan arah baratdaya-timurlaut dan barat laut- tenggara, berkembang di bagian tengah dan selatan). Struktur sekunder lainnya berupa kekar-kekar pada batuan berkembang dalam skala yang lebih kecil dan dikontrol oleh aktifitas struktur regionalnya.

Tekstur tanah di Wilayah Kabupaten Mojokerto digolongkan menjadi 2 macam yaitu: Tekstur halus, tekstur tanah yang banyak terdapat di wilayah Kabupaten Mojokerto yaitu seluas 26.405,4 Ha atau 27,24% dari luas wilayah tersebar merata kecuali Kecamatan Dlanggu, Gondang, Pacet, Kutorejo, Mojosari, dan Trawas. Tekstur Sedang, seluas 70.530,6 Ha atau 72,76% dari luas wilayah Kabupaten Mojokerto tersebar merata kecuali Kecamatan gedeg dan Kemlagi.

D. Hidrologi

Pola tata air sangat ditentukan oleh besarnya curah hujan, jumlah mata air atau sumber air dan pola aliran sungai dan bendungan. Jumlah mata air mencapai 161 buah, yang berfungsi sebanyak 153 mata air. Debit air tersebut rata-rata maksimum 19,42 lt/dtk dan debit rata-rata minimum 7,60 lt/detik. Mata air tersebut sebagian besar sebarannya terdapat di wilayah Kabupaten Mojokerto bagian Selatan.

4.2.3 Kependudukan Kabupaten Mojokerto

A. Jumlah penduduk

Penduduk Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 berdasarkan data BPS adalah sebanyak 1.125.522 jiwa. Adapun komposisi penduduk Kabupaten Mojokerto didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki, dengan rincian penduduk perempuan sebesar 559.503 jiwa sedangkan penduduk dengan jenis kelamin laki-laki



sebesar 566.019 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di wilayah Kecamatan Jetis sebesar 86.621 jiwa, diikuti dengan Kecamatan Ngoro sebanyak 85.431 jiwa, dan jumlah penduduk terkecil berada di wilayah Kecamatan Trawas sebesar 31.011 berikut merupakan tabel jumlah penduduk di Kabupaten Mojokerto:

Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Kabupten Mojokerto

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Jatirejo	44.325
2	Gondang	43.119
3	Pacet	58.913
4	Trawas	31.011
5	Ngoro	85.431
6	Pungging	79.258
7	Kutorejo	66.977
8	Mojosari	78.176
9	Bangsar	51.103
10	Mojoanyar	50.808
11	Dlanggu	55.733
12	Puri	78.532
13	Trowulan	74.829
14	Sooko	75.278
15	Gedek	56.708
16	Kemlagi	58.016
17	Jetis	86.621
18	Dawar Blandong	50.684
Total		1.125.522

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2022

Berikut merupakan penjabaran data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Mojokerto berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin:

Tabel 4. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Mojokerto

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	44679	42348	87027
5-9	42850	41267	84117
10-14	42704	40416	83120
15-19	41796	40193	81989
20-24	42163	40985	83148
25-29	45478	43632	89110
30-34	44704	42415	87119
35-39	43754	42338	86092
40-44	41709	41186	82895
45-49	41459	42588	84047
50-54	39267	39959	79226
55-59	33245	33269	66514
60-64	25477	25421	50898
65-69	17289	18328	35617
70-74	10162	11762	21924
75+	9283	13396	22679



Jumlah	566019	559503	1125522
---------------	---------------	---------------	----------------

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2022

B. Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk yang besar dan persebaran penduduk yang masih belum merata merupakan masalah klasik kependudukan yang terjadi sekarang ini dan terus menjadi perhatian pemerintah. Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk, baik berkurang maupun bertambah di Kabupaten Mojokerto. Berikut merupakan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mojokerto tahun 2021/2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 7 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Penduduk	Angka Pertumbuhan Penduduk Tahun 2010-2020	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021
Jatirejo	44.325	0,53	0,53
Gondang	43.119	0,50	0,50
Pacet	58.913	0,50	0,50
Trawas	31.011	0,41	0,41
Ngoro	85.431	0,28	0,28
Pungging	79.258	0,45	0,45
Kutorejo	66.977	0,81	0,81
Mojosari	78.176	0,17	0,17
Bangsar	51.103	0,41	0,41
Mojoanyar	50.808	0,40	0,40
Dlanggu	55.733	0,52	0,52
Puri	78.532	0,52	0,52
Trowulan	74.829	0,42	0,42
Soko	75.278	0,40	0,40
Gedek	56.708	0,29	0,29
Kemlagi	58.016	0,56	0,56
Jetis	86.621	0,33	0,33
Dawar Blandong	50.684	0,21	0,21
Total	1125522	0,46	0,42

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2022

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tahun 2021-2022 mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 0,46%. Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 sebesar 0,77%. Menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 laju pertumbuhan sebesar 0,80%. Berikut merupakan tabel jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mojokerto tahun 2018-2022.

Tabel 4. 8 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
2018	1.109.067	0,90	99,83
2019	1.118.625	0,86	99,83
2020	1.127.882	0,83	99,82
2021	1.136.879	0,80	99,78
2022	1.145.650	0,77	99,76

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2022

Penurunan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2018 hingga 2022 dapat dijadikan indikasi keberhasilan pemerintah daerah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mojokerto. Jika ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, maka rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 sebesar 99,76 artinya bahwa dari setiap 1000 penduduk perempuan, ada sebanyak 997 penduduk laki-laki, dengan kata lain penduduk laki-laki di Kabupaten Mojokerto lebih banyak jumlahnya daripada penduduk perempuan.

Tabel 4. 9 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Tahun 2021

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Tahun 2021
Jatirejo	106
Gondang	101
Pacet	101
Trawas	100
Ngoro	98
Pungging	101
Kutorejo	103
Mojosari	100
Bangsar	101
Mojoanyar	102
Dlanggu	101
Puri	102
Trowulan	102
Sooko	101
Gedek	101
Kemlagi	100
Jetis	103
Dawar Blandong	99
Kabupaten Mojokerto	101

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2022

Rasio jenis kelamin penduduk tahun 2021 di Kabupaten Mojokerto sebesar 101. Rasio jenis kelamin penduduk paling besar berada di Kecamatan Jatirejo sebesar 106 dan rasio jenis kelamin paling kecil berada di Kecamatan Ngoro sebesar 98.

C. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah di Kabupaten Mojokerto. Adapun luas wilayah Kabupaten Mojokerto adalah sebesar 692,15 Km². Berikut merupakan data kepadatan penduduk Kabupaten Mojokerto per kecamatan pada tahun 2021.

Tabel 4. 10 Kepadatan Penduduk Kabupaten Mojokerto

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Jatirejo	44.325	32,98	1344
2	Gondang	43.119	39,11	1103
3	Pacet	58.913	45,16	1305
4	Trawas	31.011	29,86	1039
5	Ngoro	85.431	57,48	1486
6	Pungging	79.258	48,14	1646
7	Kutorejo	66.977	42,83	1564
8	Mojosari	78.176	26,65	2933
9	Bangsals	51.103	24,06	2124
10	Mojoanyar	50.808	23,02	2207
11	Dlanggu	55.733	35,42	1573
12	Puri	78.532	35,65	2203
13	Trowulan	74.829	39,20	1909
14	Sooko	75.278	23,46	3209
15	Gedek	56.708	22,98	2468
16	Kemlagi	58.016	50,05	1159
17	Jetis	86.621	57,17	1515
18	Dawar Blandong	50.684	58,93	860
Total		1.125.522	692,15	1626

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2022

D. Kelahiran dan Kematian Penduduk

Angka kelahiran total adalah banyaknya anak yang diperkirakan/dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksi dengan anggapan bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran tertentu. Angka kematian atau mortalitas adalah frekuensi kematian dalam suatu populasi perseribu penduduk setiap tahunnya.

Tabel 4. 11 Banyaknya Kelahiran Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jatirejo	323	294	617
2	Gondang	295	280	575
3	Pacet	408	353	761
4	Trawas	175	161	336
5	Ngoro	559	549	1.108
6	Pungging	525	503	1.028
7	Kutorejo	437	404	841
8	Mojosari	473	432	905
9	Bangsals	367	373	740
10	Mojoanyar	330	305	635

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
11	Dlanggu	516	441	957
12	Puri	461	436	897
13	Trowulan	481	432	913
14	Sooko	331	322	653
15	Gedek	391	329	720
16	Kemlagi	540	533	1.073
17	Jetis	339	278	617
18	Dawar Blandong	312	279	591
Kabupaten Mojokerto		6.951	6.425	13.376

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2022

Tabel 4. 12 Banyaknya Kematian Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jatirejo	142	71	213
2	Gondang	126	95	221
3	Pacet	100	67	167
4	Trawas	63	29	92
5	Ngoro	179	115	294
6	Pungging	195	120	315
7	Kutorejo	185	104	289
8	Mojosari	168	88	256
9	Bangsar	128	69	197
10	Mojoanyar	167	94	261
11	Dlanggu	143	81	224
12	Puri	235	115	350
13	Trowulan	174	87	261
14	Sooko	215	114	329
15	Gedek	142	90	232
16	Kemlagi	168	100	268
17	Jetis	192	120	312
18	Dawar Blandong	68	58	126
Kabupaten Mojokerto		2.790	1.617	4.407

Sumber: Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2022

Banyaknya kelahiran penduduk menurut jenis kelamin paling tinggi terdapat di Kecamatan Ngoro sebanyak 1.108 jiwa dan paling sedikit berada di Kecamatan Trawas sebanyak 336 jiwa. Sementara untuk angka kematian yang paling banyak berada di Kecamatan Puri yaitu sebanyak 350 jiwa dan paling sedikit berada di Kecamatan Trawas.

4.3 Gambaran Umum Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Mojokerto

4.3.1 Kondisi Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan cikal bakal dari terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang handal. Sistem pendidikan yang baik akan melahirkan generasi penerus

yang cerdas, berakhlak, dan kompeten. Faktor pendidikan penduduk mejadi salah satu indikator penting pembentuk sumber daya manusia yang menentukan kewibawaan sebuah negara.

Harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Lama sekolah penduduk miskin ekstreem di Kabupaten Mojokerto selama 5,92 tahun, sementara di Jawa Timur secara keseluruhan selama 4,78 tahun. Terdapat 2 indikator utama yang perlu mendapat perhatian lebih mengingat perbedaan capaian yang sangat besar dibandingkan dengan capaian nasional yaitu angka putus sekolah pada usia 16-18 tahun, hal ini harus segera ditangani secara serius. Di Kabupaten Mojokerto, angka putus sekolah usia 16-18 tahun mencapai 22,98 persen sementara di Jawa Timur secara keseluruhan sebesar 42,37%. Berikut merupakan Karakteristik Pendidikan di Kabupaten Mojokerto tahun 2020 menurut Susenas BPS tahun 2020.

Tabel 4. 13 Karakteristik Pendidikan Kabupaten Mojokerto

Indikator	Kabupaten Mojokerto	Jawa Timur	Indonesia
Rata-rata lama sekolah (tahun)	5,92	4,78	5,67
Angka Buta Huruf (%)	20,13	23,21	14,03
Angka Partisipasi Kasar (%)			
SD	102,07	104,14	106,02
SMP	93,75	96,81	92,67
SMA	88,89	85,76	84,8
Angka Partisipasi Murni(%):			
SD	97,72	97,97	97,78
SMP	83,9	83,78	80,67
SMA	75,93	62,95	61,7
Angka Putus Sekolah (%):			
Umur 7-12 Tahun	0	0,66	0,68
Umur 13-15 tahun	15,97	2,38	4,28
Umur 16-18 tahun	22,98	42,37	40,35

Sumber: Indikator Kesejahteraan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

Tabel 4. 14 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2022 Kabupaten Mojokerto

Kab/Kota	Jenjang Pendidikan								
	SD/MI (7-12 Thn)			SMP/MTs (13-15 Thn)			SM/MA (16-18 Thn)		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Mojokerto	96,64	111,41	103,83	103,35	99,26	101,46	126,00	77,31	99,13

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

Tabel 4. 15 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2022 Kabupaten Mojokerto

Kab/Kota	Jenjang Pendidikan								
	SD/MI (7-12 Thn)			SMP/MTs (13-15 Thn)			SM/MA (16-18 Thn)		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Mojokerto	89,56	100,00	94,64	79,86	92,39	85,66	82,20	60,77	70,37

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

Tabel 4. 16 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2022 Kabupaten Mojokerto

Kab/Kota	Jenjang Pendidikan								
	SD/MI (7-12 Thn)			SMP/MTs (13-15 Thn)			SM/MA (16-18 Thn)		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Mojokerto	98,03	100,00	98,93	94,77	90,69	92,69	67,18	61,29	64,17

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

Berdasarkan beberapa data diatas diketahui bahwa tingginya indikator kepala rumah tangga yang tidak bersekolah serta rendahnya tingkat kelulusan kepala keluarga hampir di setiap jenjang pendidikan menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan rumah tangga. Di Kabupaten Mojokerto terdapat 26,75% kepala rumah tangga miskin ekstrem hanya lulusan SD dan 32,64% tidak bersekolah. Berikut merupakan tabel karakteristik Pendidikan Kepala Rumah Tangga tahun 2020.

Tabel 4. 17 Karakteristik Pendidikan Kepala Rumah Tangga Tahun 2020

Indikator	Kabupaten Mojokerto	Jawa Timur	Indonesia
Tidak bersekolah	32,64	29,6	27,48
Lulus SD	26,75	42,64	39,22
Lulus SMP	21,74	13,31	14,87
Lulus SMA	15,33	13,14	16,83
Lulus PT	3,55	1,3	1,60

Sumber: Indikator Kesejahteraan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

4.3.2 Kesehatan

Prevalensi Balita Kerdil (stunting) di Jawa Timur menurun di tahun 2018 menjadi 32,7 dibandingkan 2013 sebesar 35,8. Sumber Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Prevalensi Stunting di Kabupaten Mojokerto sebesar 29,9 persen dengan jumlah balita stunting sebesar 25.065 jiwa. Dapat dikatakan bahwa Desa/Kelurahan di Jawa Timur lebih mudah dalam mengakses fasilitas kesehatan, baik rumah sakit bersalin maupun puskesmas yang sudah diupayakan oleh pemerintah dibandingkan rata-rata nasional. Berikut merupakan akses fasilitas Kesehatan tahun 2020 di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 4. 18 Akses Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

Kemudahan Akses Desa/Kelurahan Menuju	Mojokerto	Jawa Timur	Indonesia
Rumah Sakit	98,68	96,37	71,57
Rumah sakit Bersalin	98,36	60,82	40,88
Puskesmas	100	99,73	95,33
Poliklinik Swasta	99,67	97,56	69,06

4.3.3 Ketenagakerjaan

Pada aspek ketenagakerjaan, Kabupaten Mojokerto dalam Angka Tahun 2022 menguraikan mengenai UMR, jumlah penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, serta status pekerjaan penduduk angkatan kerja tahun di Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 2021, Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Mojokerto adalah sebesar Rp 4.279.787,00. Nilai tersebut meningkat sebesar 1,02% dari tahun sebelumnya, di mana UMR Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 adalah Rp 4.179.787,00.

Pada tahun 2021, jumlah penduduk angkatan kerja di Kabupaten Mojokerto adalah sebanyak 632.808 jiwa dan 265.171 jiwa lainnya bukan termasuk angkatan kerja. Status pekerjaan utama dari penduduk angkatan utama di Kabupaten Mojokerto secara umum diklasifikasikan menjadi 6 (enam) jenis, yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas, dan pekerja keluarga.

Tabel 4. 19 Jumlah Penduduk Usia > 15 Tahun Menurut Kegiatan Utama di Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja			
1. Bekerja	363.193	234.582	597.775
2. Pengangguran Terbuka	18.555	16.478	35.033
Bukan Angkatan Kerja	64.724	200.447	897.171
Jumlah	446.472	451.507	897.979

Sumber: Kabupaten Mojokerto dalam Angka, 2022

Tabel 4. 20 Jumlah Penduduk Usia > 15 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Berusaha sendiri	66.095	58.032	124.127
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	35.568	24.155	59.623
Berusaha dibantu buruh tetap	16.667	5.910	22.577
Buruh/Karyawan/Pegawai	184.562	91.891	276.453
Pekerja bebas	43.760	14.319	58.079
Pekerja keluarga	16.641	40.275	56.916



Jumlah	363.193	234.582	597.775
---------------	----------------	----------------	----------------

Sumber: Kabupaten Mojokerto dalam Angka, 2022

Tabel 4. 21 Jumlah Penduduk Usia > 15 Tahun Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
<= SD	109783	87749	197532
SMP	76394	44670	121064
SMA/SMK	151933	75594	227527
Diploma I/II/III	2074	3630	5704
Universitas	23009	22939	45948
Total	363193	234582	597775

Sumber: Kabupaten Mojokerto dalam Angka, 2022

Berdasarkan diatas, diketahui bahwa sebagian besar penduduk di Kabupaten Mojokerto bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dengan jumlah sebanyak 276.453 jiwa. Penduduk yang bekerja sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar di Kabupaten Mojokerto juga masih tergolong banyak, yaitu 56.916 jiwa hingga tahun 2021. Sementara Jumlah Penduduk Usia > 15 Tahun Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 paling tinggi berada pada sekolah SD sebanyak 197.532 jiwa dan paling sedikit berada pada jenjang diploma sebanyak 5704 jiwa.

4.3.4 Kesejahteraan

Aspek kesejahteraan ditinjau berdasarkan strata keluarga sejatera di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009, Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan Kabupaten Mojokerto dalam Angka Tahun 2022, uraian strata/tingkatan keluarga sejahtera di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.20 Perkembangan Strata Keluarga Sejahtera di Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Kecamatan	Kepala Keluarga	Pra-Sejahtera	KS-I	KS-II, III, dst.
Jatirejo	13.647	3.477	2.009	7.920
Gondang	12.438	2.885	3.071	7.424
Pacet	19.004	3.144	2.987	11.627
Trawas	10.568	2.248	2.141	5.484

Kecamatan	Kepala Keluarga	Pra-Sejahtera	KS-I	KS-II, III, dst.
Ngoro	25.364	5.357	5.346	14.937
Pungging	24.794	3.754	6.755	12.589
Kutorejo	19.606	4.120	4.557	11.315
Mojosari	24.254	5.376	5.053	13.484
Bangsar	14.715	1.543	3.341	10.916
Mojoanyar	15.519	955	1.218	12.577
Dlanggu	17.285	2.078	2.608	12.488
Puri	22.138	3.170	4.832	13.279
Trowulan	21.791	4.264	4.293	13.162
Sooko	20.843	1.599	2.273	16.823
Gedek	17.394	3.946	4.374	8.538
Kemlagi	17.712	5.951	3.170	8.508
Jetis	23.645	6.163	4.334	14.238
Dawar Blandong	15.971	6.862	2.698	6.874
Kabupaten Mojokerto	336.688	66.892	65.060	60.511

Sumber: Kabupaten Mojokerto dalam Angka, 2021

Berdasarkan Tabel diatas, jumlah keluarga yang masih tergolong sebagai keluarga Pra-Sejahtera di Kabupaten Mojokerto adalah sebanyak 66.892 keluarga, lebih banyak dibandingkan Keluarga Sejahtera I, II, dan III. Keluarga Pra-Sejahtera merupakan keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu dari 6 (enam) kebutuhan dasar keluarga yang menjadi indikator Keluarga Sejahtera.

Tabel 4. 22 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Mojokerto, 2018 - 2021

Jenis Kelamin	2018	2019	2020	2021
Laki-Laki	97,8	97,6	96,55	96,58
Perempuan	94,22	94,29	94,23	93,60

Sumber: Kabupaten Mojokerto dalam Angka, 2022

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa jenis kelamin laki-laki pada tahun 2021 memiliki angka melek huruf lebih tinggi yaitu 96,58% jika dibandingkan perempuan yaitu sebesar 93,60%.

4.3.5 Karakteristik Perekonomian

Kondisi ekonomi menguraikan mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PDRB dan PAD menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di Kabupaten Mojokerto dalam suatu periode tertentu.

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

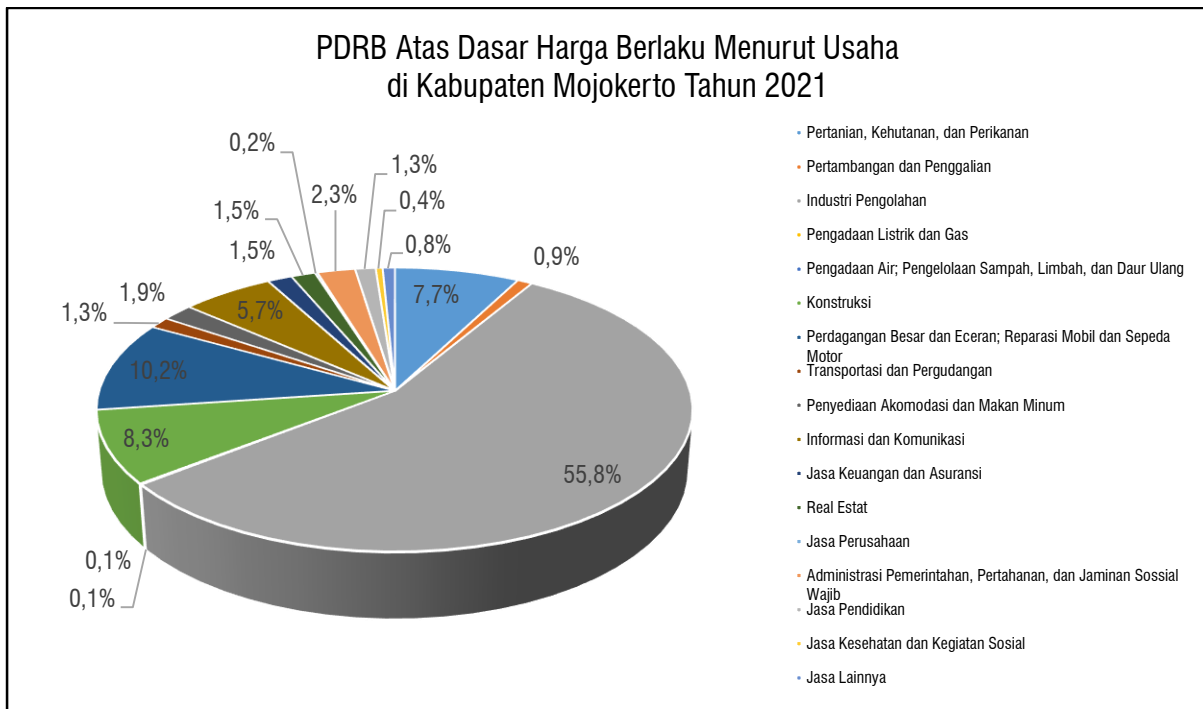
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengukur besarnya produksi atau output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah selama periode waktu

tertentu. Lapangan usaha yang turut menyumbang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto, di antaranya adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, dan sebagainya. Secara lebih terperinci, berikut uraian PDRB Kabupaten Mojokerto menurut lapangan kerja tahun 2021.

Tabel 4. 23 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar rupiah) di Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Lapangan Usaha	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.687,59
Pertambangan dan Penggalian	813,57
Industri Pengolahan	48.666,27
Pengadaan Listrik dan Gas	55,18
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	54,43
Konstruksi	7.270,48
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.927,12
Transportasi dan Pergudangan	1.134,75
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.693,35
Informasi dan Komunikasi	4.989,62
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.331,08
Real Estat	1.298,16
Jasa Perusahaan	137,4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.028,53
Jasa Pendidikan	1.098,45
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	372,14
Jasa Lainnya	658,62
Produk Domestik Bruto	87.261,74

Sumber: Kabupaten Mojokerto dalam Angka, 2022



Gambar 4. 2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) di Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Sumber: Kabupaten Mojokerto dalam Angka, 2022

Berdasarkan diagram pada gambar diatas, diketahui bahwa lapangan usaha yang memiliki angka produksi terbesar di Kabupaten Mojokerto adalah industri pengolahan, yaitu dengan pemasukan sebesar 48.666,27 miliar rupiah atau sekitar 55,8% dari pemasukan seluruh lapangan usaha di Kabupaten Mojokerto.

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari pajak, retribusi, dan usaha yang dimiliki oleh daerah. Berikut merupakan uraian PAD Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021.

Tabel 4. 24 Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Sumber Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Pajak Daerah	306.396.955.181	350.609.777.259
Retribusi Daerah	34.227.129.625	28.868.620.373,73
Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	5.421.264.092	5.421.264.091,85
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	194.075.023.083	240.442.038.754,85
Pendapatan Asli Daerah	540.120.371.981	625.341.700.479,43

Sumber: Kabupaten Mojokerto dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi PAD di Kabupaten Mojokerto telah melampaui target yang ditetapkan, di mana target pendapatan pada tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 540.120.371.981,00, sementara dalam realisasinya, PAD Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 mencapai Rp 625.341.700.49,43.

4.3.6 Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tahun 2022 persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan jika dibanding tahun 2021, yaitu dari 10,54% naik menjadi 9,71%. Tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 sebesar 5,78% dengan jumlah penduduk sebanyak 65,03 ribu jiwa. Berikut merupakan garis kemiskinan, jumlah, dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2013-2021.

Tabel 4. 25 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk miskin (%)
2013	116,6	10,99
2014	113,3	10,56
2015	113,86	10,57

2016	115,38	10,61
2017	111,79	10,19
2018	111,55	10,08
2019	108,81	9,75
2020	118,8	10,57
2021	120,54	10,64
2022	111,03	9,71

Sumber: Indikator Kesejahteraan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

Persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2013-2021 mengalami peningkatan dan penurunan. Penurunan paling signifikan dapat dilihat di tahun 2018-2019 dari 10,08% menjadi 9,75%. Pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin dari 10,57% menjadi 10,64%. Jumlah penduduk miskin tahun 2022 sekitar 111,03 ribu orang, turun dari tahun sebelumnya yang berjumlah 120,54 ribu orang. Dengan demikian, persentase penduduk miskin Kabupaten Mojokerto turun dari 10,62 persen menjadi 9,71 persen.

4.4 Gambaran Umum Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Mojokerto

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Komponen yang digunakan dalam menghitung IDG diantaranya adalah keterlibat perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan. Dengan demikian, arah dan perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut. Adapun berikut merupakan gambaran umum dari masing-masing komponen yang digunakan dalam perhitungan IDG di Kabupaten Mojokerto.

4.4.1 Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen

Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam menghitung indeks pemberdayaan gender (IDG) di Indonesia. Berdasarkan data dari World Bank, Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di dalam parlemen, hal tersebut menunjukkan partisipasi perempuan Indonesia di dalam parlemen masih rendah.



Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan CEIC mencatatkan persentase keterlibatan perempuan di parlemen sebesar 21,89%. Angka ini naik 3,7% dibandingkan tahun sebelumnya, akan tetapi partisipasi perempuan Indonesia belum menyentuh 30% sehingga masih perlunya peningkatan partisipasi perempuan dalam parlemen. Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan. Adapun di Provinsi Jawa Timur sendiri, partisipasi perempuan Jawa Timur di kursi parlemen masih terbilang cukup rendah. Hal tersebut dapat diketahui pada DPRD Jawa Timur Periode 2019-2024 keterwakilan perempuan dalam parlemen hanya terdapat 18 persen dari total akumulasi 120 anggota. Adapun tabel berikut merupakan gambaran umum persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen yang terdapat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 4. 26 Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2022

Provinsi / Kabupaten / Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	
	Tahun 2021	Tahun 2022
Provinsi Jawa Timur	17.50	19.17
Pacitan	15.56	15.56
Ponorogo	13.33	13.33
Trenggalek	6.67	6.67
Tulungagung	12.00	14.00
Blitar	24.00	26.00
Kediri	22.00	22.00
Malang	22.00	22.00
Lumajang	16.00	16.00
Jember	16.00	18.00
Banyuwangi	26.00	26.00
Bondowoso	13.33	13.33
Situbondo	31.11	31.11
Probolinggo	26.00	26.00
Pasuruan	12.00	12.00
Sidoarjo	16.00	16.00
Mojokerto	28.57	28.57
Jombang	28.00	24.00
Nganjuk	26.00	26.00
Madiun	22.22	22.22
Magetan	15.56	15.56



Provinsi / Kabupaten / Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	
	Tahun 2021	Tahun 2022
Ngawi	22.22	26.67
Bojonegoro	10.00	10.00
Tuban	14.00	14.00
Lamongan	24.00	24.00
Gresik	20.41	18.00
Bangkalan	8.00	8.00
Sampang	6.67	6.67
Pamekasan	4.44	4.44
Sumenep	8.33	8.33
Kota Kediri	36.67	36.67
Kota Blitar	12.00	12.00
Kota Malang	26.67	26.67
Kota Probolinggo	13.33	13.33
Kota Pasuruan	3.33	3.33
Kota Mojokerto	16.00	16.00
Kota Madiun	23.33	23.33
Kota Surabaya	32.00	32.00
Kota Batu	16.67	16.67

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022

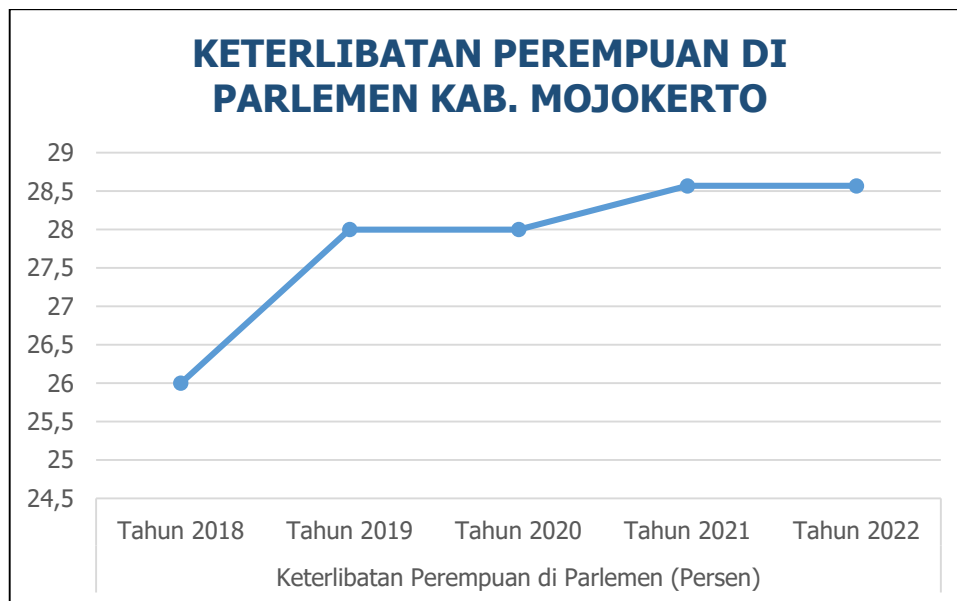
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan yang pada Tahun 2021 hanya sebesar 17,50% menjadi 19,17% pada Tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam parlemen telah mengalami kemajuan atau peningkatan, akan tetapi angka tersebut masih terbilang rendah dikarenakan belum mencapai angka persentase 30% sesuai dengan yang pemberlakuan kuota keterwakilan perempuan dalam parlemen yang telah ditetapkan. Apabila di bandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, angka keterlibatan perempuan di Provinsi Jawa Timur masih terbilang rendah terlebih jika dibandingkan dengan provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki angka persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen tertinggi di Indonesia yakni mencapai angka 33,33%. Adapun untuk Kabupaten Mojokerto sendiri memiliki angka persentase keterlibatan parlemen di Tahun 2022 sebesar 28,57%. Angka tersebut sama dengan angka keterlibatan parlemen di Kabupaten Mojokerto pada tahun sebelumnya yakni Tahun 2021. Angka persentase tersebut terbilang cukup tinggi apabila di bandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Timur meskipun apabila di bandingkan

dengan Kota Kediri yang memiliki angka persentase sebesar 36,67%, Kabupaten Mojokerto masih cukup rendah. Adapun selengkapnya keterlibatan perempuan dalam parlemen di Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 27 Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen Kabupaten Mojokerto

Provinsi / Kabupaten / Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)				
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
MOJOKERTO	26	28	28	28,57	28,57

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022



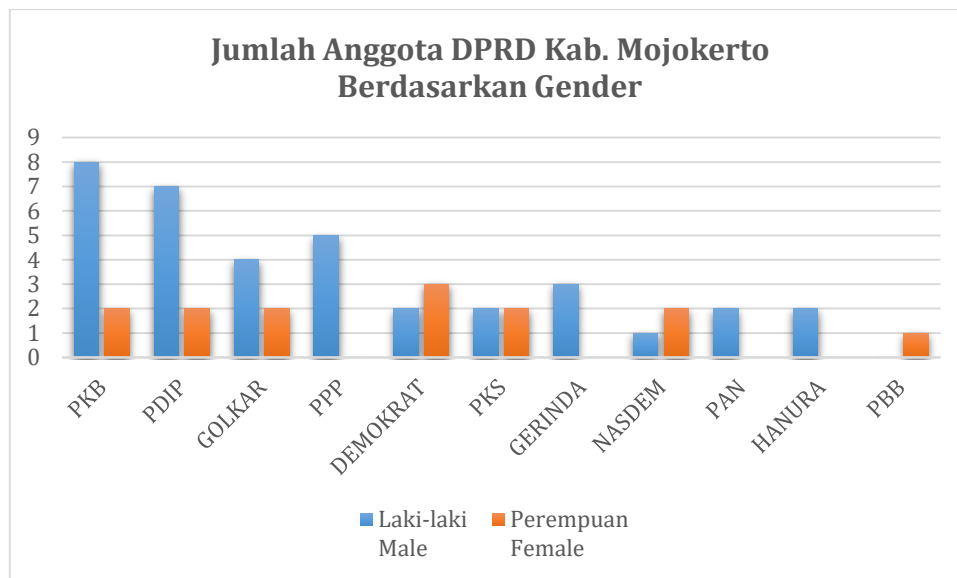
Gambar 4. 3 Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Mojokerto
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022

Berdasarkan pada tabel dan gambar diatas dapat diketahui bahwa, keterlibatan perempuan dalam parlemen di Kabupaten Mojokerto terus mengalami kenaikan pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat dari angka persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen di Kabupaten Mojokerto yang terus mengalami peningkatan dari angka 26% pada Tahun 2018 meningkat menjadi 28% pada tahun 2019-2020 hingga pada Tahun 2021-2022 menjadi 28,57%. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan peran atau partisipasi perempuan dalam parlemen di Kabupaten Mojokerto. Angka tersebut perlu ditingkatkan kembali agar dapat mencapai angka 30% sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender sesuai dengan amanat pemerintah pusat. Adapun berikut merupakan data tambahan terkait jumlah anggota dprd di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 4. 28 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

Partai Politik <i>Political Parties</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
PKB	8	2	10
PDIP	7	2	9
GOLKAR	4	2	6
PPP	5	-	5
DEMOKRAT	2	3	5
PKS	2	2	4
GERINDA	3	-	3
NASDEM	1	2	3
PAN	2	-	2
HANURA	2	-	2
PBB	-	1	1
Kabupaten Mojokerto	36	14	50

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto, 2022



Gambar 4. 4 Jumlah Anggota DPRD di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022

4.4.2 Perempuan sebagai Tenaga Profesional

Perempuan sebagai tenaga profesional merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam menghitung indeks pemberdayaan gender (IDG) di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, persentase perempuan yang menjadi tenaga kerja profesional di Indonesia telah mencapai 49,99%. Nilai tersebut naik 2,52% poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 48,76%. Angka tersebut menunjukkan bahwa perempuan saat ini telah lebih mudah mendapatkan haknya untuk bekerja apabila dibandingkan dengan tahun-tahun lampau dimana perempuan masih sangat kesulitan

mendapatkan haknya untuk bekerja karena terbelenggu budaya patriarki. Namun seiring dengan besarnya gerakan emansipasi, persentase perempuan pekerja pun terus meningkat. Adapun berikut merupakan tabel gambaran umum angka persentase perempuan sebagai tenaga profesional Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 4. 29 Perempuan sebagai Tenaga Profesional di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2022

Provinsi / Kabupaten / Kota	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	
	Tahun 2021	Tahun 2022
Provinsi Jawa Timur	50.73	49.41
Pacitan	46.45	67.18
Ponorogo	54.15	45.68
Trenggalek	56.74	47.68
Tulungagung	60.80	53.01
Blitar	56.51	54.67
Kediri	56.45	48.68
Malang	49.21	51.79
Lumajang	50.92	52.62
Jember	46.55	49.25
Banyuwangi	47.70	51.47
Bondowoso	38.75	50.19
Situbondo	49.66	48.69
Probolinggo	49.77	41.46
Pasuruan	57.47	47.52
Sidoarjo	51.30	44.97
Mojokerto	50.92	51.01
Jombang	54.40	50.84
Nganjuk	47.20	49.92
Madiun	59.18	50.58
Magetan	55.54	54.36
Ngawi	52.93	56.98
Bojonegoro	48.78	46.95
Tuban	58.80	53.42
Lamongan	47.66	51.83
Gresik	48.48	45.37
Bangkalan	41.50	51.68
Sampang	42.68	28.55
Pamekasan	35.00	43.97
Sumenep	42.47	35.12
Kota Kediri	47.48	52.10
Kota Blitar	50.71	45.84
Kota Malang	57.80	53.83

Provinsi / Kabupaten / Kota	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	
	Tahun 2021	Tahun 2022
Kota Probolinggo	46.77	51.61
Kota Pasuruan	47.13	57.95
Kota Mojokerto	59.56	49.82
Kota Madiun	55.13	51.56
Kota Surabaya	49.99	50.70
Kota Batu	49.51	45.04

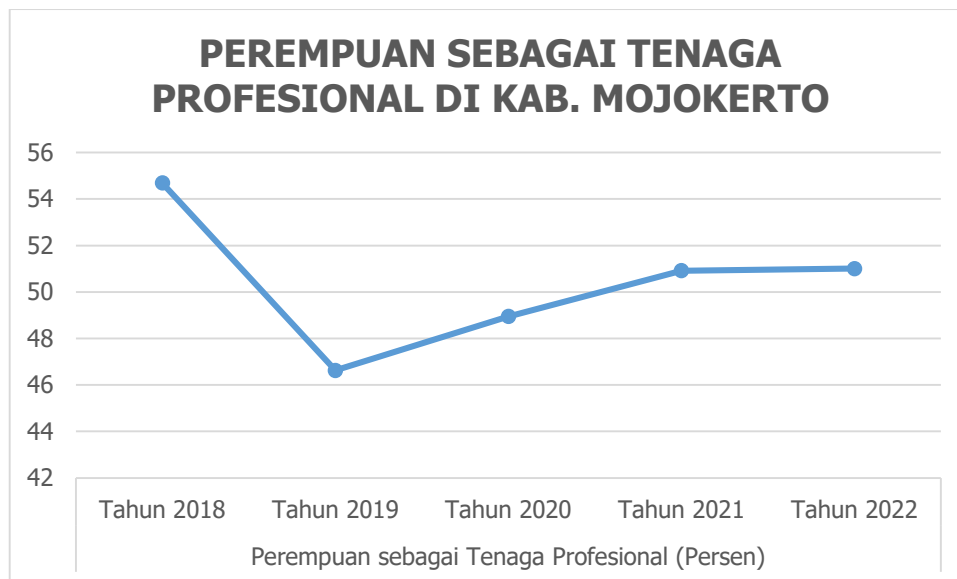
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2022

Pada provinsi Jawa Timur berdasarkan tabel diatas, angka persentase perempuan sebagai tenaga profesional mengalami penurunan dari angka 50,73% pada Tahun 2021 menjadi 49,41% pada Tahun 2022. Angka tersebut terbilang cukup kecil apabila dibandingkan dengan provinsi lain yang memiliki angka persentase perempuan sebagai tenaga profesional tinggi seperti provinsi Sumatera Barat dengan persentase perempuan sebagai tenaga kerja profesional tertinggi, yakni 59,09% sehingga masih perlunya program-program yang dapat meningkatkan angka persentase perempuan sebagai tenaga profesional di Provinsi Jawa Timur. Adapun untuk Kabupaten Mojokerto sendiri mengalami peningkatan dari Tahun 2021 sebesar 50,92% menjadi 51,01% pada Tahun 2022. Angka tersebut termasuk tinggi karena melebihi 50%, serta apabila di bandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Timur. Selengkapnya angka persentase perempuan sebagai tenaga profesional di Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 30 Perempuan Sebagai Tenaga Profesional di Kabupaten Mojokerto

Provinsi / Kabupaten / Kota	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)				
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Kabupaten Mojokerto	54,69	46,63	48,95	50,92	51,01

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022



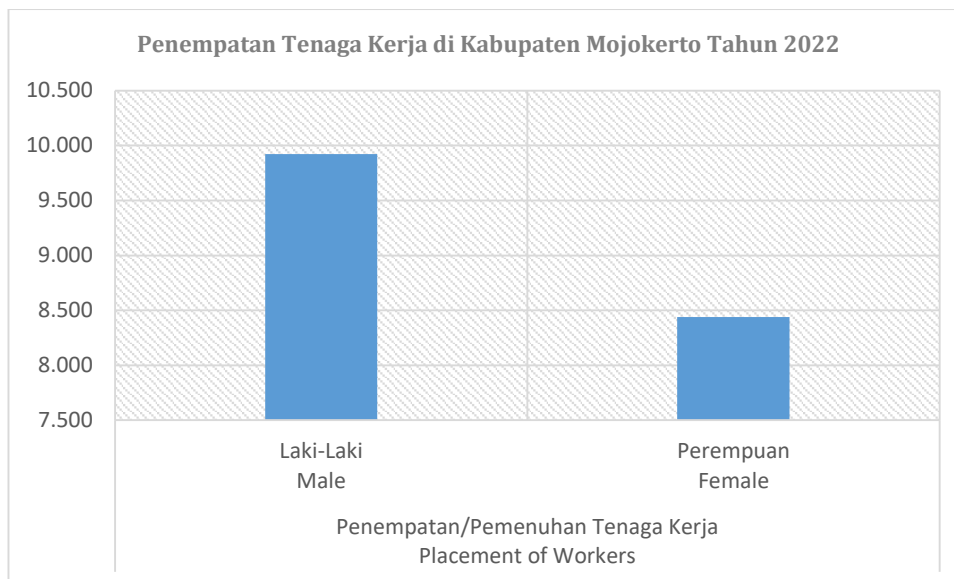
Gambar 4. 5 Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Mojokerto
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022

Berdasarkan tabel dan gambar diatas, diketahui bahwa angka persentase perempuan sebagai tenaga kerja profesional di Kab. Mojokerto mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Persentase perempuan sebagai tenaga profesional di Kabupaten Mojokerto sempat mengalami penurunan pada Tahun 2019 yang pada awalnya 54,69% menjadi 46,63% akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu kembali meningkat seperti pada Tahun 2020 menjadi sebesar 48,95%. Peningkatan angka persentase tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Mojokerto keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional sudah mulai berkembang atau meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan bekerja dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam pekerjaan sudah bukan hal yang mustahil lagi bagi perempuan di Kabupaten Mojokerto. Dengan pendidikan yang tinggi dan pengalaman yang banyak, seorang perempuan dapat mencapai target yang lebih tinggi dari laki-laki. Adapun berikut merupakan data tambahan terkait proporsi pemenuhan tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022.

Tabel 4. 31 Perempuan Sebagai Tenaga Profesional di Kabupaten Mojokerto

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja <i>Placement of Workers</i>		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
Mojokerto	9.923	8.439	18.362

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022



Gambar 4. 6 Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Mojokerto
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022

Berdasarkan data yang tertera pada tabel dan gambar diatas diketahui bahwa penempatan/pemenuhan tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022, laki-laki masih mendominasi dibandingkan perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran perempuan dalam tenaga kerja profesional di Kabupaten Mojokerto masih belum setara dengan laki-laki. Sehingga hal tersebut perlu di optimalkan kembali.

4.4.3 Sumbangan Pendapatan Perempuan

Sumbangan Pendapatan Perempuan merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam menghitung indeks pemberdayaan gender (IDG) di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, sumbangan pendapatan perempuan di Indonesia mencapai 37,17% pada 2022. Hal ini berarti perempuan Indonesia berkontribusi sebanyak 37,17% terhadap pendapatan keluarga. Apabila dibandingkan setahun sebelumnya, sumbangan pendapatan perempuan menurun 0,05 poin. Pada 2021, sumbangan pendapatan perempuan sebesar 37,22%. Provinsi Jawa Timur sendiri memiliki angka persentase sumbangan pendapatan perempuan mencapai angka 35,81% pada Tahun 2022 yang berarti perempuan di Jawa Timur berkontribusi sebanyak 37,17% terhadap pendapatan keluarga. Adapun selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 4. 32 Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kabupaten/Kota Provinsi
Jawa Timur Tahun 2021-2022**

Provinsi / Kabupaten / Kota	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	
	Tahun 2021	Tahun 2022
Jawa Timur	35.72	35.81
Pacitan	39.43	40.10
Ponorogo	35.99	35.67
Trenggalek	38.05	37.22
Tulungagung	38.16	38.50
Blitar	39.90	40.67
Kediri	31.21	31.89
Malang	37.12	36.44
Lumajang	23.98	23.48
Jember	31.19	30.88
Banyuwangi	31.37	30.70
Bondowoso	37.17	37.34
Situbondo	27.36	28.05
Probolinggo	25.42	25.27
Pasuruan	35.21	35.33
Sidoarjo	29.77	29.84
Mojokerto	35.01	34.94
Jombang	28.17	28.37
Nganjuk	25.64	26.11
Madiun	30.23	30.04
Magetan	38.33	38.99
Ngawi	32.32	32.21
Bojonegoro	26.68	26.57
Tuban	31.00	30.98
Lamongan	33.46	33.51
Gresik	31.41	31.61
Bangkalan	36.03	35.08
Sampang	30.82	29.94
Pamekasan	34.22	34.10
Sumenep	36.94	37.67
Kota Kediri	35.46	36.08
Kota Blitar	39.11	39.09
Kota Malang	34.69	34.81
Kota Probolinggo	31.09	31.18
Kota Pasuruan	31.84	31.82
Kota Mojokerto	37.35	37.25
Kota Madiun	37.65	38.42
Kota Surabaya	35.83	35.80
Kota Batu	30.05	29.95

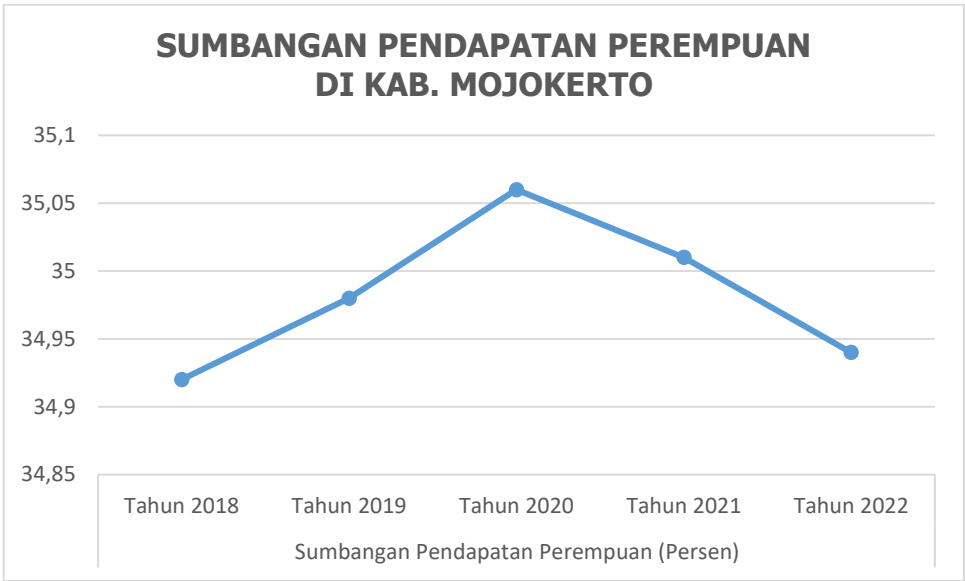
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki angka persentase sumbangan pendapatan perempuan mencapai angka 35,81% pada Tahun 2022. Hal tersebut mengalami kenaikan dari Tahun 2021 sebesar 0,09%. Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia seperti provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencapai 43,93% pada Tahun 2022, angka tersebut masih cenderung kecil. Kabupaten Mojokerto sendiri pada Tahun 2022 memiliki angka persentase sumbangan pendapatan perempuan mencapai 34,94. Angka tersebut mengalami penurunan di banding tahun-tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 4. 33 Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kabupaten Mojokerto

Provinsi / Kabupaten / Kota	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)				
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Kabupaten Mojokerto	34,92	34,98	35,06	35,01	34,94

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022



Gambar 4. 7 Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kabupaten Mojokerto
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022

Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Dimana pada Tahun 2020 memiliki angka persentase sebesar 35,05% turun menjadi 35,01% pada Tahun 2021. Penurunan tersebut juga terjadi kembali pada tahun 2022 yang memiliki angka persentase sebesar 34,94%. Hal tersebut menunjukkan, di Kabupaten Mojokerto persentase sumbangan pendapatan kerja laki – laki lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan. Penghitungan pendapatan ini didasarkan pada upah buruh selain



pertanian.

4.5 Analisis Perkembangan IPG dan IDG di Kabupaten Mojokerto

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi indikator utama untuk mengukur pencapaian kesetaraan gender. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, skor IPG nasional sebesar 91,63 poin pada 2022. Angka tersebut meningkat 0,4% atau 0,36 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 91,27 poin. Provinsi Jawa Timur sendiri telah mencetak Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2022 di atas rata-rata nasional. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), capaian kinerja kesetaraan gender Jawa Timur tahun 2022 mencetak angka 92,08 sementara angka nasional berada di 91,63. Apabila dibandingkan dengan provinsi DI Yogyakarta yang memiliki skor IPG tertinggi di Indonesia sebesar 94,99 pada Tahun 2022, Jawa Timur tidak terlalu jauh dan masih mendekati angka tersebut. Adapun dalam sub bab ini akan di paparkan terkait perkembangan IPG dan IDG di Kabupaten Mojokerto, selengkapnya sebagai berikut.

4.5.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mojokerto

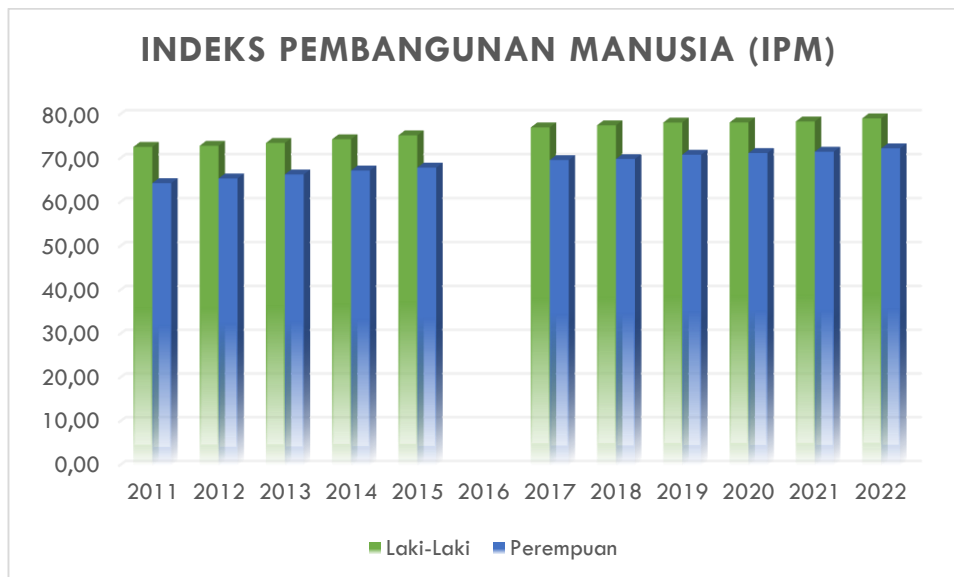
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan layak. Untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggunakan beberapa indikator seperti Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita. IPM ini nantinya akan menjadi dasar dari pembentukan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Mojokerto. Adapun berikut merupakan gambaran dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 4. 34 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mojokerto

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	IPM
2011	72,76	64,53	63,97
2012	73,02	65,58	64,71
2013	73,66	66,50	65,2
2014	74,51	67,40	70,22
2015	75,39	68,05	70,85
2016	-	-	71,38
2017	77,20	69,78	72,36

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	IPM
2018	77,68	70,03	72,64
2019	78,31	70,99	73,53
2020	78,33	71,36	73,83
2021	78,56	71,68	74,15
2022	79,27	72,43	74,89

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 4. 8 IPM di Kabupaten Mojokerto
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mojokerto dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Pada Tahun 2022 angka IPM mencapai angka 74,89. IPM di Kabupaten Mojokerto masih memiliki ketimpangan antara Angka IPM Laki-laki (79,27) dan Perempuan (72,43). Di Kabupaten Mojokerto cenderung lebih tinggi angka IPM laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat dari masing-masing indikator penyusun IPM yang diantaranya adalah sebagai berikut.

A. Angka Harapan Hidup (AHH)

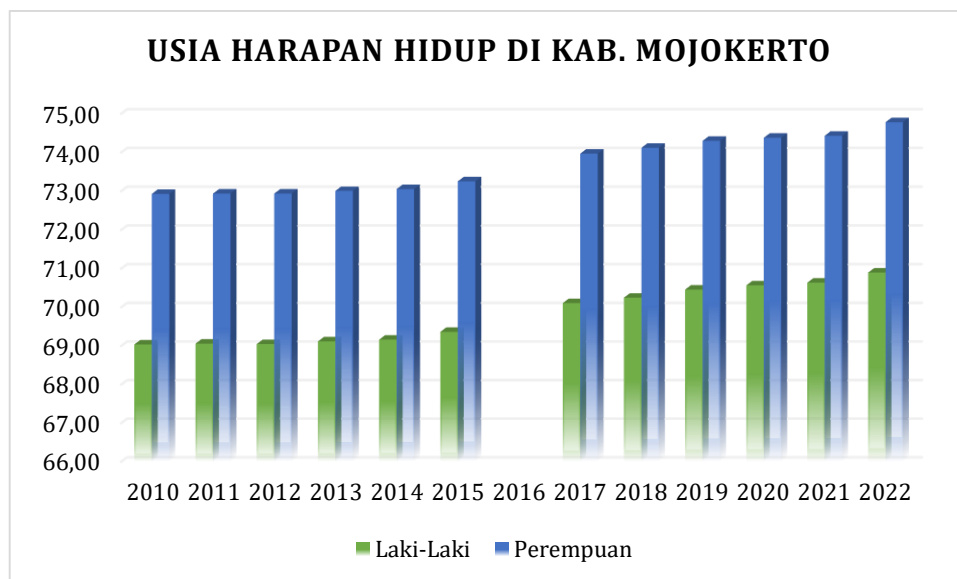
Angka Harapan Hidup atau disingkat AHH merupakan rata-rata jumlah tahun hidup yang diperkirakan dapat ditempuh oleh seseorang. AHH merupakan indikator yang mencerminkan taraf kesehatan masyarakat di suatu wilayah sebagai dampak dari pelaksanaan hasil pembangunan khususnya di bidang kesehatan. AHH merupakan salah satu faktor yang membentuk angka indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Mojokerto. Berikut merupakan indikator pertama yakni indikator usia harapan hidup atau angka harapan hidup (AHH) di Kabupaten Mojokerto yang

dapat dilihat pada tabel dan bagan dibawah ini.

Tabel 4. 35 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Mojokerto

Indikator	Kab. Mojokerto			Rasio
	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	
Angka Harapan Hidup	2010	69,04	72,93	0,95
	2011	69,06	72,94	0,95
	2012	69,05	72,94	0,95
	2013	69,12	73,01	0,95
	2014	69,16	73,05	0,95
	2015	69,36	73,25	0,95
	2016			
	2017	70,11	73,97	0,95
	2018	70,25	74,12	0,95
	2019	70,46	74,30	0,95
	2020	70,57	74,38	0,95
	2021	70,64	74,43	0,95
	2022	70,90	74,78	0,95

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022



Gambar 4. 9 Grafik Usia Harapan Hidup di Kabupaten Mojokerto

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa angka harapan hidup (AHH) di Kabupaten Mojokerto, perempuan memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan laki-laki. Rasio antara angka harapan hidup laki-laki dan perempuan juga memiliki nilai sebesar 0,95 yang menunjukkan bahwa angka harapan hidup perempuan dan laki-laki hampir setara karena hampir menunjukkan angka 1. Angka usia harapan hidup di Kabupaten Mojokerto dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Hal tersebut juga selaras dengan peningkatan

angka harapan hidup di Negara Indonesia. Angka usia harapan hidup di Kabupaten Mojokerto berkisar antara 65-75 tahun, hal tersebut juga telah mendekati angka usia harapan hidup di Negara Indonesia. Peningkatan angka usia harapan hidup menandakan bahwa terciptanya kehidupan yang lebih baik, pencegahan serta perawatan kesehatan sudah membaik, meningkatnya pendidikan dan pendapatan perkapita. Angka harapan hidup sendiri dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat, sehingga semakin tinggi angka harapan hidup maka menandakan bahwa semakin baik pula kehidupan pada wilayah kabupaten/kota tersebut.

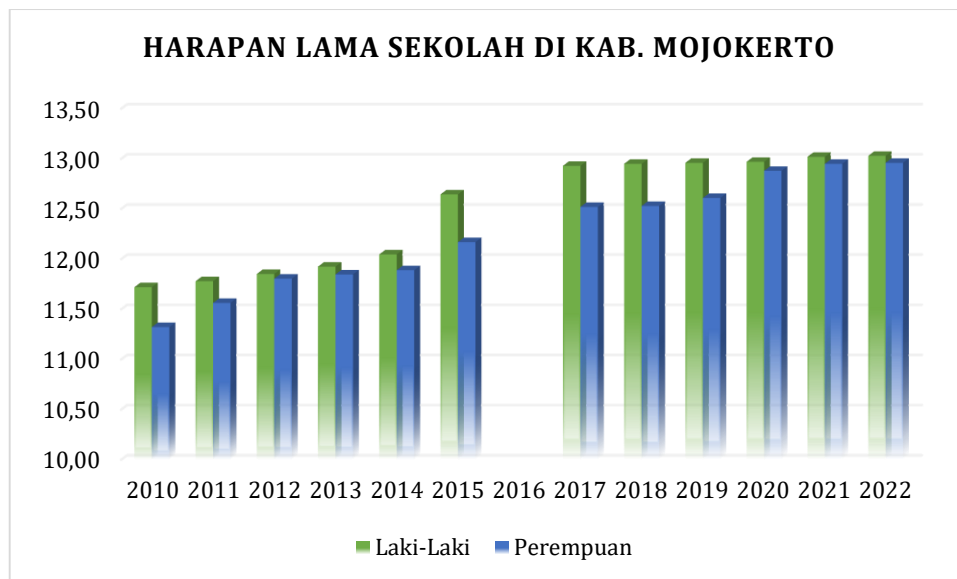
B. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah atau HLS adalah salah satu faktor penyusun angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Mojokerto. Adapun berikut akan dipaparkan terkait angka harapan lama sekolah di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 4. 36 Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Mojokerto

Indikator	Kab. Mojokerto			Rasio
	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	
Harapan Lama Sekolah	2010	11,72	11,32	0,97
	2011	11,78	11,56	0,98
	2012	11,85	11,81	1,00
	2013	11,93	11,85	0,99
	2014	12,05	11,89	0,99
	2015	12,65	12,17	0,96
	2016	-	-	-
	2017	12,93	12,52	0,97
	2018	12,95	12,53	0,97
	2019	12,96	12,61	0,97
	2020	12,97	12,88	0,99
	2021	13,02	12,95	0,99
	2022	13,03	12,96	0,99

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022



Gambar 4. 10 Grafik Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Mojokerto
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2022 masih terdapat ketimpangan angka harapan lama sekolah antara laki-laki dan perempuan. Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Mojokerto apabila dibandingkan dengan angka harapan lama sekolah nasional (13,08) pada Tahun 2022 adalah sudah hampir mendekati hanya perlu di tingkatkan lagi agar HLS di Kabupaten Mojokerto tidak cenderung stagnan dan dapat mencapai angka harapan lama sekolah nasional ataupun melebihinya. Rasio dari angka harapan lama sekolah (HLS) di Kabupaten Mojokerto rata-rata mencapai angka 0,95 setiap tahunnya sehinggamenunjukkan harapan lama sekolah antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Mojokerto hampir setara meskipun masih terdapat ketimpangan diantara laki-laki dan perempuan yang harus di selesaikan. Selanjutnya akan dibahas indikator IPG yang ke-3 yakni indikator rata-rata lama sekolah.

C. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

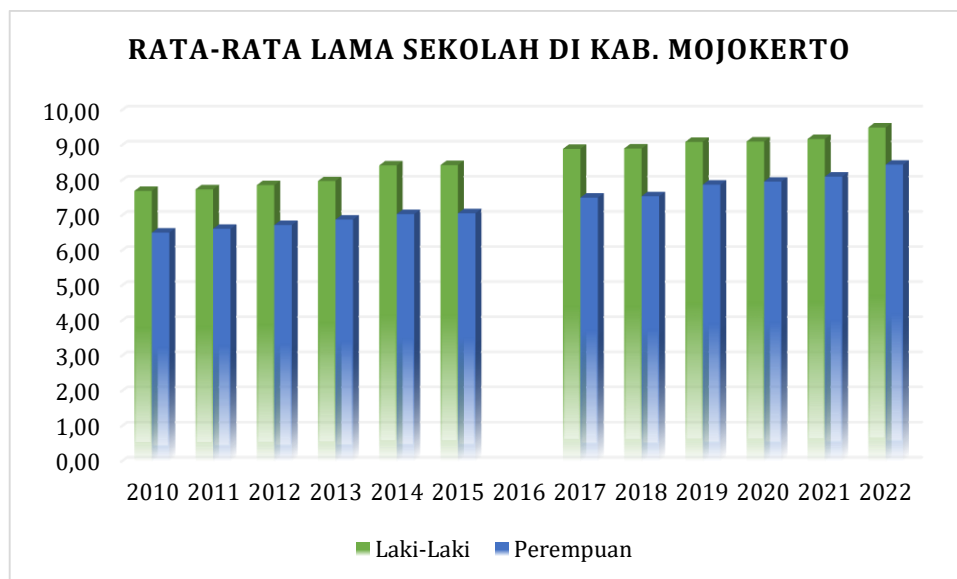
Rata-Rata Lama Sekolah Adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator yang digunakan atau yang menyusun indeks pembangunan gender atau IPG di Kabupaten

Mojokerto. Adapun berikut akan dipaparkan terkait rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 4. 37 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Mojokerto

Indikator	Kab. Mojokerto			Rasio
	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	
Rata-Rata Lama Sekolah	2010	7,71	6,52	0,85
	2011	7,76	6,63	0,85
	2012	7,88	6,74	0,86
	2013	8,00	6,90	0,86
	2014	8,44	7,05	0,84
	2015	8,45	7,07	0,84
	2016	-	-	-
	2017	8,91	7,52	0,84
	2018	8,92	7,56	0,85
	2019	9,11	7,89	0,87
	2020	9,12	7,98	0,88
	2021	9,19	8,12	0,88
	2022	9,52	8,46	0,89

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022



Gambar 4. 11 Grafik Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Mojokerto
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2022 masih terdapat ketimpangan angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Mojokerto yang ditunjukkan oleh rasio rata-rata lama sekolah yang hanya berkisar pada angka 0,85. Angka tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan antara rata-rata lama sekolah (RLS)



laki-laki dan perempuan cukup tinggi. Di Kabupaten Mojokerto rata-rata penduduk lelaki lebih memiliki angka RLS yang lebih tinggi di bandingkan perempuan. Meskipun angka RLS di Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya mengalami kenaikan, akan tetapi masih harus terus di tingkat kembali agar ketimpangan angka RLS antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Mojokerto lekas terselesaikan. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan aspek pengeluaran pendapatan perkapita di Kabupaten Mojokerto.

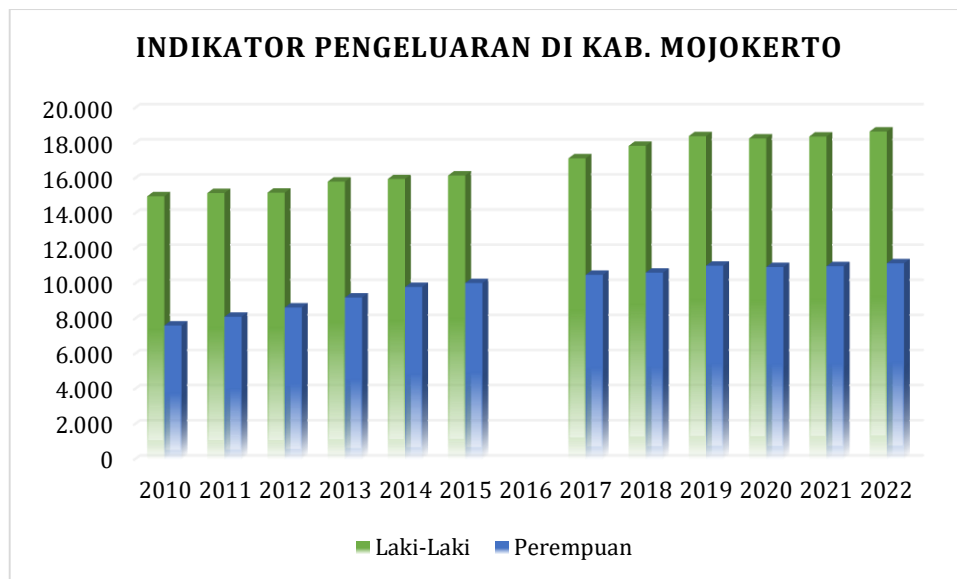
D. Pengeluaran

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga tersebut. Pengeluaran per kapita menjadi salah satu indikator pendukung dalam pembentukan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Mojokerto. Adapun berikut merupakan pengeluaran per kapita di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 4. 38 Pengeluaran di Kabupaten Mojokerto

Indikator	Kab. Mojokerto			Rasio
	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	
Pengeluaran	2010	15.004	7.646	0,51
	2011	15.190	8.144	0,54
	2012	15.210	8.673	0,57
	2013	15.838	9.238	0,58
	2014	15.992	9.838	0,62
	2015	16.190	10.066	0,62
	2016	-	-	-
	2017	17.166	10.530	0,61
	2018	17.878	10.656	0,60
	2019	18.428	11.051	0,60
	2020	18.299	10.974	0,60
	2021	18.409	11.027	0,60
	2022	18.693	11.192	0,60

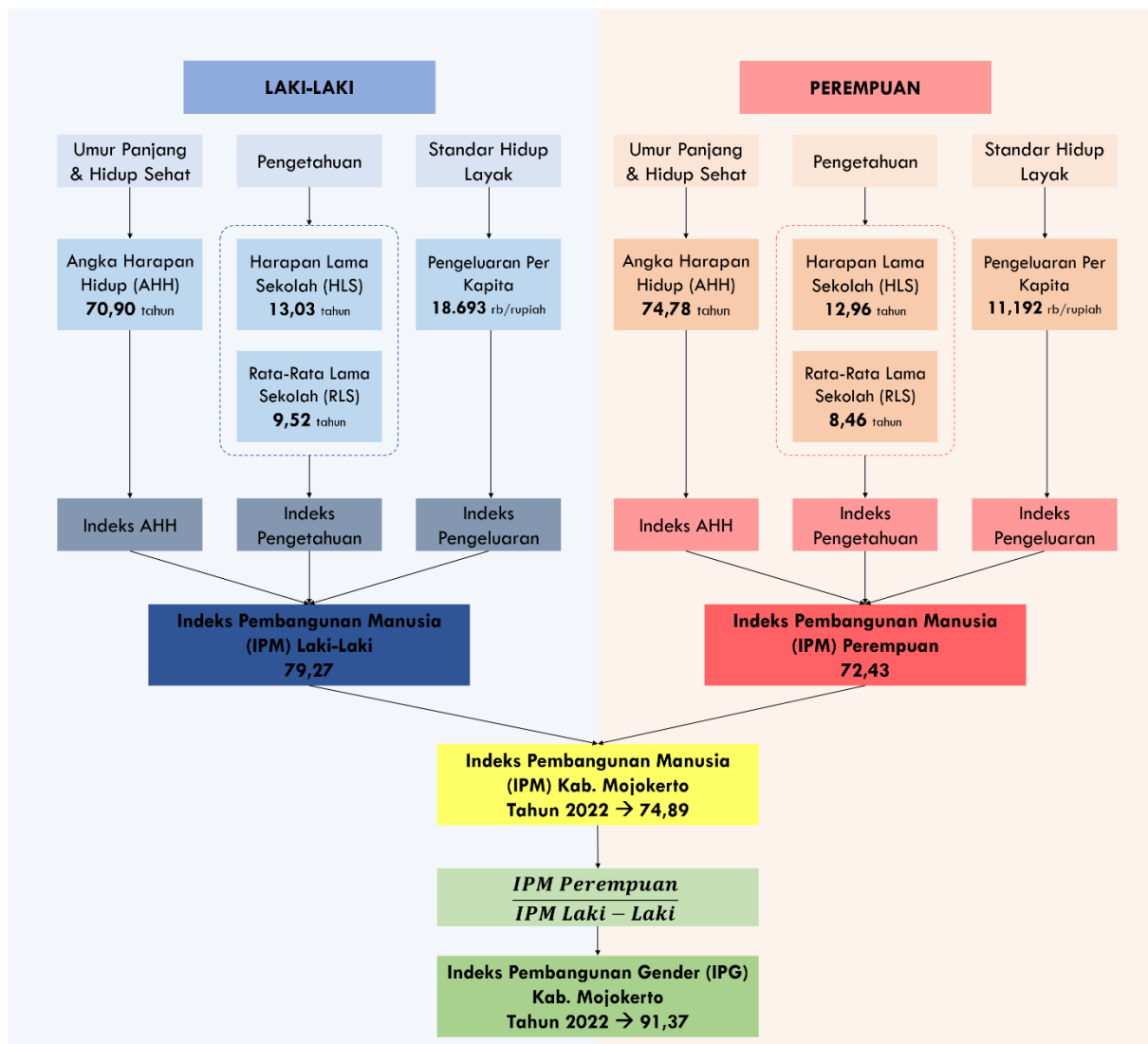
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022



Gambar 4. 12 Grafik Pengeluaran di Kabupaten Mojokerto
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022

Indikator pengeluaran yang dimaksud dalam hal ini adalah pengeluaran per kapita. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Berdasarkan data tabel dan grafik diatas diketahui bahwa rasio pengeluaran per kapita di Kabupaten Mojokerto memiliki rasio yang paling rendah apabila dibandingkan dengan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni hanya sekitar 0,5. Hal tersebut menunjukkan masih terjadi ketimpangan yang cukup tinggi antara pengeluaran laki-laki dan perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Mojokerto mayoritas pengeluaran per kapita masih banyak yang dikeluarkan oleh pihak lelaki.

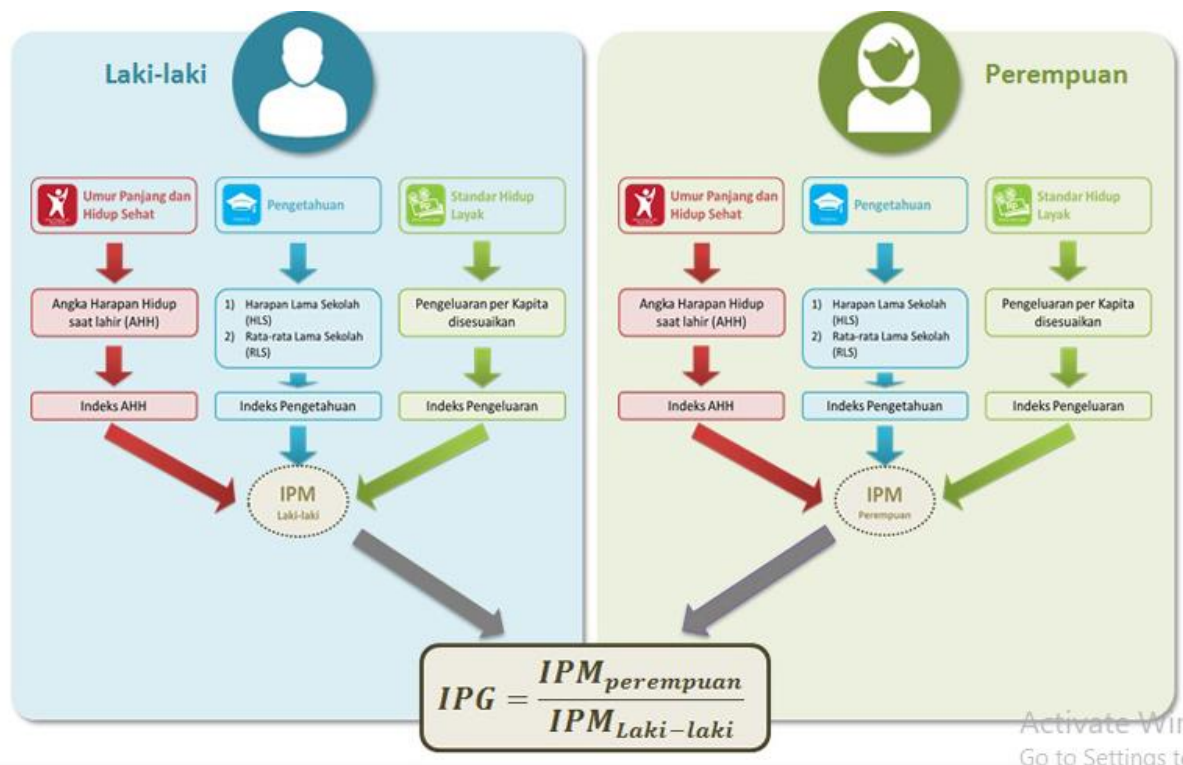
Berdasarkan beberapa penjabaran diatas terkait Indeks Pembangunan Manusia maka berikut merupakan skema kesimpulan yang dapat mempermudah membaca data dan keterkaitan IPM dan IPG.



Gambar 4. 13 Skema IPM
Sumber: Hasil Analisis, 2023

4.5.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Mojokerto

Dalam upaya mengukur besarnya ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses hasil pembangunan; pendidikan dan lain-lain, dapat menggunakan salah satu indikator yang dirilis oleh BPS, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI). Adapun berikut merupakan rumus dalam mengukur IPG



Gambar 4. 14 Rumus Penyusun IPG
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022

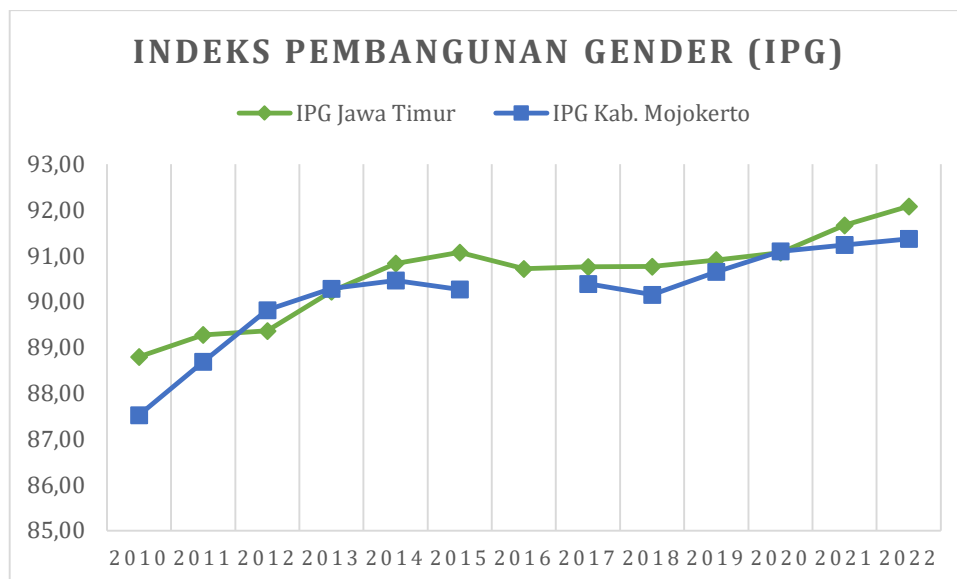
IPG disusun oleh IPM dimana berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa IPG diperoleh dari IPM Perempuan / IPM Laki-Laki. Dalam melakukan pengukuran IPG apabila hasil menunjukkan Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. Berikut merupakan tabel dan bagan yang akan menggambarkan kondisi Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu Tahun 2010-2022 serta akan di sandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu yang sama.

Tabel 4. 39 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Mojokerto & Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2022

Tahun	IPG Jawa Timur	IPG Kab. Mojokerto
2010	88,80	87,52
2011	89,28	88,69
2012	89,36	89,82
2013	90,22	90,28
2014	90,83	90,46
2015	91,07	90,27

Tahun	IPG Jawa Timur	IPG Kab. Mojokerto
2016	90,72	
2017	90,76	90,39
2018	90,77	90,15
2019	90,91	90,65
2020	91,07	91,10
2021	91,67	91,24
2022	92,08	91,37

Sumber : BPS Jawa Timur, 2022



Gambar 4. 15 Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Mojokerto & Provinsi Jawa Timur
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022

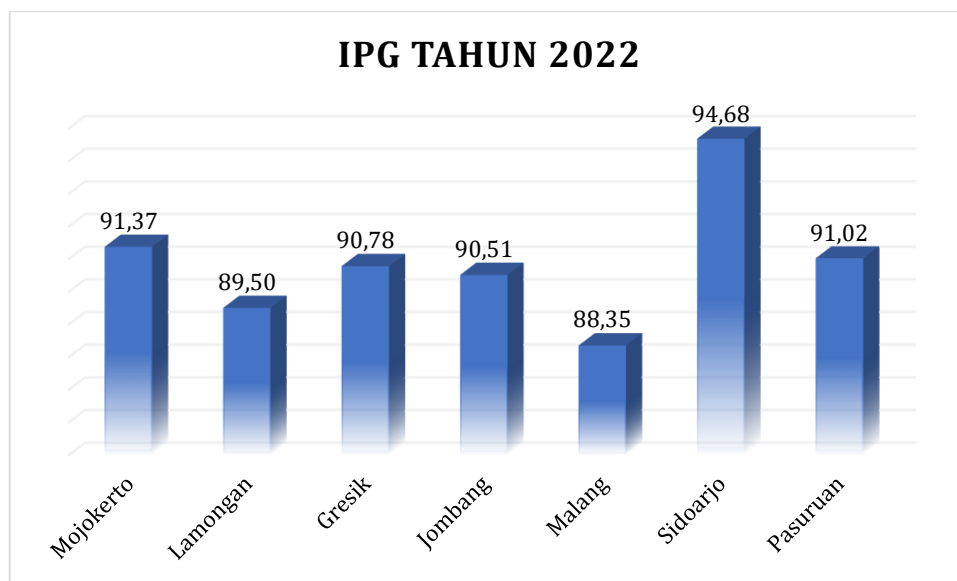
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai IPG dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan terkecuali pada Tahun 2017 ke 2018 yang mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2021, nilai IPG untuk Kabupaten Mojokerto adalah 91,24. Nilai indeks pembangunan gender (IPG) di Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan 0,14 poin dari tahun sebelumnya yaitu 91,10. Pada Tahun 2022, nilai IPG di Kabupaten Mojokerto kembali mengalami kenaikan dari tahun 2021. IPG ini menunjukkan bahwa sudah banyak perempuan di Kabupaten Mojokerto yang dapat mengakses pendidikan, memperoleh pendapatan, mengakses kesehatan dan lain sebagainya. Walaupun masih belum 100 persen, kesempatan bagi setiap perempuan untuk memperoleh pendidikan, penghasilan yang layak sudah terbuka lebar apabila dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Nilai IPG di Kabupaten Mojokerto apabila dibandingkan dengan IPG Jawa Timur pada Tahun 2022 masih terdapat ketimpangan, Kabupaten Mojokerto memiliki nilai IPG yang masih dibawah Jawa Timur. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto

akan dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut.

Tabel 4. 40 Perbandingan IPG Kabupaten Mojokerto dengan IPG Kabupaten yang berbatasan langsung Tahun 2022

Kabupaten	IPG Tahun 2022
Mojokerto	91,37
Lamongan	89,50
Gresik	90,78
Jombang	90,51
Malang	88,35
Sidoarjo	94,68
Pasuruan	91,02

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022



Gambar 4. 16 Perbandingan IPG di Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten yang Berbatasan
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Mojokerto memiliki nilai IPG yang cukup tinggi diantara Kabupaten yang berbatasan secara administratif. Meskipun Kabupaten Mojokerto bukan merupakan Kabupaten atau Kota yang memiliki nilai IPG tertinggi, akan tetapi nilai IPG di Kabupaten Mojokerto sudah terbilang cukup baik hanya saja perlu di optimalkan agar dapat mencapai angka yang sempurna. Pengoptimalan tersebut dapat melalui aspek-aspek indikator pendukung dalam penyusunan IPG. Adapun selengkapnya adalah tabel indikator penyusun IPG pada Tahun 2022 di Kabupaten Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur.

Tabel 4. 41 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Indikator	Kab. Mojokerto		Prov. Jawa Timur	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Usia Harapan Hidup	70,90	74,78	69,81	73,71
Harapan Lama Sekolah	13,03	12,96	13,26	13,59
Rata-Rata Lama Sekolah	9,52	8,46	8,42	7,65
Pengeluaran	18,69	11,19	17,23	10,29
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,27	72,43	76,81	70,73
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,24	1,00	91,67	15

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022

Berdasarkan tabel indikator penyusun IPG pada Tahun 2022 di Kabupaten Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur, di Kabupaten Mojokerto indikator penyusun IPG yang memiliki ketimpangan tertinggi terletak pada indikator pengeluaran. Dimana laki-laki memiliki angka pengeluaran yang jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan yakni sebesar 18,69 yang memiliki selisih 7,50 poin. Selanjutnya akan dilakukan pembahasa dari penjabaran masing-masing indikator yang digunakan dalam penyusunan IPG di Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu 2010-2022.

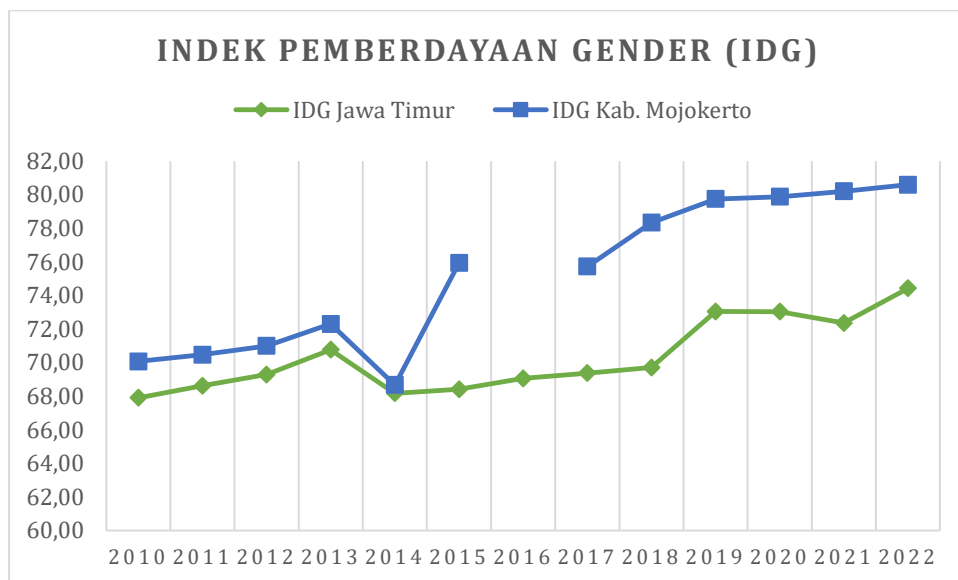
4.5.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Mojokerto

Setelah adanya pembahasan analisa kondisi terkait Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada sub bab sebelumnya, terdapat juga Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Tiga indikator penyusun IDG adalah keterlibatan perempuan di parlemen, pekerjaan dan pendapatan. Adapun berikut merupakan kondisi dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 42 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2021

Tahun	IDG Jawa Timur	IDG Kab. Mojokerto
2010	67,91	70,07
2011	68,62	70,47
2012	69,29	71,00
2013	70,77	72,30
2014	68,17	68,67
2015	68,41	75,93
2016	69,06	-
2017	69,37	75,72
2018	69,71	78,33
2019	73,04	79,74
2020	73,03	79,87
2021	72,36	80,20
2022	74,42	80,59

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022



Gambar 4. 17 IDG di Kabupaten Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022

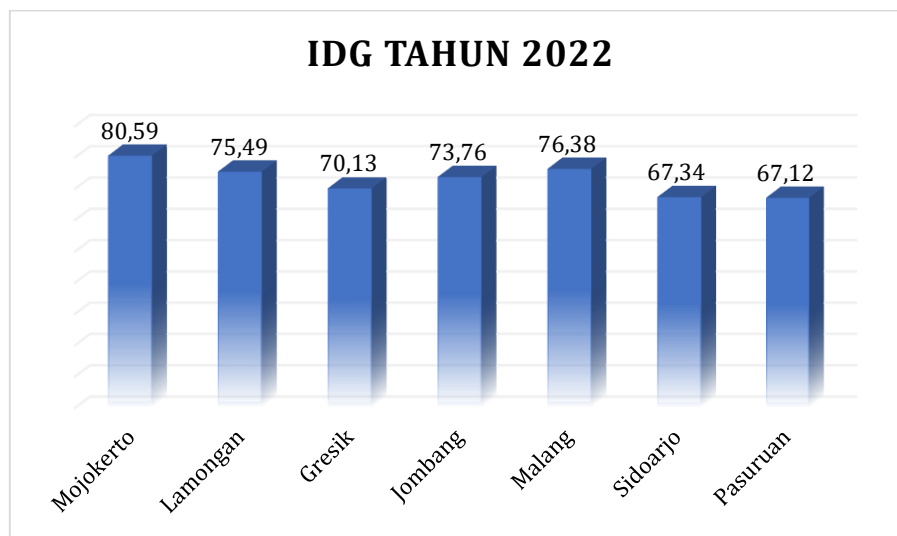
Berdasarkan tabel dan grafik diatas diketahui bahwa pada Tahun 2022 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni dari 80,20 menjadi 80,59. Angka IDG tersebut juga lebih tinggi dari angka IDG yang terdapat di Provinsi Jawa Timur. Adapun berdasarkan tabel diketahui bahwa dari tahun ke tahun IDG yang terdapat di Kabupaten Mojokerto mengalami fluktuatif mulai dari peningkatan hingga penurunan angka IDG. Penurunan IDG terbesar dalam kurun waktu Tahun 2010-2022 di Kabupaten Mojokerto terdapat pada tahun 2013 ke 2014, akan tetapi setelah itu IDG di Kabupaten Mojokerto

mengalami peningkatan angka persentase yang tinggi. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten atau Kota yang berbatasan langsung secara administratif dengan Kabupaten Mojokerto, maka akan menghasilkan gambaran sebagai berikut.

Tabel 4. 43 Perbandingan IDG dengan Kabupaten/Kota disekitarnya Tahun 2022

Kabupaten	IDG Tahun 2022
Mojokerto	80,59
Lamongan	75,49
Gresik	70,13
Jombang	73,76
Malang	76,38
Sidoarjo	67,34
Pasuruan	67,12

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022



Gambar 4. 18 Perbandingan IDG Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten Yang Berbatasan
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022

Berdasarkan tabel dan grafik diatas diketahui bahwa pada Tahun 2022, IDG Kabupaten Mojokerto memiliki nilai IDG yang paling tinggi apabila di sandingkan dengan nilai IDG Kabupaten yang berbatasan langsung secara administratif. Meskipun begitu, Kabupaten Mojokerto masih harus meningkatkan nilai IDG agar dapat mencapai angka yang sempurna. Pengomptimalan nilai IDG tersebut dapat dilakukan melalui komponen indikator pendukung dalam penyusunannya. Adapun selanjutnya akan di lakukan pembahasan dari indikator penyusun IDG di Kabupaten Mojokerto yang dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut.

Tabel 4. 44 Indikator Penyusun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Mojokerto berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021 dan 2022

Tahun	Keterlibatan Perempuan Dalam Parlemen		Perempuan Sebagai Tenaga Profesional		Sumbangan Pendapatan Perempuan	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
2021	71,43	28,57	49,08	50,92	64,99	35,01
2022	71,43	28,57	48,99	51,01	65,06	34,94

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto, 2022



Gambar 4. 19 Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen di Kabupaten Mojokerto
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022



Gambar 4. 20 Perempuan sebagai Tenaga Profesional di Kabupaten Mojokerto
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022



Gambar 4. 21 Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kabupaten Mojokerto
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022

Berdasarkan ke-3 indikator penyusun IDG diketahui di Kabupaten Mojokerto pada indikator keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan cenderung lebih rendah dari laki-laki. Hal tersebut ditunjukkan dengan angka partisipasi perempuan dalam parlemen sebesar 28,57%. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih sedikit yang menjadi wakil rakyat. Kabupaten Mojokerto sendiri memiliki angka persentase keterlibatan parlemen di Tahun 2021 dan 2022 sebesar 28,57%, sehingga masih diperlukan peningkatan peran keterlibatan perempuan dalam parlemen di Kabupaten Mojokerto agar dapat mengejar angka minimum yang ditetapkan oleh pemerintah nasional (30%). Perempuan cenderung lebih unggul pada indikator ke-2 yakni keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional yang dapat dilihat dari angka persentase di tahun 2022, perempuan memiliki angka persentase sebesar 51,01%. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan bekerja dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam pekerjaan sudah bukan hal yang mustahil lagi bagi perempuan. Dengan pendidikan yang tinggi dan pengalaman yang banyak, seorang perempuan dapat mencapai target yang lebih tinggi dari laki-laki. Dalam kenyataannya masih banyak pekerjaan atau jabatan yang mengutamakan laki – laki sebagai pemegangnya. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan dari penjabaran masing-masing indikator yang digunakan dalam penyusunan IDG di Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu 2010-2022.

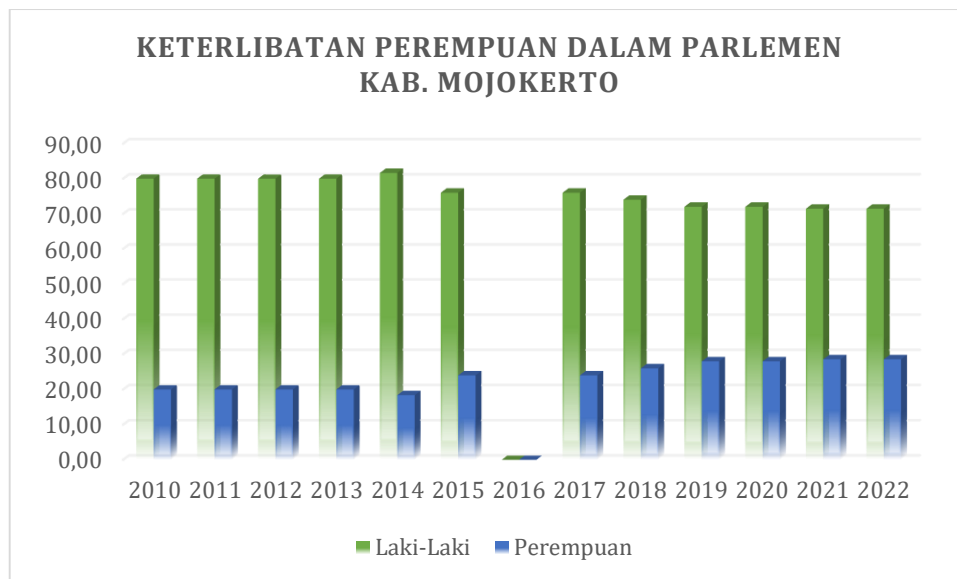
A. Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen

Komponen pembentuk IDG yaitu perempuan di parlemen diukur dari persentase perempuan yang menduduki kursi di DPRD. Untuk mencapai hal ini pemerintah menetapkan quota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Penetapan kuota 30% perempuan dalam pemilu legislatif adalah sebuah *affirmative action* yang telah lama diperjuangkan oleh aktivis perempuan (Kertati, 2021). Capaian perempuan terlibat dalam parlemen Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2022. Selengkapnya dapat disimak pada table dan grafik berikut :

Tabel 4. 45 Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen di Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010-2022

Indikator	Tahun	Kabupaten Mojokerto		Rasio
		Laki-Laki	Perempuan	
Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen	2010	80,00	20,00	0,25
	2011	80,00	20,00	0,25
	2012	80,00	20,00	0,25
	2013	80,00	20,00	0,25
	2014	81,63	18,37	0,23
	2015	76,00	24,00	0,32
	2016	-	-	-
	2017	76,00	24,00	0,32
	2018	74,00	26,00	0,35
	2019	72,00	28,00	0,39
	2020	72,00	28,00	0,39
	2021	71,43	28,57	0,40
	2022	71,43	28,57	0,40

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022



Gambar 4. 22 Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen di Kabupaten Mojokerto
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut dapat dilihat bahwa kondisi keterlibatan perempuan dalam parlemen di Kabupaten Mojokerto berdinamika dari tahun ke tahun. Angka keterlibatan Perempuan dalam parlemen mengalami kestabilan selama 4 tahun yaitu dari tahun 2010 hingga 2013 sebesar 20%. Kemudian angka tersebut mengalami penurunan menjadi 18,37% pada tahun 2014 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Angkat tertinggi keterlibatan Perempuan dalam parlemen terjadi pada tahun 2021 dan 2022 yaitu sebesar 28,57%. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih relative sedikit yang menjadi wakil rakyat. Sehingga masih diperlukan peningkatan peran keterlibatan perempuan dalam parlemen di Kabupaten Mojokerto agar dapat mengejar angka minimum yang ditetapkan oleh pemerintah nasional (30%). Apabila kuota Perempuan yang telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003 mampu dicapai secara optimal, tentu akan membawa dampak positif dalam pemberdayaan perempuan karena kebijakan-kebijakan yang dibuat akan lebih memperhatikan isu-isu gender.

B. Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional

Indikator lain yang juga digunakan dalam mengukur indeks komposit IDG yaitu persentase keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional. Indikator ini menunjukkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan ekonomi dan sosial. Keterlibatan perempuan di posisi ini memberikan gambaran kemajuan terhadap peranan

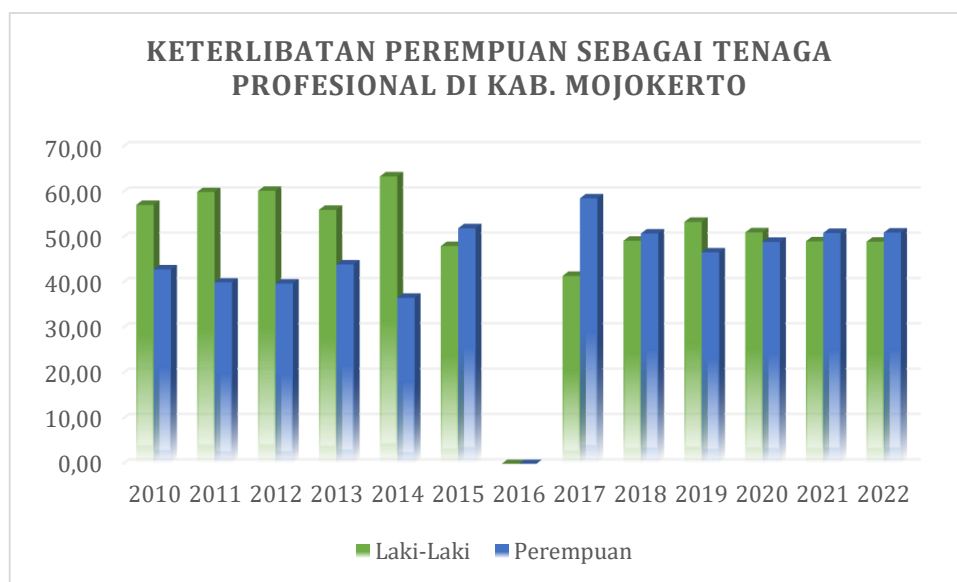


perempuan, mengingat selama ini perempuan hanya dipandang sebagai makhluk berurusan dengan pekerjaan rumah tangga. Indikator ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan indikator IDG lainnya. Berikut merupakan capaian keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 4. 46 Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional di Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010-2022

Indikator	Tahun	Kabupaten Mojokerto		Rasio
		Laki-Laki	Perempuan	
Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional	2010	57,12	42,88	0,75
	2011	59,99	40,01	0,67
	2012	60,24	39,76	0,66
	2013	56,03	43,97	0,78
	2014	63,41	36,59	0,58
	2015	48,04	51,96	1,08
	2016	-	-	-
	2017	41,43	58,57	1,41
	2018	49,20	50,80	1,03
	2019	53,37	46,63	0,87
	2020	51,05	48,95	0,96
	2021	49,08	50,92	1,04
	2022	48,99	51,01	1,04

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022



Gambar 4. 23 Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional Di Kabupaten Mojokerto
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022

Persentase keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional di Kabupaten Mojokerto naik dari 48,95% pada tahun 2020 menjadi 50,92% pada tahun 2021. Pada Tahun 2022 juga kembali mengalami kenaikan hingga mencapai angka 51,01%.

Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 58,57% melebihi presentase keterlibatan laki-laki sebagai tenaga profesional. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan bekerja dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam pekerjaan sudah bukan hal yang mustahil lagi bagi perempuan. Dengan pendidikan yang tinggi dan pengalaman yang banyak, seorang perempuan dapat mencapai target yang lebih tinggi dari laki-laki. Dalam kenyataannya masih banyak pekerjaan atau jabatan yang mengutamakan laki – laki sebagai pemegangnya.

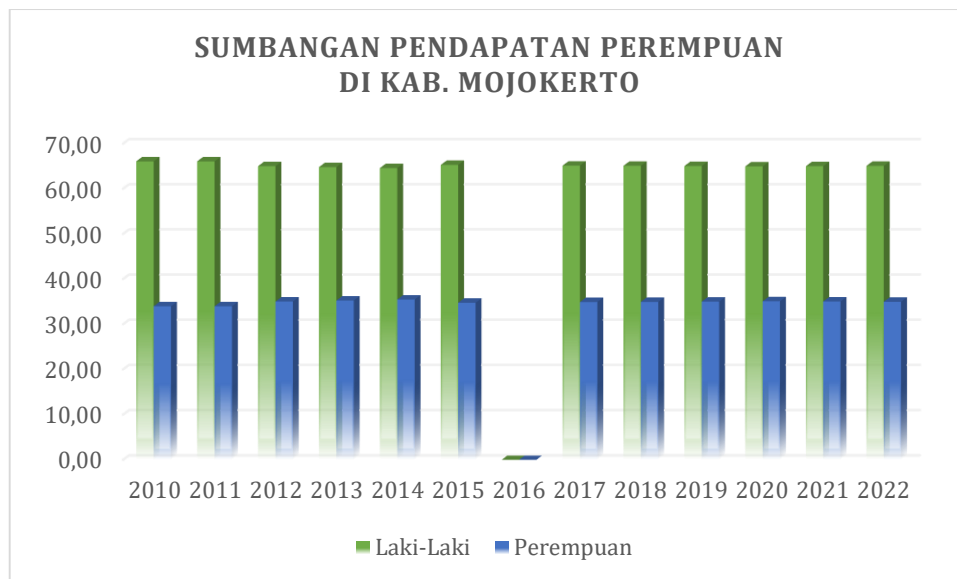
C. Sumbangan Pendapatan Perempuan

Indikator ketiga IDG adalah sumbangan dalam pendapatan kerja. Berbanding terbalik dengan keterlibatan perempuan dalam pekerjaan, persentase sumbangan pendapatan kerja laki – laki lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan. Lebih tingginya nilai partisipasi wanita menjadi tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan dari pada nilai proporsi wanita di pendapatan kerja menunjukkan bahwa upah yang diterima wanita pada bidang pekerjaannya tidak sebanyak laki-laki. Di sisi lain, secara kodrati, wanita memiliki tanggung jawab di ranah domestik dan kondisi fisik wanita cenderung lebih lemah dibanding dengan laki-laki. Hal itu turut mempengaruhi perbedaan jumlah jam kerja serta jumlah penghasilan antara laki-laki dan perempuan. Presentase capaian sumbangan pendapatan perempuan di Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada table dan grafik berikut.

Tabel 4. 47 Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010-2022

Indikator	Tahun	Kabupaten Mojokerto		Rasio
		Laki-Laki	Perempuan	
Sumbangan Pendapatan Perempuan	2010	66,05	33,95	0,51
	2011	66,05	33,95	0,51
	2012	64,99	35,01	0,54
	2013	64,78	35,22	0,54
	2014	64,57	35,43	0,55
	2015	65,27	34,73	0,53
	2016	-	-	-
	2017	65,11	34,89	0,54
	2018	65,08	34,92	0,54
	2019	65,02	34,98	0,54
	2020	64,94	35,06	0,54
	2021	64,99	35,01	0,54
	2022	65,06	34,94	0,54

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022



Gambar 4. 24 Sumbangan Pendapatan Perempuan Di Kabupaten Mojokerto
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022

Berdasarkan tabel dan grafik diatas presentase perubahan sumbangan pendapatan perempuan tidak mengalami perubahan yang signifikan namun selalu meningkat setiap tahunnya. Sumbangan pendapatan perempuan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 35,43%, sedangkan sumbangan pendapatan terendah terjadi pada tahun 2010 dan 2011 yaitu sebesar 33,95%. Pada tahun 2020, perempuan di Kabupaten Mojokerto menyumbang 35,06 persen pendapatan kerja. Sedangkan tahun 2021 turun menjadi 35,01 persen. Pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 34,94%. Penghitungan pendapatan ini didasarkan pada upah buruh selain pertanian. Berdasarkan dari dua komponen pembentuk indeks pemberdayaan gender (keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan dalam pendapatan kerja) dapat disimpulkan bahwa, walaupun sudah banyak perempuan di Kabupaten Mojokerto yang menduduki jabatan yang tinggi tetapi pendapatan yang didapatkan masih jauh jika dibandingkan dengan laki-laki. Dengan jabatan yang sama, bisa saja gaji yang diterima perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki.

4.6 Analisis Ketimpangan Gender di Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, terdapat data terkait masing-masing dari indikator penyusun indeks pembangunan dan pemberdayaan gender (IPG) dan (IDG). Berdasarkan indikator tersebut dapat dilihat



bahwa terdapat beberapa ketimpangan gender, yang dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4. 48 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

Indikator	Kab. Mojokerto		Prov. Jawa Timur	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Usia Harapan Hidup	70,90	74,78	69,81	73,71
Harapan Lama Sekolah	13,03	12,96	13,26	13,59
Rata-Rata Lama Sekolah	9,52	8,46	8,42	7,65
Pengeluaran	18,69	11,19	17,23	10,29
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,27	72,43	76,81	70,73
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,24	1,00	91,67	15

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022

Berdasarkan tabel indikator penyusun IPG diatas, diketahui ketimpangan sebagian besar terjadi pada perempuan. Pada tabel dapat dilihat bahwa angka pada indikator usia harapan hidup perempuan merupakan satu-satunya indikator dimana perempuan memiliki angka persentase lebih tinggi dibandingkan pada laki-laki. Hal tersebut secara ilmiah dijelaskan bahwa perempuan memiliki dua kromosom X (XX), sedangkan pria hanya memiliki satu kromosom X (XY). Kromosom ini turut mendukung kerja sistem imun pada tubuh. Oleh sebab itu, wanita dianggap lebih tahan terhadap kerusakan (mutasi) kromosom karena memiliki cadangan kromosom X, sedangkan pria tidak sehingga angka harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada laki-laki adalah hal yang sangat wajar. Selanjutnya apabila melihat indikator yang lain seperti, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran, perempuan cenderung memiliki angka yang lebih kecil apabila di bandingkan dengan laki-laki.

Pada indikator harapan lama sekolah, perempuan memiliki nilai yang lebih kecil dan masih timpang dengan laki-laki. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan komponen IPM perempuan yang lambat dibandingkan dengan laki-laki, terutama pada komponen harapan lama sekolah (HLS) sehingga hal tersebut mempengaruhi IPG di Kabupaten Mojokerto. Ketimpangan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan.

Selanjutnya pada indikator rata-rata lama sekolah (RLS), diketahui di Kabupaten Mojokerto perempuan memiliki angka nilai RLS yang lebih rendah

dibanding dengan laki-laki. Sehingga hal itu menunjukkan bahwa, penduduk perempuan cenderung memiliki masa studi yang singkat apabila dibandingkan dengan laki-laki di Kabupaten Mojokerto. Hal tersebut juga selaras dengan apa yang terjadi di Indonesia, Data Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2017 menunjukkan, tahun 2016, rata-rata lama penduduk perempuan sekolah hanya selama 7,5 tahun. Cukup berbeda jika dibandingkan dengan laki-laki yang bersekolah selama 8,41 tahun. Artinya, perempuan di Indonesia rata-rata bersekolah hanya sampai kelas 8 (SMP). Sedangkan secara rata-rata, laki-laki mengenyam pendidikan sekitar 1 tahun lebih lama dibandingkan perempuan atau hingga kelas 9 (SMP). Tetap saja, faktanya rata-rata penduduk Indonesia bahkan tidak lulus setingkat SMP. Ketimpangan tersebut cukuplah dapat menjadi catatan yang harus di evaluasi. Perbedaan capaian rata-rata lama sekolah antara laki-laki dan perempuan dipengaruhi banyak faktor yang saling terkait, salah satunya adalah budaya. Budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia menyebabkan anak perempuan lebih dikesampingkan untuk mendapatkan pendidikan dibandingkan anak laki-laki. Meski demikian, setidaknya perempuan semakin sadar untuk mengakses pendidikan dan bersekolah, yang ditunjukkan dari angka rata-rata lama sekolah pada perempuan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Indikator selanjutnya adalah indikator pengeluaran. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pengeluaran laki-laki lebih besar dibanding pengeluaran perempuan. Hal ini juga masih dalam pengaruh budaya patriarki yang terdapat di masyarakat. Selanjutnya apabila dilihat dari sisi indeks pemberdayaan gender (IDG), ketimpangan antara laki-laki dan perempuan juga masih terlihat cukup besar. Hal tersebut dapat dilihat dari keterlibatan perempuan dalam parlemen dapat dilihat dari persentase jumlah perempuan yang tergabung menjadi anggota DPR di Kabupaten Mojokerto. Di Kabupaten Mojokerto sendiri, terdapat 28,57% perempuan yang terlibat dalam parlemen. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih sedikit yang menjadi wakil rakyat.

Selanjutnya apabila ditinjau dari indikator ke-2 dalam IDG, keterlibatan perempuan dalam menduduki jabatan dalam pekerjaan di Kabupaten Mojokerto memiliki persentase sebesar 50,92%. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa kesempatan bekerja dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam pekerjaan sudah bukan hal yang mustahil lagi bagi perempuan sehingga hal tersebut perlu dipertahankan dan

ditingkatkan. Pada indikator ketiga IDG yakni sumbangan dalam pendapatan kerja. Berbanding terbalik dengan keterlibatan perempuan dalam pekerjaan, persentase sumbangan pendapatan kerja laki – laki lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan. Pada tahun 2020, perempuan di Kabupaten Mojokerto menyumbang 35,06 persen pendapatan kerja. Sedangkan tahun 2021 turun menjadi 35,01 persen. Hal ini juga perlu di evaluasi kembali agar ketimpangan dalam indikator ini cepat terselesaikan. Berdasarkan komponen pembentuk indeks pemberdayaan gender (IDG) ini dapat disimpulkan bahwa, walaupun sudah banyak perempuan di Kabupaten Mojokerto yang menduduki jabatan yang tinggi tetapi pendapatan yang didapatkan masih jauh jika dibandingkan dengan laki-laki. Dengan jabatan yang sama, bisa saja gaji yang diterima perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki atau dapat dikatakan masih terdapat ketimpangan.

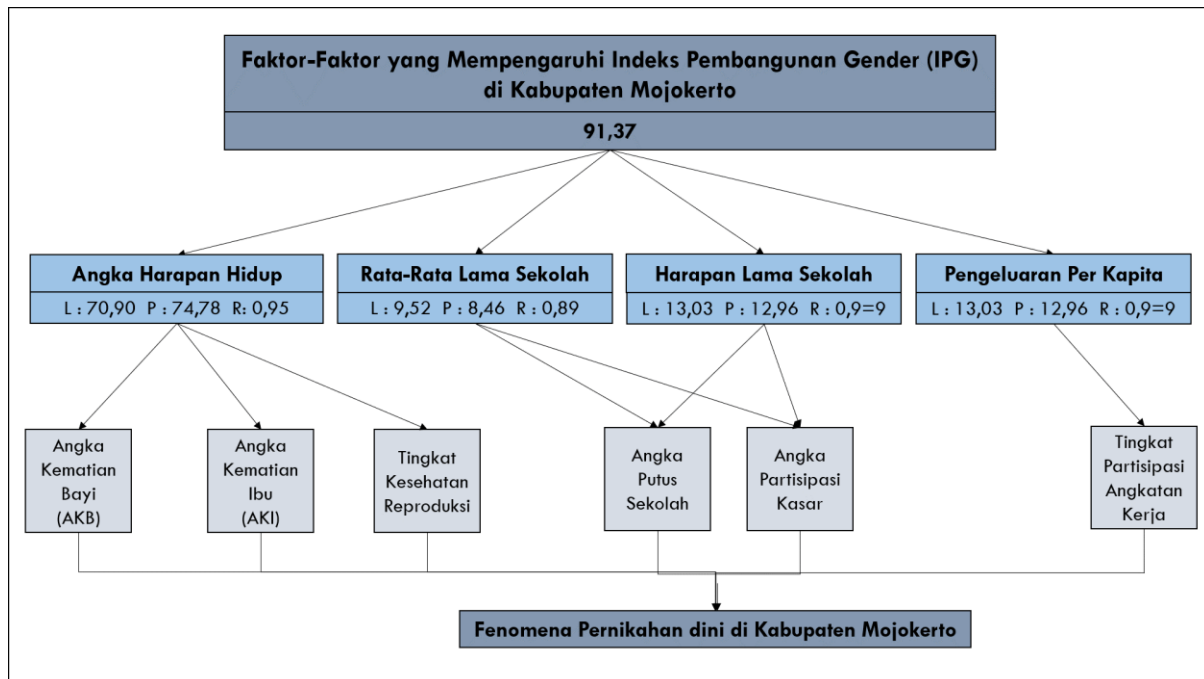
4.7 Analisis Faktor-Faktor yang Membentuk dan Mempengaruhi IPG dan IDG di Kabupaten Mojokerto

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan dua ukuran yang selalu digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan. Pada beberapa sub bab pembahasan di atas telah diketahui bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari tahun ke tahun mengalami perubahan angka, serta masih terdapat beberapa ketimpangan antara laki-laki dan perempuannya. Pada sub bab ini, akan dilakukan pembahasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Mojokerto.

4.7.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dan Membentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Untuk mempermudah memahami pembahasan terkait faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi IPG di Kabupaten Mojokerto yang mengarah pada masih maraknya pernikahan dini di Kabupaten Mojokerto. Untuk dapat meningkatkan angka IPG perempuan di Kabupaten Mojokerto dapat berfokus pada kasus pernikahan dini dengan menciptakan program meminimalkan angka pernikahan dini. Adapun

berikut bagan untuk dapat memudahkan dalam membaca faktor yang mempengaruhi IPG di Kabupaten Mojokerto.



Gambar 4. 25 Skema Faktor yang Mempengaruhi IPG di Kabupaten Mojokerto

Sumber: Hasil Analisis, 2023

A. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah sebuah konsep yang dipakai untuk menghitung berapa lama seseorang diharapkan hidup berdasarkan beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, Kesehatan, dan gaya hidup. Angka harapan hidup menjadi indikator yang penting dalam perencanaan pembangunan khususnya di bidang Kesehatan dan merupakan salah satu faktor yang cukup mempengaruhi IPG. Berdasarkan hasil wawancara kepada OPD yang terdapat di Kabupaten Mojokerto, faktor kesehatan terbilang cukup sering disebut dan cukup penting dalam mempengaruhi IPG. Untuk menghitung angka harapan hidup, digunakan data statistik terkait kematian dan kelahiran dalam populasi, dan biasanya menggunakan tabel mortalitas yang menunjukkan kemungkinan kematian pada setiap usia dalam suatu populasi. Angka harapan hidup dapat dipengaruhi oleh keadaan kesehatan, keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat. Kondisi kesehatan dapat berpengaruh terhadap meningkatnya harapan hidup masyarakat apabila terdapat kondisi kesehatan yang baik. Peningkatan harapan hidup disebabkan karena adanya fasilitas kesehatan yang lebih baik, pencegahan serta

perawatan ibu dengan baik. Apabila angka harapan hidup membaik maka indeks pembangunan gender (IPG) pun akan membaik pula.

Berdasarkan hasil wawancara pada OPD di Kabupaten Mojokerto, masih terdapat beberapa aspek dalam indikator angka harapan hidup yang harus diperhatikan agar dapat mengoptimalkan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Hal tersebut diantaranya adalah:

1. Angka Kematian Bayi

Secara teoritis, angka harapan hidup berhubungan erat dengan kematian bayi. Menurunnya angka kematian bayi akan menyebabkan meningkatkan angka harapan hidup. Pada Kabupaten Mojokerto, masih tercatat adanya 66 bayi yang meninggal dunia sepanjang Tahun 2023. Kematian tersebut mayoritas disebabkan oleh kondisi bayi yang mengalami berat badan lahir rendah (BBLR), apabila berat badan lahir bayi rendah hal tersebut berkaitan dengan gizi pada ibu hamil. Selain itu, terdapat pula bayi yang mengalami afeksia atau kekurangan oksigen pada pernapasan akibat terganggunya fungsi organ. Serta terlambat mendapatkan rujukan. Sehingga dengan adanya hal ini dapat dikatakan bahwa angka kematian bayi masih terbilang tinggi di Kabupaten Mojokerto. Hal tersebut perlu di evaluasi agar angka kematian bayi menurun sehingga dapat meningkatkan angka harap hidup masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Terdapat jurnal yang menjelaskan pula bahwa salah satu dari penyebab meningkatnya angka kematian bayi juga disebabkan oleh maraknya pernikahan dini. Pernikahan pada usia dini sangat berbahaya. Pernikahan usia dini berpotensi memiliki bayi yang dilahirkan mengalami kekerdilan atau biasa juga disebut stunting. Tidak hanya di Kabupaten Mojokerto, pernikahan dini memang tengah marak di Indonesia. Berdasarkan data yang dimiliki BKKBN, pernikahan pada usia di bawah 18 tahun di Indonesia terjadi sebanyak 20 dari 1.000 pernikahan. Padahal, pernikahan dini dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi yang kelak akan dilahirkan baik nyawa maupun kondisi kesehatannya. Organ reproduksi anak perempuan yang menikah pada usia 16-17 tahun, belum cukup matang untuk mendukung pertumbuhan janin yang optimal karena panggul yang memiliki ukuran kurang dari 10 sentimeter dan membahayakan proses melahirkan, sehingga dapat meningkatkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu dalam waktu yang bersamaan. Di Kabupaten Mojokerto sendiri

sepanjang Tahun 2022 tercatat ada 279 pernikahan dini yang telah terdaftar. Dari jumlah itu, **pernikahan dini didominasi dari anak perempuan** dengan jumlah 240. Sisanya merupakan anak laki-laki. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor utama penyebab mengapa angka IPG perempuan di Kabupaten Mojokerto lebih rendah dibandingkan angka IPG laki-laki. Berikut dilampirkan data yang mencakup angka kematian bayi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 serta data BBLR di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.

Tabel 4. 49 Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

NO	KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH KELAHIRAN					
			LAKI-LAKI			PEREMPUAN		
			HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI
1	Sooko	Sooko	515	0	515	522	2	524
2	Trowulan	Trowulan	289	2	291	291	0	291
3		Tawang Sari	250	1	251	246	1	247
4	Puri	Puri	563	3	566	482	0	482
5	Mojoanyar	Gayaman	289	0	289	298	1	299
6	Bangsar	Bangsar	442	0	442	460	0	460
7	Gedeg	Gedeg	302	1	303	249	1	250
8		Lespadangan	180	1	181	141	1	142
9	Kemlagi	Kemlagi	278	0	278	282	0	282
10		Kedungsari	165	0	165	172	1	173
11	Dawarblondong	Dawarblondong	375	5	380	392	3	395
12	Jetis	Kupang	365	1	366	348	1	349
13		Jetis	235	0	235	195	1	196
14	Mojosari	Mojosari	305	0	305	320	0	320
15		Modopuro	289	1	290	285	0	285
16	Pungging	Pungging	384	0	384	395	0	395
17		Watukonongo	170	1	171	166	2	168
18	Ngoro	Ngoro	368	0	368	384	0	384
19		Manduro	206	0	206	226	0	226
20	Dlanggu	Dlanggu	400	0	400	399	0	399
21	Kutorejo	Kutorejo	229	1	230	181	1	182
22		Pesanggrahan	234	1	235	266	0	266
23	Pacet	Pacet	205	1	206	229	2	231
24		Pandan	168	0	168	187	0	187
25	Trawas	Trawas	157	0	157	188	1	189
26	Gondang	Gondang	333	2	335	282	0	282
27	Jatirejo	Jatirejo	380	2	382	368	4	372
JUMLAH (KAB/KOTA)			8.076	23	8.099	7.954	22	7.976
ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN (DILAPORKAN)				2,8			2,8	

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, 2022

Tabel 4.50 Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	BBLR					
			L		P		L + P	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Soko	Soko	9	1,7	6	1,1	15	1,4
2	Trowulan	Trowulan	6	2,1	3	1,1	9	1,6
3		Tawang Sari	7	2,8	2	0,8	9	1,8
4	Puri	Puri	16	3,3	14	3,4	30	3,3
5	Mojoanyar	Gayaman	14	4,8	12	4,5	26	4,7
6	Bangsar	Bangsar	3	0,8	2	0,5	5	0,6
7	Gedeg	Gedeg	6	5,8	9	8,3	15	7,1
8		Lespadangan	1	0,9	7	6,1	8	3,5
9	Kemlagi	Kemlagi	8	2,9	7	2,5	15	2,7
10		Kedungsari	31	18,8	36	27,1	67	22,5
11	Dawarblandong	Dawarblandong	12	3,2	6	1,9	18	2,6
12	Jetis	Kupang	14	3,8	9	2,6	23	3,2
13		Jetis	5	2,1	1	0,5	6	1,4
14	Mojosari	Mojosari	7	2,4	5	1,9	12	2,1
15		Modopuro	6	2,2	12	4,5	18	3,3
16	Pungging	Pungging	17	4,4	16	4,1	33	4,2
17		Watuknongo	2	1,2	6	3,7	8	2,4
18	Ngoro	Ngoro	8	2,2	12	3,1	20	2,7
19		Manduro	4	1,9	7	3,2	11	2,6
20	Dlanggu	Dlanggu	22	6,0	27	7,3	49	6,6
21	Kutorejo	Kutorejo	4	2,5	4	2,4	8	2,4
22		Pesanggrahan	4	1,7	3	1,4	7	1,6
23	Pacet	Pacet	4	2,7	8	6,9	12	4,5
24		Pandan	2	1,2	6	3,2	8	2,3
25	Trawas	Trawas	10	6,4	12	6,4	22	6,4
26	Gondang	Gondang	3	0,9	1	0,4	4	0,7
27	Jatirejo	Jatirejo	10	2,6	16	4,3	26	3,5
JUMLAH (KAB/KOTA)			235	3,1	249	3,5	484	3,3

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, 2022

2. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan). Angka kematian ibu memiliki pengaruh besar dalam menentukan angka harapan hidup pada suatu kabupaten/kota. Di Kabupaten Mojokerto tercatat pada tahun 2022 masih terdapat 7 peristiwa/kejadian kematian ibu. Hal tersebut perlu di evaluasi agar angka kematian ibu menurun sehingga dapat meningkatkan angka harap hidup masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya pada sub bab angka kematian bayi, telah

dijelaskan bahwa pernikahan dini dapat berdampak pada tingginya angka kematian ibu, kematian bayi, serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Hal ini diperkuat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar selama kehamilan atau melahirkan dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun. Sementara yang usia 15-19 tahun kemungkinannya dua kali lebih besar. Selain itu, juga muncul risiko kesakitan dan kematian yang timbul selama proses kehamilan dan persalinan. Hal tersebut menyebabkan angka kematian ibu lebih tinggi. Di Kabupaten Mojokerto sendiri sepanjang Tahun 2022 tercatat ada 279 pernikahan dini yang telah terdaftar. Dari jumlah itu, pernikahan dini didominasi dari anak perempuan dengan jumlah 240. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya IPG perempuan di Kabupaten Mojokerto apabila dibandingkan dengan laki-laki. Adapun berikut merupakan lampiran data terkait angka kematian ibu di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 4. 51 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KEMATIAN IBU															
			JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL				JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN				JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS				JUMLAH KEMATIAN IBU			
			< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	Jumlah	< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	Jumlah	< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	Jumlah	< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	Jumlah
1	Sooko	Sooko	0	2	0	2	0	0	0	0	1	0	1	2	1	2	1	4
2	Trowulan	Trowulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Tawang Sari	0	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	3	0	3
4	Puri	Puri	0	3	0	3	0	0	0	0	0	1	1	2	0	4	1	5
5	Mojoanyar	Gayaman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bangsar	Bangsar	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2
7	Gedeg	Gedeg	0	2	0	2	0	0	0	0	0	3	1	4	0	5	1	6
8		Lespadangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kemlagi	Kemlagi	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	3
10		Kedungsari	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
11	Dawarblandong	Dawarblandong	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	3
12	Jetis	Kupang	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	3
13		Jetis	0	6	1	7	0	0	0	0	0	1	0	1	0	7	1	8
14	Mojosari	Mojosari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Modopuro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pungging	Pungging	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	1	4
17		Watukenongo	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
18	Ngoro	Ngoro	0	3	0	3	0	0	0	0	0	2	0	2	0	5	0	5
19		Manduro	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
20	Dlanggu	Dlanggu	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2
21	Kutorejo	Kutorejo	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
22		Pesanggrahan	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2
23	Pacet	Pacet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Pandan	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KEMATIAN IBU															
			JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL				JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN				JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS				JUMLAH KEMATIAN IBU			
			< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	Jumlah	< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	Jumlah	< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	Jumlah	< 20 tahun	20-34 tahun	≥35 tahun	Jumlah
25	Trawas	Trawas	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
26	Gondang	Gondang	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
27	Jatirejo	Jatirejo	0	2	1	3	0	0	0	0	0	1	2	3	0	3	3	6
JUMLAH (KAB/KOTA)			1	40	3	44	0	2	0	2	1	11	9	21	2	53	12	67
ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)																		418

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

3. Tingkat Kesehatan Reproduksi

Kualitas hidup perempuan yang lebih baik dapat dicapai dengan peningkatan kesetaraan gender. Pemberdayaan perempuan juga berkorelasi positif dengan peningkatan kesehatan reproduksi. Menjaga kesehatan organ reproduksi merupakan hal yang penting karena terkait dengan bagaimana kita menjamin keberlangsungan hidup manusia agar dapat meningkatkan angka harapan hidup manusia. Sehingga di Kabupaten Mojokerto diperlukan adanya program yang membahas terkait bagaimana kesehatan reproduksi.

Adapun selain itu berdasarkan fakta di lapangan menjelaskan bahwa, pernikahan dini berpotensi besar akan mengganggu kesehatan reproduksi, Anak-anak yang menikah dini diyakini akan mengalami penyakit menular seksual, seperti sifilis, HIV, hepatitis B, HPV, dan lain sebagainya. Infeksi penyakit tersebut dapat terjadi karena organ reproduksi anak-anak belum matang atau mengalami imaturitas. Risiko semakin tinggi bila anak yang menikah dini mengalami kekerasan dalam hubungan seksual terlebih pada anak perempuan. Di Kabupaten Mojokerto sendiri kasus orang yang terestimasi risiko tHIV telah mencapai angka 20.772 Hal tersebut juga termasuk faktor yang mempengaruhi angka IPG di Kabupaten Mojokerto. Adapun berikut merupakan data terkait jumlah kasus HIV di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.

Tabel 4. 52 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

NO	KELOMPOK UMUR	KASUS H I V			PROPORSI KELOMPOK UMUR
		L	P	L+P	
1	≤ 4 TAHUN	3	1	4	2,5
2	5 - 14 TAHUN	1	0	1	0,6
3	15 - 19 TAHUN	4	0	4	2,5
4	20 - 24 TAHUN	22	2	24	14,8
5	25 - 49 TAHUN	72	28	100	61,7
6	≥ 50 TAHUN	15	14	29	17,9
JUMLAH (KAB/KOTA)		117	45	162	
PROPORSI JENIS KELAMIN		72,2	27,8		
Jumlah estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV					20772
Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar					14609
Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesu					70,3

Sumber : Dinas Kesehatan, 2022

4. Kualitas Kesehatan Manula

Kualitas hidup manula merujuk pada tingkat kesejahteraan, kesehatan fisik dan mental, serta kepuasan hidup seseorang yang telah memasuki usia lanjut. Ini

mencakup berbagai aspek, seperti kesehatan fisik, fungsi mental, dukungan sosial, aktivitas sosial, mobilitas, lingkungan fisik, akses terhadap layanan kesehatan, dan banyak lagi. Kualitas hidup manula bisa sangat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya, tergantung pada faktor-faktor seperti kondisi kesehatan, lingkungan sosial, dukungan keluarga, dan faktor ekonomi. Kualitas hidup manula dapat diukur dengan berbagai cara, termasuk kuesioner khusus, penilaian medis, dan evaluasi yang melibatkan pendapat individu tersebut. Penting untuk memahami bahwa setiap individu memiliki preferensi dan prioritas yang berbeda, sehingga definisi kualitas hidup manula bisa bervariasi dari satu orang ke orang lain. Adapun berikut merupakan penanganan terkait kualitas hidup manula di Kabupaten Mojokerto.

**Tabel 4. 53 Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut di Kabupaten Mojokerto
Tahun 2022**

NO	PUSKESMAS	USIA LANJUT (60TAHUN+)								
		JUMLAH			MENDAPAT SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR					
		L	P	L+P	L	%	P	%	L+P	%
1	Sooko	1.801	2.065	3.866	1.801	100,0	2.065	100,0	3.866	100,0
2	Trowulan	1.290	1.522	2.812	1.290	100,0	1.522	100,0	2.812	100,0
3	Tawang Sari	1.172	1.114	2.286	1.631	139,2	2.315	207,8	3.946	172,6
4	Puri	1.292	1.284	2.576	2.196	170,0	2.158	168,1	4.354	169,0
5	Gayaman	3.292	4.236	7.528	3.154	95,8	3.555	83,9	6.709	89,1
6	Bangsar	2.708	2.843	5.551	2.064	76,2	2.360	83,0	4.424	79,7
7	Gedeg	2.651	3.076	5.727	1.805	68,1	1.911	62,1	3.716	64,9
8	Lespadangan	701	1.111	1.812	855	122,0	907	81,6	1.762	97,2
9	Kemlagi	3.013	2.966	5.979	1.952	64,8	2.312	78,0	4.264	71,3
10	Kedungsari	1.795	2.208	4.003	929	51,8	1.011	45,8	1.940	48,5
11	Dawarblandong	3.600	4.400	8.000	2.635	73,2	3.880	88,2	6.515	81,4
12	Kupang	3.480	3.213	6.693	3.703	106,4	3.622	112,7	7.325	109,4
13	Jetis	2.109	2.289	4.398	1.021	48,4	942	41,2	1.963	44,6
14	Mojosari	3.710	2.016	5.726	3.151	84,9	3.702	183,6	6.853	119,7
15	Modopuro	2.679	3.600	6.279	2.413	90,1	2.915	81,0	5.328	84,9
16	Pungging	1.918	2.186	4.104	1.909	99,5	2.199	100,6	4.108	100,1
17	Watukonongo	1.212	1.352	2.564	1.202	99,2	1.311	97,0	2.513	98,0
18	Ngoro	3.085	3.268	6.353	2.141	69,4	2.055	62,9	4.196	66,0
19	Manduro	4.189	5.082	9.271	3.330	79,5	3.935	77,4	7.265	78,4
20	Dlanggu	1.923	1.983	3.906	2.427	126,2	3.183	160,5	5.610	143,6
21	Kutorejo	1.856	2.003	3.859	1.417	76,3	1.631	81,4	3.048	79,0
22	Pesanggrahan	2.238	2.253	4.491	1.354	60,5	1.468	65,2	2.822	62,8
23	Pacet	2.025	2.193	4.218	935	46,2	946	43,1	1.881	44,6
24	Pandan	952	1.112	2.064	861	90,4	1.202	108,1	2.063	100,0
25	Trawas	2.375	3.895	6.270	1.465	61,7	1.622	41,6	3.087	49,2
26	Gondang	2.576	2.586	5.162	2.041	79,2	1.966	76,0	4.007	77,6
27	Jatirejo	2.064	2.208	4.272	1.501	72,7	1.854	84,0	3.355	78,5

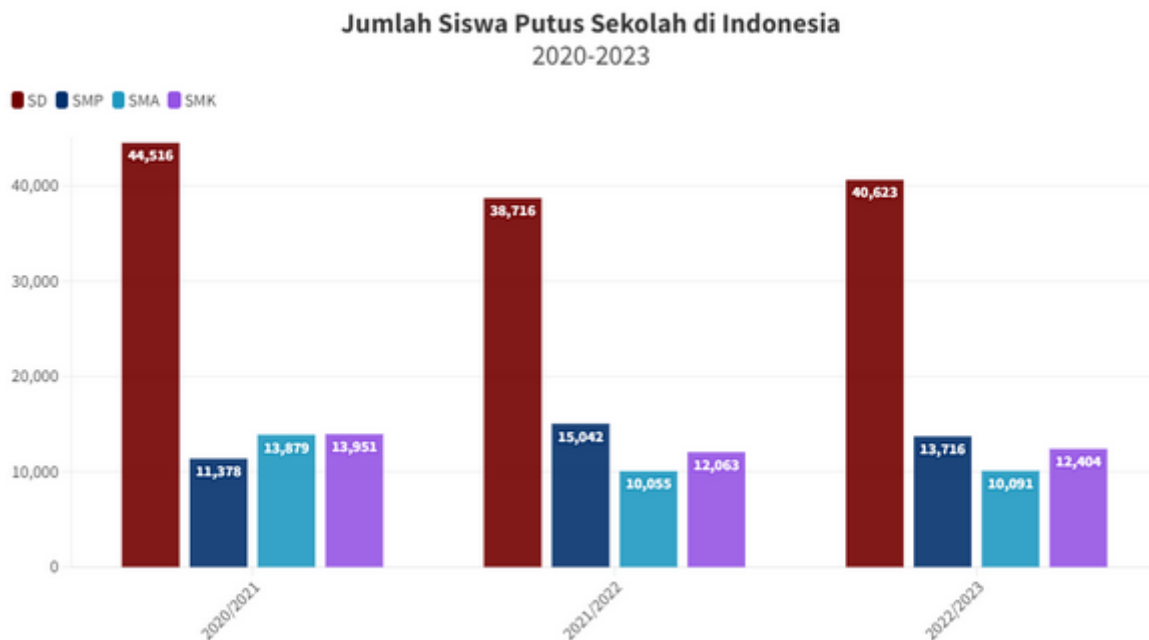


B. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang berperan dalam penyusunan IPG dan IDG. Hal tersebut mengingat bahwa, IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan), dan ekonomi. Pendidikan yang tinggi dapat menjadikan seseorang dengan pengetahuan dan keterampilan yang tinggi sehingga mampu memproduksi barang maupun jasa untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pendidikan bagi perempuan memiliki dampak tambahan yang positif, diantaranya penurunan pernikahan dini, tingkat kematian anak, serta pendidikan anak yang lebih tinggi. Hal ini dengan sendirinya akan mendorong perspektif pertumbuhan jangka panjang pada suatu negara/wilayah. Berdasarkan hasil survey wawancara yang dilakukan kepada OPD di Kabupaten Mojokerto, pendidikan merupakan faktor yang berkaitan erat dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Pendidikan mempengaruhi IPG pada indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sehingga dari ke-2 indikator tersebut dapat berindikator pula ke IDG di Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan hasil wawancara pada OPD di Kabupaten Mojokerto, masih terdapat beberapa aspek dalam faktor pendidikan yang harus diperhatikan agar dapat mengoptimalkan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Hal tersebut adalah angka melek huruf di Kabupaten Mojokerto. Beberapa kendala dari angka melek huruf yang cukup mempengaruhi indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah sehingga berdampak pada angka IPG dan IDG di Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Angka Putus Sekolah



Gambar 4. 26 Jumlah Siswa Putus Sekolah di Indonesia 2020-2023
Sumber : Kemendikbud

Angka putus sekolah di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya walaupun pada tahun ajaran 2021/2022 mengalami penurunan namun meningkat Kembali pada tahun ajaran 2022/2023. Berdasarkan data dari Kemendikbud tahun 2023 Jumlah siswa putus sekolah di tingkat SD memiliki angka yang tertinggi yaitu 40.623 orang, kemudian diikuti tingkat SMP 13.716 orang, tingkat SMK 12.404 orang, dan tingkat SMA 10.091. angka putus sekolah di dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satu faktor utamanya adalah faktor ekonomi. Menurut data BPS sekitar 76% keluarga menyatakan penyebab utama anak putus sekolah adalah karena faktor ekonomi. 67% diantaranya dikarenakan tidak mampu membayar biaya sekolah, dan 8,7% sisanya harus mencari nafkah. Sama halnya yang terjadi di Kabupaten Mojokerto yang memiliki angka putus sekolah yang masih cukup tinggi yaitu sebesar 2.221 orang. Berikut data terkait angka putus sekolah per kecamatan di Kabupaten Mojokerto tahun 2022.

Tabel 4. 54 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

No	Kecamatan	Peserta Didik Putus Sekolah			
		TK/KB/TPA/SPS	SD	SMP	PKBM
1	Kec. Bangsal	-	1	26	-
2	Kec. Dawar Blandong	-	7	7	-
3	Kec. Dlanggu	-	23	5	-
4	Kec. Gedeg	-	2	19	-
5	Kec. Gondang	-	9	13	-
6	Kec. Jatirejo	-	-	3	-
7	Kec. Jetis	-	3	9	-
8	Kec. Kemlagi	-	21	22	-
9	Kec. Kutorejo	-	5	13	-
10	Kec. Mojoanyar	-	8	15	-
11	Kec. Mojosari	-	4	14	-
12	Kec. Ngoro	-	33	46	-
13	Kec. Pacet	-	11	18	-
14	Kec. Pungging	-	8	19	-
15	Kec. Puri	-	6	45	-
16	Kec. Sooko	-	6	15	-
17	Kec. Trawas	-	1	14	-
18	Kec. Trowulan	-	7	35	-
Jumlah		-	155	338	-

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2022

Berdasarkan hasil survei sekunder yang dilakukan pada dinas pendidikan di Kabupaten Mojokerto, masih terdapat angka anak putus sekolah yang semakin meningkat setiap tahunnya di Kabupaten Mojokerto. Penyebab adanya permasalahan angka putus sekolah di Kabupaten Mojokerto selain karena faktor ekonomi adalah pernikahan dini, kenakalan remaja, hamil muda, sudah mendapatkan pekerjaan sehingga memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan serta faktor disabilitas. Salah satu penyebab permasalahan angka putus sekolah adalah pernikahan dini. Dimana faktor ini menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap tingginya angka putus sekolah. Menurut Kasi Binmas Kemenag Kabupaten Mojokerto sepanjang tahun 2022 tercatat ada 470 pernikahan dini yang telah didaftarkan. Berdasarkan angka tersebut pernikahan dini didominasi dari anak perempuan baik itu karena factor pergaulan bebas maupun himpitan ekonomi keluarga. Jika faktor ekonomi dan pernikahan dini terus meningkat maka akan berpengaruh besar pula terhadap semakin tingginya angka putus sekolah. Dalam hal ini Kabupaten Mojokerto perlu memiliki program untuk menyelesaikan permasalahan angka anak putus sekolah

di Kabupaten Mojokerto.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Berdasarkan hasil survei wawancara kepada OPD terkait di Kabupaten Mojokerto, angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan di Kabupaten Mojokerto masih rendah yakni belum mencapai 12% pada tahun 2022. Peningkatan angka partisipasi kasar salah satunya dipengaruhi dengan adanya pernikahan dini. Di Kabupaten Mojokerto pernikahan dini banyak terjadi pada masa usia sekolah SMP dan SMA dengan rentang usia 13-18 tahun. Hal ini terjadi karena pada masa usia ini banyak yang mengalami pergaulan bebas, terpengaruh oleh faktor lingkungan dan budaya seperti orang tua yang sudah terburu-buru ingin menikahkan anaknya. Dapat dilihat pada **Tabel 4.48** angka partisipasi kasar pada usia jenjang Pendidikan SMP adalah 101,46% dengan APK perempuan lebih rendah daripada laki-laki yaitu 99,26%. Sedangkan angka partisipasi kasar pada usia jenjang Pendidikan SMA adalah 99,13% dengan APK perempuan juga lebih rendah daripada laki-laki yaitu 77,13%.

Tabel 4. 55 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2022 Kabupaten Mojokerto

Kab/Kota	Jenjang Pendidikan								
	SD/MI (7-12 Thn)			SMP/MTs (13-15 Thn)			SM/MA (16-18 Thn)		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Mojokerto	96,64	111,41	103,83	103,35	99,26	101,46	126,00	77,31	99,13

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

C. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menunjukkan jumlah pengeluaran rata-rata yang dikeluarkan oleh tiap individu di suatu negara atau wilayah dalam periode tertentu, biasanya dalam satu tahun. Konsep ini memiliki peranan penting dalam ilmu ekonomi karena dapat memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan dan standar hidup masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan hasil survey wawancara yang dilakukan kepada OPD di Kabupaten Mojokerto, perekonomian merupakan faktor yang berkaitan erat dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Faktor ekonomi ini adalah faktor yang memiliki keterkaitan pada hampir semua indikator IPG di

Kabupaten Mojokerto. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan perbaikan ekonomi secara menyeluruh, akan tetapi justru seringkali dibarengi dengan ketimpangan. Ketimpangan ini seringkali dirasakan oleh kaum perempuan yang sulit mendapatkan akses baik kesehatan maupun pendidikan. Tidak menutup kemungkinan bahwasannya negara dengan tingkat pendapatan tinggi justru berhadapan dengan tingkat ketimpangan yang juga tinggi, disebabkan oleh rendahnya pendidikan perempuan yang menyebabkan perempuan diposisikan pada pekerja kasar yang menimbulkan tingginya ketimpangan gender di suatu wilayah termasuk Kabupaten Mojokerto.

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Berdasarkan wawancara kepada OPD terkait di Kabupaten Mojokerto, beberapa hal yang masih menjadi masalah dan mempengaruhi IPG dan IDG di Kabupaten Mojokerto diantaranya adalah masih adanya angka tingkat pengangguran terbuka. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Di Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2022 masih memiliki 5,54 persen tingkat pengangguran terbuka. Sebanyak 35.033 orang yang dinyatakan sebagai tenaga kerja yang masih membutuhkan pekerjaan. Akan tetapi berdasarkan hasil data terakhir angka pengangguran terbuka di Kabupaten Mojokerto menurun menjadi 4,83%/April Tahun 2023. Berdasarkan data yang tercatat hingga saat ini, pengangguran masih banyak didominasi oleh perempuan (data terlampir). Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintahan Kabupaten Mojokerto agar dapat menekan angka pengangguran terbuka.

Apabila dihubungkan dengan fenomena yang tengah marak di Kabupaten Mojokerto terkait pernikahan dini, pengeluaran pendapatan perkapita dan tingkat pengangguran cukup memiliki keterkaitan. Sepanjang 2022 di Kabupaten Mojokerto, tercatat ada 470 pernikahan dini yang telah didaftarkan. Dari jumlah itu, pernikahan dini didominasi dari anak perempuan rentan melahirkan keluarga miskin karena rendahnya pendidikan sehingga rendah pula akses pekerjaan yang didapat. Ketidaksiapan finansial rentan membuat keluarga baru menjadi keluarga miskin, karena mayoritas perempuan yang menikah dini akan cenderung menganggur dan memilih menjadi ibu rumah tangga. Sehingga hal seperti itu akan sangat mempengaruhi angka IPG di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 4. 56 Angka Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2022

JENIS DATA	TAHUN														
	2018			2019			2020			2021			2022		
	%			%			%			%			%		
	L	P	TPT	L	P	TPT	L	P	TPT	L	P	TPT	L	P	TPT
Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,1	5,7	4,2	3,0	4,5	3,6	4,8	7,2	5,7	4,8	6,5	5,5	3,6	6,6	4,83

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2023

Tabel 4. 57 Jumlah Orang Menganggur di Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2022

JENIS DATA	TAHUN														
	2018			2019			2020			2021			2022		
	JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH		
	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL
Jumlah Orang yang menganggur	11.66 2	14.69 3	26.35 5	11.73 0	10.35 4	22.08 4	18.30 1	17.40 0	35.70 1	18.55 5	16.47 8	35.03 3	14.00 2	17.21 9	31.22 1

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2023

Tabel 4. 58 Jumlah Pengajuan Pernikahan Dini di Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2022

Pengajuan Pernikahan Dini	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
	193	248	556	613	470

Sumber : DP2KBP2, 2023

4.7.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Faktor selanjutnya yang akan dibahas dalam sub bab ini adalah faktor yang membentuk dan mempengaruhi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adapun faktor tersebut salah satunya adalah faktor sosial budaya. Berdasarkan hasil survey lapangan, faktor sosial budaya yang sangat mempengaruhi faktor adalah faktor masih tingginya budaya patriarki. Budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia menyebabkan anak perempuan lebih dikesampingkan untuk mendapatkan pendidikan dibandingkan anak laki-laki. Meski demikian, setidaknya perempuan semakin sadar untuk mengakses pendidikan dan bersekolah, yang ditunjukkan dari angka rata-rata lama sekolah yang semakin meningkat setiap tahunnya. Upaya mempercepat program pemberdayaan perempuan untuk mengejar ketertinggalan perempuan dari laki-laki, hingga kini masih terhambat dengan budaya patriarki yang begitu kuat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut bahkan mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender (IDG) pada kabupaten/kota di Indonesia termasuk Kabupaten Mojokerto. Peran perempuan sejak dahulu selalu identik lebih dominan pada pekerjaan domestik sedangkan laki-laki lah yang keluar rumah mencari uang. Hal tersebut menyebabkan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi IPG dan IDG, di Kabupaten Mojokerto sendiri masalah tersebut diantaranya :

A. Kurangnya partisipasi peran serta perempuan dalam kegiatan bermasyarakat.

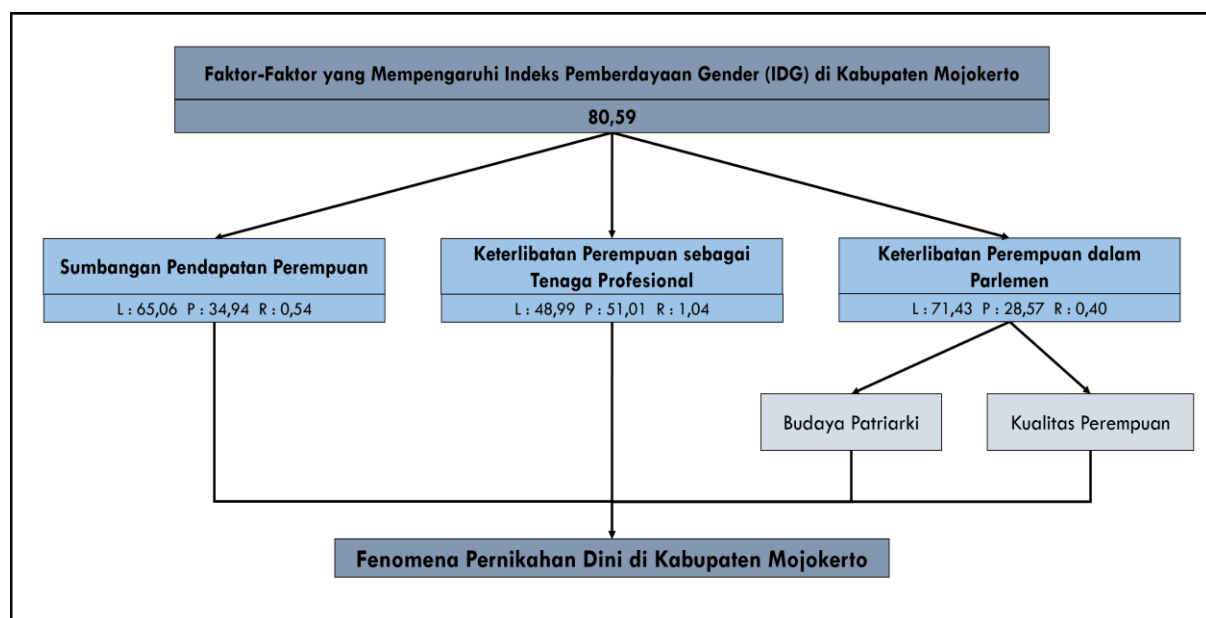
Berdasarkan hasil wawancara kepada OPD terkait di Kabupaten Mojokerto, permasalahan yang masih belum terselesaikan, dan menjadi problem pada kesetaraan gender diantaranya adalah masih kurangnya partisipasi peran serta perempuan dalam kegiatan bermasyarakat. Partisipasi perempuan saat ini dapat terbilang masih dibawah 30%, hal ini harus dioptimalkan agar angka IPG dan IDG di Kabupaten Mojokerto dapat meningkat pada tahun selanjutnya. Rendahnya partisipasi masyarakat ini juga dapat disebabkan oleh faktor pernikahan dini yang ada di Kabupaten Mojokerto. Pada umumnya perempuan yang sudah menikah cenderung lebih memilih untuk menghabiskan waktunya dalam mengurus rumah sehingga hal tersebut berpengaruh

pada kurangnya partisipasi peran serta perempuan dalam kegiatan bermasyarakat.

B. Kurangnya partisipasi perempuan dalam parlemen di Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan hasil wawancara, permasalahan selanjutnya di Kabupaten Mojokerto diketahui bahwa partisipasi perempuan dalam parlemen masih belum mencapai 30%, hal ini dapat terbilang rendah. Rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan di Kabupaten Mojokerto secara garis besar dikarenakan oleh beberapa faktor yang pertama ialah budaya patriarki. Dimana sistem sosial menempatkan pria sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi. Terutama pada perempuan yang sudah menikah cenderung akan dilarang untuk bekerja agar lebih fokus mengurus rumah tangga. Tingkat partisipasi perempuan dalam parlemen akan semakin menurun apabila angka pernikahan dini di Kabupaten Mojokerto semakin meningkat. Faktor kedua ialah masih rendahnya kualitas perempuan baik itu di bidang politik maupun bidang sosial, seperti dalam bidang ekonomi.

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dari sub bab 4.7.2, secara ringkasnya faktor-faktor yang mempengaruhi angka IDG secara umum di Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada skema berikut.



Gambar 4. 27 Skema Faktor yang Mempengaruhi IDG di Kabupaten Mojokerto
Sumber : Hasil Analisis, 2023

4.8 Analisis Tingkat Kesesuaian Program Upaya Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Gender di Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan dari beberapa sub bab analisis diatas yang telah memaparkan

terkait gambaran umum Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Mojokerto, Ketimpangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Mojokerto serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, selanjutnya pada sub bab ini akan dilakukan pembahasan terkait program-program upaya peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Mojokerto. Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender baik dari sisi regulasi, program maupun kebijakan. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi indikator utama untuk mengukur pencapaian kesetaraan gender di Kabupaten Mojokerto. Adapun berikut merupakan tabel program-program upaya peningkatan pembangunan dan pemberdayaan gender di Kabupaten Mojokerto yang dilakukan berdasarkan indikator penyusun IPG.

Tabel 4. 59 Program Upaya Peningkatan IPG dan IDG di Kabupaten Mojokerto

Indikator	Nama Program	Sasaran	OPD/Bidang Terkait
Usia Harapan Hidup	Perbup Tanda Merah (Pemberian Tanda Pada Buku Ibu Hamil, Untuk Mempermudah Monitor Ibu Hamil Yang Memiliki Resiko Tinggi)	Seluruh Ibu Hamil dengan resiko tinggi di Kab. Mojokerto	Semua Fasilitas Kesehatan di Kab Mojokerto
	Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Balita	Setiap puskesmas di Kab. Mojokerto (rata-rata 10-15 ibu hamil /kelas)	Puskesmas masing-masing wilayah
	Penyuluhan Untuk Nakes	Tenaga Kesehatan di Kab. Mojokerto	Dinas Kesehatan (Bidang KIA)
	Penyuluhan Nakes Terkait Asfiksia (Materi Penyuluhan Tergantung Penyebab Kasus Kematian Bayi Tertinggi Di Tahun Tersebut)	Tenaga Kesehatan di Kab. Mojokerto	Dinas Kesehatan (Bidang KIA)
	Penyuluhan Kader Posyandu	Kader Puskesmas	Dinas Kesehatan (KIA) dan puskesmas masing-masing
	Pendampingan Bumeristi (Ibu Hamil Resiko Tinggi)	Seluruh Ibu Hamil Beresiko Tinggi	Puskesmas dan Promkes masing-masing wilaya
	Permen Simela (Persalinan Aman, Siap, Sigap Melayani) : Penjemputan Ibu Hamil Yang Akan Melahirkan Ke Rumah	Pada Tahun 2020 diawali di Puskesmas Bangsal, lalu pada tahun 2022 diadopsi seluruh puskesmas karena masuk nominasi inovasi untuk mengurangi	Puskesmas masing-masing

Indikator	Nama Program	Sasaran	OPD/Bidang Terkait
		resiko kematian ibu dan bayi	
	Aksi Simpatik Genre "Ayo Cegah Stunting Agar Keluarga Bebas Stunting"	Masyarakatan	DP2KBP2
	Sosialisasi Stunting Dan Pelayanan Kb	Masyarakatan	DP2KBP2
	Gebyar Pemakaian Pil KB Bagi Ibu Menyusui Dan Pelayan Kb Implan	Masyarakatan	DP2KBP2
	Road Show Percepatan Penurunan Stunting	Masyarakat	DP2KBP2
	Program Terkait Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Terdapat Di BKKBN	Masyarakat Kabupaten Mojokerto	BKKBN
Harapan Lama Sekolah & Rata Rata Lama Sekolah	Program Kejar Paket	Anak Putus Sekolah	Dinas Pendidikan
	Ayo Sekolah Rek!	Anak Putus Sekolah	Dinas Pendidikan bagian PAUD UNICEF
	Program Gratis Sekolah (Hanya Untuk Sekolah Negeri)	Seluruh masyarakat usia sekolah	Dinas Pendidikan
	Pip Program Indonesia Pintar	Beasiswa untuk siswa pintar yang kurang mampu	Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial
	Program Perlindungan Dan Pemberdayaan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum)	ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)	Dinas Sosial
	Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Khusus Anak Kepada Orang Tua Anak	Anak-Anak di Kabupaten Mojokerto	DP2KBP2
	Bina Keluarga Balita	Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH)	Masyarakat	DP2KBP2
Pengeluaran	Pemberdayaan Perempuan (Ppks)	Masyarakat yang Termasuk kedalam kategori WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) Kategorinya dinilai dari provinsi karena ini program dari provinsi jawa timur	Dinas Sosial
	Pelatihan Keterampilan Kepada Masyarakat	Masyarakat Usia Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
	PUSPA (Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan) Perempuan Dan Anak)	Masyarakat Perempuan	DP2KBP2
	Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
	Kesetaraan Gender Dan Anak		
	Kewirausahaan Perempuan Korban Kekerasan Dan Kepala Rumah Tangga	Masyarakat Perempuan	DP2KBP2

Indikator	Nama Program	Sasaran	OPD/Bidang Terkait
	Sosialisasi Terkait Budaya Patriarki Kepada Masyarakat	Masyarakat	Tim Bappeda
			BPKAD
			Inspektorat
			DPMD
	Pembinaan Psikologi	Masyarakat Perempuan	PKK
			Muslimat
			Fatayat
			Aisiyah
			GKJW
	Kewirausahaan Kecantikan	Masyarakat Perempuan	PKK
			Muslimat
			Fatayat
			Aisiyah
			GKJW

Sumber : Hasil Survei Sekunder, 2023

4.9 Analisis Jaringan Sosial (Social Network Analysis) Dalam Indeks Pembangunan & Pemberdayaan Gender di Kabupaten Mojokerto

Analisis jaringan sosial atau social network analysis merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui, menganalisis, memetakan interaksi antar manusia. Social Network Analysis (SNA) dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi seperti hubungan interaksi dan pertemanan antar user yang digambarkan sebagai graf. SNA juga dapat diartikan sebagai suatu gambaran interaksi dan hubungan yang selalu terjadi antara satu individu dengan individu lain dalam suatu organisasi atau lingkungan kerja dan perusahaan. Di dalam social network, individu akan digambarkan sebagai sebuah nodes atau titik, sedangkan relasi yang terjadi antar individu disebut sebagai dengan edges atau links. Digambarkan sebuah peta yang terdiri atas banyak orang dimana di dalamnya terdapat relasi antar individunya. Dalam SNA terdapat 4 cara untuk mengukur centrality yakni dengan :

1. Degree Centrality, ukuran pemusatan yang menghitung banyaknya edges yang terhubung ke suatu node. Degree centrality dapat memberitahu seberapa banyak hubungan langsung yang dimiliki setiap node sehingga ketika kita ingin mencari individu yang memiliki koneksi langsung terbanayak dengan orang lain (orang paling populer).
2. Betweenness Centrality, salah satu cara untuk mengukur sentralitas dalam suatu jaringan yang fokus terhadap seberapa banyak suatu node menghubungkan

(menjembatani) antara node yang satu ke node lainnya. Pada *betweenness centrality* digunakan untuk mengetahui individu mana yang paling mempengaruhi dalam suatu hubungan.

3. *Closeness Centrality*, *Closeness centrality* dapat memberitahu kita node mana yang memiliki jarak terpendek keseluruhan nodes. Ukuran ini dapat digunakan ketika kita ingin mencari tau individu yang paling efektif dalam persebaran informasi.

Tabel 4. 60 Daftar Identifikasi OPD di Kabupaten Mojokerto

Aktor	Bappeda	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan	Dinas Pendidikan	Disnaker	Disperindag	BPS	UNICEF	Kemen-trian sosial	DP2KBP2	Dispen duk capil	Pemerin- tah Desa/Kel urahan	LSM
Bupati	Persetujuan & Pengesahan SK												
Bappeda	V	V	V	V	V	-	V (Sinkronisa si Data pendukung (IPG & IDG))			V	V	V	-
Dinas Sosial	V (Bappeda sebagai koordinato r program)	V	V (penyaluran program bantuan peningkatan kesejahteraan n yang berkaitan dengan kesehatan)	V (penyaluran program bantuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan)	V (sinkronisasi data penduduk usia kerja yang memerlukan bantuan)	-	V (Sinkronisa si Data pendukung)	V (berhubungan terkait program perlindungan anak yang komprehensif untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan, pelecehan, penelantaran dan eksploitasi anak)	V (berhubungan terkait program perlindungan anak yang komprehensif untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan, pelecehan, penelantaran dan eksploitasi anak)	V(berhubung an terkait program yang berkaitan dengan ibu & anak)	V (sinkroni sasi data kependu dukan)	V (penyalura n bantuan kesejahter aan)	V
Dinas Kesehatan	V (Bappeda sebagai koordinato r program)	V (penyaluran program bantuan peningkatan kesejahteraan yang berkaitan dengan kesehatan)	V	V (pendidikan kesehatan dasar)		-	V (Sinkronisa si Data pendukung)	V (berhubungan terkait program kesehatan anak)		V(berhubung an terkait program yang berkaitan dengan kesehatan ibu & anak)		V	V
Dinas Pendidikan	V (Terkait Penelitian)	V (penyaluran program bantuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan)	V (pendidikan kesehatan dasar0	V	-	-	-	V	-	-	-	V	-

Aktor	Bappeda	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan	Dinas Pendidikan	Disnaker	Disperindag	BPS	UNICEF	Kemen-trian sosial	DP2KBP2	Dispen duk capil	Pemerin- tah Desa/Kel urahan	LSM
Disnaker	V (Bappeda sebagai koordinator program)	V (sinkronisasi data penduduk usia kerja yang memerlukan bantuan)			V	V (Sinkronisasi data)	V (Sinkronisasi data)		-	-	-	V	V(Peny aluran Tenaga Kerja)
Disperin- dag	V	-	-	-	V (Sinkronisasi data)	V	-	-	-	-	-	V	V
BPS	V (Sinkronisasi Data pendukung IPG & IDG)	V (Sinkronisasi Data pendukung)	-		V (Sinkronisasi data)	-	-	-	-	-	-	V	-
UNICEF	V	V (berhubungan terkait program perlindungan anak yang komprehensif untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan, pelecehan, penelantaran dan eksploitasi anak)	V (berhubunga n terkait program kesehatan anak)	V	-	-	-	V	V (berhubungan terkait program perlindungan anak yang komprehensif untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan, pelecehan, penelantaran dan eksploitasi anak)	-	-	-	V
Kementeri an Sosial	-	V (berhubungan terkait program perlindungan anak yang komprehensif untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan, pelecehan, penelantaran dan eksploitasi anak)	-	-	-	-	-	V (berhubungan terkait program perlindungan anak yang komprehensif untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan, pelecehan, penelantaran dan eksploitasi anak)	V	-	-	V	-



Aktor	Bappeda	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan	Dinas Pendidikan	Disnaker	Disperindag	BPS	UNICEF	Kemen-trian sosial	DP2KBP2	Dispenduk capil	Pemerintah Desa/Kelurahan	LSM
DP2KBP2	V	V(berhubungan terkait program yang berkaitan dengan ibu & anak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	-
Dispenduk capil	V	V (sinkronisasi data kependudukan)						-	-	-	-	V	-
Pemerintah Desa/Kelurahan	V	V (penyaluran bantuan kesejahteraan)	V	V	V	V	V	-	-	-	V	V	V
LSM/ Lembaga Masyarakat	V	V	V	-	V(Penyaluran Tenaga Kerja)	V	-	V	-	-	-	V	V

Sumber : Hasil Analisis, 202

Berdasarkan tabel tersebut, berikut merupakan hasil analisis SNA dengan menggunakan metode :

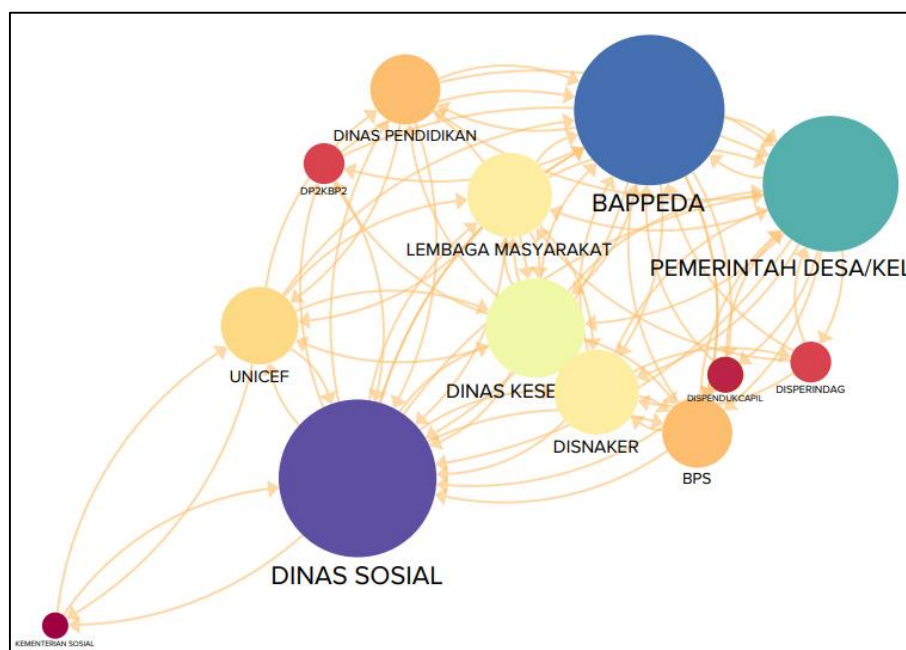
A. Degree Centrality

Berdasarkan hasil analisis SNA degree centrality diketahui bahwa 3 OPD teratas yang memiliki koneksi langsung terbanyak dengan OPD lainnya dalam pengembangan IPG dan IDG adalah dinas sosial, bappeda, dan pemerintah desa/kelurahan. Hasil dari analisis SNA dengan menggunakan metode degree centrality menghasilkan hasil yang dapat dilihat pada tabel dan graph sebagai berikut.

Tabel 4. 61 Analisis SNA OPD di Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan metode Degree Centrality

Rank	Label	Value
1	Dinas Sosial	22
2	Bappeda	21
3	Pemerintah Desa/Kelurahan	19
4	Dinas Kesehatan	14
5	Disnaker	12
6	Lembaga Masyarakat	12
7	Unicef	11
8	Dinas Pendidikan	10
9	Bps	10
10	Disperindag	6
11	Dp2kbp2	6
12	Dispendukcapil	5
13	Kementerian Sosial	4

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Gambar 4. 28 Graph Analisis SNA Degree Centrality OPD yang Mempengaruhi IPG & IDG di Kabupaten Mojokerto

Sumber: Hasil Analisis, 2023

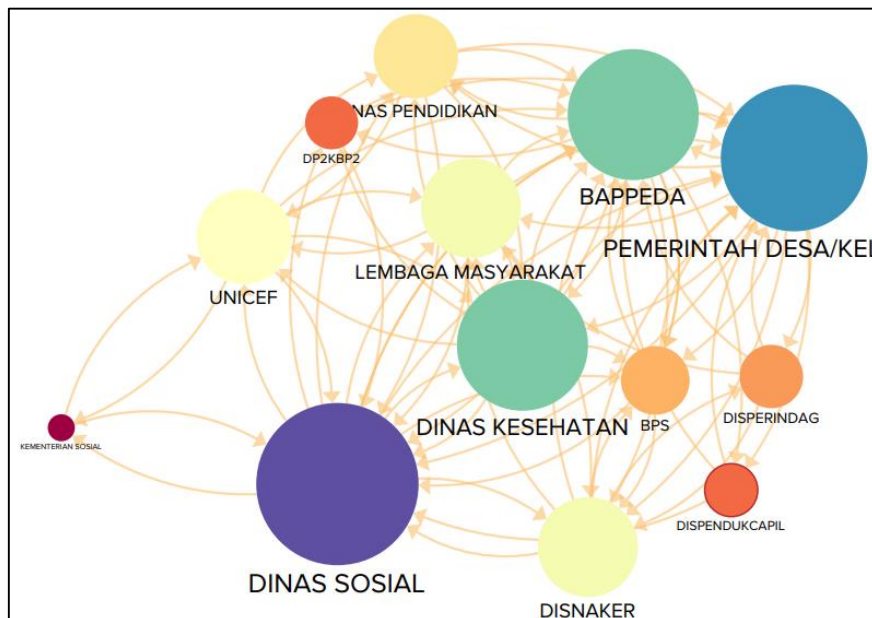
B. Closeness Centrality

Berdasarkan hasil analisis SNA degree centrality diketahui bahwa 3 OPD teratas yang memiliki jarak terpendek keseluruhan OPD lainnya adalah Dinas Sosial, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Bappeda. Ukuran ini dapat digunakan ketika kita ingin mencari tau OPD yang paling efektif dalam persebaran informasi Hasil dari analisis SNA dengan menggunakan metode closeness centrality menghasilkan hasil yang dapat dilihat pada tabel dan graph sebagai berikut.

Tabel 4. 62 Analisis SNA OPD di Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan metode Closeness Centrality

Rank	Label	Value
1	Dinas Sosial	0,63681
2	Pemerintah Desa/Kelurahan	0,60764
3	Bappeda	0,57847
4	Dinas Kesehatan	0,57847
5	Disnaker	0,52083
6	Lembaga Masyarakat	0,52083
7	Unicef	0,51111
8	Dinas Pendidikan	0,49167
9	Bps	0,46319
10	Disperindag	0,45347
11	Dp2kbp2	0,43403
12	Dispendukcapil	0,43403
13	Kementerian Sosial	0,38611

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Gambar 4. 29 Graph Analisis SNA Closeness Centrality OPD yang Mempengaruhi IPG & IDG di Kabupaten Mojokerto

Sumber: Hasil Analisis, 2023

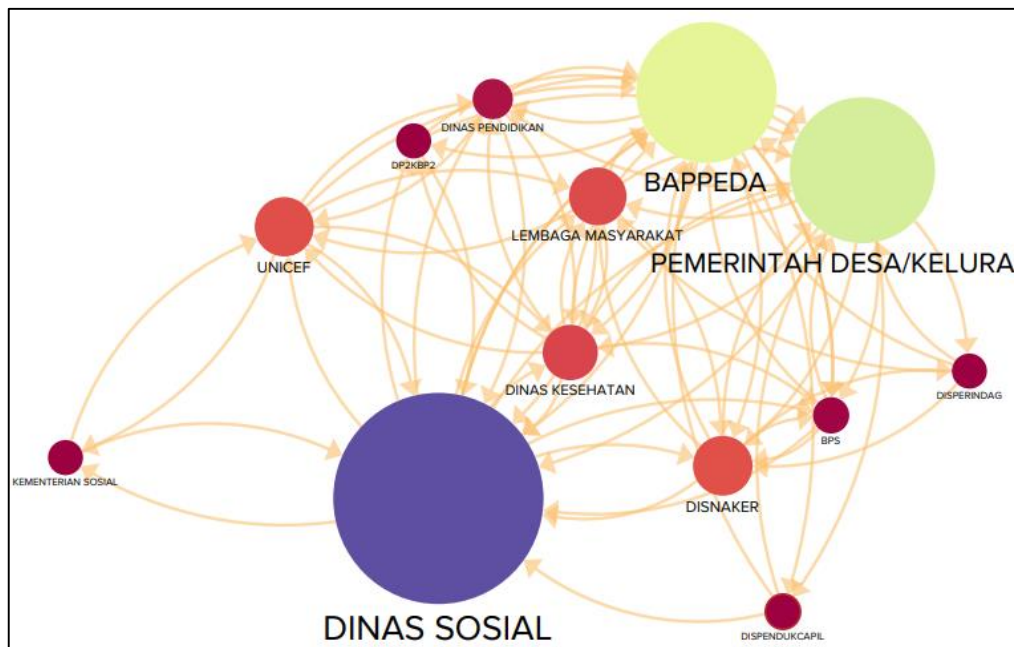
C. Betwenneess Centrality

Berdasarkan hasil analisis SNA degree centrality diketahui bahwa 3 OPD teratas yang paling mempengaruhi dalam IPG dan IDG di Kabupaten Mojokerto adalah Dinas Sosial, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Bappeda. Hasil dari analisis SNA dengan menggunakan metode betwenneess centrality menghasilkan hasil yang dapat dilihat pada tabel dan graph sebagai berikut.

Tabel 4. 63 Analisis SNA OPD di Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan metode Betwenneess Centrality

Rank	Label	Value
1	Dinas Sosial	0,1625
2	Pemerintah Desa/Kelurahan	0,10208
3	Bappeda	0,09722
4	Disnaker	0.033
5	Unicef	0.032
6	Lembaga Masyarakat	0.030
7	Dinas Kesehatan	0.027
8	Dinas Pendidikan	0.007
9	Bps	0.002
10	Disperindag	0
11	Kementerian Sosial	0
12	Dp2kbp2	0
13	Dispendukcapil	0

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Gambar 4. 30 Graph Analisis SNA Betweenness Centrality OPD yang Mempengaruhi IPG & IDG di Kabupaten Mojokerto

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan dari ke-3 metode analisis SNA diatas, dapat ditarik kesimpulan OPD yang paling berperan dan mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Mojokerto adalah Dinas Sosial, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Bappeda. Ke-3 OPD tersebut dianggap menjadi OPD yang dapat memiliki koneksi langsung terbanyak dengan OPD lain dan lembaga masyarakat serta OPD lain yang memiliki kedekatan dengan OPD lain sehingga dapat lebih mudah atau efektif dalam penyebaran informasi. Serta 3 OPD teratas tersebut dianggap paling memiliki pengaruh dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Mojokerto.

4.10 Analisis Perumusan Strategi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Gender di Kabupaten Mojokerto

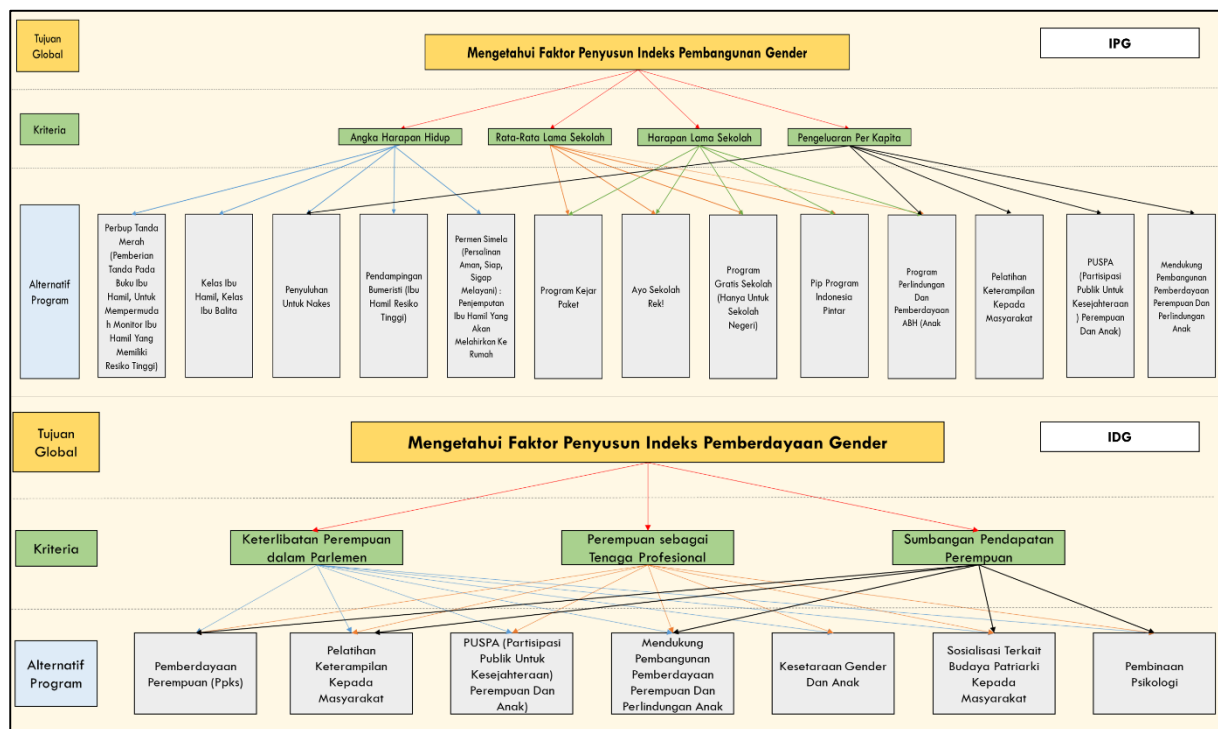
Berdasarkan pada sub bab sebelumnya yang telah dilakukan pembahasan terkait program-program yang telah dilakukan di Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Gender, maka pada sub bab ini akan dibahas mengenai tambahan inovasi terkait strategi program pembangunan pemberdayaan gender di Kabupaten Mojokerto. Perumusan strategi prohran pembangunan dan pemberdayaan gender harus mempertimbangkan PUG. PUG (Pengarusutamaan Gender) merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan dapat berkembang optimal tanpa terkendala oleh jenis kelaminnya. Sedangkan keadilan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan punya perbedaan kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam strategi ini pembangunan yang diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan sehingga bermanfaat untuk semua. Pada pelaksanaanya juga harus diintegrasikan dengan

dokumen perencanaan penganggaran baik menengah (RPJMD) maupun tahunan.

4.10.1 Penentuan Program Prioritas Peningkatan IPG dan IDG di Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan hasil wawancara dari para OPD serta diolah dengan menggunakan analisis hierarky proses atau AHP yang digunakan dalam menentukan program prioritas sehingga dalam perumusan strategi pengembangan dan peningkatan IPG dan IDG di Kabupaten Mojokerto bisa selaras dengan program-program yang ada berikut digambarkan dalam skema dibawah.



Gambar 4. 31 Skema AHP Faktor Penyusun IPG dan IDG

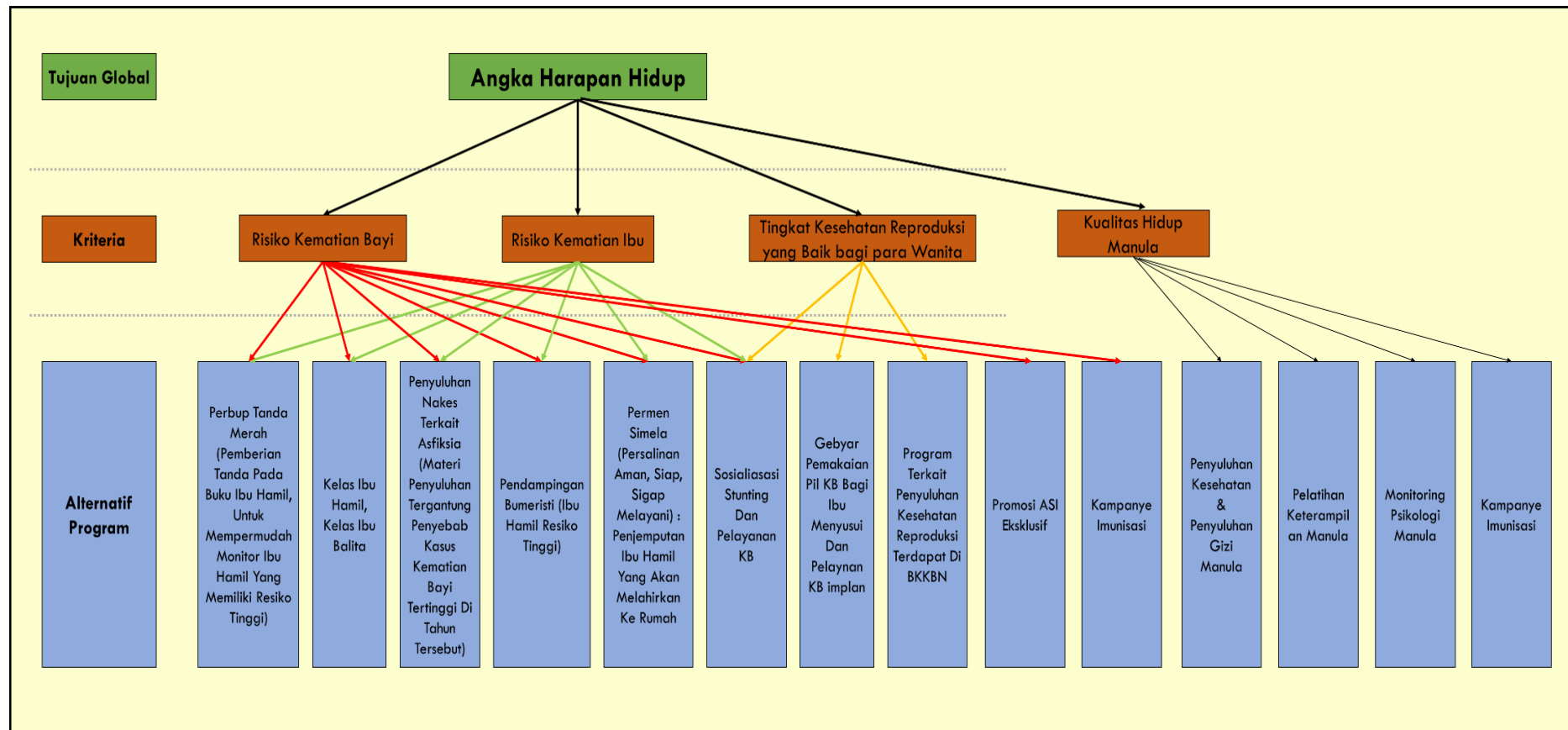
Penentuan hierarki digunakan untuk menentukan susunan tahapan pelaksanaan program yang dapat menjadi strategi peningkatan angka IPG dan IDG. Strategi pengembangan IPG dan IDG didasarkan pada temuan hasil factor yang mempengaruhi dengan program-program yang telah diupayakan terkait dengan peningkatan peran gender. Kondisi yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 64 Faktor yang Mempengaruhi IPG dan IDG di Kabupaten Mojokerto

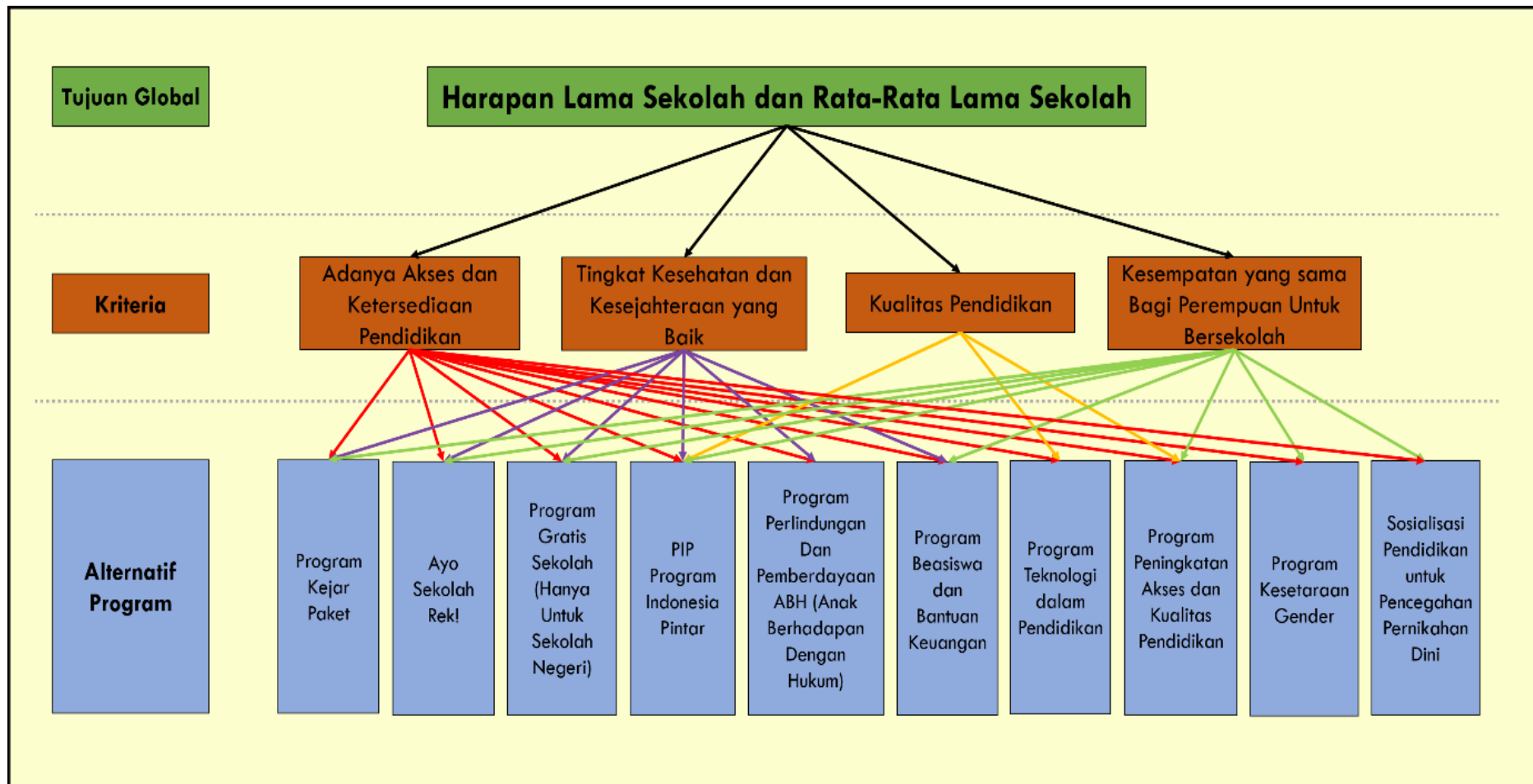
Nilai IPG 2022	Faktor yang mempengaruhi IPG		Target peningkatan Nilai Faktor yang mempengaruhi IPG (eksisting)	Kemungkinan kenaikan nilai IPG
91,37	Harapan Lama Sekolah	perkiraan tahun sekolah untuk anak-anak usia masuk sekolah yang merupakan jumlah total tahun bersekolah yang dapat diharapkan oleh anak usia masuk sekolah	12,96 tahun	0,5%
	Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup	74,78 Tahun	0,5%
	Rata-Rata Lama Sekolah	Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani.	8,46 Tahun	4%
	Pengeluaran Pendapatan Per Kapita	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga tersebut.	11.192	1,5%
Nilai IDG 2022	Faktor Yang Mempengaruhi IDG		Target Peningkatan Nilai Faktor yang mempengaruhi IDG (eksisting)	Kemungkinan kenaikan nilai IDG
80,59	Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen	Komponen pembentuk IDG yaitu perempuan di parlemen diukur dari persentase perempuan yang menduduki kursi di DPRD.	28,57	2%
	Perempuan sebagai Tenaga Profesional	Peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan ekonomi dan sosial.	51,01	0,2%
	Sumbangan Pendapatan	Indikator ketiga IDG adalah sumbangan	34,94	2%

	Perempuan	dalam pendapatan kerja. Berbanding terbalik dengan keterlibatan perempuan dalam pekerjaan, persentase sumbangan pendapatan kerja laki – laki lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan.		
--	-----------	--	--	--

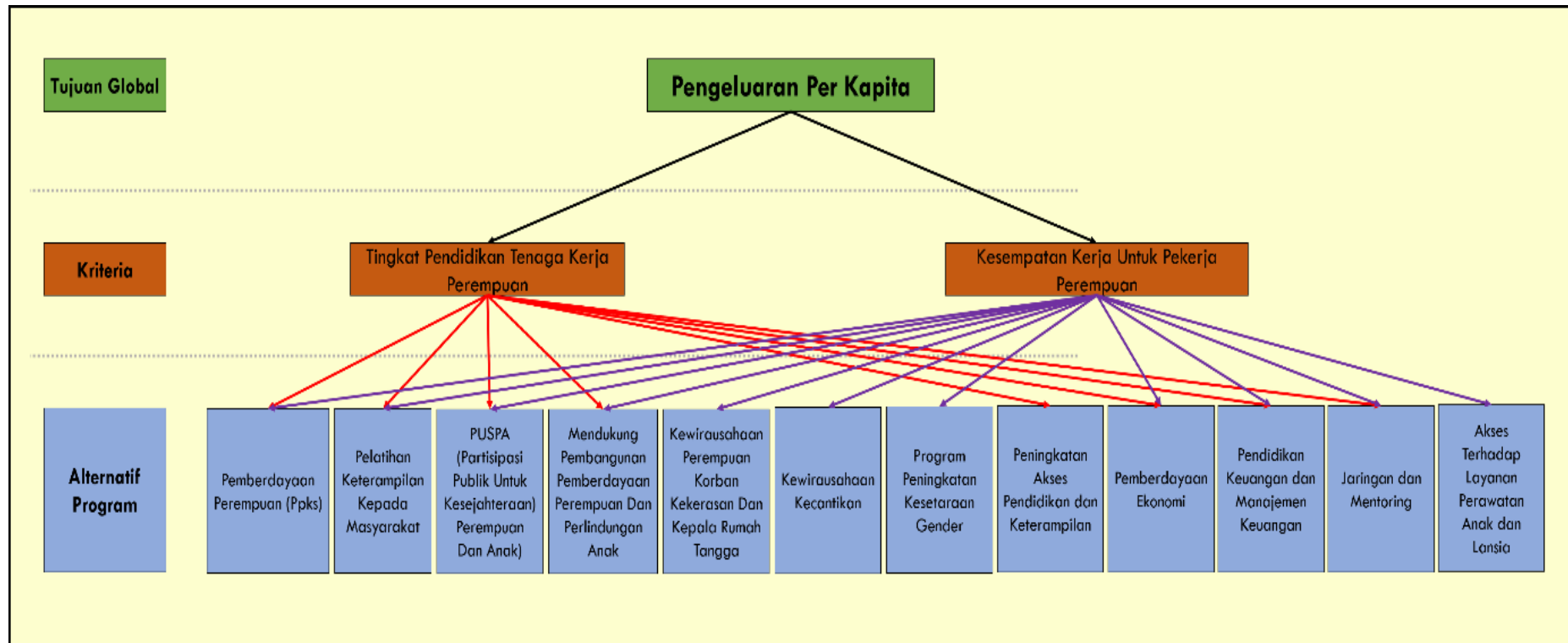
Sumber : Hasil Analisis, 2023



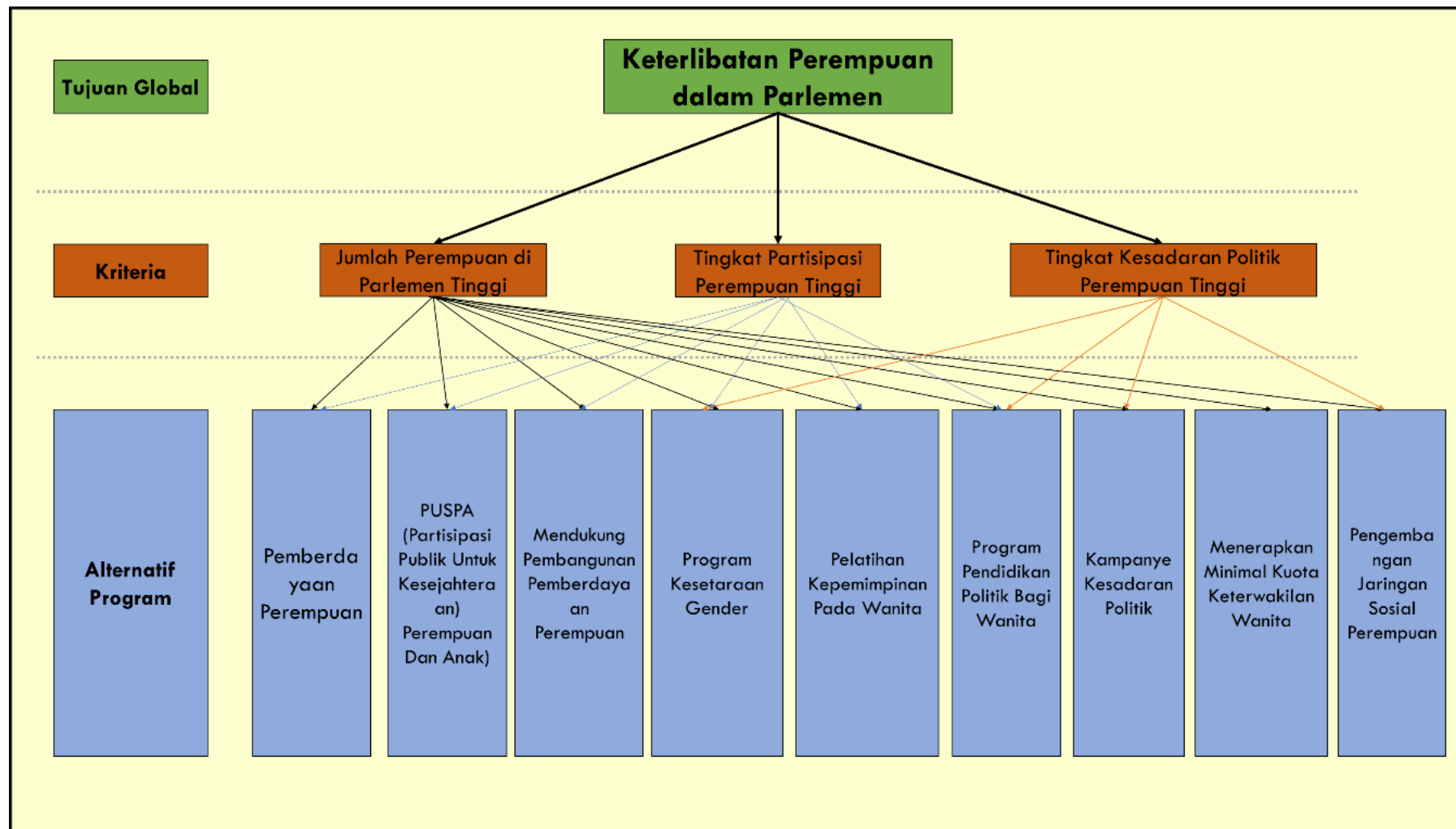
Gambar 4. 32 Skema AHP Angka Harapan Hidup



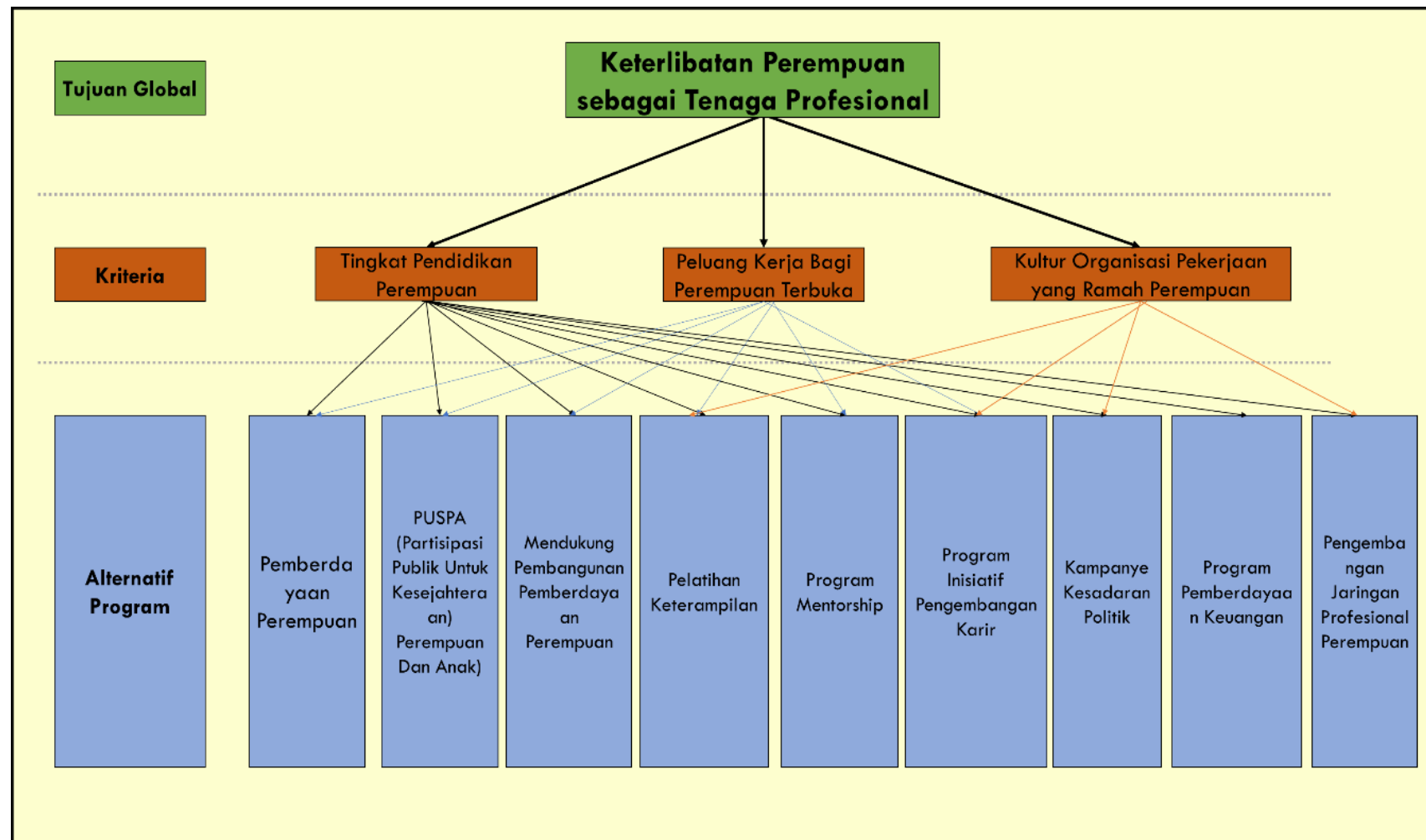
Gambar 4. 33 Skema AHP Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah



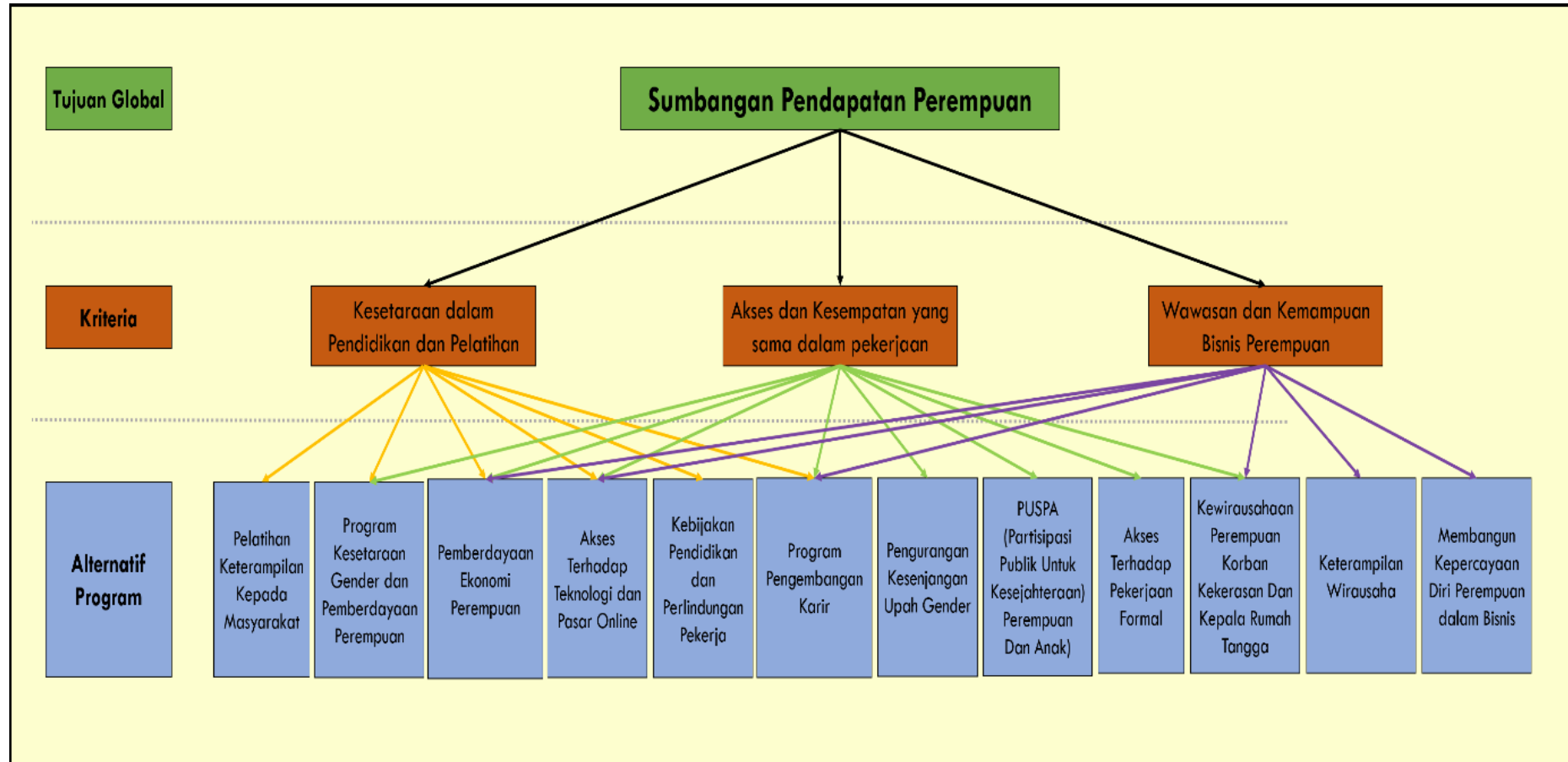
Gambar 4. 34 Skema AHP Pengeluaran Per Kapita



Gambar 4. 35 Skema AHP Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen



Gambar 4. 36 Skema AHP Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional



Gambar 4. 37 Skema AHP Sumbangan Pendapatan Perempuan

A. Angka Harapan Hidup

Salah satu elemen utama yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia di bidang kesehatan adalah usia panjang dan sehat (*a long and healthy life*). Indikator ini mengacu pada Angka Harapan Hidup (AHH) pada penduduk yang dihitung sejak kelahirannya. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, AHH penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan jenis kelamin, AHH perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang berarti bahwa perempuan lebih memiliki harapan berumur panjang dibandingkan laki-laki. Dibandingkan dengan rata-rata yang dicapai di wilayah Asia Timur dan Pasifik, Angka Harapan Hidup Penduduk Indonesia lebih pendek 2,7 tahun. Pada kategori rata-rata lama sekolah, Indonesia sedikit di atas rata-rata yang ada di wilayah Asia Timur dan Pasifik. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator yang cukup penting untuk mempengaruhi IPG. Dalam analisis AHP yang telah dilakukan Indikator ini terdiri 4 kriteria yaitu angka kematian bayi (risiko kematian bayi), angka kematian ibu (risiko kematian ibu), tingkat Kesehatan reproduksi dan kualitas hidup manula. Berikut merupakan hasil dari AHP yang telah dilakukan kepada instansi terkait. Untuk Angka Harapan Hidup sendiri memiliki 2 responden dari Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan. Adapun berikut merupakan analisis AHP untuk Angka Harapan Hidup yang dimulai dengan proses perbandingan berpasangan dari masing-masing kriteria. Penilaian perbandingan berpasangan kelima kriteria dilakukan oleh narasumber untuk mendapatkan tingkat kepentingan suatu kriteria dibandingkan dengan kriteria lainnya.

1. Narasumber Pertama

Penilaian kriteria untuk AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan nilai skala. Rentang nilai skala yang digunakan adalah dari 1 sampai 9. Nilai yang diberikan oleh narasumber akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria yang dibandingkan. Hasil dari penilaian narasumber pertama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 65 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Angka Harapan Hidup (AHH)

Kriteria	Keterangan			
	Resiko Kematian Bayi	Resiko Kematian Ibu	Kesehatan Reproduksi Ibu	Kualitas Hidup Manula
Resiko Kematian Bayi	1	0,33	3,00	3,00
Resiko Kematian Ibu	3,00	1	3,00	1,00

Kriteria	Keterangan			
	Resiko Kematian Bayi	Resiko Kematian Ibu	Kesehatan Reproduksi Ibu	Kualitas Hidup Manula
Kesehatan Reproduksi Ibu	0,33	0,33	1	1,00
Kualitas Hidup Manula	0,33	1,00	1,00	1

Sumber : Hasil Kuisisioner, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari narasumber pertama akan diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi ini bertujuan untuk menyetarakan skala perhitungan dengan menjadikan jumlah maksimal pada setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan dalam mencari nilai eigen value. Nilai eigen value diperoleh dari hasil penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

Tabel 4. 66 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Angka Harapan Hidup (AHH) Responden Pertama

Kriteria	Nilai λ				Nilai Eigen Value
	Resiko Kematian Bayi	Resiko Kematian Ibu	Kesehatan Reproduksi Ibu	Kualitas Hidup Manula	
Resiko Kematian Bayi	0,214	0,125	0,375	0,500	0,30
Resiko Kematian Ibu	0,643	0,375	0,375	0,167	0,39
Kesehatan Reproduksi Ibu	0,071	0,375	0,125	0,167	0,18
Kualitas Hidup Manula	0,071	0,375	0,125	0,167	0,18
Jumlah					1

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya adalah perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai lamda maksimal. Nilai lamda maksimal yang diperoleh adalah 4,54. Nilai lamda maksimal lalu digunakan untuk menghitung nilai consistency index (CI), dimana nilai CI dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,06. Nilai random index (RI) yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan tabel random index. Tahap pengolahan data dari narasumber, terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai consistency ratio (CR) berada pada angka $\leq 10\%$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan dari narasumber dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat sehingga dapat digunakan

untuk tahapan selanjutnya.

Tabel 4. 67 Hasil Eigen Value dan Prioritas Angka Harapan Hidup (AHH)

No	Kriteria	Eigen Value
1	Resiko Kematian Ibu	0,39
2	Resiko Kematian Bayi	0,30
3	Kesehatan Reproduksi Ibu	0,18
4	Kualitas Hidup Manula	0,18

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil penilaian dari narasumber pertama, memberikan bobot tertinggi pada kriteria Risiko Kematian Ibu. Nilai bobot tertinggi kedua adalah kriteria Risiko Kematian Bayi. Sehingga apabila ingin meningkatkan nilai Angka Harapan Hidup. Berdasarkan pendapat narasumber pertama, hal yang harus diprioritaskan pertama adalah Risiko Kematian Ibu yang disusul oleh memprioritaskan Risiko Kematian Bayi.

2. Narasumber Kedua

Penilaian kriteria untuk AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan nilai skala. Rentang nilai skala yang digunakan adalah dari 1 sampai 9. Nilai yang diberikan oleh narasumber akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria yang dibandingkan. Hasil dari penilaian narasumber pertama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 68 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Angka Harapan Hidup (AHH)

Kriteria	Keterangan			
	Resiko Kematian Bayi	Resiko Kematian Ibu	Kesehatan Reproduksi Ibu	Kualitas Hidup Manula
Resiko Kematian Bayi	1	0,33	5,00	3,00
Resiko Kematian Ibu	3,00	1	3,00	1,00
Kesehatan Reproduksi Ibu	0,20	0,33	1	1,00
Kualitas Hidup Manula	0,33	1,00	1,00	1

Sumber : Hasil Kuisiner, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari narasumber pertama akan diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi ini bertujuan untuk menyetarakan skala perhitungan dengan menjadikan jumlah maksimal pada setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan dalam mencari nilai eigen value. Nilai

eigen value diperoleh dari hasil penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

Tabel 4. 69 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Angka Harapan Hidup (AHH) Responden Kedua

Kriteria	Nilai λ				Nilai Eigen Value
	Resiko Kematian Bayi	Resiko Kematian Ibu	Kesehatan Reproduksi Ibu	Kualitas Hidup Manula	
Resiko Kematian Bayi	0,221	0,125	0,500	0,500	0,34
Resiko Kematian Ibu	0,662	0,375	0,300	0,167	0,38
Kesehatan Reproduksi Ibu	0,074	0,375	0,100	0,167	0,18
Kualitas Hidup Manula	0,074	0,375	0,100	0,167	0,18
Jumlah					1

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya adalah perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai lamda maksimal. Nilai lamda maksimal yang diperoleh adalah 4,69. Nilai lamda maksimal lalu digunakan untuk menghitung nilai consistency index (CI), dimana nilai CI dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,088. Nilai random index (RI) yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan tabel random index. Tahap pengolahan data dari narasumber, terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai consistency ratio (CR) berada pada angka $\leq 10\%$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan dari narasumber dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat sehingga dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya.

Tabel 4. 70 Hasil Eigen Value dan Prioritas Angka Harapan Hidup (AHH)

No	Kriteria	Eigen Value
1	Resiko Kematian Ibu	0,38
2	Resiko Kematian Bayi	0,34
3	Kesehatan Reproduksi Ibu	0,18
4	Kualitas Hidup Manula	0,18

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil penilaian dari narasumber kedua, memberikan bobot tertinggi pada kriteria Risiko Kematian Ibu. Nilai bobot tertinggi kedua adalah kriteria

Risiko Kematian Bayi. Sehingga apabila ingin meningkatkan nilai Angka Harapan Hidup. Berdasarkan pendapat narasumber, hal yang harus diprioritaskan pertama adalah Risiko Kematian Ibu yang disusul oleh memprioritaskan Risiko Kematian Bayi.

3. Gabungan Narasumber

Dari ke-2 narasumber diatas memiliki penilaian bobot dan urutan prioritas masing-masing. Setelah seluruh penilaian kedua narasumber dinyatakan konsisten untuk mencegah nilai error, maka hasil penilaian AHP perlu digabungkan untuk menentukan besaran nilai bobot dari masing-masing kriteria. Narasumber AHP pada penelitian berjumlah lebih dari satu, maka penggabungan matriks perbandingan berpasangan menggunakan rata-rata geometrik (Geomean). Berikut merupakan geomean pada AHP kriteria Angka Harapan Hidup yang dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 4. 71 Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Kriteria
Angka Harapan Hidup (AHH)**

Kriteria	Keterangan			
	Resiko Kematian Bayi	Resiko Kematian Ibu	Kesehatan Reproduksi Ibu	Kualitas Hidup Manula
Resiko Kematian Bayi	1	0,33	3,87	3,00
Resiko Kematian Ibu	3,00	1	3,00	1,00
Kesehatan Reproduksi Ibu	0,26	0,33	1	1,00
Kualitas Hidup Manula	0,33	1,00	1,00	1
Jumlah	4,59	2,67	8,87	6,00

Sumber : Hasil Kuisisioner, 2023

**Tabel 4. 72 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan
Angka Harapan Hidup (AHH)**

Kriteria	Nilai λ				Nilai Eigen Value
	Resiko Kematian Bayi	Resiko Kematian Ibu	Kesehatan Reproduksi Ibu	Kualitas Hidup Manula	
Resiko Kematian Bayi	0,218	0,125	0,436	0,500	1,279
Resiko Kematian Ibu	0,653	0,375	0,338	0,167	1,533
Kesehatan Reproduksi Ibu	0,056	0,125	0,113	0,167	0,461
Kualitas Hidup Manula	0,073	0,375	0,113	0,167	0,727
Jumlah					1,000

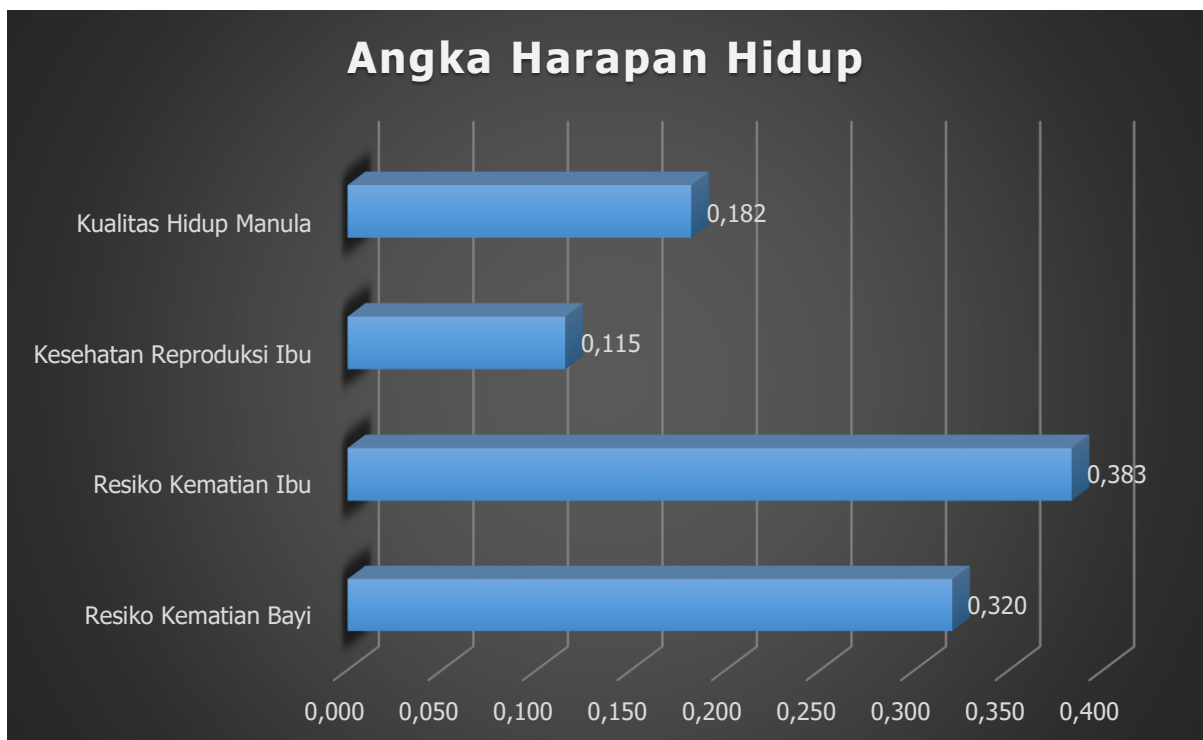
Sumber : Hasil Analisis, 2023

Setelah mendapatkan nilai geomean pada masing-masing perbandingan berpasangan, maka nilai geomean disusun ke dalam matrik perbandingan berpasangan dan dinormalisasi untuk mencari nilai lamda maksimal, nilai CI dan nilai CR. Maka nilai lamda maksimalnya didapatkan sebesar 4,06 dengan nilai CI sebesar 0,02. Dengan Nilai IR yang digunakan sesuai ketentuan yakni sebesar 0,90 karena hanya ada 4 kriteria, maka hasil nilai CR dari hasil penggabungan narasumber adalah 0,02% sehingga penilaian dari gabungan kedua narasumber tersebut dinyatakan konsisten. Sehingga berdasarkan kedua gabungan narasumber tersebut dapat diketahui bahwa urutan prioritas kriteria dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 73 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Angka Harapan Hidup (AHH)

Kriteria	Eigen Value
Resiko Kematian Bayi	0,320
Resiko Kematian Ibu	0,383
Kesehatan Reproduksi Ibu	0,115
Kualitas Hidup Manula	0,182
Jumlah	1

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 4. 38 Grafik Kriteria Angka Harapan Hidup

Berdasarkan hasil penilaian dari gabungan kedua narasumber, hasilnya menunjukkan bahwa bobot tertinggi pada kriteria Risiko Kematian Ibu. Nilai bobot tertinggi kedua adalah kriteria Risiko Kematian Bayi. Sehingga apabila ingin meningkatkan nilai Angka Harapan Hidup. Berdasarkan hasil analisis, hal yang harus diprioritaskan pertama adalah Risiko Kematian Ibu yang disusul oleh memprioritaskan Risiko Kematian Bayi agar angka harapan hidup di Kabupaten Mojokerto meningkat.

Adapun selanjutnya akan dilanjutkan analisis AHP pada masing-masing unsur dari kriteria yang ada pada Angka harapan hidup, dimulai dari unsur Risiko Kematian Bayi untuk mengetahui urutan prioritas program.

Risiko Kematian Bayi

1. Narasumber Pertama

Penilaian kriteria untuk AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan nilai skala. Rentang nilai skala yang digunakan adalah dari 1 sampai 9. Nilai yang diberikan oleh narasumber akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria yang dibandingkan. Hasil dari penilaian narasumber pertama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 74 Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Risiko Kematian Bayi Narasumber Pertama

Kriteria	Keterangan							
	Program Monitoring Ibu Hamil	Program Kelas Ibu & Balita	Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	Persalinan Aman, Sigap	Sosialisasi Stunting & KB	Promosi ASI Eksklusif	Kampanye Imunisasi
Program Monitoring Ibu Hamil	1	1,00	1	9,00	0,33	3,00	1,00	1,00
Program Kelas Ibu & Balita	1	1	9	0,14	1,00	5	0,14	5
Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	1,00	0,11	1	3	0,33	0,20	3	3
Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	0,11	7	0,33	1	0,20	1,00	7	1
Persalinan Aman, Sigap	3	1	3	5	1	9	1,00	0,33
Sosialisasi Stunting & KB	0,33	0,20	5	1	0,11	1	0,14	0,33
Promosi ASI Eksklusif	1	7	0,33	0,14	1	7	1	1
Kampanye Imunisasi	1	0,20	0,33	1,00	3	3	1,00	1
Jumlah	8,44	17,51	20,00	20,29	6,98	29,20	14,286	12,667

Sumber : Hasil Kuisioner, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari narasumber pertama akan diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi ini bertujuan untuk menyetarakan skala perhitungan dengan menjadikan jumlah maksimal pada setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan dalam mencari nilai eigen value. Nilai eigen value diperoleh dari hasil penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

Tabel 4. 75 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Risiko Kematian Bayi Narasumber Pertama

Kriteria	Keterangan								Nilai Eigen Value
	Program Monitoring Ibu Hamil	Program Kelas Ibu & Balita	Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	Persalinan Aman, Sigap	Sosialisasi Stunting & KB	Promosi ASI Eksklusif	Kampanye Imunisasi	
Program Monitoring Ibu Hamil	0,12	0,06	0,05	0,44	0,05	0,10	0,07	0,08	0,121
Program Kelas Ibu & Balita	0,12	0,06	0,45	0,01	0,14	0,17	0,01	0,39	0,169
Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	0,12	0,01	0,05	0,15	0,05	0,01	0,21	0,24	0,103
Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	0,01	0,40	0,02	0,05	0,03	0,03	0,49	0,08	0,139
Persalinan Aman, Sigap	0,36	0,06	0,15	0,25	0,14	0,31	0,07	0,03	0,170
Sosialisasi Stunting & KB	0,04	0,01	0,25	0,05	0,02	0,03	0,01	0,03	0,055
Promosi ASI Eksklusif	0,12	0,40	0,02	0,01	0,14	0,24	0,07	0,08	0,134
Kampanye Imunisasi	0,12	0,01	0,02	0,05	0,43	0,10	0,07	0,08	0,110
Jumlah									1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya adalah perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai lamda maksimal. Nilai lamda maksimal yang diperoleh adalah 14,94. Nilai lamda maksimal lalu digunakan untuk menghitung nilai consistency index (CI), dimana nilai CI dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,07. Nilai random index (RI) yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan tabel random index. Tahap pengolahan data dari narasumber, terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai consistency ratio (CR) berada pada angka $\leq 10\%$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan dari narasumber dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat sehingga dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya.

Tabel 4. 76 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Risiko Kematian Bayi

No	Alternatif Program	Eigen Value
1	Persalinan Aman, Sigap	0,169587
2	Program Kelas Ibu & Balita	0,168981
3	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	0,13884
4	Promosi ASI Eksklusif	0,134233
5	Program Monitoring Ibu Hamil	0,121081
6	Kampanye Imunisasi	0,109679
7	Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	0,103014
8	Sosialisasi Stunting & KB	0,054585

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil penilaian dari narasumber pertama, memberikan bobot tertinggi pada unsur program Persalinan Aman dan Sigap. Nilai bobot tertinggi kedua adalah Program Kelas Ibu dan Balita. Sedangkan untuk 2 program yang memiliki angka terendah menurut narasumber pertama berada pada program penyuluhan nakse terkait asfiksia dan sosialisasi stunting & KB. Sehingga apabila dilihat dari program-program yang ada di Kriteria Risiko Kematian Bayi, untuk dapat meminimalisir angka Risiko Kematian Bayi dapat dilakukan dengan mendahulukan Persalinan Aman dan Sigap serta Program Kelas Ibu & Balita.

2. Narasumber Kedua

Penilaian kriteria untuk AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan nilai skala. Rentang nilai skala yang digunakan adalah dari 1 sampai 9. Nilai yang diberikan oleh narasumber akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria yang dibandingkan. Hasil dari penilaian narasumber pertama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 77 Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Risiko Kematian Bayi Narasumber Kedua

Kriteria	Keterangan							
	Program Monitoring Ibu Hamil	Program Kelas Ibu & Balita	Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	Persalinan Aman, Sigap	Sosialisasi Stunting & KB	Promosi ASI Eksklusif	Kampanye Imunisasi
Program Monitoring Ibu Hamil	1	1,00	0	9,00	0,33	3,00	1,00	1,00
Program Kelas Ibu & Balita	3	1	9	0,14	1,00	5	0,14	5
Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	1,00	0,11	1	3	0,33	0,20	3	3
Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	0,11	7	0,33	1	0,20	1,00	7	1
Persalinan Aman, Sigap	3	1	3	5	1	9	1,00	0,33
Sosialisasi Stunting & KB	0,33	0,20	5	1	0,11	1	0,14	0,33
Promosi ASI Eksklusif	1	7	0,33	0,14	1	7	1	1
Kampanye Imunisasi	1	0,20	0,33	1,00	3	3	1,00	1
Jumlah	10,44	17,51	19,33	20,29	6,98	29,20	14,286	12,667

Sumber : Hasil Kuisioner, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari narasumber kedua akan diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi ini bertujuan untuk menyetarakan skala perhitungan dengan menjadikan jumlah maksimal pada setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan dalam mencari nilai eigen value. Nilai eigen value diperoleh dari hasil penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

Tabel 4. 78 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Risiko Kematian Bayi Narasumber Kedua

Kriteria	Keterangan								Nilai Eigen Value
	Program Monitoring Ibu Hamil	Program Kelas Ibu & Balita	Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	Persalinan Aman, Sigap	Sosialisasi Stunting & KB	Promosi ASI Eksklusif	Kampanye Imunisasi	
Program Monitoring Ibu Hamil	0,10	0,06	0,02	0,44	0,05	0,10	0,07	0,08	0,121
Program Kelas Ibu & Balita	0,29	0,06	0,47	0,01	0,14	0,17	0,01	0,39	0,169
Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	0,10	0,01	0,05	0,15	0,05	0,01	0,21	0,24	0,103

Kriteria	Keterangan								Nilai Eigen Value
	Program Monitoring Ibu Hamil	Program Kelas Ibu & Balita	Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	Persalinan Aman, Sigap	Sosialisasi Stunting & KB	Promosi ASI Eksklusif	Kampanye Imunisasi	
Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	0,01	0,40	0,02	0,05	0,03	0,03	0,49	0,08	0,139
Persalinan Aman, Sigap	0,29	0,06	0,16	0,25	0,14	0,31	0,07	0,03	0,170
Sosialisasi Stunting & KB	0,03	0,01	0,26	0,05	0,02	0,03	0,01	0,03	0,055
Promosi ASI Eksklusif	0,10	0,40	0,02	0,01	0,14	0,24	0,07	0,08	0,134
Kampanye Imunisasi	0,10	0,01	0,02	0,05	0,43	0,10	0,07	0,08	0,110
Jumlah									1,00

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya adalah perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai lamda maksimal. Nilai lamda maksimal yang diperoleh adalah 15,39. Nilai lamda maksimal lalu digunakan untuk menghitung nilai consistency index (CI) dan Nilai random index (RI) yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan tabel random index. Tahap pengolahan data dari narasumber, terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai consistency ratio (CR) dengan hasil 0,06 berada pada angka $\leq 10\%$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan dari narasumber dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat sehingga dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya.

Tabel 4. 79 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Risiko Kematian Bayi

No	Alternatif Program	Eigen Value
1	Program Kelas Ibu & Balita	0,168087
2	Persalinan Aman, Sigap	0,16173
3	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	0,138597
4	Promosi ASI Eksklusif	0,13147
5	Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	0,124332
6	Program Monitoring Ibu Hamil	0,114152
7	Kampanye Imunisasi	0,106916
8	Sosialisasi Stunting & KB	0,054717

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil penilaian dari narasumber kedua, memberikan bobot tertinggi pada unsur program Program Kelas Ibu dan Balita. Nilai bobot tertinggi kedua

adalah Persalinan Aman dan Sigap. Sedangkan untuk program yang memiliki angka terendah menurut narasumber kedua berada pada program sosialisasi stunting & KB. Sehingga apabila dilihat dari program-program yang ada di Kriteria Risiko Kematian Bayi, untuk dapat meminimalisir angka Risiko Kematian Bayi dapat dilakukan dengan mendahulukan Persalinan Aman dan Sigap serta Program Kelas Ibu & Balita.

3. Gabungan Narasumber

Dari ke-2 narasumber diatas memiliki penilaian bobot dan urutan prioritas masing-masing. Setelah seluruh penilaian kedua narasumber dinyatakan konsisten untuk mencegah nilai error, maka hasil penilaian AHP perlu digabungkan untuk menentukan besaran nilai bobot dari masing-masing kriteria. Narasumber AHP pada penelitian berjumlah lebih dari satu, maka penggabungan matriks perbandingan berpasangan menggunakan rata-rata geometrik (Geomean). Berikut merupakan geomean pada AHP kriteria Angka Harapan Hidup yang dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 80 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Risiko Kematian Bayi

Kriteria	Keterangan							
	Program Monitoring Ibu Hamil	Program Kelas Ibu & Balita	Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	Persalinan Aman, Sigap	Sosialisasi Stunting & KB	Promosi ASI Eksklusif	Kampanye Imunisasi
Program Monitoring Ibu Hamil	1	1	0,58	9	0,33	3	1	1
Program Kelas Ibu & Balita	1	1	9	0,14	1	5	0,14	5
Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	1,73	0,11	1	3	0,33	0,20	3	3
Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	0,11	7	0,33	1	0,20	1	7	1
Persalinan Aman, Sigap	3	1	3	5	1	9	1	0,33
Sosialisasi Stunting & KB	0,33	0,20	5	1	0,11	1	0,14	0,33
Promosi ASI Eksklusif	1	7	0,33	0,14	1	7	1	1
Kampanye Imunisasi	1	0,20	0,33	1	3	3	1	1
Jumlah	9,18	17,51	19,58	20,29	6,98	29,20	14,286	12,667

Sumber : Hasil Kuisioner, 2023

Tabel 4. 81 Matriks Gabungan Eigen Value Alternatif Porgram Risiko Kematian Bayi

Kriteria	Keterangan								Nilai Eigen Value
	Program Monitoring Ibu Hamil	Program Kelas Ibu & Balita	Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	Persalinan Aman, Sigap	Sosialisasi Stunting & KB	Promosi ASI Eksklusif	Kampanye Imunisasi	
Program Monitoring Ibu Hamil	0,11	0,06	0,03	0,44	0,05	0,10	0,07	0,08	0,117
Program Kelas Ibu & Balita	0,11	0,06	0,46	0,01	0,14	0,17	0,01	0,39	0,169
Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	0,19	0,01	0,05	0,15	0,05	0,01	0,21	0,24	0,112
Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	0,01	0,40	0,02	0,05	0,03	0,03	0,49	0,08	0,139
Persalinan Aman, Sigap	0,33	0,06	0,15	0,25	0,14	0,31	0,07	0,03	0,166
Sosialisasi Stunting & KB	0,04	0,01	0,26	0,05	0,02	0,03	0,01	0,03	0,055
Promosi ASI Eksklusif	0,11	0,40	0,02	0,01	0,14	0,24	0,07	0,08	0,133
Kampanye Imunisasi	0,11	0,01	0,02	0,05	0,43	0,10	0,07	0,08	0,109
Jumlah									1,00

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Setelah mendapatkan nilai geomean pada masing-masing perbandingan berpasangan, maka nilai geomean disusun ke dalam matrik perbandingan berpasangan dan dinormalisasi untuk mencari nilai lamda maksimal, nilai CI dan nilai CR. Maka nilai lamda maksimalnya didapatkan sebesar 15,39 dengan nilai CI sebesar 0,08. Dengan Nilai IR yang digunakan sesuai ketentuan, maka hasil nilai CR dari hasil penggabungan narasumber adalah 0,05% sehingga penilaian dari gabungan kedua narasumber tersebut dinyatakan konsisten. Sehingga berdasarkan kedua gabungan narasumber tersebut dapat diketahui bahwa urutan prioritas kriteria dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 82 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Risiko Kematian Bayi

Alternatif Program	Eigen Value
Program Monitoring Ibu Hamil	0,117
Program Kelas Ibu & Balita	0,169
Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	0,112
Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	0,139
Persalinan Aman, Sigap	0,166
Sosialisasi Stunting & KB	0,055
Promosi ASI Eksklusif	0,133

Kampanye Imunisasi	0,109
--------------------	-------

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 4. 39 Grafik Prioritas Program Unsur Risiko Kematian Bayi

Berdasarkan hasil penilaian dari gabungan kedua narasumber, hasilnya menunjukkan bahwa nilai tertinggi pada kriteria unsur Risiko Kematian Bayi terdapat pada program Kelas Ibu & Balita. Nilai bobot tertinggi kedua adalah program persalinan aman dan sigap. Sehingga apabila ingin menekan angka kematian bayi, berdasarkan hasil analisis program yang harus diprioritaskan pertama adalah program kelas ibu dan balita agar angka harapan hidup di Kabupaten Mojokerto meningkat.

Risiko Kematian Ibu

1. Narasumber Pertama

Penilaian kriteria untuk AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan nilai skala. Rentang nilai skala yang digunakan adalah dari 1 sampai 9. Nilai yang diberikan oleh narasumber akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria yang dibandingkan. Hasil dari penilaian narasumber pertama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 83 Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Risiko Kematian Ibu Narasumber Pertama

Kriteria	Keterangan					
	Program Monitoring Ibu Hamil	Program Kelas Ibu & Balita	Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	Persalinan Aman, Sigap	Sosialisasi Stunting & KB
Program Monitoring Ibu Hamil	1	1,00	3	0,33	1,00	0,33
Program Kelas Ibu & Balita	0,33	1	3	1,00	1,00	1,00
Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	0,33	0,33	1	1	1,00	1,00
Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	3,00	1	1,00	1	0,33	1,00
Persalinan Aman, Sigap	1	1	1	3	1	1
Sosialisasi Stunting & KB	3,00	1,00	1,00	0,33	1,00	1
Jumlah	8,67	5,33	10,00	6,67	5,33	5,33

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari narasumber pertama akan diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi ini bertujuan untuk menyetarakan skala perhitungan dengan menjadikan jumlah maksimal pada setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan dalam mencari nilai eigen value. Nilai eigen value diperoleh dari hasil penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

Tabel 4. 84 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Risiko Kematian Ibu Narasumber Pertama

Nilai λ						Eigen Value
Program Monitoring Ibu Hamil	Program Kelas Ibu & Balita	Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	Persalinan Aman, Sigap	Sosialisasi Stunting & KB	
0,12	0,19	0,30	0,05	0,19	0,06	0,150
0,04	0,19	0,30	0,15	0,19	0,19	0,175
0,04	0,06	0,10	0,15	0,19	0,19	0,121
0,35	0,19	0,10	0,15	0,06	0,19	0,172
0,12	0,19	0,10	0,45	0,19	0,19	0,205
0,35	0,19	0,10	0,05	0,19	0,19	0,176
						1,00

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya adalah perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai lamda maksimal. Nilai lamda maksimal yang diperoleh adalah 6,62. Nilai lamda maksimal lalu digunakan untuk

menghitung nilai consistency index (CI) dan Nilai random index (RI) yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan tabel random index. Tahap pengolahan data dari narasumber, terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai consistency ratio (CR) dengan hasil 0,08 berada pada angka $\leq 10\%$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan dari narasumber dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat sehingga dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya.

Tabel 4. 85 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Risiko Kematian Ibu

No	Alternatif Program	Eigen Value
1	Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	0,204647
2	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	0,176442
3	Sosialisasi Stunting & KB	0,17516
4	Program Monitoring Ibu Hamil	0,172276
5	Persalinan Aman, Sigap	0,150481
6	Program Kelas Ibu & Balita	0,120994

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil penilaian dari narasumber kedua, memberikan bobot tertinggi pada unsur program penyuluhan nakes. Sehingga apabila dilihat dari program-program yang ada di Kriteria Risiko Kematian Ibu, untuk dapat meminimalisir angka Risiko Kematian Ibu dapat dilakukan dengan mendahulukan Penyuluhan Nakes.

2. Narasumber Kedua

Penilaian kriteria untuk AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan nilai skala. Rentang nilai skala yang digunakan adalah dari 1 sampai 9. Nilai yang diberikan oleh narasumber akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria yang dibandingkan. Hasil dari penilaian narasumber pertama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 86 Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Risiko Kematian Ibu Narasumber Kedua

Kriteria	Keterangan					
	Program Monitoring Ibu Hamil	Program Kelas Ibu & Balita	Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	Persalinan Aman, Sigap	Sosialisasi Stunting & KB
Program Monitoring Ibu Hamil	1	3,00	1	1,00	1,00	0,33
Program Kelas Ibu & Balita	0,33	1	3	1,00	1,00	1,00

Kriteria	Keterangan					
	Program Monitoring Ibu Hamil	Program Kelas Ibu & Balita	Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	Persalinan Aman, Sigap	Sosialisasi Stunting & KB
Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	1,00	0,33	1	1	1,00	1,00
Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	1,00	1	1,00	1	0,33	1,00
Persalinan Aman, Sigap	1	1	1	3	1	1
Sosialisasi Stunting & KB	3,00	1,00	1,00	0,33	1,00	1
Jumlah	7,33	7,33	8,00	7,33	5,33	5,33

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari narasumber pertama akan diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi ini bertujuan untuk menyetarakan skala perhitungan dengan menjadikan jumlah maksimal pada setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan dalam mencari nilai eigen value. Nilai eigen value diperoleh dari hasil penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

Tabel 4. 87 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Risiko Kematian Ibu Narasumber Kedua

Nilai λ						Eigen Value
Program Monitoring Ibu Hamil	Program Kelas Ibu & Balita	Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	Persalinan Aman, Sigap	Sosialisasi Stunting & KB	
0,14	0,41	0,13	0,14	0,19	0,06	0,176
0,05	0,14	0,38	0,14	0,19	0,19	0,178
0,14	0,05	0,13	0,14	0,19	0,19	0,136
0,14	0,14	0,13	0,14	0,06	0,19	0,131
0,14	0,14	0,13	0,41	0,19	0,19	0,197
0,41	0,14	0,13	0,05	0,19	0,19	0,182
						1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya adalah perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai lamda maksimal. Nilai lamda maksimal yang diperoleh adalah 6,61. Nilai lamda maksimal lalu digunakan untuk menghitung nilai consistency index (CI) dan Nilai random index (RI) yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan tabel random index. Tahap pengolahan data dari narasumber, terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai consistency ratio

(CR) dengan hasil 0,09 berada pada angka $\leq 10\%$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan dari narasumber dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat sehingga dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya.

Tabel 4. 88 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Risiko Kematian Ibu

No	Alternatif Program	Eigen Value
1	Persalinan Aman, Sigap	0,19697
2	Sosialisasi Stunting & KB	0,181818
3	Program Kelas Ibu & Balita	0,17803
4	Program Monitoring Ibu Hamil	0,176136
5	Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	0,136364
6	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	0,130682

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil penilaian dari narasumber kedua, memberikan bobot tertinggi pada unsur program persalinan aman dan sigap. Sehingga apabila dilihat dari program-program yang ada di Kriteria Risiko Kematian Ibu, untuk dapat meminimalisir angka Risiko Kematian Ibu dapat dilakukan dengan mendahulukan Persalinan Aman dan Sigap.

3. Gabungan Narasumber

Dari ke-2 narasumber diatas memiliki penilaian bobot dan urutan prioritas masing-masing. Setelah seluruh penilaian kedua narasumber dinyatakan konsisten untuk mencegah nilai error, maka hasil penilaian AHP perlu digabungkan untuk menentukan besaran nilai bobot dari masing-masing kriteria. Narasumber AHP pada penelitian berjumlah lebih dari satu, maka penggabungan matriks perbandingan berpasangan menggunakan rata-rata geometrik (Geomean). Berikut merupakan geomean pada AHP kriteria Angka Harapan Hidup yang dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 89 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Risiko Kematian Ibu

Kriteria	Keterangan					
	Program Monitoring Ibu Hamil	Program Kelas Ibu & Balita	Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	Persalinan Aman, Sigap	Sosialisasi Stunting & KB
Program Monitoring Ibu Hamil	1	1,73	1,73	0,58	1	0,33
Program Kelas Ibu & Balita	0,33	1	3	1	1	1
Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	0,58	0,33	1	1	1	1
Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	1,73	1	1	1	0,33	1
Persalinan Aman, Sigap	1	1	1	3	1	1
Sosialisasi Stunting & KB	3	1	1	0,33	1	1
Jumlah	7,64	6,07	8,73	6,91	5,33	5,33

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 90 Matrisk Gabungan Eigen Value Alternatif Program Risiko Kematian Ibu

Nilai λ						Eigen Value
Program Monitoring Ibu Hamil	Program Kelas Ibu & Balita	Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	Persalinan Aman, Sigap	Sosialisasi Stunting & KB	
0,13	0,29	0,20	0,08	0,19	0,06	0,158
0,04	0,16	0,34	0,14	0,19	0,19	0,179
0,08	0,05	0,11	0,14	0,19	0,19	0,127
0,23	0,16	0,11	0,14	0,06	0,19	0,150
0,13	0,16	0,11	0,43	0,19	0,19	0,203
0,39	0,16	0,11	0,05	0,19	0,19	0,183
						1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Setelah mendapatkan nilai geomean pada masing-masing perbandingan berpasangan, maka nilai geomean disusun ke dalam matrik perbandingan berpasangan dan dinormalisasi untuk mencari nilai lamda maksimal, nilai CI dan nilai CR. Maka nilai lamda maksimalnya didapatkan sebesar 6,49 dengan nilai CI sebesar 0,09. Dengan Nilai IR yang digunakan sesuai ketentuan, maka hasil nilai CR dari hasil penggabungan narasumber adalah 0,06 sehingga penilaian dari gabungan kedua narasumber tersebut dinyatakan konsisten. Sehingga berdasarkan kedua gabungan narasumber tersebut dapat diketahui bahwa urutan prioritas kriteria dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 91 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan

Alternatif Program Risiko Kematian Ibu

Alternatif Program	Eigen Value
Program Monitoring Ibu Hamil	0,158
Program Kelas Ibu & Balita	0,179
Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	0,127
Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	0,150
Persalinan Aman, Sigap	0,203
Sosialisasi Stunting & KB	0,183

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 4. 40 Grafik Prioritas Program Unsur Risiko Kematian Ibu

Berdasarkan hasil penilaian dari gabungan kedua narasumber, hasilnya menunjukkan bahwa nilai tertinggi pada kriteria unsur Risiko Kematian Ibu terdapat pada program Persalinan Aman dan Sigap. Nilai bobot tertinggi kedua adalah program Sosialisasi stunting & KB. Sehingga apabila ingin menekan angka kematian bayi, berdasarkan hasil analisis program yang harus diprioritaskan pertama adalah program persalinan aman dan sigap agar angka harapan hidup di Kabupaten Mojokerto meningkat.

Tingkat Kesehatan Reproduksi

1. Narasumber Pertama

Penilaian kriteria untuk AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan nilai skala. Rentang nilai skala yang digunakan adalah dari 1 sampai 9. Nilai yang diberikan oleh narasumber akan menentukan tingkat

kepentingan dari kriteria yang dibandingkan. Hasil dari penilaian narasumber pertama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 92 Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Kesehatan Reproduksi Narasumber Pertama

Kriteria	Keterangan		
	Sosialisasi Stunting dan KB	Gebyar Pemakaian Pil KB	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi
Sosialisasi Stunting dan KB	1	5	3,00
Gebyar Pemakaian Pil KB	0,20	1	1
Penyuluhan Kesehatan Reproduksi	0,33	1,00	1

Sumber : Hasil Kuisiner, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari narasumber pertama akan diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan skala perhitungan dengan menjadikan jumlah maksimal pada setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan dalam mencari nilai eigen value. Nilai eigen value diperoleh dari hasil penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

Tabel 4. 93 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Tingkat Kesehatan Reproduksi Narasumber Pertama

Kriteria	Nilai λ			Nilai Eigen Value
	Sosialisasi Stunting dan KB	Gebyar Pemakaian Pil KB	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi	
Sosialisasi Stunting dan KB	0,652	0,714	0,600	0,655
Gebyar Pemakaian Pil KB	0,130	0,143	0,200	0,158
Penyuluhan Kesehatan Reproduksi	0,217	0,143	0,200	0,187
Jumlah				1

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya adalah perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai lamda maksimal. Nilai lamda maksimal yang diperoleh adalah 3,043. Nilai lamda maksimal lalu digunakan untuk menghitung nilai consistency index (CI), dimana nilai CI dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,04. Nilai random index (RI) yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan tabel random index. Tahap pengolahan data dari narasumber, terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai consistency ratio (CR) berada pada angka $\leq 10\%$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan dari

narasumber dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat sehingga dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya.

Tabel 4. 94 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Tingkat Kesehatan Reproduksi

No	Alternatif Program	Eigen Value
1	Sosialisasi Stunting dan KB	0,66
2	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi	0,19
3	Gebyar Pemakaian Pil KB	0,16

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil penilaian dari narasumber pertama, memberikan bobot tertinggi pada kriteria Tingkat Kesehatan Reproduksi. Nilai bobot tertinggi kedua adalah program Penyuluhan Kesehatan Reproduksi. Sehingga apabila ingin meningkatkan nilai Angka Harapan Hidup. Berdasarkan pendapat narasumber pertama, hal yang harus diprioritaskan adalah sesuai urutan dengan program diatas.

2. Narasumber Kedua

Penilaian kriteria untuk AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan nilai skala. Rentang nilai skala yang digunakan adalah dari 1 sampai 9. Nilai yang diberikan oleh narasumber akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria yang dibandingkan. Hasil dari penilaian narasumber pertama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 95 Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Kesehatan Reproduksi Narasumber Kedua

Kriteria	Keterangan		
	Sosialisasi Stunting dan KB	Gebyar Pemakaian Pil KB	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi
Sosialisasi Stunting dan KB	1	3	5
Gebyar Pemakaian Pil KB	0,33	1	3
Penyuluhan Kesehatan Reproduksi	0,20	0,33	1

Sumber : Hasil Kuisisioner, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari narasumber pertama akan diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi ini bertujuan untuk menyetarakan skala perhitungan dengan menjadikan jumlah maksimal pada setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan dalam mencari nilai eigen value. Nilai eigen value diperoleh dari hasil penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

Tabel 4. 96 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Tingkat Kesehatan Reproduksi Narasumber Kedua

Kriteria	Nilai λ			Nilai Eigen Value
	Sosialisasi Stunting dan KB	Gebyar Pemakaian Pil KB	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi	
Sosialisasi Stunting dan KB	0,652	0,692	0,556	0,633
Gebyar Pemakaian Pil KB	0,217	0,231	0,333	0,260
Penyuluhan Kesehatan Reproduksi	0,130	0,077	0,111	0,106
Jumlah				1

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya adalah perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai lamda maksimal. Nilai lamda maksimal yang diperoleh adalah 3,055. Nilai lamda maksimal lalu digunakan untuk menghitung nilai consistency index (CI), dimana nilai CI dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,02. Nilai random index (RI) yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan tabel random index. Tahap pengolahan data dari narasumber, terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai consistency ratio (CR) berada pada angka 0,04 sehingga $\leq 10\%$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan dari narasumber dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat sehingga dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya.

Tabel 4. 97 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Tingkat Kesehatan Reproduksi

No	Alternatif Program	Eigen Value
1	Sosialisasi Stunting dan KB	0,63334572
2	Gebyar Pemakaian Pil KB	0,260497956
3	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi	0,106156324

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil penilaian dari narasumber pertama, memberikan bobot tertinggi pada kriteria Tingkat Kesehatan Reproduksi. Nilai bobot tertinggi adalah program Sosialisasi stunting dan KB. Sehingga apabila ingin meningkatkan nilai Angka Harapan Hidup. Berdasarkan pendapat narasumber pertama, hal yang harus diprioritaskan adalah sesuai urutan dengan program diatas.

3. Gabungan Narasumber

Dari ke-2 narasumber diatas memiliki penilaian bobot dan urutan prioritas masing-masing. Setelah seluruh penilaian kedua narasumber dinyatakan konsisten

untuk mencegah nilai error, maka hasil penilaian AHP perlu digabungkan untuk menentukan besaran nilai bobot dari masing-masing kriteria. Narasumber AHP pada penelitian berjumlah lebih dari satu, maka penggabungan matriks perbandingan berpasangan menggunakan rata-rata geometrik (Geomean). Berikut merupakan geomean pada AHP unsur Tingkat Kesehatan Reproduksi yang dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 98 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Tingkat Kesehatan Reproduksi

Kriteria	Keterangan		
	Sosialisasi Stunting dan KB	Gebyar Pemakaian Pil KB	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi
Sosialisasi Stunting dan KB	1	3,87	3,87
Gebyar Pemakaian Pil KB	0,26	1	1,73
Penyuluhan Kesehatan Reproduksi	0,26	0,58	1

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 99 Eigen Value Alternatif Program Tingkat Kesehatan Reproduksi

Kriteria	Nilai λ			Nilai Eigen Value
	Sosialisasi Stunting dan KB	Gebyar Pemakaian Pil KB	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi	
Sosialisasi Stunting dan KB	0,659	0,711	0,586	0,652
Gebyar Pemakaian Pil KB	0,170	0,183	0,262	0,205
Penyuluhan Kesehatan Reproduksi	0,170	0,106	0,151	0,143
Jumlah				1

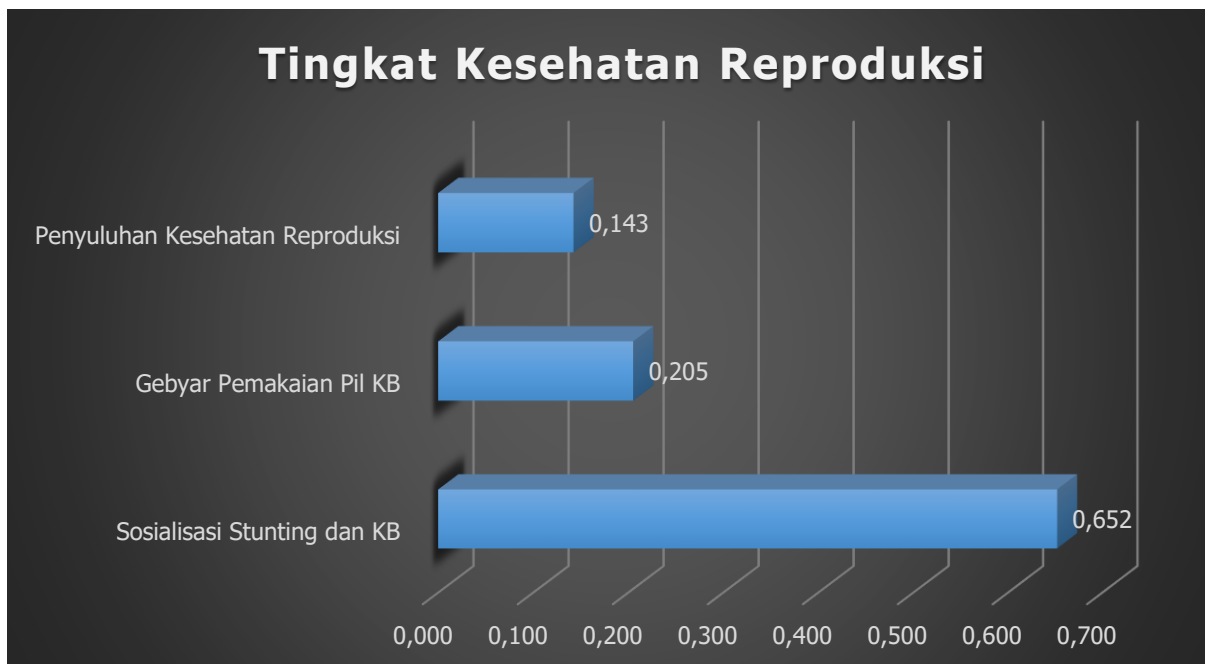
Sumber : Hasil Analisis, 2023

Setelah mendapatkan nilai geomean pada masing-masing perbandingan berpasangan, maka nilai geomean disusun ke dalam matrik perbandingan berpasangan dan dinormalisasi untuk mencari nilai lamda maksimal, nilai CI dan nilai CR. Maka nilai lamda maksimalnya didapatkan sebesar 3,049 dengan nilai CI sebesar 0,02. Dengan Nilai IR yang digunakan sesuai ketentuan, maka hasil nilai CR dari hasil penggabungan narasumber adalah 0,04 sehingga penilaian dari gabungan kedua narasumber tersebut dinyatakan konsisten. Sehingga berdasarkan kedua gabungan narasumber tersebut dapat diketahui bahwa urutan prioritas kriteria dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 100 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Tingkat Kesehatan Reproduksi

Alternatif Program	Eigen Value
Sosialisasi Stunting dan KB	0,652
Gebyar Pemakaian Pil KB	0,205
Penyuluhan Kesehatan Reproduksi	0,143

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 4. 41 Grafik Prioritas Program Unsur Tingkat Kesehatan Reproduksi

Berdasarkan hasil penilaian dari gabungan kedua narasumber, hasilnya menunjukkan bahwa nilai tertinggi pada kriteria unsur Tingkat Kesehatan Reproduksi terdapat pada program Sosialisasi KB. Sehingga apabila ingin meningkatkan kesehatan reproduksi, berdasarkan hasil analisis program yang harus diprioritaskan pertama adalah sosialisasi KB agar angka harapan hidup di Kabupaten Mojokerto meningkat.

Kualitas Hidup Manula

1. Narasumber Pertama

Penilaian kriteria untuk AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan nilai skala. Rentang nilai skala yang digunakan adalah dari 1 sampai 9. Nilai yang diberikan oleh narasumber akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria yang dibandingkan. Hasil dari penilaian narasumber pertama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 101 Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kualitas Hidup Manula Narasumber Pertama

Kriteria	Keterangan				
	Penyuluhan Kesehatan Manula	Penyuluhan Gizi Manula	Pelatihan Ketrampilan Manula	Monitoring Psikologi Manula	Pelayanan Tanggap Manula
Penyuluhan Kesehatan Manula	1	1,00	3	0,33	0,33
Penyuluhan Gizi Manula	1,00	1	3	1,00	1,00
Pelatihan Ketrampilan Manula	0,33	0,33	1	1	1,00
Monitoring Psikologi Manula	3,00	1	1,00	1	0,33
Pelayanan Tanggap Manula	3,00	1	1	3	1
Jumlah	8,33	4,33	9,00	6,33	3,67

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari narasumber pertama akan diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan skala perhitungan dengan menjadikan jumlah maksimal pada setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan dalam mencari nilai eigen value. Nilai eigen value diperoleh dari hasil penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

Tabel 4. 102 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Kualitas Hidup Manula Narasumber Pertama

Kriteria	Nilai λ					
	Penyuluhan Kesehatan Manula	Penyuluhan Gizi Manula	Pelatihan Ketrampilan Manula	Monitoring Psikologi Manula	Pelayanan Tanggap Manula	Eigen Value
Penyuluhan Kesehatan Manula	0,12	0,23	0,33	0,05	0,09	0,166
Penyuluhan Gizi Manula	0,12	0,23	0,33	0,16	0,27	0,223
Pelatihan Ketrampilan Manula	0,04	0,08	0,11	0,16	0,27	0,132
Monitoring Psikologi Manula	0,36	0,23	0,11	0,16	0,09	0,190

Kriteria	Nilai λ					
	Penyuluhan Kesehatan Manula	Penyuluhan Gizi Manula	Pelatihan Ketrampilan Manula	Monitoring Psikologi Manula	Pelayanan Tanggap Manula	Eigen Value
Pelayanan Tanggap Manula	0,36	0,23	0,11	0,47	0,27	0,290
Jumlah						1.000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya adalah perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai lamda maksimal. Nilai lamda maksimal yang diperoleh adalah 5,79. Nilai lamda maksimal lalu digunakan untuk menghitung nilai consistency index (CI) dan Nilai random index (RI) yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan tabel random index. Tahap pengolahan data dari narasumber, terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai consistency ratio (CR) dengan hasil 0,099 berada pada angka $\leq 10\%$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan dari narasumber dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat sehingga dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya.

Tabel 4. 103 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Kualitas Hidup Manula

No	Alternatif Program	Eigen Value
1	Pelayanan Tanggap Manula	0,289658
2	Penyuluhan Gizi Manula	0,222945
3	Monitoring Psikologi Manula	0,190137
4	Penyuluhan Kesehatan Manula	0,165529
5	Pelatihan Ketrampilan Manula	0,131731

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil penilaian dari narasumber pertama, memberikan bobot tertinggi pada unsur kualitas hidup manula program pelayanan tanggap manula. Sehingga apabila dilihat dari program-program yang ada di Kriteria Kualitas Hidup Manula, untuk dapat meningkatkan kualitas hidup manula dapat dilakukan dengan mendahulukan Pelayanan Tanggap Manula.

2. Narasumber Kedua

Penilaian kriteria untuk AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan nilai skala. Rentang nilai skala yang digunakan adalah dari 1 sampai 9. Nilai yang diberikan oleh narasumber akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria yang dibandingkan. Hasil dari penilaian

narasumber pertama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 104 Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kualitas Hidup Manula Narasumber Kedua

Kriteria	Keterangan				
	Penyuluhan Kesehatan Manula	Penyuluhan Gizi Manula	Pelatihan Ketrampilan Manula	Monitoring Psikologi Manula	Pelayanan Tanggap Manula
Penyuluhan Kesehatan Manula	1	1,00	3	0,33	1,00
Penyuluhan Gizi Manula	1,00	1	3	1,00	1,00
Pelatihan Ketrampilan Manula	0,33	0,33	1	1	1,00
Monitoring Psikologi Manula	3,00	1	1,00	1	0,33
Pelayanan Tanggap Manula	1,00	1	1	3	1
Jumlah	6,33	4,33	9,00	6,33	4,33

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari narasumber pertama akan diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan skala perhitungan dengan menjadikan jumlah maksimal pada setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan dalam mencari nilai eigen value. Nilai eigen value diperoleh dari hasil penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

Tabel 4. 105 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Kualitas Hidup Manula Narasumber Kedua

Kriteria	Nilai λ					
	Penyuluhan Kesehatan Manula	Penyuluhan Gizi Manula	Pelatihan Ketrampilan Manula	Monitoring Psikologi Manula	Pelayanan Tanggap Manula	Eigen Value
Penyuluhan Kesehatan Manula	0,16	0,23	0,33	0,05	0,23	0,201
Penyuluhan Gizi Manula	0,16	0,23	0,33	0,16	0,23	0,222
Pelatihan Ketrampilan Manula	0,05	0,08	0,11	0,16	0,23	0,126
Monitoring Psikologi Manula	0,47	0,23	0,11	0,16	0,08	0,210

Kriteria	Nilai λ					
	Penyuluhan Kesehatan Manula	Penyuluhan Gizi Manula	Pelatihan Ketrampilan Manula	Monitoring Psikologi Manula	Pelayanan Tanggap Manula	Eigen Value
Pelayanan Tanggap Manula	0,16	0,23	0,11	0,47	0,23	0,241
Jumlah						1.000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya adalah perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai lamda maksimal. Nilai lamda maksimal yang diperoleh adalah 5,74. Nilai lamda maksimal lalu digunakan untuk menghitung nilai consistency index (CI) dan Nilai random index (RI) yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan tabel random index. Tahap pengolahan data dari narasumber, terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai consistency ratio (CR) dengan hasil 0,099 berada pada angka $\leq 10\%$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan dari narasumber dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat sehingga dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya.

Tabel 4. 106 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Kualitas Hidup Manula

No	Alternatif Program	Eigen Value
1	Pelayanan Tanggap Manula	0,240846
2	Penyuluhan Gizi Manula	0,222132
3	Monitoring Psikologi Manula	0,210076
4	Penyuluhan Kesehatan Manula	0,20108
5	Pelatihan Ketrampilan Manula	0,125866

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil penilaian dari narasumber pertama, memberikan bobot tertinggi pada unsur kualitas hidup manula program pelayanan tanggap manula. Sehingga apabila dilihat dari program-program yang ada di Kriteria Kualitas Hidup Manula, untuk dapat meningkatkan kualitas hidup manula dapat dilakukan dengan mendahulukan Pelayanan Tanggap Manula.

3. Gabungan Narasumber

Dari ke-2 narasumber diatas memiliki penilaian bobot dan urutan prioritas masing-masing. Setelah seluruh penilaian kedua narasumber dinyatakan konsisten untuk mencegah nilai error, maka hasil penilaian AHP perlu digabungkan untuk menentukan besaran nilai bobot dari masing-masing kriteria. Narasumber AHP pada

penelitian berjumlah lebih dari satu, maka penggabungan matriks perbandingan berpasangan menggunakan rata-rata geometrik (Geomean). Berikut merupakan geomean pada AHP unsur Kualitas Hidup Manula yang dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 107 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kualitas Hidup Manula

Kriteria	Keterangan				
	Penyuluhan Kesehatan Manula	Penyuluhan Gizi Manula	Pelatihan Ketrampilan Manula	Monitoring Psikologi Manula	Pelayanan Tanggap Manula
Penyuluhan Kesehatan Manula	1	1,00	3,00	0,33	0,58
Penyuluhan Gizi Manula	1,00	1	3,00	1,00	1,00
Pelatihan Ketrampilan Manula	0,33	0,33	1	1,00	1,00
Monitoring Psikologi Manula	3,00	1,00	1,00	1	0,33
Pelayanan Tanggap Manula	1,73	1,00	1,00	3,00	1
Jumlah	7,07	4,33	9,00	6,33	3,91

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 108 Matriks Gabungan Eigen Value Alternatif Program Kualitas Hidup Manula

Kriteria	Nilai λ					
	Penyuluhan Kesehatan Manula	Penyuluhan Gizi Manula	Pelatihan Ketrampilan Manula	Monitoring Psikologi Manula	Pelayanan Tanggap Manula	Eigen Value
Penyuluhan Kesehatan Manula	0,14	0,23	0,33	0,05	0,15	0,181
Penyuluhan Gizi Manula	0,14	0,23	0,33	0,16	0,26	0,224
Pelatihan Ketrampilan Manula	0,05	0,08	0,11	0,16	0,26	0,130
Monitoring Psikologi Manula	0,42	0,23	0,11	0,16	0,09	0,202
Pelayanan Tanggap Manula	0,25	0,23	0,11	0,47	0,26	0,263
Jumlah						1.000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

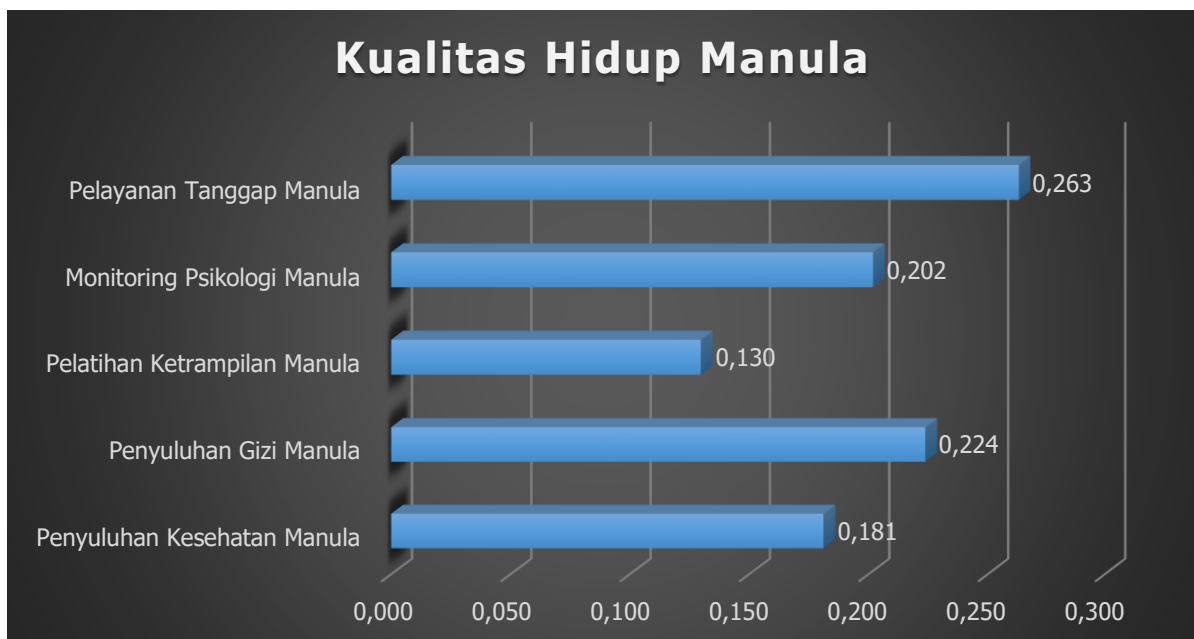
Setelah mendapatkan nilai geomean pada masing-masing perbandingan

berpasangan, maka nilai geomean disusun ke dalam matrik perbandingan berpasangan dan dinormalisasi untuk mencari nilai lamda maksimal, nilai CI dan nilai CR. Maka nilai lamda maksimalnya didapatkan sebesar 5,72 dengan nilai CI sebesar 0,02. Dengan Nilai IR yang digunakan sesuai ketentuan, maka hasil nilai CR dari hasil penggabungan narasumber adalah 0,092 sehingga penilaian dari gabungan kedua narasumber tersebut dinyatakan konsisten. Sehingga berdasarkan kedua gabungan narasumber tersebut dapat diketahui bahwa urutan prioritas kriteria dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 109 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Kualitas Hidup Manula

Alternatif Program	Eigen Value
Penyuluhan Kesehatan Manula	0,181
Penyuluhan Gizi Manula	0,224
Pelatihan Ketrampilan Manula	0,130
Monitoring Psikologi Manula	0,202
Pelayanan Tanggap Manula	0,263

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 4. 42 Grafik Prioritas Program Unsur Kualitas Hidup Manula

Berdasarkan hasil penilaian dari gabungan kedua narasumber, hasilnya menunjukkan bahwa nilai tertinggi pada kriteria unsur Kualitas Hidup Manula terdapat pada program Pelayanan Tanggap Manula. Sehingga apabila ingin meningkatkan kualitas hidup manula, berdasarkan hasil analisis program yang harus diprioritaskan pertama adalah program Pelayanan Tanggap Manula agar angka harapan hidup di

Kabupaten Mojokerto meningkat.

B. Harapan Lama Sekolah Dan Rata-Rata Lama Sekolah

Pada Periode waktu tahun 2022, terdapat kesenjangan HLS dalam durasi hampir satu tahun antara laki-laki dan perempuan atau perempuan lama bersekolahnya lebih cepat hampir 1 tahun dibandingkan laki-laki. Secara rata-rata laki-laki memiliki harapan lama sekolah selama 13,03 tahun atau hingga menempuh kuliah awal, sedangkan perempuan menikmati Pendidikan lebih rendah satu tahun yaitu selama 12,96 tahun atau hingga tamat Sekolah Menengah Atas.

Perbedaan harapan bersekolah pada laki-laki yang mayoritas sedikit lebih rendah dibanding perempuan dapat dikaitkan dengan berbagai faktor. Di sejumlah daerah, anak laki-laki dituntut membantu orang tua bekerja untuk menutupi kebutuhan keluarga karena konstruksi budaya memosisikan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Situasi ini dapat berkontribusi pada tingkat partisipasi sekolah laki-laki yang lebih rendah ketimbang perempuan.

Upaya menekan kesenjangan peluang sekolah penting dilakukan upaya melalui kebijakan dan program yang terintegrasi dan terfokus. Dengan kebijakan dan program yang terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat, upaya meningkatkan HLS dapat dilakukan dengan menyinergikan pada program dan pemberdayaan yang terdapat di pemerintahan pusat, daerah dan masyarakat. Kebijakan dan program dirancang dengan menfokuskan mengurangi kesenjangan yang terjadi pada jenis kelamin tertentu dan provinsi yang tertinggal, dan akhirnya peluang sekolah dapat dirasakan oleh seluruh warga Indonesia secara adil dan merata.

Karena itu, penting melakukan upaya melalui kebijakan dan program prioritas guna mendorong perempuan bisa lebih lama berada di bangku sekolah. Berbagai kendala yang berkonsekuensi pada tidak dilanjutkannya pendidikan formal perempuan penting diintervensi. Berinvestasi pada pendidikan berdampak positif pada kapasitas individu dan masyarakat dalam menghadapi resesidan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial dan kemajuan bangsa serta dapat meminimalisir pernikahan dini yang ada di Kabupaten Mojokerto sehingga dapat meningkatkan angka IPG pada perempuan. Dalam analisis AHP yang telah dilakukan indikator ini

terdiri dari 4 kriteria yaitu akses dan ketersediaan Pendidikan, tingkat Kesehatan dan kesejahteraan yang baik, kualitas Pendidikan dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk bersekolah. Berikut merupakan hasil dari AHP yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah kepada instansi terkait dengan 2 responden dari Dinas Pendidikan.

1. Narasumber Pertama

Penilaian kriteria AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dengan menggunakan skala 1-9. Nilai yang diberikan oleh responden akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang dibandingkan. Responden pertama berasal dari bidang pengelola data dinas Pendidikan. Hasil dari penilaian responden pertama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 110 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria HLS dan RLS Responden Pertama

Kriteria	Keterangan			
	Adanya Akses dan Ketersediaan Pendidikan	Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik	Kualitas Pendidikan	Kesempatan yang sama Bagi Perempuan Untuk Bersekolah
Adanya Akses dan Ketersediaan Pendidikan	1	7,00	5	5
Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik	0,14	1	1	0,33
Kualitas Pendidikan	0,20	1	1	0,33
Kesempatan yang sama Bagi Perempuan Untuk Bersekolah	0,20	3	3	1
Jumlah	1,54	12,00	10	6,67

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari responden pertama diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi dilakukan untuk menyetarakan skala perhitungan dengan menjumlahkan setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan untuk mencari nilai eigen value. Nilai eigen value didapatkan dari penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

**Tabel 4. 111 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan HLS Dan RLS
Responden Pertama**

Kriteria	Nilai λ				Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Adanya Akses dan Ketersediaan Pendidikan	Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik	Kualitas Pendidikan	Kesempatan yang sama Bagi Perempuan Untuk Bersekolah		
Adanya Akses dan Ketersediaan Pendidikan	0,648	0,583	0,500	0,750	2,481	0,620
Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik	0,093	0,083	0,100	0,050	0,326	0,081
Kualitas Pendidikan	0,130	0,083	0,100	0,050	0,363	0,091
Kesempatan yang sama Bagi Perempuan Untuk Bersekolah	0,130	0,250	0,300	0,150	0,830	0,207
Jumlah					4,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya dilakukan perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai λ maksimal. Nilai λ maks yang diperoleh dari perkalian tersebut adalah 4,225. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk menghitung nilai *consistency index* (CI), dimana nilai CI yang didapatkan adalah 0,075. Nilai *random index* (RI) yang digunakan adalah 0,9 karena kriteria yang dibandingkan berjumlah 4 kriteria sesuai dengan tabel *random index*. Terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai *consistency ratio* (CR) berada pada angka $\leq 0,1$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan narasumber dinyatakan konsisten dan dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. Perhitungan *consistency ratio* (CR) didapatkan dari hasil pembagian nilai CI dengan nilai RI. Nilai CR dari responden pertama adalah 0,083 sehingga data yang diperoleh dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penilaian AHP pada responden pertama, bobot tertinggi diberikan pada kriteria akses dan ketersediaan Pendidikan sedangkan bobot terendah diberikan pada kriteria tingkat kesehatan dan kesejahteraan yang baik.

2. Narasumber Kedua

Penilaian kriteria AHP dilakukan dengan responden kedua menggunakan skala 1-9. Nilai yang diberikan oleh responden akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria angka harapan hidup yang dibandingkan. Responden kedua berasal dari

bidang pengelola data dinas Pendidikan. Hasil dari penilaian responden kedua dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4. 112 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria HLS dan RLS Responden Pertama

Kriteria	Keterangan			
	Akses dan Ketersediaan Pendidikan	Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik	Kualitas Pendidikan	Kesempatan yang sama Bagi Perempuan Untuk Bersekolah
Akses dan Ketersediaan Pendidikan	1	3,00	9	5,00
Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik	0,33	1	1	1,00
Kualitas Pendidikan	0,11	1	1	1,00
Kesempatan yang sama Bagi Perempuan Untuk Bersekolah	0,20	1	1	1
Jumlah	1,64	6,00	12	8,00

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 113 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria HLS Dan RLS Responden Kedua

Kriteria	Nilai λ				Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Adanya Akses dan Ketersediaan Pendidikan	Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik	Kualitas Pendidikan	Kesempatan yang sama Bagi Perempuan Untuk Bersekolah		
Akses dan Ketersediaan Pendidikan	0,608	0,500	0,750	0,625	2,483	0,621
Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik	0,203	0,167	0,083	0,125	0,578	0,144
Kualitas Pendidikan	0,068	0,167	0,083	0,125	0,443	0,111
Kesempatan yang sama Bagi Perempuan Untuk Bersekolah	0,122	0,167	0,083	0,125	0,497	0,124
Jumlah					4,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari responden kedua diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi dilakukan untuk menyetarakan skala perhitungan dengan menjumlahkan setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan untuk mencari nilai eigen value. Nilai eigen value didapatkan dari penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah

kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

Tahapan selanjutnya dilakukan perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai λ maksimal. Nilai λ maks yang diperoleh dari perkalian tersebut adalah 4,208 dan nilai CI yang didapatkan adalah 0,069. Nilai *random index* (RI) yang digunakan adalah 0,9 karena kriteria yang dibandingkan berjumlah 4 kriteria sesuai dengan tabel *random index*. Angka *consistency ratio* (CR) yang didapatkan dari perhitungan responden kedua adalah 0,077 sehingga data yang diperoleh dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat karena angka yang didapatkan kurang dari 0,1. Berdasarkan hasil penilaian AHP pada responden kedua, bobot tertinggi diberikan pada kriteria akses dan ketersediaan pendidikan yaitu 0,621 sedangkan bobot terendah diberikan pada kriteria kualitas Pendidikan yaitu 0,111.

3. Narasumber Gabungan

Kedua responden memiliki penilaian bobot dan urutan prioritas masing-masing dari keempat kriteria. Setelah seluruh penilaian kedua responden dinyatakan konsisten untuk mencegah nilai *error*. Selanjutnya penilaian AHP perlu digabungkan untuk menentukan besaran nilai bobot dari masing-masing kriteria karena memiliki responden berjumlah lebih dari satu. Penggabungan matriks perbandingan berpasangan menggunakan rata-rata geometric (*geomean*) seperti pada **tabel 4.78**.

Tabel 4. 114 Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Kriteria HLS dan RLS

Kriteria	Keterangan			
	Adanya Akses dan Ketersediaan Pendidikan	Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik	Kualitas Pendidikan	Kesempatan yang sama Bagi Perempuan Untuk Bersekolah
Adanya Akses dan Ketersediaan Pendidikan	1	4,58	6,71	5,00
Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik	0,22	1	1	0,58
Kualitas Pendidikan	0,15	1	1	0,578
Kesempatan yang sama Bagi Perempuan Untuk Bersekolah	0,20	1,73	1,73	1
Jumlah	1,57	8,31	10,44	7,16

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 115 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Kriteria HLS dan RLS

Kriteria	Nilai λ		
----------	-----------------	--	--

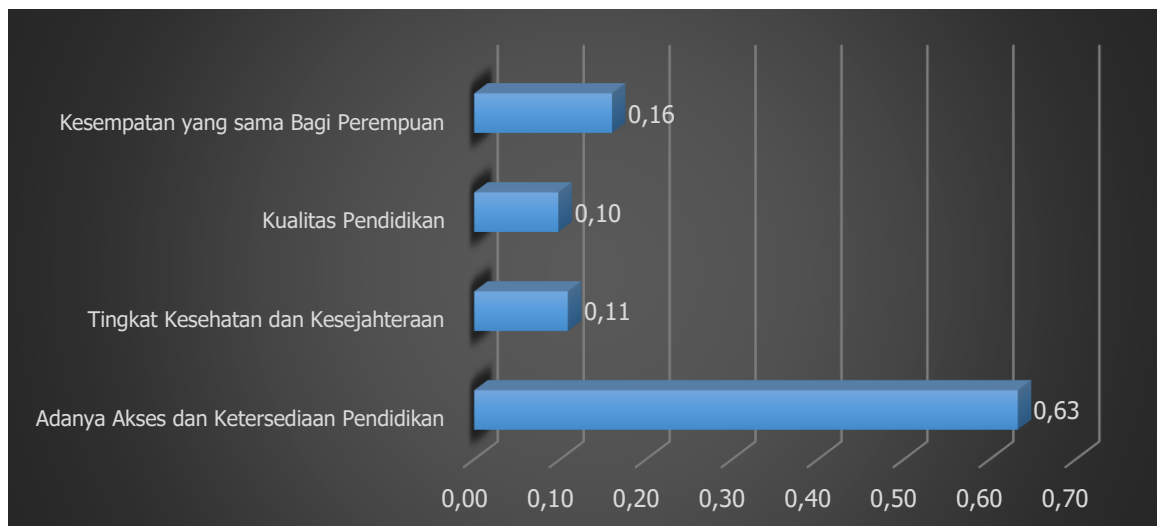
	Adanya Akses dan Ketersediaan Pendidikan	Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik	Kualitas Pendidikan	Kesempatan yang sama Bagi Perempuan Untuk Bersekolah	Jumlah Nilai λ	Eigen Value
Adanya Akses dan Ketersediaan Pendidikan	0,638	0,551	0,643	0,699	2,531	0,633
Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik	0,139	0,120	0,096	0,081	0,436	0,109
Kualitas Pendidikan	0,095	0,120	0,096	0,081	0,392	0,098
Kesempatan yang sama Bagi Perempuan Untuk Bersekolah	0,128	0,208	0,166	0,140	0,642	0,160
Jumlah					4,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Setelah mendapatkan nilai geomean pada masing-masing perbandingan, selanjutnya nilai geomean disusun ke dalam matriks perbandingan berpasangan dan dinormalisasi untuk mendapatkan nilai λ maksimal, nilai CI, nilai IR, dan nilai CR. Nilai λ maks yang didapatkan adalah 4,068 dengan nilai CI sebesar 0,023. Dengan nilai IR yang dipakai adalah 0,9 maka nilai CR dari hasil penggabungan kedua responden terkait kriteria harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah adalah 0,025 sehingga penilaiannya dinyatakan konsisten. Kemudian bobot yang diperoleh dari masing-masing kriteria diurutkan dan didapatkan kriteria yang paling penting dalam peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

Tabel 4. 116 Hasil AHP Kriteria Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

Kriteria	Hasil	Peringkat
Adanya Akses dan Ketersediaan Pendidikan	0,633	1
Kesempatan yang sama Bagi Perempuan Untuk Bersekolah	0,160	2
Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik	0,109	3
Kualitas Pendidikan	0,098	4



Gambar 4. 43 Hasil AHP Kriteria Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

Berdasarkan perhitungan gabungan dari kedua responden, didapatkan bahwa kriteria paling penting dan menempati urutan pertama dalam peningkatan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah adalah akses dan ketersediaan pendidikan dengan bobot 0,63. Kriteria ini sangat berpengaruh terhadap angka putus sekolah. Semakin mudahnya akses yang dimiliki anak-anak untuk bersekolah maka semakin tinggi pula jumlah anak-anak yang mau bersekolah sampai tamat sesuai dengan program wajib belajar yaitu 12 tahun. Peringkat kedua yang penting untuk ditingkatkan adalah kesempatan yang sama bagi perempuan dengan bobot sebesar 0,16. Peningkatan kriteria selanjutnya adalah tingkat Kesehatan dan kesejahteraan yang baik dengan bobot 0,11. Kriteria terakhir yang dilakukan untuk peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah adalah peningkatan kualitas Pendidikan dengan bobot sebesar 0,10.

Penilaian Alternatif Program Akses dan Ketersediaan Pendidikan

1. Narasumber Pertama

Penilaian kriteria AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar alternatif program akses dan ketersediaan pendidikan dengan menggunakan skala 1-9. Nilai yang diberikan oleh responden akan menentukan tingkat kepentingan dari alternatif program akses dan ketersediaan pendidikan yang dibandingkan. Responden pertama berasal dari bidang pengelola data dinas Pendidikan. Hasil dari penilaian responden pertama dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4. 117 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Akses dan Ketersediaan Pendidikan Responden Pertama

Kriteria	Keterangan									
	Kejar Paket	Ayo Sekolah Rek	Gratis Sekolah	Program Indonesia Pintar	Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	Beasiswa dan Bantuan Keuangan	Teknologi dalam Pendidikan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Kesetaraan Gender bagi Perempuan	Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini
Kejar Paket	1	0,20	0,11	0,11	1	0,11	0,14	0,20	1	0,14
Ayo Sekolah Rek	5	1	0,11	0,11	9	0,11	9	1	9	3
Gratis Sekolah	9	9	1	1	9	0,11	7	7	9	5
Program Indonesia Pintar	9	9	1	1	7	1	7	7	9	3
Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	1	0,11	0,11	0,14	1	0,11	1	1	1	1
Beasiswa dan Bantuan Keuangan	9	9	9	1	9	1	7	9	5	7
Teknologi dalam Pendidikan	7	0,11	0,14	0,14	1	0,14	1	0,11	1	1
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	5	1	0,14	0,14	1	0,11	9	1	1	1
Kesetaraan Gender bagi Perempuan	1	0,11	0,11	0,11	1	0,20	1	1	1	1
Sosialisasi Pendidikan Untuk	7	0,33	0,20	0,33	1	0,14	1	1	1	1

Kriteria	Keterangan									
	Kejar Paket	Ayo Sekolah Rek	Gratis Sekolah	Program Indonesia Pintar	Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	Beasiswa dan Bantuan Keuangan	Teknologi dalam Pendidikan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Kesetaraan Gender bagi Perempuan	Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini
Pencegahan Pernikahan Dini										
Jumlah	54,00	29,87	11,93	4,10	40,00	3,04	43,14	28,31	38,00	23,14

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 118 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Akses dan Ketersediaan Pendidikan Responden Pertama

Kriteria	Nilai λ										Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Kejar Paket	Ayo Sekolah Rek	Gratis Sekolah	Program Indonesia Pintar	Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	Beasiswa dan Bantuan Keuangan	Teknologi dalam Pendidikan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Kesetaraan Gender bagi Perempuan	Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini		
Kejar Paket	0,019	0,007	0,009	0,027	0,025	0,037	0,003	0,007	0,026	0,006	0,166	0,017
Ayo Sekolah Rek	0,093	0,033	0,009	0,027	0,225	0,037	0,209	0,035	0,237	0,130	1,034	0,103
Gratis Sekolah	0,167	0,301	0,084	0,244	0,225	0,037	0,162	0,247	0,237	0,216	1,920	0,192
Program Indonesia Pintar	0,167	0,301	0,084	0,244	0,175	0,329	0,162	0,247	0,237	0,130	2,076	0,208
Perlindungan dan Pemberdayaan Anak	0,019	0,004	0,009	0,035	0,025	0,037	0,023	0,035	0,026	0,043	0,256	0,026



Kriteria	Nilai λ										Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Kejar Paket	Ayo Sekolah Rek	Gratis Sekolah	Program Indonesia Pintar	Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	Beasiswa dan Bantuan Keuangan	Teknologi dalam Pendidikan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Kesetaraan Gender bagi Perempuan	Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini		
Berhadapan Hukum												
Beasiswa dan Bantuan Keuangan	0,167	0,301	0,754	0,244	0,225	0,329	0,162	0,318	0,132	0,302	2,935	0,293
Teknologi dalam Pendidikan	0,130	0,004	0,012	0,035	0,025	0,047	0,023	0,004	0,026	0,043	0,349	0,035
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	0,093	0,033	0,012	0,035	0,025	0,037	0,209	0,035	0,026	0,043	0,548	0,055
Kesetaraan Gender bagi Perempuan	0,019	0,004	0,009	0,027	0,025	0,066	0,023	0,035	0,026	0,043	0,277	0,028
Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini	0,130	0,011	0,017	0,081	0,025	0,047	0,023	0,035	0,026	0,043	0,439	0,044
Jumlah											10,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari responden pertama diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi dilakukan untuk menyetarakan skala perhitungan dengan menjumlahkan setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan untuk mencari nilai eigen value. Nilai eigen value didapatkan dari penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

Tahapan selanjutnya dilakukan perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai λ maksimal. Nilai λ maks yang diperoleh dari perkalian tersebut adalah 11,094. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk menghitung nilai *consistency index* (CI), dimana nilai CI yang didapatkan adalah 0,122. Nilai *random index* (RI) yang digunakan adalah 1,49 karena kriteria yang dibandingkan berjumlah 10 kriteria sesuai dengan tabel *random index*. Terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai *consistency ratio* (CR) berada pada angka $\leq 0,1$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan narasumber dinyatakan konsisten dan dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. Perhitungan *consistency ratio* (CR) didapatkan dari hasil pembagian nilai CI dengan nilai RI. Nilai CR dari responden pertama adalah 0,082 sehingga data yang diperoleh dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penilaian AHP pada responden pertama, bobot tertinggi diberikan pada alternatif program beasiswa dan bantuan keuangan sedangkan bobot terendah diberikan pada alternatif program perlindungan dan pemberdayaan anak berhadapan hukum.

2. Narasumber Kedua

Penilaian kriteria AHP selanjutnya dilakukan kepada responden kedua menggunakan skala 1-9. Nilai yang diberikan oleh responden akan menentukan tingkat kepentingan dari alternatif program yang dibandingkan. Responden kedua berasal dari bidang pengelola data dinas Pendidikan. Hasil dari penilaian responden kedua dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4. 119 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Akses dan Ketersediaan Pendidikan Responden Kedua

Kriteria	Keterangan									
	Kejar Paket	Ayo Sekolah Rek	Gratis Sekolah	Program Indonesia Pintar	Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	Beasiswa dan Bantuan Keuangan	Teknologi dalam Pendidikan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Kesetaraan Gender bagi Perempuan	Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini
Kejar Paket	1	0,11	0,11	0,11	3	0,14	7,00	0,11	0,14	0,14
Ayo Sekolah Rek	9	1	0,11	0,11	1	0,11	5	1	3	1
Gratis Sekolah	9	9	1	0,11	9	0,14	5	5	5	5
Program Indonesia Pintar	9	9	9	1	9	9,00	9	9	9	9
Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	0,33	1,00	0,11	0,11	1	0,11	0,20	0,11	0,2	0,33
Beasiswa dan Bantuan Keuangan	9	7	9	0,111111111	9	1	9	9	9	9
Teknologi dalam Pendidikan	0	0	0,20	0,11	5	0,11	1	0,20	1	0,11
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	9	1	0	0	9	0,11	5	1	7	7
Kesetaraan Gender bagi Perempuan	7	0,33	0,20	0,11	5	0,11	1	0,14	1	0,14

Kriteria	Keterangan									
	Kejar Paket	Ayo Sekolah Rek	Gratis Sekolah	Program Indonesia Pintar	Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	Beasiswa dan Bantuan Keuangan	Teknologi dalam Pendidikan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Kesetaraan Gender bagi Perempuan	Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini
Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini	7	1	0,20	0,11	3	0,11	9	0,14	7	1
Jumlah	60,48	29,64	20,13	2,00	54,00	10,95	51,20	25,71	42,34	32,73

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 120 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Akses dan Ketersediaan Pendidikan Responden Kedua

Kriteria	Nilai λ										Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Kejar Paket	Ayo Sekolah Rek	Gratis Sekolah	Program Indonesia Pintar	Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	Beasiswa dan Bantuan Keuangan	Teknologi dalam Pendidikan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Kesetaraan Gender bagi Perempuan	Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini		
Kejar Paket	0,017	0,004	0,006	0,056	0,056	0,013	0,137	0,004	0,003	0,004	0,299	0,030
Ayo Sekolah Rek	0,149	0,034	0,006	0,056	0,019	0,010	0,098	0,039	0,071	0,031	0,510	0,051
Gratis Sekolah	0,149	0,304	0,050	0,056	0,167	0,013	0,098	0,194	0,118	0,153	1,300	0,130
Program Indonesia Pintar	0,149	0,304	0,447	0,500	0,167	0,822	0,176	0,350	0,213	0,275	3,401	0,340
Perlindungan dan Pemberdayaan	0,006	0,034	0,006	0,056	0,019	0,010	0,004	0,004	0,005	0,010	0,152	0,015

Kriteria	Nilai λ										Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Kejar Paket	Ayo Sekolah Rek	Gratis Sekolah	Program Indonesia Pintar	Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	Beasiswa dan Bantuan Keuangan	Teknologi dalam Pendidikan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Kesetaraan Gender bagi Perempuan	Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini		
n Anak Berhadapan Hukum												
Beasiswa dan Bantuan Keuangan	0,149	0,236	0,447	0,056	0,167	0,091	0,176	0,350	0,213	0,275	2,159	0,216
Teknologi dalam Pendidikan	0,002	0,007	0,010	0,056	0,093	0,010	0,020	0,008	0,024	0,003	0,232	0,023
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	0,149	0,034	0,010	0,056	0,167	0,010	0,098	0,039	0,165	0,214	0,941	0,094
Kesetaraan Gender bagi Perempuan	0,116	0,011	0,010	0,056	0,093	0,010	0,020	0,006	0,024	0,004	0,348	0,035
Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini	0,116	0,034	0,010	0,056	0,056	0,010	0,176	0,006	0,165	0,031	0,658	0,066
Jumlah											10,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari responden kedua diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi dilakukan untuk menyetarakan skala perhitungan dengan menjumlahkan setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan untuk mencari nilai eigen value. Nilai eigen value didapatkan dari penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

Tahapan selanjutnya dilakukan perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai λ maksimal. Nilai λ maks yang diperoleh dari perkalian tersebut adalah 10,984. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk menghitung nilai *consistency index* (CI), dimana nilai CI yang didapatkan adalah 0,109. Nilai *random index* (RI) yang digunakan adalah 1,49 karena kriteria yang dibandingkan berjumlah 10 kriteria sesuai dengan tabel *random index*. Terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai *consistency ratio* (CR) berada pada angka $\leq 0,1$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan narasumber dinyatakan konsisten dan dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. Perhitungan *consistency ratio* (CR) didapatkan dari hasil pembagian nilai CI dengan nilai RI. Nilai CR dari responden pertama adalah 0,073 sehingga data yang diperoleh dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penilaian AHP pada responden kedua, bobot tertinggi diberikan pada alternatif program PIP (Program Indonesia Pintar) sedangkan bobot terendah diberikan pada alternatif program perlindungan dan pemberdayaan anak berhadapan hukum.

3. Narasumber Gabungan

Kedua responden memiliki penilaian bobot dan urutan prioritas masing-masing dari 10 kriteria. Setelah seluruh penilaian kedua responden dinyatakan konsisten untuk mencegah nilai *error*. Selanjutnya penilaian AHP perlu digabungkan untuk menentukan besaran nilai bobot dari masing-masing kriteria karena memiliki responden berjumlah lebih dari satu. Penggabungan matriks perbandingan berpasangan menggunakan rata-rata geometric (*geomean*) seperti pada table berikut.

Tabel 4. 121 Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Akses dan Ketersediaan Pendidikan

Kriteria	Keterangan									
	Kejar Paket	Ayo Sekolah Rek	Gratis Sekolah	Program Indonesia Pintar	Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	Beasiswa dan Bantuan Keuangan	Teknologi dalam Pendidikan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Kesetaraan Gender bagi Perempuan	Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini
Kejar Paket	1	0,15	0,11	0,11	1,73	0,13	1,00	0,15	0,38	0,14
Ayo Sekolah Rek	6,71	1	0,11	0,11	3,00	0,11	6,71	1,00	5,20	1,73
Gratis Sekolah	9,00	9,00	1	0,33	9,00	0,13	5,92	5,92	6,71	5,00
Program Indonesia Pintar	9,00	9,00	3,00	1	7,94	3,00	7,94	7,94	9,00	5,20
Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	0,58	0,33	0,11	0,13	1	0,11	0,45	0,33	0,45	0,58
Beasiswa dan Bantuan Keuangan	9,00	7,94	9,00	0,33	9,00	1	7,94	9,00	6,71	7,94
Teknologi dalam Pendidikan	1,00	0,15	0,17	0,13	2,24	0,13	1	0,15	1,00	0,33
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	6,71	1,00	0,17	0,13	3,00	0,11	6,71	1	2,65	2,65
Kesetaraan Gender bagi Perempuan	2,65	0,19	0,15	0,11	2,24	0,15	1,00	0,38	1	0,38
Sosialisasi Pendidikan Untuk	7,00	0,58	0,20	0,19	1,73	0,13	3,00	0,38	2,65	1

Kriteria	Keterangan									
	Kejar Paket	Ayo Sekolah Rek	Gratis Sekolah	Program Indonesia Pintar	Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	Beasiswa dan Bantuan Keuangan	Teknologi dalam Pendidikan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Kesetaraan Gender bagi Perempuan	Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini
Pencegahan Pernikahan Dini										
Jumlah	52,64	29,34	14,02	2,57	40,87	4,99	41,65	26,24	35,73	24,94

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 122 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Akses dan Ketersediaan Pendidikan

Kriteria	Nilai λ										Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Kejar Paket	Ayo Sekolah Rek	Gratis Sekolah	Program Indonesia Pintar	Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	Beasiswa dan Bantuan Keuangan	Teknologi dalam Pendidikan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Kesetaraan Gender bagi Perempuan	Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini		
Kejar Paket	0,019	0,005	0,008	0,043	0,042	0,025	0,024	0,006	0,011	0,006	0,189	0,019
Ayo Sekolah Rek	0,127	0,034	0,008	0,043	0,073	0,022	0,161	0,038	0,145	0,069	0,722	0,072
Gratis Sekolah	0,171	0,307	0,071	0,130	0,220	0,025	0,142	0,225	0,188	0,200	1,680	0,168
Program Indonesia Pintar	0,171	0,307	0,214	0,389	0,194	0,602	0,191	0,302	0,252	0,208	2,830	0,283

Kriteria	Nilai λ										Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Kejar Paket	Ayo Sekolah Rek	Gratis Sekolah	Program Indonesia Pintar	Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	Beasiswa dan Bantuan Keuangan	Teknologi dalam Pendidikan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Kesetaraan Gender bagi Perempuan	Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini		
Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	0,011	0,011	0,008	0,049	0,024	0,022	0,011	0,013	0,013	0,023	0,185	0,019
Beasiswa dan Bantuan Keuangan	0,171	0,271	0,642	0,130	0,220	0,201	0,191	0,343	0,188	0,318	2,673	0,267
Teknologi dalam Pendidikan	0,019	0,005	0,012	0,049	0,055	0,025	0,024	0,006	0,028	0,013	0,236	0,024
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	0,127	0,034	0,012	0,049	0,073	0,022	0,161	0,038	0,074	0,106	0,698	0,070
Kesetaraan Gender bagi Perempuan	0,050	0,007	0,011	0,043	0,055	0,030	0,024	0,014	0,028	0,015	0,277	0,028
Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini	0,133	0,020	0,014	0,075	0,042	0,025	0,072	0,014	0,074	0,040	0,510	0,051
Jumlah											10,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Setelah mendapatkan nilai geomean pada masing-masing perbandingan, selanjutnya nilai geomean disusun ke dalam matriks perbandingan berpasangan dan dinormalisasi untuk mendapatkan nilai λ maksimal, nilai CI, nilai IR, dan nilai CR. Nilai λ maks yang didapatkan adalah 10,984 dengan nilai CI sebesar 0,109. Dengan nilai IR yang dipakai adalah 1,49 maka nilai CR dari hasil penggabungan kedua responden terkait alternatif program akses dan ketersediaan Pendidikan adalah 0,073 sehingga penilaiannya dinyatakan konsisten. Kemudian bobot yang diperoleh dari masing-masing kriteria diurutkan dan didapatkan urutan alternatif program yang perlu dilakukan untuk meningkatkan akses dan ketersediaan pendidikan.

Tabel 4. 123 Hasil AHP Alternatif Program Akses dan Ketersediaan Pendidikan

Alternatif Program	Hasil	Peringkat
Program Indonesia Pintar	0,283	1
Beasiswa dan Bantuan Keuangan	0,267	2
Gratis Sekolah	0,168	3
Ayo Sekolah Rek	0,072	4
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	0,070	5
Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini	0,051	6
Kesetaraan Gender bagi Perempuan	0,028	7
Teknologi dalam Pendidikan	0,024	8
Kejar Paket	0,019	9
Perlindungan dan Pemberdayaan ABH	0,019	10

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 4. 44 Hasil AHP Alternatif Program Akses dan Ketersediaan Pendidikan

Berdasarkan perhitungan gabungan dari kedua responden, didapatkan bahwa alternatif program paling penting dan menempati urutan pertama untuk meningkatkan akses dan ketersediaan Pendidikan adalah program PIP (Program Indonesia Pintar)

dengan bobot 0,283. Alternatif program ini merupakan program bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada siswa melalui KIP dan bagi mahasiswa melalui KIP Kuliah. Program ini sangat penting untuk membantu biaya personal Pendidikan peserta didik, seperti membeli perlengkapan sekolah atau kursus uang saku, biaya transportasi, biaya praktik tambahan serta biaya uji kompetensi. Peringkat kedua program yang penting untuk dilakukan adalah beasiswa dan bantuan keuangan dengan bobot sebesar 0,267.

Selain program PIP yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk seluruh daerah di Indonesia adalah pemberian beasiswa dan bantuan keuangan bagi anak-anak yang membutuhkan baik siswa yang kurang mampu maupun yang berprestasi karena masalah utama tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Mojokerto adalah masalah perekonomian. Dengan adanya beasiswa dan bantuan keuangan diharapkan program ini akan meningkatkan keinginan anak-anak untuk bersekolah. Alternatif program selanjutnya adalah gratis sekolah dengan bobot dengan bobot 0,168, program ayo sekolah rek dengan bobot 0,072, program peningkatan akses dan kualitas Pendidikan dengan bobot 0,070, program sosialisasi Pendidikan untuk pencegahan pernikahan dini dengan bobot 0,051, program kesetaraan gender bagi perempuan dengan bobot 0,028, program teknologi dalam Pendidikan dengan bobot 0,024, dan dua program terakhir akan dilaksanakan dengan bobot yang sama yaitu 0,019 yaitu program kejar paket dan program perlindungan dan pemberdayaan anak berhadapan hukum.

Penilaian Alternatif Program Kesempatan yang sama Bagi Perempuan

1. Narasumber Pertama

Penilaian kriteria AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar alternatif program kesempatan yang sama bagi perempuan dengan menggunakan skala 1-9. Nilai yang diberikan oleh responden akan menentukan tingkat kepentingan dari alternatif program kesempatan yang sama bagi perempuan yang dibandingkan. Responden pertama berasal dari bidang pengelola data dinas Pendidikan. Hasil dari penilaian responden pertama dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4. 124 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kesempatan yang sama Bagi Perempuan Untuk Bersekolah Responden Pertama

Kriteria	Keterangan							
	Kejar Paket	Ayo Sekolah Rek	Gratis Sekolah	Program Indonesia Pintar	Beasiswa dan Bantuan Keuangan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Kesetaraan Gender bagi Perempuan	Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini
Kejar Paket	1	1	0,11	1	5	0,14	0,1111111	0,14
Ayo Sekolah Rek	1	1	9	9	5	7	0	0,14
Gratis Sekolah	9	0,11	1	1	5	5	0,14	3
Program Indonesia Pintar	1	0,11	1	1	0,11	5	0,11	0,33
Beasiswa dan Bantuan Keuangan	0,20	0,20	0,2	9	1	7	0,1111111	9
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	7	0,14	0,20	0,20	0,14	1	0,1428571	1
Kesetaraan Gender bagi Perempuan	9,00	7,00	7,00	9	9,00	7	1	9
Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini	7	7	0,33	3	0,11	1	0,1111111	1
Jumlah	35,20	16,57	18,84	33,20	25,37	33,14	1,87	23,62

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 125 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kesempatan yang sama Bagi Perempuan Untuk Bersekolah Responden Pertama

Kriteria	Nilai λ								Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Kejar Paket	Ayo Sekolah Rek	Gratis Sekolah	Program Indonesia Pintar	Beasiswa dan Bantuan Keuangan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Kesetaraan Gender bagi Perempuan	Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini		
Kejar Paket	0,028	0,060	0,006	0,030	0,197	0,004	0,059	0,006	0,392	0,049
Ayo Sekolah Rek	0,028	0,060	0,478	0,271	0,197	0,211	0,076	0,006	1,328	0,166
Gratis Sekolah	0,256	0,007	0,053	0,030	0,197	0,151	0,076	0,127	0,897	0,112



Kriteria	Nilai λ								Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Kejar Paket	Ayo Sekolah Rek	Gratis Sekolah	Program Indonesia Pintar	Beasiswa dan Bantuan Keuangan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Kesetaraan Gender bagi Perempuan	Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini		
Program Indonesia Pintar	0,028	0,007	0,053	0,030	0,004	0,151	0,059	0,014	0,347	0,043
Beasiswa dan Bantuan Keuangan	0,006	0,012	0,011	0,271	0,039	0,211	0,059	0,381	0,990	0,124
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	0,199	0,009	0,011	0,006	0,006	0,030	0,076	0,042	0,379	0,047
Kesetaraan Gender bagi Perempuan	0,256	0,423	0,371	0,271	0,355	0,211	0,534	0,381	2,802	0,350
Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini	0,199	0,423	0,018	0,090	0,004	0,030	0,059	0,042	0,866	0,108
Jumlah									8,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari responden pertama diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi dilakukan untuk menyetarakan skala perhitungan dengan menjumlahkan setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan untuk mencari nilai eigen value. Nilai eigen value didapatkan dari penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

Tahapan selanjutnya dilakukan perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai λ maksimal. Nilai λ maks yang diperoleh dari perkalian tersebut adalah 8,797. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk menghitung nilai *consistency index* (CI), dimana nilai CI yang didapatkan adalah 0,114. Nilai *random index* (RI) yang digunakan adalah 1,41 karena kriteria yang dibandingkan berjumlah 8 kriteria sesuai dengan tabel *random index*. Terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai *consistency ratio* (CR) berada pada angka $\leq 0,1$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan narasumber dinyatakan konsisten dan dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. Perhitungan *consistency ratio* (CR) didapatkan dari hasil pembagian nilai CI dengan nilai RI. Nilai CR dari responden pertama adalah 0,081 sehingga data yang diperoleh dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penilaian AHP pada responden pertama, bobot tertinggi diberikan pada alternatif program kesetaraan gender bagi perempuan sedangkan bobot terendah diberikan pada alternatif program program Indonesia pintar.

2. Narasumber Kedua

Penilaian kriteria AHP selanjutnya dilakukan kepada responden kedua menggunakan skala 1-9. Nilai yang diberikan oleh responden akan menentukan tingkat kepentingan dari alternatif program yang dibandingkan. Responden kedua berasal dari bidang pengelola data dinas Pendidikan. Hasil dari penilaian responden kedua dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4. 126 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kesempatan yang sama Bagi Perempuan Untuk Bersekolah Responden Kedua

Kriteria	Keterangan							
	Kejar Paket	Ayo Sekolah Rek	Gratis Sekolah	Program Indonesia Pintar	Beasiswa dan Bantuan Keuangan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Kesetaraan Gender bagi Perempuan	Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini
Kejar Paket	1	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Ayo Sekolah Rek	9	1	0,11	0,11	0,20	9	0	9
Gratis Sekolah	9	9	1	9	9	5	0,14	7
Program Indonesia Pintar	9	9	0,11	1	1	1	7	3
Beasiswa dan Bantuan Keuangan	9	5	0,11	1	1	5	0,14	3
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	9	0,11	0,20	1	0,20	1	0,11	0,20
Kesetaraan Gender bagi Perempuan	9	9,00	7	0,14	7,00	9	1	1
Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini	9	0,11	0,14	0,33	0,33	5	1	1
Jumlah	64,00	33,33	8,79	12,70	18,84	35,11	9,62	24,31

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 127 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kesempatan yang sama Bagi Perempuan Untuk Bersekolah Responden Kedua

Kriteria	Nilai λ								Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Kejar Paket	Ayo Sekolah Rek	Gratis Sekolah	Program Indonesia Pintar	Beasiswa dan Bantuan Keuangan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Kesetaraan Gender bagi Perempuan	Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini		
Kejar Paket	0,016	0,003	0,013	0,009	0,006	0,003	0,012	0,005	0,066	0,008
Ayo Sekolah Rek	0,141	0,030	0,013	0,009	0,011	0,256	0,012	0,370	0,841	0,105
Gratis Sekolah	0,141	0,270	0,114	0,709	0,478	0,142	0,015	0,288	2,156	0,269

Kriteria	Nilai λ								Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Kejar Paket	Ayo Sekolah Rek	Gratis Sekolah	Program Indonesia Pintar	Beasiswa dan Bantuan Keuangan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Kesetaraan Gender bagi Perempuan	Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini		
Program Indonesia Pintar	0,141	0,270	0,013	0,079	0,053	0,028	0,728	0,123	1,435	0,179
Beasiswa dan Bantuan Keuangan	0,141	0,150	0,013	0,079	0,053	0,142	0,015	0,123	0,716	0,089
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	0,141	0,003	0,023	0,079	0,011	0,028	0,012	0,008	0,304	0,038
Kesetaraan Gender bagi Perempuan	0,141	0,270	0,797	0,011	0,371	0,256	0,104	0,041	1,991	0,249
Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini	0,141	0,003	0,016	0,026	0,018	0,142	0,104	0,041	0,492	0,061
Jumlah									8,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari responden kedua diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Kemudian didapatkan eigen value dari penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1. Tahapan selanjutnya dilakukan perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai λ maksimal. Nilai λ maks yang diperoleh dari perkalian tersebut adalah 8,907. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk menghitung nilai *consistency index* (CI), dimana nilai CI yang didapatkan adalah 0,130. Nilai *random index* (RI) yang digunakan adalah 1,41 karena kriteria yang dibandingkan berjumlah 8 kriteria sesuai dengan tabel *random index*. Terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai *consistency ratio* (CR) berada pada angka $\leq 0,1$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan responden dinyatakan konsisten dan dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. Perhitungan *consistency ratio* (CR) didapatkan dari hasil pembagian nilai CI dengan nilai RI. Nilai CR dari responden kedua adalah 0,092 sehingga data yang diperoleh dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penilaian AHP pada responden kedua, bobot tertinggi diberikan pada alternatif program gratis sekolah sedangkan bobot terendah diberikan pada alternatif program kejar paket.

3. Narasumber Gabungan

Kedua responden memiliki penilaian bobot dan urutan prioritas masing-masing dari kedelapan kriteria. Setelah seluruh penilaian kedua responden dinyatakan konsisten untuk mencegah nilai *error*. Selanjutnya penilaian AHP perlu digabungkan untuk menentukan besaran nilai bobot dari masing-masing kriteria karena memiliki responden berjumlah lebih dari satu. Penggabungan matriks perbandingan berpasangan menggunakan rata-rata geometric (*geomean*) seperti pada table berikut.

Tabel 4. 128 Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Kesempatan yang sama Bagi Perempuan Untuk Bersekolah

Kriteria	Keterangan							
	Kejar Paket	Ayo Sekolah Rek	Gratis Sekolah	Program Indonesia Pintar	Beasiswa dan Bantuan Keuangan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Kesetaraan Gender bagi Perempuan	Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini
Kejar Paket	1	0,33	0,11	0,33	0,75	0,13	0,11	0,13
Ayo Sekolah Rek	3,00	1	1,00	1,00	1,00	7,94	0,13	1,13
Gratis Sekolah	9,00	1,00	1	3,00	6,71	5,00	0,14	4,58
Program Indonesia Pintar	3,00	1,00	0,33	1	0,33	2,24	0,88	1,00
Beasiswa dan Bantuan Keuangan	1,34	1,00	0,15	3,00	1	5,92	0,13	5,20
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	7,94	0,13	0,20	0,45	0,17	1	0,13	0,45
Kesetaraan Gender bagi Perempuan	9,00	7,94	7,00	1,13	7,94	7,94	1	3,00
Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini	7,94	0,88	0,22	1,00	0,19	2,24	0,33	1
Jumlah	42,22	13,28	10,01	10,91	18,09	32,39	2,85	16,49

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Tabel 4. 129 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Kesempatan yang sama Bagi Perempuan Untuk Bersekolah

Kriteria	Nilai λ								Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Kejar Paket	Ayo Sekolah Rek	Gratis Sekolah	Program Indonesia Pintar	Beasiswa dan Bantuan Keuangan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Kesetaraan Gender bagi Perempuan	Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini		
Kejar Paket	0,024	0,025	0,011	0,031	0,041	0,004	0,039	0,008	0,182	0,023
Ayo Sekolah Rek	0,071	0,075	0,100	0,092	0,055	0,245	0,044	0,069	0,751	0,094
Gratis Sekolah	0,213	0,075	0,100	0,275	0,371	0,154	0,050	0,278	1,517	0,190
Program Indonesia Pintar	0,071	0,075	0,033	0,092	0,018	0,069	0,310	0,061	0,729	0,091
Beasiswa dan Bantuan Keuangan	0,032	0,075	0,015	0,275	0,055	0,183	0,044	0,315	0,994	0,124
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	0,188	0,009	0,020	0,041	0,009	0,031	0,044	0,027	0,370	0,046
Kesetaraan Gender bagi Perempuan	0,213	0,598	0,699	0,104	0,439	0,245	0,351	0,182	2,831	0,354
Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini	0,188	0,066	0,022	0,092	0,011	0,069	0,117	0,061	0,625	0,078
Jumlah									8,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Setelah mendapatkan nilai geomean pada masing-masing perbandingan, selanjutnya nilai geomean disusun ke dalam matriks perbandingan berpasangan dan dinormalisasi untuk mendapatkan nilai λ maksimal, nilai CI, nilai IR, dan nilai CR. Nilai λ maks yang didapatkan adalah 8,691 dengan nilai CI sebesar 0,097. Dengan nilai IR yang dipakai adalah 1,41 maka nilai CR dari hasil penggabungan kedua responden terkait alternatif program kesempatan yang sama bagi perempuan adalah 0,070 sehingga penilaiannya dinyatakan konsisten. Kemudian bobot yang diperoleh dari masing-masing kriteria diurutkan dan didapatkan urutan alternatif program yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesempatan yang sama bagi perempuan sebagai berikut.

Tabel 4. 130 Hasil AHP Alternatif Program Kesempatan yang sama Bagi Perempuan Untuk Bersekolah

Alternatif Program	Hasil	Peringkat
Kesetaraan Gender bagi Perempuan	0,354	1
Gratis Sekolah	0,190	2
Beasiswa dan Bantuan Keuangan	0,124	3
Ayo Sekolah Rek	0,094	4
Program Indonesia Pintar	0,091	5
Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini	0,078	6
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	0,046	7
Kejar Paket	0,023	8

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 4. 45 Hasil AHP Alternatif Program Kesempatan yang sama Bagi Perempuan Untuk Bersekolah

Berdasarkan perhitungan gabungan dari kedua responden, didapatkan bahwa alternatif program paling penting dan menempati urutan pertama untuk meningkatkan

kesempatan yang sama bagi perempuan adalah program kesetaraan gender bagi perempuan dengan bobot 0,354. Alternatif program ini diutamakan untuk memberikan kesempatan yang sama dibidang Pendidikan sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap tingkat pendidikan perempuan. Peringkat kedua program yang penting untuk dilakukan adalah gratis sekolah dengan bobot sebesar 0,190. Alternatif program selanjutnya adalah beasiswa dan bantuan keuangan dengan bobot 0,124, program ayo sekolah rek dengan bobot 0,094, program Indonesia pintar dengan bobot 0,091, program sosialisasi Pendidikan untuk pencegahan pernikahan dini dengan bobot 0,078, program peningkatan akses dan kualitas pendidikan dengan bobot 0,046, dan program kejar paket dengan bobot 0,023.

Penilaian Alternatif Program Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik

1. Narasumber Pertama

Penilaian kriteria AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar alternatif program tingkat kesehatan dan kesejahteraan yang baik dengan menggunakan skala 1-9. Nilai yang diberikan oleh responden akan menentukan tingkat kepentingan dari alternatif program tingkat kesehatan dan kesejahteraan yang baik yang dibandingkan. Responden pertama berasal dari bidang pengelola data dinas Pendidikan. Hasil dari penilaian responden pertama dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4. 131 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik Responden Pertama

Kriteria	Keterangan					
	Kejar Paket	Ayo Sekolah Rek	Gratis Sekolah	Program Indonesia Pintar	Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	Beasiswa dan Bantuan Keuangan
Kejar Paket	1	0,33	0,11	0,11	1,00	0,11
Ayo Sekolah Rek	3	1	0,33	0,33	3,00	0,11
Gratis Sekolah	9	5	1	0,50	7	1,00
Program Indonesia Pintar	9	3	2	1	5	1
Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	1	0	0,14	0,20	1	0,11
Beasiswa dan Bantuan Keuangan	9	9	1	1	9	1
Jumlah	32,00	18,67	4,59	3,14	26,00	3,33

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 132 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik Responden Pertama

Kriteria	Nilai λ						Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Kejar Paket	Ayo Sekolah Rek	Gratis Sekolah	Program Indonesia Pintar	Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	Beasiswa dan Bantuan Keuangan		
Kejar Paket	0,031	0,018	0,024	0,035	0,038	0,033	0,180	0,030
Ayo Sekolah Rek	0,094	0,054	0,073	0,106	0,115	0,033	0,475	0,079
Gratis Sekolah	0,281	0,268	0,218	0,159	0,269	0,300	1,495	0,249
Program Indonesia Pintar	0,281	0,161	0,436	0,318	0,192	0,300	1,688	0,281
Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	0,031	0,018	0,031	0,064	0,038	0,033	0,216	0,036
Beasiswa dan Bantuan Keuangan	0,281	0,482	0,218	0,318	0,346	0,300	1,946	0,324
Jumlah							6,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari responden pertama diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi dilakukan untuk menyetarakan skala perhitungan dengan menjumlahkan setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan untuk mencari nilai eigen value. Nilai eigen value didapatkan dari penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

Tahapan selanjutnya dilakukan perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai λ maksimal. Nilai λ maks yang diperoleh dari perkalian tersebut adalah 6,483. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk menghitung nilai *consistency index* (CI), dimana nilai CI yang didapatkan adalah 0,097. Nilai *random index* (RI) yang digunakan adalah 1,24 karena kriteria yang dibandingkan berjumlah 6 kriteria sesuai dengan tabel *random index*. Terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai *consistency ratio* (CR) berada pada angka $\leq 0,1$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan narasumber dinyatakan konsisten dan dapat digunakan untuk tahap selanjutnya.

Perhitungan *consistency ratio* (CR) didapatkan dari hasil pembagian nilai CI dengan nilai RI. Nilai CR dari responden pertama adalah 0,078 sehingga data yang diperoleh dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penilaian AHP pada responden pertama, bobot tertinggi diberikan pada alternatif program beasiswa dan bantuan keuangan sedangkan bobot terendah diberikan pada alternatif program kejar paket.

2. Narasumber Kedua

Penilaian kriteria AHP selanjutnya dilakukan kepada responden kedua menggunakan skala 1-9. Nilai yang diberikan oleh responden akan menentukan tingkat kepentingan dari alternatif program yang dibandingkan. Responden kedua berasal dari bidang pengelola data dinas Pendidikan. Hasil dari penilaian responden kedua dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4. 133 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik Responden Kedua

Kriteria	Keterangan					
	Kejar Paket	Ayo Sekolah Rek	Gratis Sekolah	Program Indonesia Pintar	Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	Beasiswa dan Bantuan Keuangan
Kejar Paket	1	0,33	0,11	0,11	0,33	0,11
Ayo Sekolah Rek	3	1	0,20	0,33	0,20	0,20
Gratis Sekolah	9	5	1	1,00	2	1,00
Program Indonesia Pintar	9	3	1	1	7	1
Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	3	5	0,50	0,14	1	0,33
Beasiswa dan Bantuan Keuangan	9	5	1	1	3	1
Jumlah	34,00	19,33	3,81	3,59	13,53	3,64

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 134 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik Responden Kedua

Kriteria	Nilai λ						Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Kejar Paket	Ayo Sekolah Rek	Gratis Sekolah	Program Indonesia Pintar	Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	Beasiswa dan Bantuan Keuangan		
Kejar Paket	0,029	0,017	0,029	0,031	0,025	0,030	0,162	0,027
Ayo Sekolah Rek	0,088	0,052	0,052	0,093	0,015	0,055	0,355	0,059

Kriteria	Nilai λ						Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Kejar Paket	Ayo Sekolah Rek	Gratis Sekolah	Program Indonesia Pintar	Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	Beasiswa dan Bantuan Keuangan		
Gratis Sekolah	0,265	0,259	0,262	0,279	0,148	0,274	1,487	0,248
Program Indonesia Pintar	0,265	0,155	0,262	0,279	0,517	0,274	1,753	0,292
Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	0,088	0,259	0,131	0,040	0,074	0,091	0,683	0,114
Beasiswa dan Bantuan Keuangan	0,265	0,259	0,262	0,279	0,222	0,274	1,561	0,260
Jumlah							6,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari responden kedua diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Kemudian didapatkan eigen value dari penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1. Tahapan selanjutnya dilakukan perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai λ maksimal. Nilai λ maks yang diperoleh dari perkalian tersebut adalah 6,542. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk menghitung nilai *consistency index* (CI), dimana nilai CI yang didapatkan adalah 0,109. Nilai *random index* (RI) yang digunakan adalah 1,24 karena kriteria yang dibandingkan berjumlah 6 kriteria sesuai dengan tabel *random index*. Terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai *consistency ratio* (CR) berada pada angka $\leq 0,1$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan responden dinyatakan konsisten dan dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. Perhitungan *consistency ratio* (CR) didapatkan dari hasil pembagian nilai CI dengan nilai RI. Nilai CR dari responden kedua adalah 0,088 sehingga data yang diperoleh dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penilaian AHP pada responden kedua, bobot tertinggi diberikan pada alternatif program PIP (Program Indonesia Pintar) sedangkan bobot terendah diberikan pada alternatif program kejar paket.

3. Narasumber Gabungan

Kedua responden memiliki penilaian bobot dan urutan prioritas masing-masing dari keenam kriteria. Setelah seluruh penilaian kedua responden dinyatakan konsisten untuk mencegah nilai *error*. Selanjutnya penilaian AHP perlu digabungkan untuk menentukan besaran nilai bobot dari masing-masing kriteria karena memiliki responden berjumlah lebih dari satu. Penggabungan matriks perbandingan berpasangan menggunakan rata-rata geometric (*geomean*) seperti pada table berikut.

Tabel 4. 135 Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik

Kriteria	Keterangan					
	Kejar Paket	Ayo Sekolah Rek	Gratis Sekolah	Program Indonesia Pintar	Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	Beasiswa dan Bantuan Keuangan
Kejar Paket	1	0,33	0,11	0,11	0,58	0,11
Ayo Sekolah Rek	3,00	1	0,26	0,33	0,77	0,15
Gratis Sekolah	9,00	5,00	1	0,71	3,74	1,00
Program Indonesia Pintar	9,00	3,00	1,41	1	5,92	1,00
Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	1,73	1,29	0,27	0,17	1	0,19
Beasiswa dan Bantuan Keuangan	9,00	6,71	1,00	1,00	5,20	1
Jumlah	32,73	17,33	4,05	3,32	17,21	3,45

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 136 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik

Kriteria	Nilai λ						Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Kejar Paket	Ayo Sekolah Rek	Gratis Sekolah	Program Indonesia Pintar	Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	Beasiswa dan Bantuan Keuangan		
Kejar Paket	0,031	0,019	0,027	0,033	0,034	0,032	0,176	0,029
Ayo Sekolah Rek	0,092	0,058	0,064	0,100	0,045	0,043	0,402	0,067
Gratis Sekolah	0,275	0,288	0,247	0,213	0,217	0,290	1,530	0,255
Program Indonesia Pintar	0,275	0,173	0,349	0,301	0,344	0,290	1,732	0,289
Perlindungan dan Pemberdayaan	0,053	0,074	0,066	0,051	0,058	0,056	0,358	0,060

Kriteria	Nilai λ						Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Kejar Paket	Ayo Sekolah Rek	Gratis Sekolah	Program Indonesia Pintar	Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	Beasiswa dan Bantuan Keuangan		
an Anak Berhadapan Hukum								
Beasiswa dan Bantuan Keuangan	0,275	0,387	0,247	0,301	0,302	0,290	1,802	0,300
Jumlah							6,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Setelah mendapatkan nilai geomean pada masing-masing perbandingan, selanjutnya nilai geomean disusun ke dalam matriks perbandingan berpasangan dan dinormalisasi untuk mendapatkan nilai λ maksimal, nilai CI, nilai IR, dan nilai CR. Nilai λ maks yang didapatkan adalah 6,178 dengan nilai CI sebesar 0,036. Dengan nilai IR yang dipakai adalah 1,24 maka nilai CR dari hasil penggabungan kedua responden terkait alternatif program tingkat Kesehatan dan kesejahteraan yang baik adalah 0,029 sehingga penilaiannya dinyatakan konsisten. Kemudian bobot yang diperoleh dari masing-masing kriteria diurutkan dan didapatkan urutan alternatif program yang perlu dilakukan untuk meningkatkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan sebagai berikut.

Tabel 4. 137 Hasil AHP Alternatif Program Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik

Alternatif Program	Hasil	Peringkat
Beasiswa dan Bantuan Keuangan	0,300	1
Program Indonesia Pintar	0,289	2
Gratis Sekolah	0,255	3
Ayo Sekolah Rek	0,067	4
Perlindungan dan Pemberdayaan ABH	0,060	5
Kejar Paket	0,029	6

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 4. 46 Hasil AHP Alternatif Program Akses dan Ketersediaan Pendidikan

Berdasarkan perhitungan gabungan dari kedua responden, didapatkan bahwa alternatif program paling penting dan menempati urutan pertama untuk meningkatkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan yang baik adalah program beasiswa dan bantuan keuangan dengan bobot 0,300. Alternatif program ini merupakan program pemberian beasiswa dan bantuan keuangan bagi anak-anak yang membutuhkan baik siswa yang kurang mampu maupun yang berprestasi karena masalah utama tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Mojokerto adalah masalah perekonomian. Dengan adanya beasiswa dan bantuan keuangan diharapkan program ini akan meningkatkan keinginan anak-anak untuk bersekolah. Alternatif program selanjutnya adalah program Indonesia pintar dengan bobot 0,289, program gratis sekolah dengan bobot 0,255, program ayo sekolah rek dengan bobot 0,067, program perlindungan dan pemberdayaan anak berhadapan hukum dengan bobot 0,060, dan program terakhir akan dilaksanakan program kejar paket dengan bobot 0,029.

Penilaian Alternatif Program Kualitas Pendidikan

1. Narasumber Pertama

Penilaian kriteria AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar alternatif program kualitas pendidikan dengan menggunakan skala 1-9. Nilai yang diberikan oleh responden akan menentukan tingkat kepentingan dari alternatif program kualitas pendidikan yang dibandingkan. Responden pertama berasal dari bidang pengelola data dinas Pendidikan. Hasil dari penilaian responden pertama dapat

dilihat pada table berikut.

Tabel 4. 138 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kualitas Pendidikan Responden Pertama

Kriteria	Keterangan		
	Program Indonesia Pintar	Teknologi Dalam Pendidikan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
Program Indonesia Pintar	1	3	5
Teknologi Dalam Pendidikan	0,33	1	3
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	0,20	0,33	1
Jumlah	1,53	4,33	9,00

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 139 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kualitas Pendidikan Responden Pertama

Kriteria	Nilai λ			Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Program Indonesia Pintar	Teknologi Dalam Pendidikan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan		
Program Indonesia Pintar	0,652	0,692	0,556	1,900	0,633
Teknologi Dalam Pendidikan	0,217	0,231	0,333	0,781	0,260
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	0,130	0,077	0,111	0,318	0,106
Jumlah				3,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari responden pertama diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi dilakukan untuk menyetarakan skala perhitungan dengan menjumlahkan setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan untuk mencari nilai eigen value. Nilai eigen value didapatkan dari penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

Tahapan selanjutnya dilakukan perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai λ maksimal. Nilai λ maks yang diperoleh dari perkalian tersebut adalah 3,055. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk menghitung nilai *consistency index* (CI), dimana nilai CI yang didapatkan adalah 0,028. Nilai *random index* (RI) yang digunakan adalah 0,58 karena kriteria yang dibandingkan berjumlah 3 kriteria sesuai dengan tabel *random index*. Terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai *consistency ratio* (CR) berada pada angka $\leq 0,1$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan

narasumber dinyatakan konsisten dan dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. Perhitungan *consistency ratio* (CR) didapatkan dari hasil pembagian nilai CI dengan nilai RI. Nilai CR dari responden pertama adalah 0,048 sehingga data yang diperoleh dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penilaian AHP pada responden pertama, bobot tertinggi diberikan pada alternatif program PIP (program Indonesia pintar) sedangkan bobot terendah diberikan pada alternatif program peningkatan akses dan kualitas Pendidikan.

2. Narasumber Kedua

Penilaian kriteria AHP selanjutnya dilakukan kepada responden kedua menggunakan skala 1-9. Nilai yang diberikan oleh responden akan menentukan tingkat kepentingan dari alternatif program yang dibandingkan. Responden kedua berasal dari bidang pengelola data dinas Pendidikan. Hasil dari penilaian responden kedua dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4. 140 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kualitas Pendidikan Responden Kedua

Kriteria	Keterangan		
	Program Indonesia Pintar	Teknologi Dalam Pendidikan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
Program Indonesia Pintar	1	1	0,20
Teknologi Dalam Pendidikan	1	1	0,33
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	5,00	3	1
Jumlah	7,00	5,00	1,53

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari responden kedua diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi dilakukan untuk menyetarakan skala perhitungan dengan menjumlahkan setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan untuk mencari nilai eigen value. Nilai eigen value didapatkan dari penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

Tabel 4. 141 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kualitas Pendidikan Responden Kedua

Kriteria	Nilai λ			Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Program Indonesia Pintar	Teknologi Dalam Pendidikan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan		
Program Indonesia Pintar	0,143	0,200	0,130	0,473	0,158

Kriteria	Nilai λ			Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Program Indonesia Pintar	Teknologi Dalam Pendidikan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan		
Teknologi Dalam Pendidikan	0,143	0,200	0,217	0,560	0,187
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	0,714	0,600	0,652	1,966	0,655
Jumlah				3,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya dilakukan perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai λ maksimal. Nilai λ maks yang diperoleh dari perkalian tersebut adalah 3,043. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk menghitung nilai *consistency index* (CI), dimana nilai CI yang didapatkan adalah 0,022. Nilai *random index* (RI) yang digunakan adalah 0,58 karena kriteria yang dibandingkan berjumlah 3 kriteria sesuai dengan tabel *random index*. Terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai *consistency ratio* (CR) berada pada angka $\leq 0,1$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan narasumber dinyatakan konsisten dan dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. Perhitungan *consistency ratio* (CR) didapatkan dari hasil pembagian nilai CI dengan nilai RI. Nilai CR dari responden kedua adalah 0,037 sehingga data yang diperoleh dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penilaian AHP pada responden kedua, bobot tertinggi diberikan pada alternatif program peningkatan akses dan kualitas pendidikan sedangkan bobot terendah diberikan pada alternatif program PIP (program Indonesia pintar).

3. Naarasumber Gabungan

Kedua responden memiliki penilaian bobot dan urutan prioritas masing-masing dari ketiga kriteria. Setelah seluruh penilaian kedua responden dinyatakan konsisten untuk mencegah nilai *error*. Selanjutnya penilaian AHP perlu digabungkan untuk menentukan besaran nilai bobot dari masing-masing kriteria karena memiliki responden berjumlah lebih dari satu. Penggabungan matriks perbandingan berpasangan menggunakan rata-rata geometric (*geomean*) seperti pada table berikut.

Tabel 4. 142 Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Kualitas Pendidikan

Kriteria	Keterangan
----------	------------

	Program Indonesia Pintar	Teknologi Dalam Pendidikan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
Program Indonesia Pintar	1	1,73	1,00
Teknologi Dalam Pendidikan	0,58	1	1,00
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	1,00	1,00	1
Jumlah	2,58	3,73	3

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 143 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Kualitas Pendidikan

Kriteria	Nilai λ			Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Program Indonesia Pintar	Teknologi Dalam Pendidikan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan		
Program Indonesia Pintar	0,388	0,464	0,333	1,185	0,395
Teknologi Dalam Pendidikan	0,224	0,268	0,333	0,825	0,275
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	0,388	0,268	0,333	0,989	0,330
Jumlah				3,000	1,000

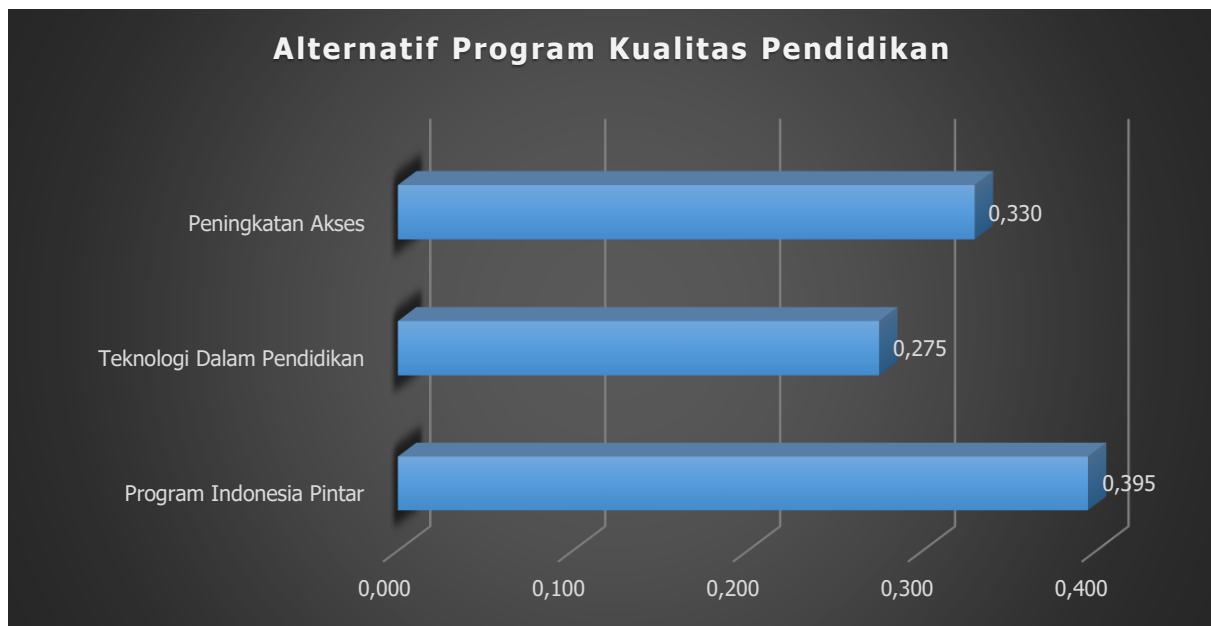
Sumber : Hasil Analisis, 2023

Setelah mendapatkan nilai geomean pada masing-masing perbandingan, selanjutnya nilai geomean disusun ke dalam matriks perbandingan berpasangan dan dinormalisasi untuk mendapatkan nilai λ maksimal, nilai CI, nilai IR, dan nilai CR. Nilai λ maks yang didapatkan adalah 3,034 dengan nilai CI sebesar 0,017. Dengan nilai IR yang dipakai adalah 0,58 maka nilai CR dari hasil penggabungan kedua responden terkait alternatif program kualitas pendidikan adalah 0,030 sehingga penilaiannya dinyatakan konsisten. Kemudian bobot yang diperoleh dari masing-masing kriteria diurutkan dan didapatkan urutan alternatif program yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sebagai berikut.

Tabel 4. 144 Hasil AHP Alternatif Program Kualitas Pendidikan

Alternatif Program	Hasil	Peringkat
Program Indonesia Pintar	0,395	1
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	0,30	2
Teknologi Dalam Pendidikan	0,275	3

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 4. 47 Hasil AHP Alternatif Program Kualitas Pendidikan

Berdasarkan perhitungan gabungan dari kedua responden, didapatkan bahwa alternatif program paling penting dan menempati urutan pertama untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah program PIP (program Indonesia pintar) dengan bobot 0,395. Alternatif program ini merupakan program bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada siswa melalui KIP dan bagi mahasiswa melalui KIP Kuliah. Program ini sangat penting untuk membantu biaya personal Pendidikan peserta didik, seperti membeli perlengkapan sekolah atau kursus uang saku, biaya transportasi, biaya praktik tambahan serta biaya uji kompetensi. Peringkat kedua program yang penting untuk dilakukan adalah peningkatan akses dan kualitas Pendidikan dengan bobot sebesar 0,330. Alternatif program terakhir dalam upaya untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di Kabupaten Mojokerto adalah teknologi dalam Pendidikan dengan bobot 0,275.

C. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah jumlah biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan untuk konsumsi oleh seluruh anggota rumah tangga dalam satu bulan, yang diperoleh dari pembelian, pemberian, atau produksi sendiri, kemudian dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Beberapa faktor dapat menyebabkan pengeluaran per kapita warga di suatu daerah lebih tinggi daripada di daerah lainnya, seperti adanya wilayah perkotaan yang memiliki banyak

wilayah elit. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan perbaikan ekonomi secara menyeluruh, akan tetapi justru seringkali dibarengi dengan ketimpangan. Ketimpangan ini seringkali dirasakan oleh kaum perempuan yang sulit mendapatkan akses baik kesehatan maupun pendidikan. Di Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2023 masih memiliki 4,83%/April tingkat pengangguran terbuka. Sebanyak 35.033 orang yang dinyatakan sebagai tenaga kerja yang masih membutuhkan pekerjaan. Pengeluaran per kapita berkaitan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang akan mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka.

. Berdasarkan permasalahan tingkat partisipasi angkatan kerja terdapat beberapa alternatif program yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja baik laki-laki. Untuk Pengeluaran Per Kapita sendiri memiliki 2 responden yaitu Bapak Agus Purwoto, S.Sos Penyuluh Sosial Ahli Muda, Dinas Sosial dan Bapak Ade, S.H JF Perencanaan, Dinas Tenaga Kerja. Adapun berikut merupakan hasil analisis AHP pengeluaran per kapita yang digunakan untuk menentukan program prioritas.

1. Narasumber Pertama

Penilaian kriteria untuk AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan nilai skala. Rentang nilai skala yang digunakan adalah dari 1 sampai 9. Nilai yang diberikan oleh narasumber akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria yang dibandingkan. Hasil dari penilaian narasumber pertama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 145 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Pengeluaran Per Kapita Narasumber Pertama

Kriteria	Keterangan	
	Tingkat Pendidikan TK Perempuan	Kesempatan Kerja Perempuan
Tingkat Pendidikan TK Perempuan	1	7
Kesempatan Kerja Perempuan	0,14	1
Jumlah	1,14	8,00

Sumber : Hasil Kuisioner, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari narasumber pertama akan diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi ini bertujuan untuk menyetarakan skala perhitungan dengan menjadikan jumlah maksimal pada setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan dalam mencari nilai eigen value. Nilai



eigen value diperoleh dari hasil penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

Tabel 4. 146 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Pengeluaran Per Kapita Narasumber Pertama

Kriteria	Nilai λ		Eigen Value
	Tingkat Pendidikan TK Perempuan	Kesempatan Kerja Perempuan	
Tingkat Pendidikan TK Perempuan	0,875	0,875	0,875
Kesempatan Kerja Perempuan	0,125	0,125	0,125
Jumlah			1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya adalah perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai lamda maksimal. Nilai lamda maksimal yang diperoleh adalah 2. Nilai lamda maksimal lalu digunakan untuk menghitung nilai consistency index (CI), dimana nilai CI dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,01. Nilai random index (RI) yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan tabel random index. Tahap pengolahan data dari narasumber, terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai consistency ratio (CR) berada pada angka $\leq 10\%$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan dari narasumber dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat sehingga dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya.

Tabel 4. 147 Hasil Eigen Value dan Kriteria Pengeluaran Per Kapita

No	Kriteria	Eigen Value
1	Tingkat Pendidikan TK Perempuan	0,875
2	Kesempatan Kerja Perempuan	0,125

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil penilaian dari narasumber pertama, memberikan bobot tertinggi pada kriteria Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Perempuan. Sehingga apabila ingin menyetarakan angka Pengeluaran Per Kapita. Berdasarkan pendapat narasumber pertama, hal yang harus diprioritaskan pertama adalah Tingkat pendidikan tenaga kerja perempuan.

2. Narasumber Kedua

Penilaian kriteria untuk AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan nilai skala. Rentang nilai skala yang

digunakan adalah dari 1 sampai 9. Nilai yang diberikan oleh narasumber akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria yang dibandingkan. Hasil dari penilaian narasumber pertama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 148 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Pengeluaran Per Kapita Narasumber Pertama

Kriteria	Keterangan	
	Tingkat Pendidikan TK Perempuan	Kesempatan Kerja Perempuan
Tingkat Pendidikan TK Perempuan	1	7
Kesempatan Kerja Perempuan	0,14	1
Jumlah	1,14	8,00

Sumber : Hasil Kuisiner, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari narasumber pertama akan diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan skala perhitungan dengan menjadikan jumlah maksimal pada setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan dalam mencari nilai eigen value. Nilai eigen value diperoleh dari hasil penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

Tabel 4. 149 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Pengeluaran Per Kapita Narasumber Kedua

Kriteria	Nilai λ		Eigen Value
	Tingkat Pendidikan TK Perempuan	Kesempatan Kerja Perempuan	
Tingkat Pendidikan TK Perempuan	0,875	0,875	0,875
Kesempatan Kerja Perempuan	0,125	0,125	0,125
Jumlah			1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya adalah perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai lamda maksimal. Nilai lamda maksimal yang diperoleh adalah 2. Nilai lamda maksimal lalu digunakan untuk menghitung nilai consistency index (CI), dimana nilai CI dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,01. Nilai random index (RI) yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan tabel random index. Tahap pengolahan data dari narasumber, terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai consistency ratio (CR) berada pada angka $\leq 10\%$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan dari

narasumber dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat sehingga dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya.

Tabel 4. 150 Hasil Eigen Value dan Kriteria Pengeluaran Per Kapita

No	Kriteria	Eigen Value
1	Tingkat Pendidikan TK Perempuan	0,875
2	Kesempatan Kerja Perempuan	0,125

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil penilaian dari narasumber pertama, memberikan bobot tertinggi pada kriteria Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Perempuan. Sehingga apabila ingin menyetarakan angka Pengeluaran Per Kapita. Berdasarkan pendapat narasumber pertama, hal yang harus diprioritaskan pertama adalah Tingkat pendidikan tenaga kerja perempuan.

3. Gabungan Narasumber

Dari ke-2 narasumber diatas memiliki penilaian bobot dan urutan prioritas masing-masing. Setelah seluruh penilaian kedua narasumber dinyatakan konsisten untuk mencegah nilai error, maka hasil penilaian AHP perlu digabungkan untuk menentukan besaran nilai bobot dari masing-masing kriteria. Narasumber AHP pada penelitian berjumlah lebih dari satu, maka penggabungan matriks perbandingan berpasangan menggunakan rata-rata geometrik (Geomean). Berikut merupakan geomean pada AHP unsur Kualitas Hidup Manusia yang dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 151 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Kriteria Pengeluaran Per Kapita

Kriteria	Keterangan	
	Tingkat Pendidikan TK Perempuan	Kesempatan Kerja Perempuan
Tingkat Pendidikan TK Perempuan	1	7
Kesempatan Kerja Perempuan	0,14	1
Jumlah	1,14	8,00

Sumber : Hasil Kuisioner, 2023

Tabel 4. 152 Matriks Gabungan Eigen Value Pengeluaran Per Kapita

Kriteria	Nilai λ		Eigen Value
	Tingkat Pendidikan TK Perempuan	Kesempatan Kerja Perempuan	
Tingkat Pendidikan TK Perempuan	0,875	0,875	0,875
Kesempatan Kerja Perempuan	0,125	0,125	0,125
Jumlah			1,000

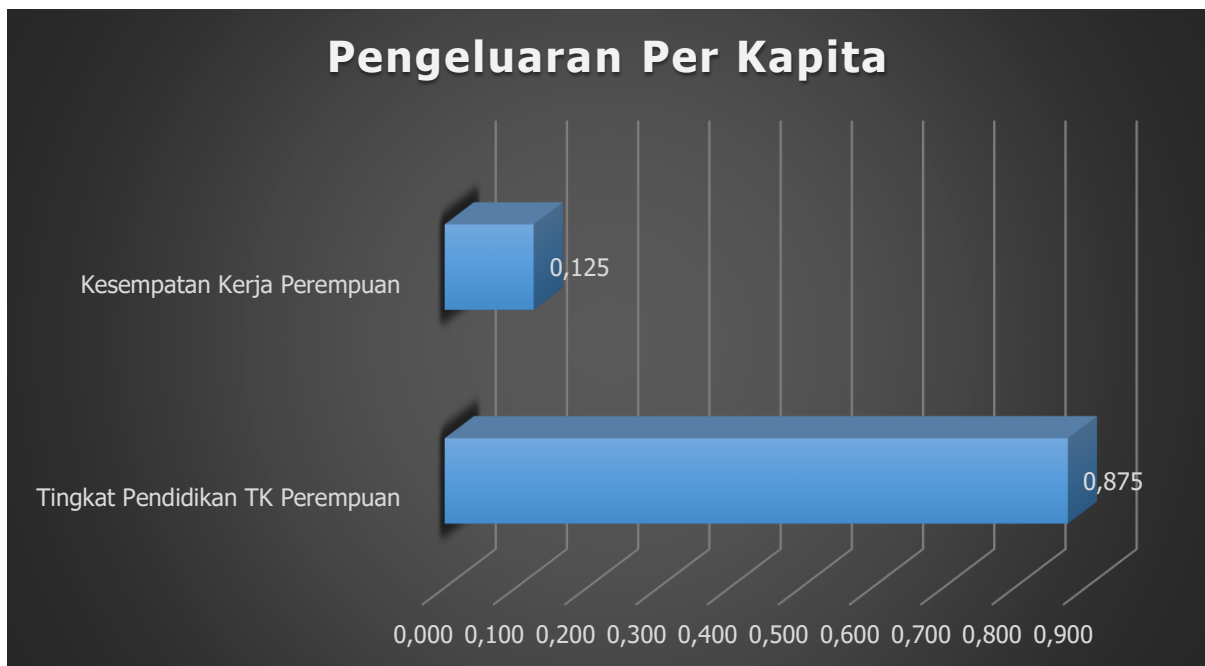
Sumber : Hasil Analisis, 2023

Setelah mendapatkan nilai geomean pada masing-masing perbandingan berpasangan, maka nilai geomean disusun ke dalam matrik perbandingan berpasangan dan dinormalisasi untuk mencari nilai lamda maksimal, nilai CI dan nilai CR. Maka nilai lamda maksimalnya didapatkan sebesar 2,00. Dengan Nilai IR yang digunakan sesuai ketentuan, maka hasil nilai CR dari hasil penggabungan narasumber adalah 0,01 sehingga penilaian dari gabungan kedua narasumber tersebut dinyatakan konsisten. Sehingga berdasarkan kedua gabungan narasumber tersebut dapat diketahui bahwa urutan prioritas kriteria dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 153 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan

No	Kriteria	Eigen Value
1	Tingkat Pendidikan TK Perempuan	0,875
2	Kesempatan Kerja Perempuan	0,125

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 4. 48 Hasil AHP Kriteria Pengeluaran

Berdasarkan hasil penilaian dari gabungan kedua narasumber, hasilnya menunjukkan bahwa nilai tertinggi pada kriteria pengeluaran terdapat pada Program Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Perempuan. Sehingga apabila ingin meningkatkan kesetaraan pengeluaran per kapita, berdasarkan hasil analisis program yang harus diprioritaskan pertama adalah program Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Perempuan agar angka kesetaraan pengeluaran per kapita menjadi sama dan nilai IPG di

Kabupaten Mojokerto meningkat.

Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Perempuan

1. Narasumber Pertama

Penilaian kriteria untuk AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan nilai skala. Rentang nilai skala yang digunakan adalah dari 1 sampai 9. Nilai yang diberikan oleh narasumber akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria yang dibandingkan. Hasil dari penilaian narasumber pertama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 4. 154 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Perempuan
Narasumber Pertama**

Kriteria	Keterangan							
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Pelatihan Kepemimpinan	Mendukung Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan Akses Pendidikan	Pemberdayaan Ekonomi	Pendidikan Keuangan	Jaringan dan Monitoring
Pemberdayaan Perempuan	1	1,00	1	9,00	0,33	3,00	1,00	1,00
PUSPA	1	1	9	0,14	1,00	5	0,14	5
Pelatihan Kepemimpinan	1,00	0,11	1	3	0,33	0,20	3	3
Mendukung Pemberdayaan Perempuan	0,11	7	0,33	1	0,20	1,00	7	1
Peningkatan Akses Pendidikan	3	1	3	5	1	9	1,00	0,33
Pemberdayaan Ekonomi	0,33	0,20	5	1	0,11	1	0,14	0,33
Pendidikan Keuangan	1	7	0,33	0,14	1	7	1	1
Jaringan dan Monitoring	1	0,20	0,33	1,00	3	3	1,00	1
Jumlah	8,44	17,51	20,00	20,29	6,98	29,20	14,286	12,667

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Tabel 4. 155 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tenaga Kerja Perempuan Narasumber Pertama

Kriteria	Nilai λ								Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Pelatihan Kepemimpinan	Mendukung Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan Akses Pendidikan	Pemberdayaan Ekonomi	Pendidikan Keuangan	Jaringan dan Monitoring		
Pemberdayaan Perempuan	0,12	0,06	0,05	0,44	0,05	0,10	0,07	0,08	0,969	0,121
PUSPA	0,12	0,06	0,45	0,01	0,14	0,17	0,01	0,39	1,352	0,169
Pelatihan Kepemimpinan	0,12	0,01	0,05	0,15	0,05	0,01	0,21	0,24	0,824	0,103
Mendukung Pemberdayaan Perempuan	0,01	0,40	0,02	0,05	0,03	0,03	0,49	0,08	1,111	0,139
Peningkatan Akses Pendidikan	0,36	0,06	0,15	0,25	0,14	0,31	0,07	0,03	1,357	0,170
Pemberdayaan Ekonomi	0,04	0,01	0,25	0,05	0,02	0,03	0,01	0,03	0,437	0,055
Pendidikan Keuangan	0,12	0,40	0,02	0,01	0,14	0,24	0,07	0,08	1,074	0,134
Jaringan dan Monitoring	0,12	0,01	0,02	0,05	0,43	0,10	0,07	0,08	0,877	0,110
Jumlah										1,00

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya adalah perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai lamda maksimal. Nilai lamda maksimal yang diperoleh adalah 14,94. Nilai lamda maksimal lalu digunakan untuk menghitung nilai consistency index (CI), dimana nilai CI dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,07. Nilai random index (RI) yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan tabel random index. Tahap pengolahan data dari narasumber, terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai consistency ratio (CR) berada pada angka 0,04 sehingga $\leq 10\%$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan dari narasumber dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat sehingga dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya.

Tabel 4. 156 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Pengeluaran Per Kapita

No	Alternatif Program	Eigen Value
1	Peningkatan Akses Pendidikan	0,169587
2	PUSPA	0,168981
3	Mendukung Pemberdayaan Perempuan	0,13884
4	Pendidikan Keuangan	0,134233
5	Pemberdayaan Perempuan	0,121081
6	Jaringan dan Monitoring	0,109679
7	Pelatihan Kepemimpinan	0,103014
8	Pemberdayaan Ekonomi	0,054585

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil penilaian dari narasumber pertama, memberikan bobot tertinggi pada program peningkatan akses pendidikan. Sehingga apabila ingin meningkatkan Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Perempuan, berdasarkan pendapat narasumber pertama, hal yang harus diprioritaskan pertama adalah peningkatan akses pendidikan

2. Narasumber Kedua

Penilaian kriteria untuk AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan nilai skala. Rentang nilai skala yang digunakan adalah dari 1 sampai 9. Nilai yang diberikan oleh narasumber akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria yang dibandingkan. Hasil dari penilaian narasumber pertama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 4. 157 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Perempuan
Narasumber Kedua**

Kriteria	Keterangan							
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Pelatihan Kepemimpinan	Mendukung Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan Akses Pendidikan	Pemberdayaan Ekonomi	Pendidikan Keuangan	Jaringan dan Monitoring
Pemberdayaan Perempuan	1	1,00	0	9,00	0,33	3,00	1,00	1,00
PUSPA	1	1	9	0,14	1,00	5	0,14	5
Pelatihan Kepemimpinan	3,00	0,11	1	3	0,33	0,20	3	3
Mendukung Pemberdayaan Perempuan	0,11	7	0,33	1	0,20	1,00	7	1
Peningkatan Akses Pendidikan	3	1	3	5	1	9	1,00	0,33
Pemberdayaan Ekonomi	0,33	0,20	5	1	0,11	1	0,14	0,33
Pendidikan Keuangan	1	7	0,33	0,14	1	7	1	1
Jaringan dan Monitoring	1	0,20	0,33	1,00	3	3	1,00	1
Jumlah	10,44	17,51	19,33	20,29	6,98	29,20	14,286	12,667

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Tabel 4. 158 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tenaga Kerja Perempuan Narasumber Kedua

Kriteria	Nilai λ								Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Pelatihan Kepemimpinan	Mendukung Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan Akses Pendidikan	Pemberdayaan Ekonomi	Pendidikan Keuangan	Jaringan dan Monitoring		
Pemberdayaan Perempuan	0,10	0,06	0,02	0,44	0,05	0,10	0,07	0,08	0,913	0,114
PUSPA	0,10	0,06	0,47	0,01	0,14	0,17	0,01	0,39	1,345	0,168
Pelatihan Kepemimpinan	0,29	0,01	0,05	0,15	0,05	0,01	0,21	0,24	0,995	0,124
Mendukung Pemberdayaan Perempuan	0,01	0,40	0,02	0,05	0,03	0,03	0,49	0,08	1,109	0,139
Peningkatan Akses Pendidikan	0,29	0,06	0,16	0,25	0,14	0,31	0,07	0,03	1,294	0,162
Pemberdayaan Ekonomi	0,03	0,01	0,26	0,05	0,02	0,03	0,01	0,03	0,438	0,055
Pendidikan Keuangan	0,10	0,40	0,02	0,01	0,14	0,24	0,07	0,08	1,052	0,131
Jaringan dan Monitoring	0,10	0,01	0,02	0,05	0,43	0,10	0,07	0,08	0,855	0,107
Jumlah										1,00

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya adalah perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai lamda maksimal. Nilai lamda maksimal yang diperoleh adalah 15,309. Nilai lamda maksimal lalu digunakan untuk menghitung nilai consistency index (CI), dimana nilai CI dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,1. Nilai random index (RI) yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan tabel random index. Tahap pengolahan data dari narasumber, terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai consistency ratio (CR) berada pada angka 0,06 sehingga $\leq 10\%$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan dari narasumber dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat sehingga dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya.

Tabel 4. 159 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Pengeluaran Per Kapita

No	Alternatif Program	Eigen Value
1	PUSPA	0,168087
2	Pemberdayaan Perempuan	0,16173
3	Pendidikan Keuangan	0,138597
4	Pelatihan Kepemimpinan	0,13147
5	Mendukung Pemberdayaan Perempuan	0,124332
6	Peningkatan Akses Pendidikan	0,114152
7	Pemberdayaan Ekonomi	0,106916
8	Jaringan dan Monitoring	0,054717

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil penilaian dari narasumber pertama, memberikan bobot tertinggi pada program PUSPA (Pemberdayaan Untuk Perempuan dan Anak). Sehingga apabila ingin meningkatkan Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Perempuan, berdasarkan pendapat narasumber kedua, hal yang harus diprioritaskan pertama adalah program PUSPA.

3. Gabungan Narasumber

Dari ke-2 narasumber diatas memiliki penilaian bobot dan urutan prioritas masing-masing. Setelah seluruh penilaian kedua narasumber dinyatakan konsisten untuk mencegah nilai error, maka hasil penilaian AHP perlu digabungkan untuk menentukan besaran nilai bobot dari masing-masing kriteria. Narasumber AHP pada penelitian berjumlah lebih dari satu, maka penggabungan matriks perbandingan berpasangan menggunakan rata-rata geometrik (Geomean).

Tabel 4. 160 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasaran Alternatif Program Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Perempuan

Kriteria	Keterangan							
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Pelatihan Kepemimpinan	Mendukung Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan Akses Pendidikan	Pemberdayaan Ekonomi	Pendidikan Keuangan	Jaringan dan Monitoring
Pemberdayaan Perempuan	1	1,00	0,58	9,00	0,33	3,00	1,00	1,00
PUSPA	1,00	1	9,00	0,14	1,00	5,00	0,14	5,00
Pelatihan Kepemimpinan	1,73	0,11	1	3,00	0,33	0,20	3,00	3,00
Mendukung Pemberdayaan Perempuan	0,11	7,00	0,33	1	0,20	1,00	7,00	1,00
Peningkatan Akses Pendidikan	3,00	1,00	3,00	5,00	1	9,00	1,00	0,33
Pemberdayaan Ekonomi	0,33	0,20	5,00	1,00	0,11	1	0,14	0,33
Pendidikan Keuangan	1,00	7,00	0,33	0,14	1,00	7,00	1	1,00
Jaringan dan Monitoring	1,00	0,20	0,33	1,00	3,00	3,00	1,00	1
Jumlah	9,18	17,51	19,58	20,29	6,98	29,20	14,286	12,667

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Tabel 4. 161 Matriks Gabungan Eigen Value Alternatif Program Tenaga Kerja Perempuan

Kriteria	Nilai λ								Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Pelatihan Kepemimpinan	Mendukung Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan Akses Pendidikan	Pemberdayaan Ekonomi	Pendidikan Keuangan	Jaringan dan Monitoring		
Pemberdayaan Perempuan	0,11	0,06	0,03	0,44	0,05	0,10	0,07	0,08	0,939	0,117
PUSPA	0,11	0,06	0,46	0,01	0,14	0,17	0,01	0,39	1,352	0,169
Pelatihan Kepemimpinan	0,19	0,01	0,05	0,15	0,05	0,01	0,21	0,24	0,896	0,112
Mendukung Pemberdayaan Perempuan	0,01	0,40	0,02	0,05	0,03	0,03	0,49	0,08	1,110	0,139
Peningkatan Akses Pendidikan	0,33	0,06	0,15	0,25	0,14	0,31	0,07	0,03	1,332	0,166
Pemberdayaan Ekonomi	0,04	0,01	0,26	0,05	0,02	0,03	0,01	0,03	0,439	0,055
Pendidikan Keuangan	0,11	0,40	0,02	0,01	0,14	0,24	0,07	0,08	1,065	0,133
Jaringan dan Monitoring	0,11	0,01	0,02	0,05	0,43	0,10	0,07	0,08	0,868	0,109
Jumlah										1,00

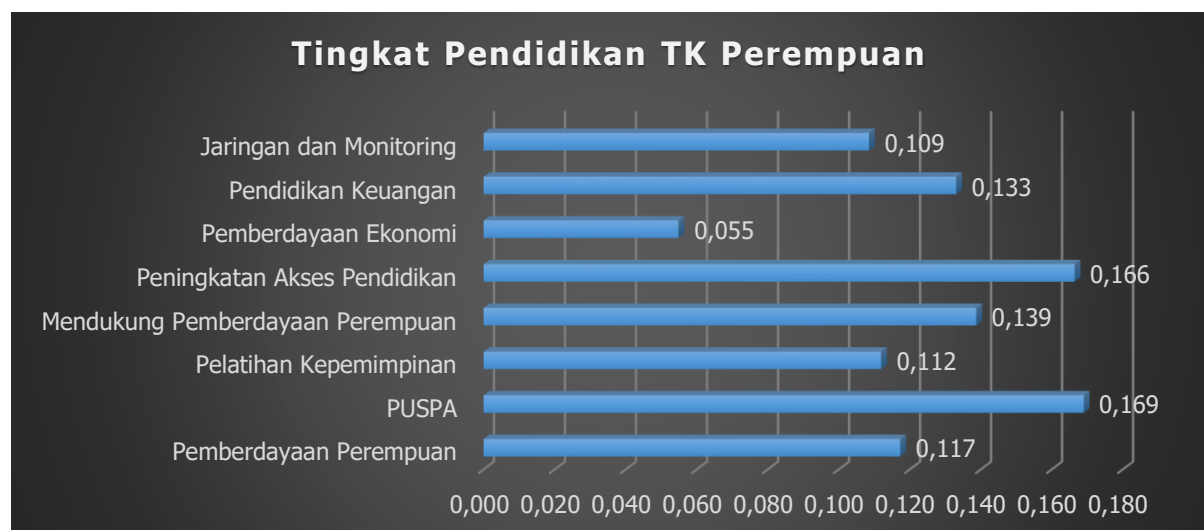
Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya adalah perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai lamda maksimal. Nilai lamda maksimal yang diperoleh adalah 15,08. Nilai lamda maksimal lalu digunakan untuk menghitung nilai consistency index (CI), dimana nilai CI dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,08. Nilai random index (RI) yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan tabel random index. Tahap pengolahan data dari narasumber, terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai consistency ratio (CR) berada pada angka 0,05 sehingga $\leq 10\%$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan dari narasumber dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat sehingga dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya.

Tabel 4. 162 Hasil Gabungan Eigen Value dan Alternatif Program Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Perempuan

Alternatif Program	Eigen Value
Pemberdayaan Perempuan	0,117
PUSPA	0,169
Pelatihan Kepemimpinan	0,112
Mendukung Pemberdayaan Perempuan	0,139
Peningkatan Akses Pendidikan	0,166
Pemberdayaan Ekonomi	0,055
Pendidikan Keuangan	0,133
Jaringan dan Monitoring	0,109

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 4. 49 Hasil AHP Alternatif Program Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Perempuan

Berdasarkan hasil penilaian dari para narasumber, memberikan bobot tertinggi pada program Pemberdayaan Perempuan Sehingga apabila ingin meningkatkan

Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Perempuan, berdasarkan pendapat narasumber pertama, hal yang harus diprioritaskan pertama adalah program Pemberdayaan Perempuan yang disusul oleh program PUSPA.

Kesempatan Kerja Perempuan

1. Narasumber Pertama

Penilaian kriteria untuk AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan nilai skala. Rentang nilai skala yang digunakan adalah dari 1 sampai 9. Nilai yang diberikan oleh narasumber akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria yang dibandingkan. Hasil dari penilaian narasumber pertama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 163 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kesempatan Kerja Perempuan Narasumber Pertama

Kriteria	Keterangan										
	Pemberdaya an Perempuan	Pelatihan Keterampilan	PUSPA	Mendukung Pemberdaya an Perempuan	Kewirausaha an Perempuan	Kewirausaha an Kecantikan	Program Kesetaraan Gender	Pemberdaya an Ekonomi	Pendidikan Keuangan	Jaringan dan Monitoring	Akses Terhadap Layanan Perawatan
Pemberdayaan Perempuan	1	1,00	1,00	9,00	0,20	3,00	1,00	1,00	0,11	1,00	0,20
Pelatihan Keterampilan	1,00	1	9,00	0,14	1,00	5,00	0,14	5,00	1,00	0,33	0,33
PUSPA	1,00	0,11	1	3,00	0,33	0,20	3,00	3,00	0,33	5,00	9,00
Mendukung Pemberdayaan Perempuan	0,11	7,00	0,33	1	0,20	1,00	7,00	1,00	1,00	0,33	1,00
Kewirausahaan Perempuan	5,00	1,00	3,00	5,00	1	9,00	1,00	0,33	0,14	1,00	1,00
Kewirausahaan Kecantikan	0,33	0,20	5,00	1,00	0,11	1	0,14	0,33	1,00	5,00	1,00
Program Kesetaraan Gender	1,00	7,00	0,33	0,14	1,00	7,00	1	1,00	0,11	1,00	1,00
Pemberdayaan Ekonomi	1,00	0,20	0,33	1,00	3,00	3,00	1,00	1	5,00	0,20	0,33
Pendidikan Keuangan	9,00	0,20	3,00	1,00	7,00	0,11	1,00	0,20	1	0,14	1,00
Jaringan dan Monitoring	1,00	3,00	0,20	3,00	1,00	0,20	1,00	5,00	7,00	1	3,00
Akses Terhadap Layanan Perawatan	5,00	3,00	0,11	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	0,33	1
Jumlah	25,44	23,71	23,31	25,29	15,84	30,51	17,286	20,867	17,698	15,343	18,867

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 164 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kesempatan Kerja Perempuan Narasumber Pertama

Nilai λ											Jumlah Nilai λ	Eigen Value
Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Keterampilan	PUSPA	Mendukung Pemberdayaan Perempuan	Kewirausahaan Perempuan	Kewirausahaan Kecantikan	Program Kesetaraan Gender	Pemberdayaan Ekonomi	Pendidikan Keuangan	Jaringan dan Monitoring	Akses Terhadap Layanan Perawatan		
0,04	0,04	0,04	0,36	0,01	0,10	0,06	0,05	0,01	0,07	0,01	0,779	0,071
0,04	0,04	0,39	0,01	0,06	0,16	0,01	0,24	0,06	0,02	0,02	1,044	0,095
0,04	0,00	0,04	0,12	0,02	0,01	0,17	0,14	0,02	0,33	0,48	1,372	0,125
0,00	0,30	0,01	0,04	0,01	0,03	0,40	0,05	0,06	0,02	0,05	0,983	0,089
0,20	0,04	0,13	0,20	0,06	0,29	0,06	0,02	0,01	0,07	0,05	1,123	0,102
0,01	0,01	0,21	0,04	0,01	0,03	0,01	0,02	0,06	0,33	0,05	0,775	0,070
0,04	0,30	0,01	0,01	0,06	0,23	0,06	0,05	0,01	0,07	0,05	0,877	0,080
0,04	0,01	0,01	0,04	0,19	0,10	0,06	0,05	0,28	0,01	0,02	0,808	0,073
0,35	0,01	0,13	0,04	0,44	0,00	0,06	0,01	0,06	0,01	0,05	1,162	0,106
0,04	0,13	0,01	0,12	0,06	0,01	0,06	0,24	0,40	0,07	0,16	1,280	0,116
0,20	0,13	0,00	0,04	0,06	0,03	0,06	0,14	0,06	0,02	0,05	0,796	0,072
												1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya adalah perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai lamda maksimal. Nilai lamda maksimal yang diperoleh adalah 15,75. Nilai lamda maksimal lalu digunakan untuk menghitung nilai consistency index (CI), dimana nilai CI dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,05. Nilai random index (RI) yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan tabel random index. Tahap pengolahan data dari narasumber, terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai consistency ratio (CR) berada pada angka 0,03 sehingga $\leq 10\%$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan dari narasumber dinyatakan konsisten.

Tabel 4. 165 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Kesempatan Kerja Perempuan

No	Alternatif Program	Eigen Value
1	PUSPA	0,124745
2	Jaringan dan Monitoring	0,116353
3	Pendidikan Keuangan	0,105643
4	Kewirausahaan Perempuan	0,102116
5	Pelatihan Keterampilan	0,094907
6	Mendukung Pemberdayaan Perempuan	0,089359
7	Program Kesenjangan Gender	0,079749
8	Pemberdayaan Ekonomi	0,073476
9	Akses Terhadap Layanan Perawatan	0,072371
10	Pemberdayaan Perempuan	0,070826
11	Kewirausahaan Kecantikan	0,070454

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil penilaian dari narasumber pertama, memberikan bobot tertinggi pada program PUSPA. Sehingga apabila ingin meningkatkan Kesempatan Kerja Perempuan, berdasarkan pendapat narasumber pertama, hal yang harus diprioritaskan pertama adalah program PUSPA atau Pemberdayaan Perempuan.

2. Narasumber Kedua

AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan nilai skala. Rentang nilai skala yang digunakan adalah dari 1 sampai 9. Nilai yang diberikan oleh narasumber akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria yang dibandingkan. Berikut dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4. 166 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kesempatan Kerja Perempuan Narasumber Kedua

Kriteria	Keterangan										
	Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Keterampilan	PUSPA	Mendukung Pemberdayaan Perempuan	Kewirausahaan Perempuan	Kewirausahaan Kecantikan	Program Kesetaraan Gender	Pemberdayaan Ekonomi	Pendidikan Keuangan	Jaringan dan Monitoring	Akses Terhadap Layanan Perawatan
Pemberdayaan Perempuan	1	1,00	1,00	9,00	0,20	3,00	1,00	1,00	0,11	1,00	0,20
Pelatihan Keterampilan	1,00	1	9,00	0,14	1,00	5,00	0,14	5,00	1,00	0,33	0,33
PUSPA	1,00	0,11	1	3,00	0,33	0,20	3,00	3,00	0,33	5,00	9,00
Mendukung Pemberdayaan Perempuan	0,11	7,00	0,33	1	0,20	1,00	7,00	1,00	1,00	0,33	1,00
Kewirausahaan Perempuan	5,00	1,00	3,00	5,00	1	9,00	1,00	0,33	0,14	1,00	1,00
Kewirausahaan Kecantikan	0,33	0,20	5,00	1,00	0,11	1	0,14	0,33	1,00	5,00	1,00
Program Kesetaraan Gender	1,00	7,00	0,33	0,14	1,00	7,00	1	1,00	0,11	1,00	1,00
Pemberdayaan Ekonomi	1,00	0,20	0,33	1,00	3,00	3,00	1,00	1	5,00	0,20	1,00
Pendidikan Keuangan	9,00	0,20	3,00	1,00	7,00	0,11	1,00	0,20	1	0,14	1,00
Jaringan dan Monitoring	1,00	3,00	0,20	3,00	1,00	0,20	1,00	5,00	7,00	1	3,00
Akses Terhadap Layanan Perawatan	5,00	3,00	0,11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,33	1
Jumlah	25,44	23,71	23,31	25,29	15,84	30,51	17,286	18,867	17,698	15,343	19,533

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Tabel 4. 167 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kesempatan Kerja Perempuan Narasumber Kedua

Nilai λ											Jumlah Nilai λ	Eigen Value
Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Keterampilan	PUSPA	Mendukung Pemberdayaan Perempuan	Kewirausahaan Perempuan	Kewirausahaan Kecantikan	Program Kesetaraan Gender	Pemberdayaan Ekonomi	Pendidikan Keuangan	Jaringan dan Monitoring	Akses Terhadap Layanan Perawatan		
0,04	0,04	0,04	0,36	0,01	0,10	0,06	0,05	0,01	0,07	0,01	0,784	0,071
0,04	0,04	0,39	0,01	0,06	0,16	0,01	0,27	0,06	0,02	0,02	1,069	0,097
0,04	0,00	0,04	0,12	0,02	0,01	0,17	0,16	0,02	0,33	0,46	1,371	0,125
0,00	0,30	0,01	0,04	0,01	0,03	0,40	0,05	0,06	0,02	0,05	0,986	0,090
0,20	0,04	0,13	0,20	0,06	0,29	0,06	0,02	0,01	0,07	0,05	1,123	0,102
0,01	0,01	0,21	0,04	0,01	0,03	0,01	0,02	0,06	0,33	0,05	0,775	0,070
0,04	0,30	0,01	0,01	0,06	0,23	0,06	0,05	0,01	0,07	0,05	0,881	0,080
0,04	0,01	0,01	0,04	0,19	0,10	0,06	0,05	0,28	0,01	0,05	0,847	0,077
0,35	0,01	0,13	0,04	0,44	0,00	0,06	0,01	0,06	0,01	0,05	1,161	0,106
0,04	0,13	0,01	0,12	0,06	0,01	0,06	0,27	0,40	0,07	0,15	1,300	0,118
0,20	0,13	0,00	0,04	0,06	0,03	0,06	0,05	0,06	0,02	0,05	0,704	0,064
												1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya adalah perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai lamda maksimal. Nilai lamda maksimal yang diperoleh adalah 15,94. Nilai lamda maksimal lalu digunakan untuk menghitung nilai consistency index (CI), dimana nilai CI dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,06. Nilai random index (RI) yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan tabel random index. Tahap pengolahan data dari narasumber, terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai consistency ratio (CR) berada pada angka 0,04 sehingga $\leq 10\%$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan dari narasumber dinyatakan konsisten.

Tabel 4. 168 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Kesempatan Kerja Perempuan

No	Alternatif Program	Eigen Value
1	PUSPA	0,124651
2	Jaringan dan Monitoring	0,118169
3	Pendidikan Keuangan	0,105571
4	Kewirausahaan Perempuan	0,102106
5	Pelatihan Keterampilan	0,097161
6	Mendukung Pemberdayaan Perempuan	0,089656
7	Program Kesenjangan Gender	0,080047
8	Pemberdayaan Ekonomi	0,076986
9	Pemberdayaan Perempuan	0,071255
10	Kewirausahaan Kecantikan	0,070443
11	Akses Terhadap Layanan Perawatan	0,063955

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil penilaian dari narasumber pertama, memberikan bobot tertinggi pada program PUSPA. Sehingga apabila ingin meningkatkan Kesempatan Kerja Perempuan, berdasarkan pendapat narasumber pertama, hal yang harus diprioritaskan pertama adalah program PUSPA atau Pemberdayaan Perempuan.

3. Gabungan Narasumber

Dari ke-2 narasumber diatas memiliki penilaian bobot dan urutan prioritas masing-masing. Narasumber AHP pada penelitian berjumlah lebih dari satu, maka penggabungan matriks perbandingan berpasangan menggunakan rata-rata geometrik (Geomean). Berikut merupakan geomean yang dapat dilihat sebagai berikut..

Tabel 4. 169 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kesempatan Kerja Perempuan

Kriteria	Keterangan										
	Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Keterampilan	PUSPA	Mendukung Pemberdayaan Perempuan	Kewirausahaan Perempuan	Kewirausahaan Kecantikan	Program Kesetaraan Gender	Pemberdayaan Ekonomi	Pendidikan Keuangan	Jaringan dan Monitoring	Akses Terhadap Layanan Perawatan
Pemberdayaan Perempuan	1	1,00	1,00	9,00	0,20	3,00	1,00	1,00	0,11	1,00	0,20
Pelatihan Keterampilan	1,00	1	9,00	0,14	1,00	5,00	0,14	5,00	1,00	0,33	0,33
PUSPA	1,00	0,11	1	3,00	0,33	0,20	3,00	3,00	0,33	5,00	9,00
Mendukung Pemberdayaan Perempuan	0,11	7,00	0,33	1	0,20	1,00	7,00	1,00	1,00	0,33	1,00
Kewirausahaan Perempuan	5,00	1,00	3,00	5,00	1	9,00	1,00	0,33	0,14	1,00	1,00
Kewirausahaan Kecantikan	0,33	0,20	5,00	1,00	0,11	1	0,14	0,33	1,00	5,00	1,00
Program Kesetaraan Gender	1,00	7,00	0,33	0,14	1,00	7,00	1	1,00	0,11	1,00	1,00
Pemberdayaan Ekonomi	1,00	0,20	0,33	1,00	3,00	3,00	1,00	1	5,00	0,20	0,58
Pendidikan Keuangan	9,00	0,20	3,00	1,00	7,00	0,11	1,00	0,20	1	0,14	1,00
Jaringan dan Monitoring	1,00	3,00	0,20	3,00	1,00	0,20	1,00	5,00	7,00	1	3,00
Akses Terhadap Layanan Perawatan	5,00	3,00	0,11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,73	1,00	0,33	1
Jumlah	25,44	23,71	23,31	25,29	15,84	30,51	17,29	19,60	17,70	15,34	19,11

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Tabel 4. 170 Matriks Gabungan Eigen Value Alternatif Program Kesempatan Kerja Perempuan

Nilai λ											Jumlah Nilai λ	Eigen Value
Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Keterampilan	PUSPA	Mendukung Pemberdayaan Perempuan	Kewirausahaan Perempuan	Kewirausahaan Kecantikan	Program Kesetaraan Gender	Pemberdayaan Ekonomi	Pendidikan Keuangan	Jaringan dan Monitoring	Akses Terhadap Layanan Perawatan		
0,04	0,04	0,04	0,36	0,01	0,10	0,06	0,05	0,01	0,07	0,01	0,782	0,071
0,04	0,04	0,39	0,01	0,06	0,16	0,01	0,26	0,06	0,02	0,02	1,059	0,096
0,04	0,00	0,04	0,12	0,02	0,01	0,17	0,15	0,02	0,33	0,47	1,375	0,125
0,00	0,30	0,01	0,04	0,01	0,03	0,40	0,05	0,06	0,02	0,05	0,985	0,090
0,20	0,04	0,13	0,20	0,06	0,29	0,06	0,02	0,01	0,07	0,05	1,124	0,102
0,01	0,01	0,21	0,04	0,01	0,03	0,01	0,02	0,06	0,33	0,05	0,775	0,070
0,04	0,30	0,01	0,01	0,06	0,23	0,06	0,05	0,01	0,07	0,05	0,880	0,080
0,04	0,01	0,01	0,04	0,19	0,10	0,06	0,05	0,28	0,01	0,03	0,824	0,075
0,35	0,01	0,13	0,04	0,44	0,00	0,06	0,01	0,06	0,01	0,05	1,162	0,106
0,04	0,13	0,01	0,12	0,06	0,01	0,06	0,26	0,40	0,07	0,16	1,293	0,118
0,20	0,13	0,00	0,04	0,06	0,03	0,06	0,09	0,06	0,02	0,05	0,740	0,067
												1,000

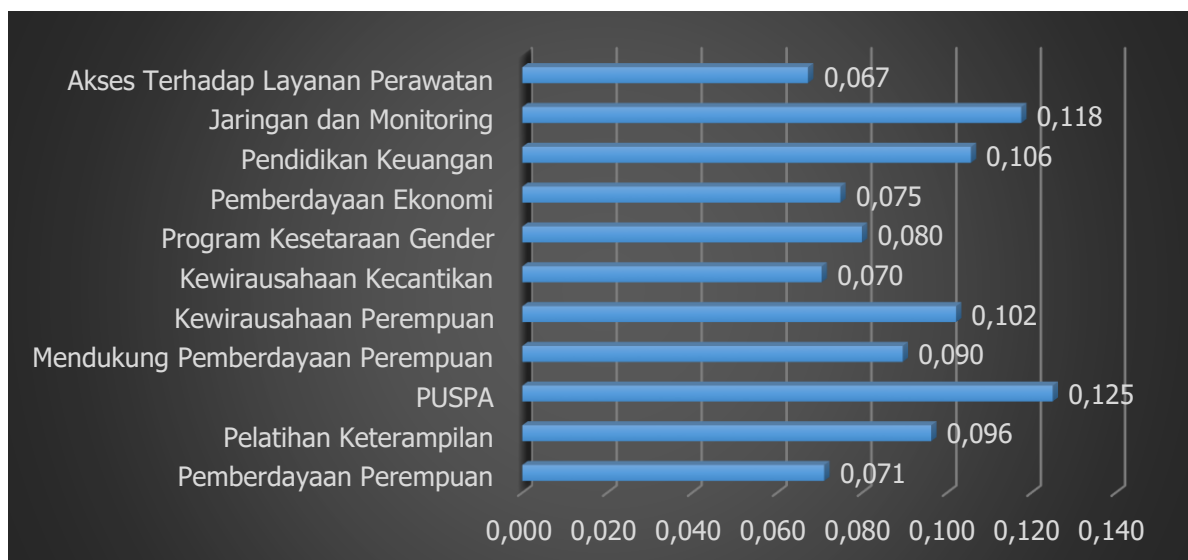
Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya adalah perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai lamda maksimal. Nilai lamda maksimal yang diperoleh adalah 15,85. Nilai lamda maksimal lalu digunakan untuk menghitung nilai consistency index (CI), dimana nilai CI dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,06. Nilai random index (RI) yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan tabel random index. Tahap pengolahan data dari narasumber, terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai consistency ratio (CR) berada pada angka 0,03 sehingga $\leq 10\%$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan dari narasumber dinyatakan konsisten.

Tabel 4. 171 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Kesempatan Kerja Perempuan

No	Alternatif Program	Eigen Value
1	Pemberdayaan Perempuan	0,071
2	Pelatihan Keterampilan	0,096
3	PUSPA	0,125
4	Mendukung Pemberdayaan Perempuan	0,090
5	Kewirausahaan Perempuan	0,102
6	Kewirausahaan Kecantikan	0,070
7	Program Kesenjangan Gender	0,080
8	Pemberdayaan Ekonomi	0,075
9	Pendidikan Keuangan	0,106
10	Jaringan dan Monitoring	0,118
11	Akses Terhadap Layanan Perawatan	0,067

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 4. 50 Hasil AHP Alternatif Program Kesempatan Kerja Perempuan



Berdasarkan hasil penilaian dari para narasumber, memberikan bobot tertinggi pada program PUSPA. Sehingga apabila ingin meningkatkan Kesempatan Kerja Perempuan, berdasarkan pendapat para narasumber, hal yang harus diprioritaskan pertama adalah program PUSPA atau Pemberdayaan Perempuan.

D. Keterlibatan Perempuan Dalam Parlemen

Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam menghitung indeks pemberdayaan gender (IDG) di Indonesia. Komponen pembentuk IDG yaitu perempuan di parlemen diukur dari persentase perempuan yang menduduki kursi di DPRD. Untuk mencapai hal ini pemerintah menetapkan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Penetapan kuota 30% perempuan dalam pemilu legislatif adalah sebuah *affirmative action* yang telah lama diperjuangkan oleh aktivis perempuan (Kertati, 2021). Capaian perempuan terlibat dalam parlemen Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2022.

Untuk Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen memiliki 2 responden yaitu Bapak Agus Purwoto, S.Sos Penyuluh Sosial Ahli Muda, Dinas Sosial dan Ibu Lenny Raficha Fatjerin, S.Sos Penyuluh Penanganan Masalah Sosial, Dinas Sosial. Adapun selanjutnya akan dipaparkan terkait hasil perhitungan analisis AHP yang digunakan untuk menentukan program prioritas yang dapat meningkatkan nilai indikator Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen.

1. Narasumber Pertama

Penilaian kriteria untuk AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan nilai skala. Rentang nilai skala yang digunakan adalah dari 1 sampai 9. Nilai yang diberikan oleh narasumber akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria yang dibandingkan. Hasil dari penilaian narasumber pertama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 172 Perbandingan Berpasangan Kriteria Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen

Kriteria	Keterangan		
	Jumlah Perempuan di Parlemen Tinggi	Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi	Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi
Jumlah Perempuan di Parlemen Tinggi	1	3	5
Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi	0,33	1	3



Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi	0,20	0,33	1
Jumlah	1,53	4,33	9,00

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 173 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen Narasumber Pertama

Kriteria	Nilai λ			Eigen Value
	Jumlah Perempuan di Parlemen Tinggi	Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi	Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi	
Jumlah Perempuan di Parlemen Tinggi	0,652	0,692	0,556	0,633
Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi	0,217	0,231	0,333	0,260
Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi	0,130	0,077	0,111	0,106
Jumlah				1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya adalah perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai lamda maksimal. Nilai lamda maksimal yang diperoleh adalah 4,35. Nilai lamda maksimal lalu digunakan untuk menghitung nilai consistency index (CI), dimana nilai CI dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,11. Nilai random index (RI) yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan tabel random index. Tahap pengolahan data dari narasumber, terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai consistency ratio (CR) berada pada angka 0,08 sehingga $\leq 10\%$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan dari narasumber dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat sehingga dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya.

Tabel 4. 174 Hasil Eigen Value dan Kriteria Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen

No	Kriteria	Eigen Value
1	Jumlah Perempuan di Parlemen Tinggi	0,633346
2	Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi	0,260498
3	Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi	0,106156

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil penilaian dari narasumber pertama, memberikan bobot tertinggi pada kriteria Jumlah Perempuan di Parlemen Tinggi. Sehingga apabila ingin meningkatkan angka Keterlibatan Perempuan di Parlemen berdasarkan pendapat narasumber pertama, hal yang harus diprioritaskan pertama adalah jumlah perempuan di dalam parlemen harus tinggi melalui program-program terkait yang

akan diketahui pada AHP unsur pada sub-sub bab dibawah.

2. Narasumber Kedua

Penilaian kriteria untuk AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan nilai skala. Rentang nilai skala yang digunakan adalah dari 1 sampai 9. Nilai yang diberikan oleh narasumber akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria yang dibandingkan. Hasil dari penilaian narasumber pertama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 175 Perbandingan Berpasangan Kriteria Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen

Kriteria	Keterangan		
	Jumlah Perempuan di Parlemen Tinggi	Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi	Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi
Jumlah Perempuan di Parlemen Tinggi	1	5	3,00
Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi	0,20	1	1
Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi	0,33	1,00	1
Jumlah	1,53	7,00	5,00

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 176 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen Narasumber Kedua

Kriteria	Nilai λ			Eigen Value
	Jumlah Perempuan di Parlemen Tinggi	Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi	Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi	
Jumlah Perempuan di Parlemen Tinggi	0,652	0,714	0,600	0,655
Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi	0,130	0,143	0,200	0,158
Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi	0,217	0,143	0,200	0,187
Jumlah				1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya adalah perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai lamda maksimal. Nilai lamda maksimal yang diperoleh adalah 3,043. Nilai lamda maksimal lalu digunakan untuk menghitung nilai consistency index (CI), dimana nilai CI dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,02. Nilai random index (RI) yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan tabel random index. Tahap pengolahan data dari narasumber, terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai consistency ratio (CR) berada pada angka 0,04 sehingga $\leq 10\%$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang

didapatkan dari narasumber dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat sehingga dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya.

Tabel 4. 177 Hasil Eigen Value dan Kriteria Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen

No	Kriteria	Eigen Value
1	Jumlah Perempuan di Parlemen Tinggi	0,655
2	Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi	0,158
3	Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi	0,187

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil penilaian dari narasumber pertama, memberikan bobot tertinggi pada kriteria Jumlah Perempuan di Parlemen Tinggi. Sehingga apabila ingin meningkatkan angka Keterlibatan Perempuan di Parlemen berdasarkan pendapat narasumber pertama, hal yang harus diprioritaskan pertama adalah jumlah perempuan di dalam parlemen harus tinggi melalui program-program terkait yang akan diketahui pada AHP unsur pada sub-sub bab dibawah.

3. Gabungan Narasumber

Dari ke-2 narasumber diatas memiliki penilaian bobot dan urutan prioritas masing-masing. Narasumber AHP pada penelitian berjumlah lebih dari satu, maka penggabungan matriks perbandingan berpasangan menggunakan rata-rata geometrik (Geomean). Berikut merupakan geomean yang dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 4. 178 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Kriteria Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen

Kriteria	Keterangan		
	Jumlah Perempuan di Parlemen Tinggi	Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi	Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi
Jumlah Perempuan di Parlemen Tinggi	1	3,87	3,87
Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi	0,26	1	1,73
Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi	0,26	0,58	1
Jumlah	1,52	5,45	6,61

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 179 Matriks Gabungan Nilai Eigen Value

Kriteria	Nilai λ			Eigen Value
	Jumlah Perempuan di Parlemen Tinggi	Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi	Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi	
Jumlah Perempuan di Parlemen Tinggi	0,659	0,711	0,586	0,652

Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi	0,170	0,183	0,262	0,205
Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi	0,170	0,106	0,151	0,143
Jumlah				1,000

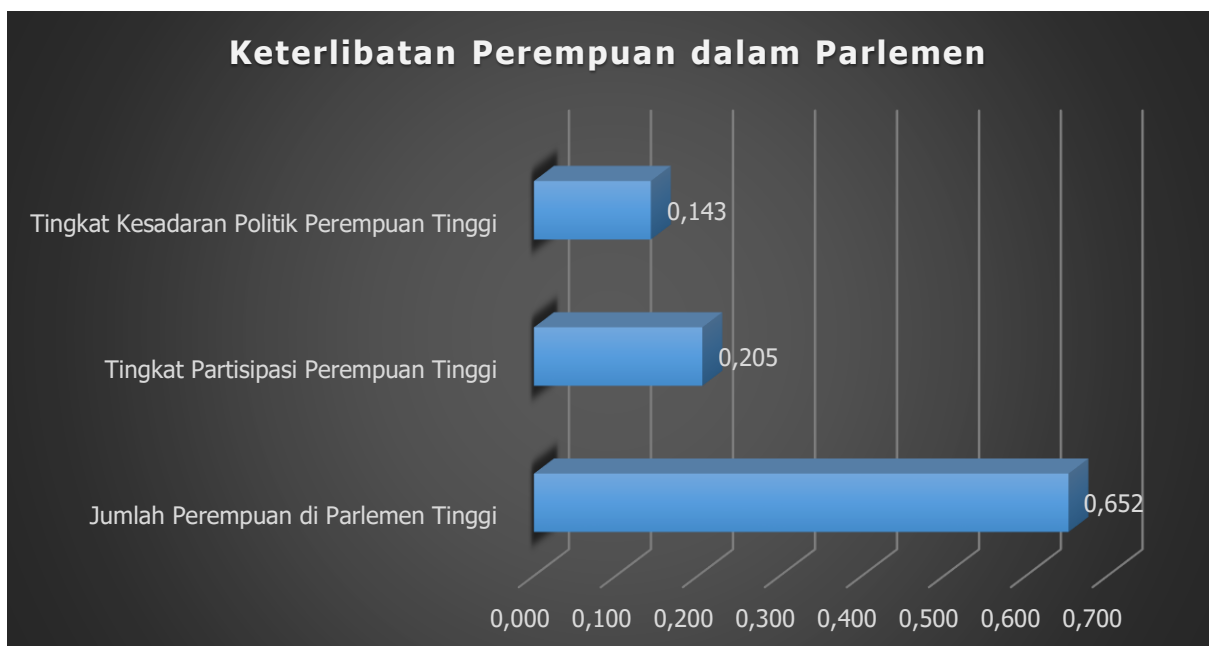
Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya adalah perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai lamda maksimal. Nilai lamda maksimal yang diperoleh adalah 3,049. Nilai lamda maksimal lalu digunakan untuk menghitung nilai consistency index (CI), dimana nilai CI dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,02. Nilai random index (RI) yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan tabel random index. Tahap pengolahan data dari narasumber, terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai consistency ratio (CR) berada pada angka 0,04 sehingga $\leq 10\%$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan dari narasumber dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat sehingga dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya.

Tabel 4. 180 Hasil Eigen Value dan Kriteria Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen

No	Kriteria	Eigen Value
1	Jumlah Perempuan di Parlemen Tinggi	0,652
2	Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi	0,205
3	Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi	0,143

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 4. 51 Hasil AHP Kriteria Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen

Berdasarkan hasil penilaian dari narasumber pertama, memberikan bobot tertinggi pada kriteria Jumlah Perempuan di Parlemen Tinggi. Sehingga apabila ingin meningkatkan angka Keterlibatan Perempuan di Parlemen berdasarkan pendapat narasumber pertama, hal yang harus diprioritaskan pertama adalah jumlah perempuan di dalam parlemen harus tinggi melalui program-program terkait yang akan diketahui pada AHP unsur pada sub-sub bab dibawah.

Jumlah Perempuan di Parlemen Tinggi

1. Narasumber Pertama

Penilaian kriteria untuk AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan nilai skala. Rentang nilai skala yang digunakan adalah dari 1 sampai 9. Nilai yang diberikan oleh narasumber akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria yang dibandingkan. Hasil dari penilaian narasumber pertama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 181 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Jumlah Perempuan dalam Parlemen Narasumber Pertama

Kriteria	Keterangan								
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pemberdayaan	Program Kesetaraan Gender	Pelatihan Kepemimpinan	Program Pendidikan Politik	Kampanye Kesadaran Politik	Minimal Kuota Keterwakilan	Pengembangan Jaringan Sosial
Pemberdayaan Perempuan	1	1,00	1	9,00	0,20	3,00	1,00	1,00	0,11
PUSPA	1	1	9	0,14	1,00	5	0,14	5	1
Mendukung Pemberdayaan	1,00	0,11	1	3	0,33	0,20	3	3	0,33
Program Kesetaraan Gender	0,11	7	0,33	1	0,20	1,00	7	1	1
Pelatihan Kepemimpinan	5	1	3	5	1	9	1,00	0,33	0,14
Program Pendidikan Politik	0,33	0,20	5	1	0,11	1	0,14	0,33	1
Kampanye Kesadaran Politik	1	7	0,33	0,14	1	7	1	1	0,11
Minimal Kuota Keterwakilan	1	0,20	0,33	1,00	3	3	1,00	1	5
Pengembangan Jaringan Sosial	9	0,20	3	1,00	7	0,11	1	0,20	1
Jumlah	19,44	17,71	23,00	21,29	13,84	29,31	15,286	12,867	9,70

Sumber : Hasil Analisis, 2023



**Tabel 4. 182 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Jumlah Perempuan dalam Parlemen
Narasumber Pertama**

Nilai λ									Eigen Value
Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pemberdayaan	Program Kesetaraan Gender	Pelatihan Kepemimpinan	Program Pendidikan Politik	Kampanye Kesadaran Politik	Minimal Kuota Keterwakilan	Pengembangan Jaringan Sosial	
0,05	0,06	0,04	0,42	0,01	0,10	0,07	0,08	0,01	0,846
0,05	0,06	0,39	0,01	0,07	0,17	0,01	0,39	0,10	1,250
0,05	0,01	0,04	0,14	0,02	0,01	0,20	0,23	0,03	0,737
0,01	0,40	0,01	0,05	0,01	0,03	0,46	0,08	0,10	1,150
0,26	0,06	0,13	0,23	0,07	0,31	0,07	0,03	0,01	1,164
0,02	0,01	0,22	0,05	0,01	0,03	0,01	0,03	0,10	0,473
0,05	0,40	0,01	0,01	0,07	0,24	0,07	0,08	0,01	0,934
0,05	0,01	0,01	0,05	0,22	0,10	0,07	0,08	0,52	1,102
0,46	0,01	0,13	0,05	0,51	0,00	0,07	0,02	0,10	1,345
									1,00

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya adalah perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai lamda maksimal. Nilai lamda maksimal yang diperoleh adalah 16,83. Nilai lamda maksimal lalu digunakan untuk menghitung nilai consistency index (CI), dimana nilai CI dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,1. Nilai random index (RI) yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan tabel random index. Tahap pengolahan data dari narasumber, terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai consistency ratio (CR) berada pada angka 0,08 sehingga $\leq 10\%$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan dari narasumber dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat sehingga dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya.

Tabel 4. 183 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen

Alternatif Program	Eigen Value
Pengembangan Jaringan Sosial	0,14945
PUSPA	0,138864
Pelatihan Kepemimpinan	0,129364
Program Kesetaraan Gender	0,127751
Minimal Kuota Keterwakilan	0,122436
Kampanye Kesadaran Politik	0,103723
Pemberdayaan Perempuan	0,093953
Mendukung Pemberdayaan	0,081868
Program Pendidikan Politik	0,05259

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil penilaian dari narasumber pertama, memberikan bobot tertinggi program pengembangan jaringan sosial pada wanita. Sehingga apabila ingin meningkatkan angka Keterlibatan Perempuan di Parlemen berdasarkan hasil analisis, program yang harus diprioritaskan pertama untuk mencapai jumlah perempuan di parlemen tinggi adalah dengan melaksanakan program pengembangan jaringan sosial pada wanita di Kabupaten Mojokerto.

2. Narasumber Kedua

Penilaian kriteria untuk AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan nilai skala. Rentang nilai skala yang digunakan adalah dari 1 sampai 9. Nilai yang diberikan oleh narasumber akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria yang dibandingkan. Hasil dari penilaian narasumber pertama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 184 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Jumlah Perempuan dalam Parlemen Narasumber Kedua

Kriteria	Keterangan								
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pemberdayaan	Program Kesetaraan Gender	Pelatihan Kepemimpinan	Program Pendidikan Politik	Kampanye Kesadaran Politik	Minimal Kuota Keterwakilan	Pengembangan Jaringan Sosial
Pemberdayaan Perempuan	1	1,00	1	9,00	0,20	3,00	1,00	1,00	0,11
PUSPA	1	1	5	0,14	1,00	5	0,14	5	1
Mendukung Pemberdayaan	1,00	0,20	1	3	0,33	0,20	3	3	0,33
Program Kesetaraan Gender	0,11	7	0,33	1	0,20	0,20	7	1	1
Pelatihan Kepemimpinan	5	1	3	5	1	9	1,00	0,33	0,14
Program Pendidikan Politik	0,33	0,20	5	5	0,11	1	0,14	0,33	1
Kampanye Kesadaran Politik	1	7	0,33	0,14	1	7	1	1	0,11
Minimal Kuota Keterwakilan	1	0,20	0,33	1,00	3	3	1,00	1	5
Pengembangan Jaringan Sosial	9	0,20	3	1,00	7	0,11	1	0,20	1
Jumlah	19,44	17,80	19,00	25,29	13,84	28,51	15,286	12,867	9,70

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Tabel 4. 185 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Jumlah Perempuan dalam Parlemen
Narasumber Kedua

Nilai λ									Eigen Value
Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pemberdayaan	Program Kesetaraan Gender	Pelatihan Kepemimpinan	Program Pendidikan Politik	Kampanye Kesadaran Politik	Minimal Kuota Keterwakilan	Pengembangan Jaringan Sosial	
0,05	0,06	0,05	0,36	0,01	0,11	0,07	0,08	0,01	0,088
0,05	0,06	0,26	0,01	0,07	0,18	0,01	0,39	0,10	0,125
0,05	0,01	0,05	0,12	0,02	0,01	0,20	0,23	0,03	0,081
0,01	0,39	0,02	0,04	0,01	0,01	0,46	0,08	0,10	0,124
0,26	0,06	0,16	0,20	0,07	0,32	0,07	0,03	0,01	0,129
0,02	0,01	0,26	0,20	0,01	0,04	0,01	0,03	0,10	0,075
0,05	0,39	0,02	0,01	0,07	0,25	0,07	0,08	0,01	0,104
0,05	0,01	0,02	0,04	0,22	0,11	0,07	0,08	0,52	0,122
0,46	0,01	0,16	0,04	0,51	0,00	0,07	0,02	0,10	0,152
									1,00

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya adalah perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai lamda maksimal. Nilai lamda maksimal yang diperoleh adalah 17,16. Nilai lamda maksimal lalu digunakan untuk menghitung nilai consistency index (CI), dimana nilai CI dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,1. Nilai random index (RI) yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan tabel random index. Tahap pengolahan data dari narasumber, terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai consistency ratio (CR) berada pada angka 0,09 sehingga $\leq 10\%$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan dari narasumber dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat sehingga dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya.

Tabel 4. 186 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen

Alternatif Program	Eigen Value
Pengembangan Jaringan Sosial	0,151681
Pelatihan Kepemimpinan	0,129212
PUSPA	0,125008
Program Kesenjangan Gender	0,124033
Minimal Kuota Keterwakilan	0,122262
Kampanye Kesadaran Politik	0,10447
Pemberdayaan Perempuan	0,087826
Mendukung Pemberdayaan	0,08098
Program Pendidikan Politik	0,074527

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil penilaian dari narasumber pertama, memberikan bobot tertinggi program pengembangan jaringan sosial pada wanita. Sehingga apabila ingin meningkatkan angka Keterlibatan Perempuan di Parlemen berdasarkan hasil analisis, program yang harus diprioritaskan pertama untuk mencapai jumlah perempuan di parlemen tinggi adalah dengan melaksanakan program pengembangan jaringan sosial pada wanita di Kabupaten Mojokerto.

3. Gabungan Narasumber

Dari ke-2 narasumber diatas memiliki penilaian bobot dan urutan prioritas masing-masing. Narasumber AHP pada penelitian berjumlah lebih dari satu, maka penggabungan matriks perbandingan berpasangan menggunakan rata-rata geometrik (Geomean). Berikut merupakan geomean yang dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 187 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Jumlah Perempuan dalam Parlemen

Kriteria	Keterangan								
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pemberdayaan	Program Kesetaraan Gender	Pelatihan Kepemimpinan	Program Pendidikan Politik	Kampanye Kesadaran Politik	Minimal Kuota Keterwakilan	Pengembangan Jaringan Sosial
Pemberdayaan Perempuan	1	1,00	1,00	9,00	0,20	3,00	1,00	1,00	0,11
PUSPA	1,00	1	6,71	0,14	1,00	5,00	0,14	5,00	1,00
Mendukung Pemberdayaan	1,00	0,15	1	3,00	0,33	0,20	3,00	3,00	0,33
Program Kesetaraan Gender	0,11	7,00	0,33	1	0,20	0,45	7,00	1,00	1,00
Pelatihan Kepemimpinan	5,00	1,00	3,00	5,00	1	9,00	1,00	0,33	0,14
Program Pendidikan Politik	0,33	0,20	5,00	2,24	0,11	1	0,14	0,33	1,00
Kampanye Kesadaran Politik	1,00	7,00	0,33	0,14	1,00	7,00	1	1,00	0,11
Minimal Kuota Keterwakilan	1,00	0,20	0,33	1,00	3,00	3,00	1,00	1	5,00
Pengembangan Jaringan Sosial	9,00	0,20	3,00	1,00	7,00	0,11	1,00	0,20	1
Jumlah	19,44	17,75	20,71	22,52	13,84	28,76	15,286	12,867	9,70

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Tabel 4. 188 Matriks Gabungan Nilai Eigen Value

Nilai λ									Eigen Value
Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pemberdayaan	Program Kesetaraan Gender	Pelatihan Kepemimpinan	Program Pendidikan Politik	Kampanye Kesadaran Politik	Minimal Kuota Keterwakilan	Pengembangan Jaringan Sosial	
0,05	0,06	0,05	0,40	0,01	0,10	0,07	0,08	0,01	0,092
0,05	0,06	0,32	0,01	0,07	0,17	0,01	0,39	0,10	0,132
0,05	0,01	0,05	0,13	0,02	0,01	0,20	0,23	0,03	0,082
0,01	0,39	0,02	0,04	0,01	0,02	0,46	0,08	0,10	0,125
0,26	0,06	0,14	0,22	0,07	0,31	0,07	0,03	0,01	0,130
0,02	0,01	0,24	0,10	0,01	0,03	0,01	0,03	0,10	0,061
0,05	0,39	0,02	0,01	0,07	0,24	0,07	0,08	0,01	0,104
0,05	0,01	0,02	0,04	0,22	0,10	0,07	0,08	0,52	0,123
0,46	0,01	0,14	0,04	0,51	0,00	0,07	0,02	0,10	0,151
									1,00

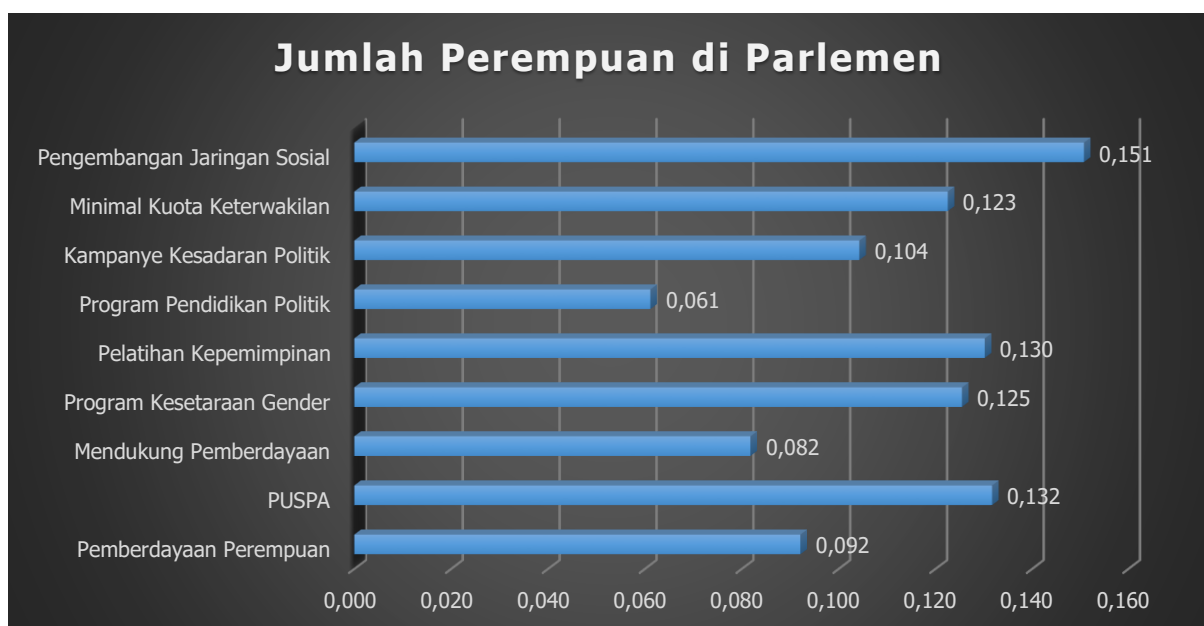
Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya adalah perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai lamda maksimal. Nilai lamda maksimal yang diperoleh adalah 16,48. Nilai lamda maksimal lalu digunakan untuk menghitung nilai consistency index (CI), dimana nilai CI dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,1. Nilai random index (RI) yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan tabel random index. Tahap pengolahan data dari narasumber, terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai consistency ratio (CR) berada pada angka 0,08 sehingga $\leq 10\%$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan dari narasumber dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat sehingga dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya.

Tabel 4. 189 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Jumlah Perempuan dalam Parlemen

Alternatif Program	Eigen Value
Pemberdayaan Perempuan	0,092
PUSPA	0,132
Mendukung Pemberdayaan	0,082
Program Kesetaraan Gender	0,125
Pelatihan Kepemimpinan	0,130
Program Pendidikan Politik	0,061
Kampanye Kesadaran Politik	0,104
Minimal Kuota Keterwakilan	0,123
Pengembangan Jaringan Sosial	0,151
Jumlah	1,00

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 4. 52 Hasil AHP Alternatif Program Jumlah Perempuan di Parlemen

Berdasarkan hasil penilaian dari gabungan narasumber pertama dan kedua, memberikan bobot tertinggi program pengembangan jaringan sosial pada wanita. Sehingga apabila ingin meningkatkan angka Keterlibatan Perempuan di Parlemen berdasarkan hasil analisis, program yang harus diprioritaskan pertama untuk mencapai jumlah perempuan di parlemen tinggi adalah dengan melaksanakan program peningkatan atau pengembangan jaringan sosial pada wanita di Kabupaten Mojokerto.

Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi

1. Narasumber Pertama

Penilaian kriteria untuk AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan nilai skala. Rentang nilai skala yang digunakan adalah dari 1 sampai 9. Nilai yang diberikan oleh narasumber akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria yang dibandingkan. Hasil dari penilaian narasumber pertama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 190 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi Narasumber Pertama

Kriteria	Keterangan					
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pemberdayaan	Program Kesetaraan Gender	Pelatihan Kepemimpinan	Program Pendidikan Politik
Pemberdayaan Perempuan	1	1,00	3	0,33	1,00	0,33
PUSPA	0,33	1	3	1,00	1,00	1,00
Mendukung Pemberdayaan	0,33	0,33	1	1	1,00	1,00
Program Kesetaraan Gender	3,00	1	1,00	1	0,33	1,00
Pelatihan Kepemimpinan	1	1	1	3	1	1
Program Pendidikan Politik	3,00	1,00	1,00	0,33	1,00	1
Jumlah	8,67	5,33	10,00	6,67	5,33	5,33

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 191 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi Narasumber Pertama

Kriteria	Nilai λ						Nilai Eigen Value
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pemberdayaan	Program Kesetaraan Gender	Pelatihan Kepemimpinan	Program Pendidikan Politik	
Pemberdayaan Perempuan	0,12	0,19	0,30	0,05	0,19	0,06	0,150
PUSPA	0,04	0,19	0,30	0,15	0,19	0,19	0,175
Mendukung Pemberdayaan	0,04	0,06	0,10	0,15	0,19	0,19	0,121
Program Kesetaraan Gender	0,35	0,19	0,10	0,15	0,06	0,19	0,172
Pelatihan Kepemimpinan	0,12	0,19	0,10	0,45	0,19	0,19	0,205
Program Pendidikan Politik	0,35	0,19	0,10	0,05	0,19	0,19	0,176
Jumlah							1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya adalah perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai lamda maksimal. Nilai lamda maksimal yang diperoleh adalah 6,62. Nilai lamda maksimal lalu digunakan untuk menghitung nilai consistency index (CI), dimana nilai CI dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,1. Nilai random index (RI) yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan tabel random index. Tahap pengolahan data dari narasumber, terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai consistency ratio (CR) berada pada angka 0,08 sehingga $\leq 10\%$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan dari narasumber dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat sehingga dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya.

Tabel 4. 192 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi

Alternatif Program	Eigen Value
Pelatihan Kepemimpinan	0,204647
Program Pendidikan Politik	0,176442
PUSPA	0,17516
Program Kesetaraan Gender	0,172276
Pemberdayaan Perempuan	0,150481
Mendukung Pemberdayaan	0,120994
Jumlah	1,00

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil penilaian dari gabungan narasumber pertama dan kedua, memberikan bobot tertinggi program pelatihan kepemimpinan pada wanita. Sehingga apabila ingin meningkatkan angka Keterlibatan Perempuan di Parlemen berdasarkan hasil analisis, program yang harus diprioritaskan pertama untuk mencapai tingkat partisipasi perempuan tinggi adalah dengan melaksanakan program pelatihan kepemimpinan pada wanita di Kabupaten Mojokerto.

2. Narasumber Kedua

Penilaian kriteria untuk AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan nilai skala. Rentang nilai skala yang digunakan adalah dari 1 sampai 9. Nilai yang diberikan oleh narasumber akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria yang dibandingkan. Hasil dari penilaian narasumber pertama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 193 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi Narasumber Kedua

Kriteria	Keterangan					
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pemberdayaan	Program Kesetaraan Gender	Pelatihan Kepemimpinan	Program Pendidikan Politik
Pemberdayaan Perempuan	1	3,00	1	1,00	1,00	0,33
PUSPA	0,33	1	3	1,00	1,00	1,00
Mendukung Pemberdayaan	1,00	0,33	1	1	1,00	1,00
Program Kesetaraan Gender	1,00	1	1,00	1	0,33	1,00
Pelatihan Kepemimpinan	1	1	1	3	1	1
Program Pendidikan Politik	3,00	1,00	1,00	0,33	1,00	1
Jumlah	7,33	7,33	8,00	7,33	5,33	5,33

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 194 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi Narasumber Kedua

Kriteria	Nilai λ						Nilai Eigen Value
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pemberdayaan	Program Kesetaraan Gender	Pelatihan Kepemimpinan	Program Pendidikan Politik	
Pemberdayaan Perempuan	0,14	0,41	0,13	0,14	0,19	0,06	0,176
PUSPA	0,05	0,14	0,38	0,14	0,19	0,19	0,178
Mendukung Pemberdayaan	0,14	0,05	0,13	0,14	0,19	0,19	0,136
Program Kesetaraan Gender	0,14	0,14	0,13	0,14	0,06	0,19	0,131
Pelatihan Kepemimpinan	0,14	0,14	0,13	0,41	0,19	0,19	0,197
Program Pendidikan Politik	0,41	0,14	0,13	0,05	0,19	0,19	0,182
Jumlah							1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya adalah perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai lamda maksimal. Nilai lamda maksimal yang diperoleh adalah 6,67. Nilai lamda maksimal lalu digunakan untuk menghitung nilai consistency index (CI), dimana nilai CI dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,1. Nilai random index (RI) yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan tabel random index. Tahap pengolahan data dari narasumber, terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai consistency ratio (CR) berada pada angka 0,09 sehingga $\leq 10\%$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan dari narasumber dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat sehingga dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya.

Tabel 4. 195 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi

Alternatif Program	Eigen Value
Pelatihan Kepemimpinan	0,19697
Program Pendidikan Politik	0,181818
PUSPA	0,17803
Pemberdayaan Perempuan	0,176136
Mendukung Pemberdayaan	0,136364

Program Kesetaraan Gender	0,130682
Jumlah	1,00

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil penilaian dari narasumber kedua, memberikan bobot tertinggi program pelatihan kepemimpinan pada wanita. Sehingga apabila ingin meningkatkan angka Keterlibatan Perempuan di Parlemen berdasarkan hasil analisis, program yang harus diprioritaskan pertama untuk mencapai tingkat partisipasi perempuan tinggi adalah dengan melaksanakan program pelatihan kepemimpinan pada wanita di Kabupaten Mojokerto.

3. Gabungan Narasumber

Dari ke-2 narasumber diatas memiliki penilaian bobot dan urutan prioritas masing-masing. Narasumber AHP pada penelitian berjumlah lebih dari satu, maka penggabungan matriks perbandingan berpasangan menggunakan rata-rata geometrik (Geomean). Berikut merupakan geomean yang dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 196 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi

Kriteria	Keterangan					
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pemberdayaan	Program Kesetaraan Gender	Pelatihan Kepemimpinan	Program Pendidikan Politik
Pemberdayaan Perempuan	1	1,73	1,73	0,58	1,00	0,33
PUSPA	0,33	1	3,00	1,00	1,00	1,00
Mendukung Pemberdayaan	0,58	0,33	1	1,00	1,00	1,00
Program Kesetaraan Gender	1,73	1,00	1,00	1	0,33	1,00
Pelatihan Kepemimpinan	1,00	1,00	1,00	3,00	1	1,00
Program Pendidikan Politik	3,00	1,00	1,00	0,33	1,00	1
Jumlah	7,64	6,07	8,73	6,91	5,33	5,33

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 197 Matriks Gabungan Nilai Eigen Value

Kriteria	Nilai λ						Nilai Eigen Value
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pemberdayaan	Program Kesetaraan Gender	Pelatihan Kepemimpinan	Program Pendidikan Politik	
Pemberdayaan Perempuan	0,13	0,29	0,20	0,08	0,19	0,06	0,158
PUSPA	0,04	0,16	0,34	0,14	0,19	0,19	0,179
Mendukung Pemberdayaan	0,08	0,05	0,11	0,14	0,19	0,19	0,127
Program Kesetaraan Gender	0,23	0,16	0,11	0,14	0,06	0,19	0,150
Pelatihan Kepemimpinan	0,13	0,16	0,11	0,43	0,19	0,19	0,203
Program Pendidikan Politik	0,39	0,16	0,11	0,05	0,19	0,19	0,183
Jumlah							1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya adalah perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai lamda maksimal. Nilai lamda maksimal yang diperoleh adalah 6,49. Nilai lamda maksimal lalu digunakan untuk menghitung nilai consistency index (CI), dimana nilai CI dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,09. Nilai random index (RI) yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan tabel random index. Tahap pengolahan data dari narasumber, terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai consistency ratio (CR) berada pada angka 0,086 sehingga $\leq 10\%$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan dari narasumber dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat sehingga dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya.

Tabel 4. 198 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi

Alternatif Program	Eigen Value
Pemberdayaan Perempuan	0,158
PUSPA	0,179
Mendukung Pemberdayaan	0,127
Program Kesetaraan Gender	0,150
Pelatihan Kepemimpinan	0,203
Program Pendidikan Politik	0,183
Jumlah	1,00

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Berdasarkan hasil penilaian dari gabungan narasumber pertama dan kedua, memberikan bobot tertinggi program pelatihan kepemimpinan pada wanita. Sehingga apabila ingin meningkatkan angka Keterlibatan Perempuan di Parlemen berdasarkan hasil analisis, program yang harus diprioritaskan pertama untuk mencapai tingkat partisipasi perempuan tinggi adalah dengan melaksanakan program pelatihan kepemimpinan pada wanita di Kabupaten Mojokerto.

Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi

1. Narasumber Pertama

Penilaian kriteria untuk AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan nilai skala. Rentang nilai skala yang digunakan adalah dari 1 sampai 9. Nilai yang diberikan oleh narasumber akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria yang dibandingkan. Hasil dari penilaian narasumber pertama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 199 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi Narasumber Pertama

Kriteria	Keterangan			
	Program Kesetaraan Gender	Pendidikan Politik	Kampanye Kesadaran Politik	Pengembangan Jaringan Sosial
Program Kesetaraan Gender	1	1,00	3	0,33
Pendidikan Politik	0,33	1	3	1,00
Kampanye Kesadaran Politik	0,33	0,33	1	1
Pengembangan Jaringan Sosial	3,00	1	1,00	1



Jumlah	4,67	3,33	8,00	3,33
--------	------	------	------	------

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 200 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi Narasumber Pertama

Kriteria	Nilai λ				Eigen Value
	Program Kesetaraan Gender	Pendidikan Politik	Kampanye Kesadaran Politik	Pengembangan Jaringan Sosial	
Program Kesetaraan Gender	0,21	0,30	0,38	0,10	0,247
Pendidikan Politik	0,07	0,30	0,38	0,30	0,262
Kampanye Kesadaran Politik	0,07	0,10	0,13	0,30	0,149
Pengembangan Jaringan Sosial	0,64	0,30	0,13	0,30	0,342
Jumlah					1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya adalah perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai lamda maksimal. Nilai lamda maksimal yang diperoleh adalah 4,35. Nilai lamda maksimal lalu digunakan untuk menghitung nilai consistency index (CI), dimana nilai CI dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,1. Nilai random index (RI) yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan tabel random index. Tahap pengolahan data dari narasumber, terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai consistency ratio (CR) berada pada angka 0,08 sehingga $\leq 10\%$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan dari narasumber dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat sehingga dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya.

Tabel 4. 201 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi

Alternatif Program	Eigen Value
Pengembangan Jaringan Sosial	0,341964
Pendidikan Politik	0,261607
Program Kesetaraan Gender	0,247321
Kampanye Kesadaran Politik	0,149107
Jumlah	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil penilaian dari narasumber pertama, memberikan bobot tertinggi program pelatihan pengembangan jaringan sosial pada wanita. Sehingga

apabila ingin meningkatkan angka Keterlibatan Perempuan di Parlemen berdasarkan hasil analisis, program yang harus diprioritaskan pertama untuk mencapai tingkat kesadaran politik perempuan tinggi adalah dengan melaksanakan program pengembangan jaringan sosial pada wanita di Kabupaten Mojokerto.

2. Narasumber Kedua

Penilaian kriteria untuk AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan nilai skala. Rentang nilai skala yang digunakan adalah dari 1 sampai 9. Nilai yang diberikan oleh narasumber akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria yang dibandingkan. Hasil dari penilaian narasumber pertama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 202 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi Narasumber Kedua

Kriteria	Keterangan			
	Program Kesetaraan Gender	Pendidikan Politik	Kampanye Kesadaran Politik	Pengembangan Jaringan Sosial
Program Kesetaraan Gender	1	0,33	1	0,33
Pendidikan Politik	3,00	1	3	1,00
Kampanye Kesadaran Politik	1,00	0,33	1	1
Pengembangan Jaringan Sosial	3,00	1	1,00	1
Jumlah	8,00	2,66	6,00	3,33

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 203 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi Narasumber Kedua

Kriteria	Nilai λ				Eigen Value
	Program Kesetaraan Gender	Pendidikan Politik	Kampanye Kesadaran Politik	Pengembangan Jaringan Sosial	
Program Kesetaraan Gender	0,13	0,12	0,17	0,10	0,129
Pendidikan Politik	0,38	0,38	0,50	0,30	0,388
Kampanye Kesadaran Politik	0,13	0,13	0,17	0,30	0,179
Pengembangan Jaringan Sosial	0,38	0,38	0,17	0,30	0,304
Jumlah					1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya adalah perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai lamda maksimal. Nilai lamda

maksimal yang diperoleh adalah 4,15. Nilai lamda maksimal lalu digunakan untuk menghitung nilai consistency index (CI), dimana nilai CI dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,05. Nilai random index (RI) yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan tabel random index. Tahap pengolahan data dari narasumber, terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai consistency ratio (CR) berada pada angka 0,03 sehingga $\leq 10\%$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan dari narasumber dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat sehingga dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya.

Tabel 4. 204 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi

Alternatif Program	Eigen Value
Pendidikan Politik	0,387617
Pengembangan Jaringan Sosial	0,304284
Kampanye Kesadaran Politik	0,179206
Program Kesetaraan Gender	0,128893
Jumlah	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil penilaian dari narasumber pertama, memberikan bobot tertinggi program pelatihan pendidikan politik. Sehingga apabila ingin meningkatkan angka Keterlibatan Perempuan di Parlemen berdasarkan hasil analisis, program yang harus diprioritaskan pertama untuk mencapai tingkat kesadaran politik perempuan tinggi adalah dengan melaksanakan program pendidikan politik di Kabupaten Mojokerto.

3. Gabungan Narasumber

Dari ke-2 narasumber diatas memiliki penilaian bobot dan urutan prioritas masing-masing. Narasumber AHP pada penelitian berjumlah lebih dari satu, maka penggabungan matriks perbandingan berpasangan menggunakan rata-rata geometrik (Geomean). Berikut merupakan geomean yang dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 205 Matriks Gabungan Perbandingan Berpasangan

Kriteria	Keterangan			
	Program Kesetaraan Gender	Pendidikan Politik	Kampanye Kesadaran Politik	Pengembangan Jaringan Sosial
Program Kesetaraan Gender	1	0,57	1,73	0,33
Pendidikan Politik	1,00	1	3,00	1,00

Kriteria	Keterangan			
	Program Kesetaraan Gender	Pendidikan Politik	Kampanye Kesadaran Politik	Pengembangan Jaringan Sosial
Kampanye Kesadaran Politik	0,58	0,33	1	1,00
Pengembangan Jaringan Sosial	3,00	1,00	1,00	1
Jumlah	5,58	2,91	6,73	3,33

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 206 Matriks Gabungan Nilai Eigen Value

Kriteria	Nilai λ				Eigen Value
	Program Kesetaraan Gender	Pendidikan Politik	Kampanye Kesadaran Politik	Pengembangan Jaringan Sosial	
Program Kesetaraan Gender	0,18	0,20	0,26	0,10	0,184
Pendidikan Politik	0,18	0,34	0,45	0,30	0,317
Kampanye Kesadaran Politik	0,10	0,11	0,15	0,30	0,167
Pengembangan Jaringan Sosial	0,54	0,34	0,15	0,30	0,333
Jumlah					1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya adalah perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai lamda maksimal. Nilai lamda maksimal yang diperoleh adalah 4,17. Nilai lamda maksimal lalu digunakan untuk menghitung nilai consistency index (CI), dimana nilai CI dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,05. Nilai random index (RI) yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan tabel random index. Tahap pengolahan data dari narasumber, terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai consistency ratio (CR) berada pada angka 0,04 sehingga $\leq 10\%$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan dari narasumber dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat sehingga dapat digunakan untuk tahapan selanjutnya.

Tabel 4. 207 Hasil Eigen Value dan Alternatif Program Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi

Alternatif Program	Eigen Value
Program Kesetaraan Gender	0,184
Pendidikan Politik	0,317
Kampanye Kesadaran Politik	0,167
Pengembangan Jaringan Sosial	0,333

Jumlah

1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Berdasarkan hasil penilaian dari gabungan narasumber pertama dan kedua, memberikan bobot tertinggi program pelatihan pengembangan jaringan sosial pada wanita. Sehingga apabila ingin meningkatkan angka Keterlibatan Perempuan di Parlemen berdasarkan hasil analisis, program yang harus diprioritaskan pertama untuk mencapai tingkat kesadaran politik perempuan tinggi adalah dengan melaksanakan program pengembangan jaringan sosial pada wanita di Kabupaten Mojokerto.

E. Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional

Keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam menghitung Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Indonesia. Persentase perempuan yang menjadi tenaga kerja profesional di Indonesia telah mencapai 49,99%. Nilai tersebut naik 2,52% poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 48,76%. Angka tersebut menunjukkan bahwa perempuan saat ini telah lebih mudah mendapatkan haknya untuk bekerja apabila dibandingkan dengan tahun-tahun lampau dimana perempuan masih sangat kesulitan mendapatkan haknya untuk bekerja karena terbelenggu budaya patriarki. Namun seiring dengan besarnya gerakan emansipasi, persentase perempuan pekerja pun terus meningkat. Berikut merupakan hasil perhitungan analisis AHP yang digunakan untuk menentukan program prioritas yang dapat meningkatkan nilai indikator Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional. Analisis AHP telah dilakukan ke instansi terkait dengan

menggunakan 3 kriteria yaitu tingkat Pendidikan perempuan, peluang kerja bagi perempuan terbuka, dan kultur organisasi pekerjaan yang ramah.

1. Narasumber Pertama

Penilaian kriteria AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional dengan menggunakan skala 1-9. Nilai yang diberikan oleh responden akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional yang dibandingkan. Responden pertama adalah Ibu Atik analis kebijakan bidang PP PUG dari dinas DP2KBP2. Hasil dari penilaian responden pertama dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4. 208 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Kesempatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional Responden Pertama

Kriteria	Keterangan		
	Tingkat Pendidikan Perempuan	Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka	Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah
Tingkat Pendidikan Perempuan	1	7,00	5
Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka	0,14	1	1
Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah	0,20	1	1
Jumlah	1,34	9,00	7

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari responden pertama diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi dilakukan untuk menyetarakan skala perhitungan dengan menjumlahkan setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan untuk mencari nilai eigen value. Nilai eigen value didapatkan dari penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

Tabel 4. 209 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Kesempatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional Responden Pertama

Kriteria	Nilai λ			Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Tingkat Pendidikan Perempuan	Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka	Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah		
Tingkat Pendidikan Perempuan	0,745	0,778	0,714	2,237	0,746

Kriteria	Nilai λ			Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Tingkat Pendidikan Perempuan	Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka	Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah		
Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka	0,106	0,111	0,143	0,360	0,120
Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah	0,149	0,111	0,143	0,403	0,134
Jumlah				3,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya dilakukan perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai λ maksimal. Nilai λ maks yang diperoleh dari perkalian tersebut adalah 3,022. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk menghitung nilai *consistency index* (CI), dimana nilai CI yang didapatkan adalah 0,011. Nilai *random index* (RI) yang digunakan adalah 0,58 karena kriteria yang dibandingkan berjumlah 3 kriteria sesuai dengan tabel *random index*. Terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai *consistency ratio* (CR) berada pada angka $\leq 0,1$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan narasumber dinyatakan konsisten dan dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. Perhitungan *consistency ratio* (CR) didapatkan dari hasil pembagian nilai CI dengan nilai RI. Nilai CR dari responden pertama adalah 0,019 sehingga data yang diperoleh dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penilaian AHP pada responden pertama, bobot tertinggi diberikan pada kriteria tingkat Pendidikan perempuan sedangkan bobot terendah diberikan pada kriteria peluang kerja bagi perempuan terbuka.

2. Narasumber Kedua

Penilaian kriteria AHP dilakukan dengan responden kedua menggunakan skala 1-9. Nilai yang diberikan oleh responden akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional yang dibandingkan. Responden kedua Ibu Etty analis kebijakan bidang PP PUG dari dinas DP2KBP2. Hasil dari penilaian responden kedua dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 210 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional Responden Kedua

Kriteria	Keterangan
----------	------------

	Tingkat Pendidikan Perempuan	Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka	Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah
Tingkat Pendidikan Perempuan	1	5,00	3
Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka	0,20	1	2
Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah	0,20	0,50	1
Jumlah	1,40	6,50	6

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 211 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional Responden Kedua

Kriteria	Nilai λ			Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Tingkat Pendidikan Perempuan	Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka	Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah		
Tingkat Pendidikan Perempuan	0,714	0,769	0,500	1,984	0,661
Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka	0,143	0,154	0,333	0,630	0,210
Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah	0,143	0,077	0,167	0,386	0,129
Jumlah				3,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari responden kedua diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi dilakukan untuk menyetarakan skala perhitungan dengan menjumlahkan setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan untuk mencari nilai eigen value. Nilai eigen value didapatkan dari penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

Tahapan selanjutnya dilakukan perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai λ maksimal. Nilai λ maks yang diperoleh dari perkalian tersebut adalah 3,064 dan nilai CI yang didapatkan adalah 0,032. Nilai *random index* (RI) yang digunakan adalah 0,58 karena kriteria yang dibandingkan berjumlah 3 kriteria sesuai dengan tabel *random index*. Angka *consistency ratio* (CR) yang didapatkan dari perhitungan responden kedua adalah 0,055 sehingga data yang diperoleh dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat karena angka yang didapatkan kurang dari 0,1. Berdasarkan hasil penilaian AHP pada responden kedua, bobot tertinggi diberikan pada kriteria tingkat Pendidikan

perempuan yaitu 0,661 sedangkan bobot terendah diberikan pada kriteria kultur organisasi pekerjaan yang ramah yaitu 0,129.

3. Narasumber Ketiga

Penilaian kriteria AHP dilakukan dengan responden ketiga menggunakan skala 1-9. Nilai yang diberikan oleh responden akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional yang dibandingkan. Responden kedua Ibu Endah Y. Kasubag Umum dan Kepegawaian, sekretariat dinas tenaga kerja. Hasil dari penilaian responden ketiga dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4. 212 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional Responden Ketiga

Kriteria	Keterangan		
	Tingkat Pendidikan Perempuan	Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka	Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah
Tingkat Pendidikan Perempuan	1	5,00	3
Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka	0,20	1	2
Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah	0,20	0,50	1
Jumlah	1,40	6,50	6

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 213 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional Responden Kedua

Kriteria	Nilai λ			Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Tingkat Pendidikan Perempuan	Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka	Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah		
Tingkat Pendidikan Perempuan	0,429	0,455	0,333	1,216	0,405
Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka	0,429	0,455	0,556	1,439	0,480
Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah	0,143	0,091	0,111	0,345	0,115
Jumlah				3,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari responden ketiga diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi dilakukan untuk menyetarakan skala perhitungan dengan menjumlahkan setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan untuk mencari nilai eigen value. Nilai eigen value didapatkan dari

penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

Tahapan selanjutnya dilakukan perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai λ maksimal. Nilai λ maks yang diperoleh dari perkalian tersebut adalah 3,036 dan nilai CI yang didapatkan adalah 0,018. Nilai *random index* (RI) yang digunakan adalah 0,58 karena kriteria yang dibandingkan berjumlah 3 kriteria sesuai dengan tabel *random index*. Angka *consistency ratio* (CR) yang didapatkan dari perhitungan responden ketiga adalah 0,031 sehingga data yang diperoleh dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat karena angka yang didapatkan kurang dari 0,1. Berdasarkan hasil penilaian AHP pada responden ketiga, bobot tertinggi diberikan pada kriteria peluang kerja bagi perempuan terbuka yaitu 0,480 sedangkan bobot terendah diberikan pada kriteria kultur organisasi pekerjaan yang ramah yaitu 0,115.

4. Narasumber Gabungan

Ketiga responden memiliki penilaian bobot dan urutan prioritas masing-masing dari ketiga kriteria. Setelah seluruh penilaian kedua responden dinyatakan konsisten untuk mencegah nilai *error*. Selanjutnya penilaian AHP perlu digabungkan untuk menentukan besaran nilai bobot dari masing-masing kriteria karena memiliki responden berjumlah lebih dari satu. Penggabungan matriks perbandingan berpasangan menggunakan rata-rata geometric (*geomean*) seperti pada table berikut.

Tabel 4. 214 Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Kriteria Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional

Kriteria	Keterangan		
	Tingkat Pendidikan Perempuan	Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka	Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah
Tingkat Pendidikan Perempuan	1	3,27	3,56
Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka	0,31	1	2,15
Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah	0,24	0,46	1

Kriteria	Keterangan		
	Tingkat Pendidikan Perempuan	Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka	Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah
Jumlah	1,54	4,74	6,71

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 215 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Kriteria Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional

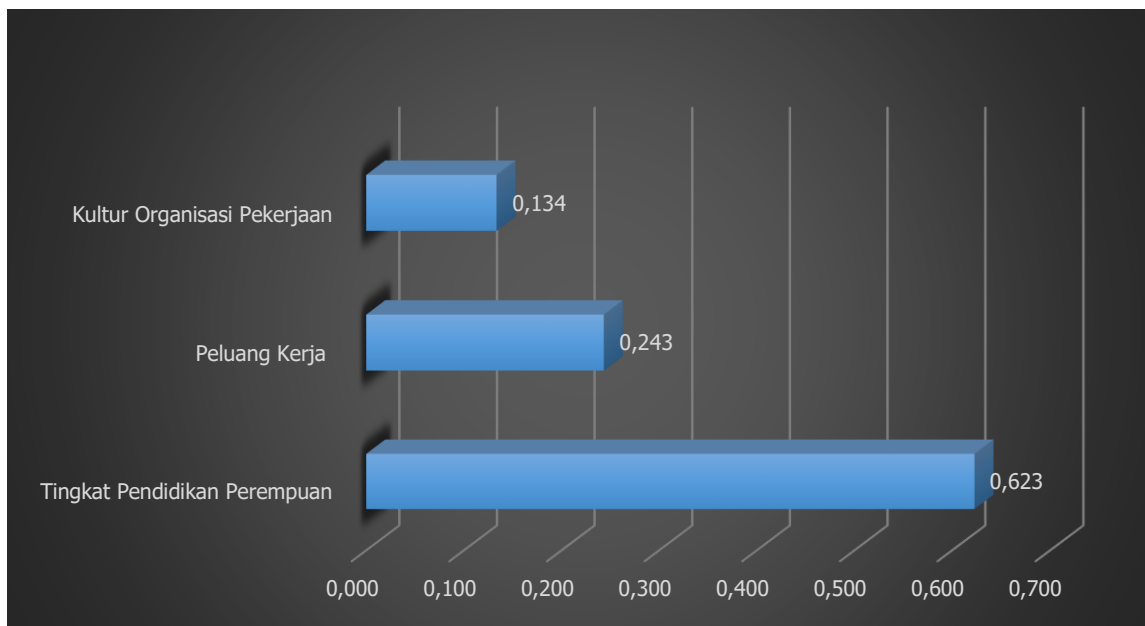
Kriteria	Nilai λ			Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Tingkat Pendidikan Perempuan	Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka	Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah		
Tingkat Pendidikan Perempuan	0,648	0,691	0,530	1,869	0,623
Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka	0,198	0,211	0,321	0,730	0,243
Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah	0,154	0,098	0,149	0,401	0,134
Jumlah				3,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Setelah mendapatkan nilai geomean pada masing-masing perbandingan, selanjutnya nilai geomean disusun ke dalam matriks perbandingan berpasangan dan dinormalisasi untuk mendapatkan nilai λ maksimal, nilai CI, nilai IR, dan nilai CR. Nilai λ maks yang didapatkan adalah 3,010 dengan nilai CI sebesar 0,005. Dengan nilai IR yang dipakai adalah 0,58 maka nilai CR dari hasil penggabungan ketiga responden terkait kriteria keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional adalah 0,009 sehingga penilaiannya dinyatakan konsisten. Kemudian bobot yang diperoleh dari masing-masing kriteria diurutkan dan didapatkan kriteria yang paling penting dalam peningkatan keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional.

Tabel 4. 216 Hasil AHP Kriteria Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional

Kriteria	Hasil	Peringkat
Tingkat Pendidikan Perempuan	0,623	1
Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka	0,243	2
Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah	0,134	3



Gambar 4. 53 Hasil AHP Kriteria Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional

Berdasarkan perhitungan gabungan dari kedua responden, didapatkan bahwa kriteria paling penting dan menempati urutan pertama dalam peningkatan keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional adalah tingkat Pendidikan perempuan dengan bobot 0,623. Kriteria ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas perempuan dalam bekerja agar perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menempati kedudukan yang sama sebagai tenaga profesional. Peringkat kedua yang penting untuk ditingkatkan adalah peluang kerja bagi perempuan terbuka dengan bobot sebesar 0,243. Semakin banyak peluang kerja bagi perempuan maka semakin besar pula peluang perempuan mendapatkan posisi sebagai tenaga profesional. Kriteria terakhir yang dilakukan untuk peningkatan kesempatan perempuan sebagai tenaga profesional adalah kultur organisasi pekerjaan yang ramah dengan bobot sebesar 0,134.

Penilaian Alternatif Program Tingkat Pendidikan Perempuan

1. Narasumber Pertama

Penilaian kriteria AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar alternatif program tingkat Pendidikan perempuan dengan menggunakan skala 1-9. Nilai yang diberikan oleh responden akan menentukan tingkat kepentingan dari alternatif program tingkat Pendidikan perempuan yang dibandingkan. Responden pertama adalah Ibu Atik analis kebijakan bidang PP PUG dari dinas DP2KB2. Hasil dari penilaian responden pertama dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4. 217 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Pendidikan Perempuan Responden Pertama

Kriteria	Keterangan									
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Keterampilan	Program Mentorship	Program Inisiatif Pengembangan Karir	Kampanye Kesadaran Organisasi	Program Pemberdayaan Keuangan	Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini
Pemberdayaan Perempuan	1	7,00	7	1	1	2	7	3	0,33	3
PUSPA	0,14	1	0,33	0,20	0,33	1	3	3	0,20	0,33
Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	0,14	3	1	0,11	0,33	0,33	3	1	0,2	0,33
Pelatihan Keterampilan	1,00	5	9	1	1	3	9	5	2	3
Program Mentorship	1,00	3	3	1	1	1	5	3	1	3
Program Inisiatif Pengembangan Karir	0,50	1	3	0,33	1	1	3	2	0,5	1
Kampanye Kesadaran Organisasi	0,14	0,33	0,33	0,2	0,2	0,33	1	0,33	0,33	0,2
Program Pemberdayaan Keuangan	0,33	0,33	1	0,11	0,33	0,5	3	1	0,2	1
Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	3,00	5	5	0,5	1	2	3	5	1	3
Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini	0,33	3	3	0,33	0,33	1	5	1	0,33	1
Jumlah	7,60	28,67	32,67	4,79	6,53	12,17	42,00	24,33	6,10	15,87

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 218 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Pendidikan Perempuan Responden Pertama

Kriteria	Nilai λ										Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Keterampilan	Program Mentorship	Program Inisiatif Pengembangan Karir	Kampanye Kesadaran Organisasi	Program Pemberdayaan Keuangan	Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini		
Pemberdayaan Perempuan	0,132	0,244	0,214	0,209	0,153	0,164	0,167	0,123	0,055	0,189	1,650	0,165
PUSPA	0,019	0,035	0,010	0,042	0,051	0,082	0,071	0,123	0,033	0,021	0,487	0,049
Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	0,019	0,105	0,031	0,023	0,051	0,027	0,071	0,041	0,033	0,021	0,422	0,042
Pelatihan Keterampilan	0,132	0,174	0,276	0,209	0,153	0,247	0,214	0,205	0,328	0,189	2,127	0,213
Program Mentorship	0,132	0,105	0,092	0,209	0,153	0,082	0,119	0,123	0,164	0,189	1,368	0,137
Program Inisiatif Pengembangan Karir	0,066	0,035	0,092	0,070	0,153	0,082	0,071	0,082	0,082	0,063	0,796	0,080
Kampanye Kesadaran Organisasi	0,019	0,012	0,010	0,042	0,031	0,027	0,024	0,014	0,055	0,013	0,245	0,025
Program Pemberdayaan Keuangan	0,044	0,012	0,031	0,023	0,051	0,041	0,071	0,041	0,033	0,063	0,410	0,041
Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	0,395	0,174	0,153	0,104	0,153	0,164	0,071	0,205	0,164	0,189	1,774	0,177
Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini	0,044	0,105	0,092	0,070	0,051	0,082	0,119	0,041	0,055	0,063	0,721	0,072
Jumlah											10,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari responden pertama diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi dilakukan untuk menyetarakan skala perhitungan dengan menjumlahkan setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan untuk mencari nilai eigen value. Nilai eigen value didapatkan dari penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

Tahapan selanjutnya dilakukan perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai λ maksimal. Nilai λ maks yang diperoleh dari perkalian tersebut adalah 11,163. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk menghitung nilai *consistency index* (CI), dimana nilai CI yang didapatkan adalah 0,129. Nilai *random index* (RI) yang digunakan adalah 1,49 karena kriteria yang dibandingkan berjumlah 10 kriteria sesuai dengan tabel *random index*. Terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai *consistency ratio* (CR) berada pada angka $\leq 0,1$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan narasumber dinyatakan konsisten dan dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. Perhitungan *consistency ratio* (CR) didapatkan dari hasil pembagian nilai CI dengan nilai RI. Nilai CR dari responden pertama adalah 0,087 sehingga data yang diperoleh dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penilaian AHP pada responden pertama, bobot tertinggi diberikan pada alternatif program pelatihan keterampilan sedangkan bobot terendah diberikan pada alternatif program pemberdayaan keuangan.

2. Narasumber Kedua

Penilaian kriteria AHP selanjutnya dilakukan kepada responden kedua menggunakan skala 1-9. Nilai yang diberikan oleh responden akan menentukan tingkat kepentingan dari alternatif program yang dibandingkan. Responden kedua adalah Ibu Etty analis kebijakan bidang PP PUG dari dinas DP2KB2. Hasil dari penilaian responden kedua dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 219 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Pendidikan Perempuan Responden Kedua

Kriteria	Keterangan									
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Keterampilan	Program Mentorship	Program Inisiatif Pengembangan Karir	Kampanye Kesadaran Organisasi	Program Pemberdayaan Keuangan	Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini
Pemberdayaan Perempuan	1	7,00	1	0,14	0,2	1	3	3	1	1
PUSPA	0,14	1	0,20	0,11	0,33	0,33	1	1	0,33	0,20
Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	1	5	1	0,20	0,20	0,20	3	3	1	1
Pelatihan Keterampilan	7	9	5	1	1	3	5	5	1	3
Program Mentorship	5	3	5	1	1	1	4	1	3	3
Program Inisiatif Pengembangan Karir	1	3	5	0,33	1	1	7	3	1	3
Kampanye Kesadaran Organisasi	0,33	1	0,33	0,2	0,25	0,14	1	0,33	0,14	1
Program Pemberdayaan Keuangan	0,33	1	0,33	0,2	1	0,33	3	1	0,2	0,33
Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	1	3	1	1	0,33	1	7	5	1	1
Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini	1	5	1	0,33	0,33	0,33	1	3	1	1
Jumlah	17,81	38,00	19,87	4,52	5,65	8,34	35,00	25,33	9,68	14,53

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 220 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Pendidikan Perempuan Responden Kedua

Kriteria	Nilai λ										Jumlah Nilai λ	Rata-rata
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Keterampilan	Program Mentorship	Program Inisiatif Pengembangan Karir	Kampanye Kesadaran Organisasi	Program Pemberdayaan Keuangan	Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini		
Pemberdayaan Perempuan	0,056	0,184	0,050	0,032	0,035	0,120	0,086	0,118	0,103	0,069	0,854	0,085
PUSPA	0,008	0,026	0,010	0,025	0,059	0,040	0,029	0,039	0,034	0,014	0,284	0,028

Kriteria	Nilai λ										Jumlah Nilai λ	Rata-rata
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Keterampilan	Program Mentorship	Program Inisiatif Pengembangan Karir	Kampanye Kesadaran Organisasi	Program Pemberdayaan Keuangan	Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini		
Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	0,056	0,132	0,050	0,044	0,035	0,024	0,086	0,118	0,103	0,069	0,718	0,072
Pelatihan Keterampilan	0,393	0,237	0,252	0,221	0,177	0,360	0,143	0,197	0,103	0,206	2,289	0,229
Program Mentorship	0,281	0,079	0,252	0,221	0,177	0,120	0,114	0,039	0,310	0,206	1,800	0,180
Program Inisiatif Pengembangan Karir	0,056	0,079	0,252	0,074	0,177	0,120	0,200	0,118	0,103	0,206	1,386	0,139
Kampanye Kesadaran Organisasi	0,019	0,026	0,017	0,044	0,044	0,017	0,029	0,013	0,015	0,069	0,293	0,029
Program Pemberdayaan Keuangan	0,019	0,026	0,017	0,044	0,177	0,040	0,086	0,039	0,021	0,023	0,492	0,049
Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	0,056	0,079	0,050	0,221	0,059	0,120	0,200	0,197	0,103	0,069	1,155	0,116
Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini	0,056	0,132	0,050	0,074	0,059	0,040	0,029	0,118	0,103	0,069	0,730	0,073
Jumlah											10,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari responden kedua diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Kemudian didapatkan eigen value dari penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1. Tahapan selanjutnya dilakukan perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai λ maksimal. Nilai λ maks yang diperoleh dari perkalian tersebut adalah 11,683. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk menghitung nilai *consistency index* (CI), dimana nilai CI yang didapatkan adalah 0,187. Nilai *random index* (RI) yang digunakan adalah 1,49 karena kriteria yang dibandingkan berjumlah 10 kriteria sesuai dengan tabel *random index*. Terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai *consistency ratio* (CR) berada pada angka $\leq 0,1$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan responden dinyatakan konsisten dan dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. Perhitungan *consistency ratio* (CR) didapatkan dari hasil pembagian nilai CI dengan nilai RI. Nilai CR dari responden kedua adalah 0,126 sehingga data yang diperoleh dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penilaian AHP pada responden kedua, bobot tertinggi diberikan pada alternatif program pelatihan keterampilan sedangkan bobot terendah diberikan pada alternatif program PUSPA.

3. Narasumber Ketiga

Penilaian kriteria AHP dilakukan dengan responden ketiga menggunakan skala 1-9. Nilai yang diberikan oleh responden akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional yang dibandingkan. Responden kedua Ibu Endah Y. Kasubag Umum dan Kepegawaian, sekretariat dinas tenaga kerja. Hasil dari penilaian responden ketiga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 221 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Pendidikan Perempuan Responden Ketiga

Kriteria	Keterangan									
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Keterampilan	Program Mentorship	Program Inisiatif Pengembangan Karir	Kampanye Kesadaran Organisasi	Program Pemberdayaan Keuangan	Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini
Pemberdayaan Perempuan	1	7,00	7	1	1	2	7	3	0,33	3
PUSPA	0,14	1	0,20	0,14	0,33	0,33	1,00	1,00	0,33	0,20
Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	0,14	5	1	0,33	0,33	0,33	3	3	1	1
Pelatihan Keterampilan	1,00	7	3	1	1	3	3	3	5	3
Program Mentorship	1,00	3	3	1	1	1	7	3	1	3
Program Inisiatif Pengembangan Karir	0,50	3	3	0,33	1	1	3	7	1	2
Kampanye Kesadaran Organisasi	0,14	1	0,33	0,33	0,14	0,33	1	0,14	0,2	1
Program Pemberdayaan Keuangan	0,33	1	0,33	1	0,33	0,14	7	1	1	1
Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	3,00	3	1	0,33	1	1	5	1	1	1
Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini	0,33	5	1	0,33	0,33	0,5	1	1	1	1
Jumlah	7,60	36,00	19,87	5,81	6,48	9,64	38,00	23,14	11,87	16,20

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 222 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Tingkat Pendidikan Perempuan Responden Ketiga

Kriteria	Nilai λ										Jumlah Nilai λ	Rata-rata
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Keterampilan	Program Mentorship	Program Inisiatif Pengembangan Karir	Kampanye Kesadaran Organisasi	Program Pemberdayaan Keuangan	Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini		
Pemberdayaan Perempuan	0,132	0,194	0,352	0,172	0,154	0,207	0,184	0,130	0,028	0,185	1,740	0,174
PUSPA	0,019	0,028	0,010	0,025	0,051	0,035	0,026	0,043	0,028	0,012	0,277	0,028

Kriteria	Nilai λ										Jumlah Nilai λ	Rata-rata
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Keterampilan	Program Mentorship	Program Inisiatif Pengembangan Karir	Kampanye Kesadaran Organisasi	Program Pemberdayaan Keuangan	Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini		
Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	0,019	0,139	0,050	0,057	0,051	0,035	0,079	0,130	0,084	0,062	0,706	0,071
Pelatihan Keterampilan	0,132	0,194	0,151	0,172	0,154	0,311	0,079	0,130	0,421	0,185	1,930	0,193
Program Mentorship	0,132	0,083	0,151	0,172	0,154	0,104	0,184	0,130	0,084	0,185	1,380	0,138
Program Inisiatif Pengembangan Karir	0,066	0,083	0,151	0,057	0,154	0,104	0,079	0,302	0,084	0,123	1,205	0,120
Kampanye Kesadaran Organisasi	0,019	0,028	0,017	0,057	0,022	0,035	0,026	0,006	0,017	0,062	0,288	0,029
Program Pemberdayaan Keuangan	0,044	0,028	0,017	0,172	0,051	0,015	0,184	0,043	0,084	0,062	0,700	0,070
Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	0,395	0,083	0,050	0,057	0,154	0,104	0,132	0,043	0,084	0,062	1,165	0,116
Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini	0,044	0,139	0,050	0,057	0,051	0,052	0,026	0,043	0,084	0,062	0,609	0,061
Jumlah											10,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari responden ketiga diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Kemudian didapatkan eigen value dari penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1. Tahapan selanjutnya dilakukan perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai λ maksimal. Nilai λ maks yang diperoleh dari perkalian tersebut adalah 11,985. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk menghitung nilai *consistency index* (CI), dimana nilai CI yang didapatkan adalah 0,221. Nilai *random index* (RI) yang digunakan adalah 1,49 karena kriteria yang dibandingkan berjumlah 10 kriteria sesuai dengan tabel *random index*. Terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai *consistency ratio* (CR) berada pada angka $\leq 0,1$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan responden dinyatakan konsisten dan dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. Perhitungan *consistency ratio* (CR) didapatkan dari hasil pembagian nilai CI dengan nilai RI. Nilai CR dari responden kedua adalah 0,148 sehingga data yang diperoleh dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penilaian AHP pada responden kedua, bobot tertinggi diberikan pada alternatif program pelatihan keterampilan sedangkan bobot terendah diberikan pada alternatif program PUSPA.

4. Narasumber Gabungan

Ketiga responden memiliki penilaian bobot dan urutan prioritas masing-masing dari 10 kriteria. Setelah seluruh penilaian kedua responden dinyatakan konsisten untuk mencegah nilai *error*. Selanjutnya penilaian AHP perlu digabungkan untuk menentukan besaran nilai bobot dari masing-masing kriteria karena memiliki responden berjumlah lebih dari satu. Penggabungan matriks perbandingan berpasangan menggunakan rata-rata geometric (*geomean*) seperti pada tabel berikut.

Tabel 4. 223 Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Porgram Tingkat Pendidikan Perempuan

Kriteria	Keterangan									
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Keterampilan	Program Mentorship	Program Inisiatif Pengembangan Karir	Kampanye Kesadaran Organisasi	Program Pemberdayaan Keuangan	Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini
Pemberdayaan Perempuan	1	7,00	3,66	0,52	0,58	1,59	5,28	3,00	0,48	2,08
PUSPA	0,14	1	0,24	0,15	0,33	0,48	1,44	1,44	0,28	0,24
Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	0,27	4,22	1	0,19	0,28	0,28	3,00	2,08	0,58	0,69
Pelatihan Keterampilan	1,91	6,80	5,13	1	1,00	3,00	5,13	4,22	2,15	3,00
Program Mentorship	1,71	3,00	3,56	1,00	1	1,00	5,19	2,08	1,44	3,00
Program Inisiatif Pengembangan Karir	0,63	2,08	3,56	0,33	1,00	1	3,98	3,48	0,79	1,82
Kampanye Kesadaran Organisasi	0,19	0,69	0,33	0,24	0,19	0,25	1	0,25	0,21	0,58
Program Pemberdayaan Keuangan	0,33	0,69	0,48	0,28	0,48	0,29	3,98	1	0,34	0,69
Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	2,08	3,56	1,71	0,55	0,69	1,26	4,72	2,92	1	1,44

Kriteria	Keterangan									
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Keterampilan	Program Mentorship	Program Inisiatif Pengembangan Karir	Kampanye Kesadaran Organisasi	Program Pemberdayaan Keuangan	Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini
Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini	0,48	4,22	1,44	0,33	0,33	0,55	1,71	1,44	0,69	1
Jumlah	8,75	33,26	21,11	4,60	5,90	9,70	35,43	21,91	7,98	14,55

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 224 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Tingkat Pendidikan Perempuan

Kriteria	Nilai λ										Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Keterampilan	Program Mentorship	Program Inisiatif Pengembangan Karir	Kampanye Kesadaran Organisasi	Program Pemberdayaan Keuangan	Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini		
Pemberdayaan Perempuan	0,114	0,210	0,173	0,114	0,099	0,164	0,149	0,137	0,060	0,143	1,364	0,136
PUSPA	0,016	0,030	0,011	0,032	0,057	0,050	0,041	0,066	0,035	0,016	0,354	0,035
Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	0,031	0,127	0,047	0,042	0,048	0,029	0,085	0,095	0,073	0,048	0,625	0,062
Pelatihan Keterampilan	0,219	0,205	0,243	0,217	0,170	0,309	0,145	0,192	0,270	0,206	2,176	0,218

Kriteria	Nilai λ										Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Keterampilan	Program Mentorship	Program Inisiatif Pengembangan Karir	Kampanye Kesadaran Organisasi	Program Pemberdayaan Keuangan	Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini		
Program Mentorship	0,195	0,090	0,169	0,217	0,170	0,103	0,147	0,095	0,181	0,206	1,572	0,157
Program Inisiatif Pengembangan Karir	0,072	0,063	0,169	0,072	0,170	0,103	0,112	0,159	0,099	0,125	1,143	0,114
Kampanye Kesadaran Organisasi	0,022	0,021	0,016	0,052	0,033	0,026	0,028	0,011	0,027	0,040	0,275	0,027
Program Pemberdayaan Keuangan	0,038	0,021	0,023	0,061	0,081	0,030	0,112	0,046	0,043	0,048	0,502	0,050
Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	0,238	0,107	0,081	0,120	0,118	0,130	0,133	0,133	0,125	0,099	1,284	0,128
Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini	0,055	0,127	0,068	0,072	0,057	0,057	0,048	0,066	0,087	0,069	0,705	0,071
Jumlah											10,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Setelah mendapatkan nilai geomean pada masing-masing perbandingan, selanjutnya nilai geomean disusun ke dalam matriks perbandingan berpasangan dan dinormalisasi untuk mendapatkan nilai λ maksimal, nilai CI, nilai IR, dan nilai CR. Nilai λ maks yang didapatkan adalah 10,852 dengan nilai CI sebesar 0,095. Dengan nilai IR yang dipakai adalah 1,49 maka nilai CR dari hasil penggabungan ketiga responden terkait alternatif program tingkat pendidikan perempuan adalah 0,064 sehingga penilaiannya dinyatakan konsisten. Kemudian bobot yang diperoleh dari masing-masing kriteria diurutkan dan didapatkan urutan alternatif program yang perlu dilakukan untuk meningkatkan tingkat pendidikan perempuan sebagai berikut.

Tabel 4. 225 Hasil AHP Alternatif Program Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik

Alternatif Program	Hasil	Peringkat
Pelatihan Keterampilan	0,218	1
Program Mentorship	0,157	2
Pemberdayaan Perempuan	0,136	3
Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	0,128	4
Program Inisiatif Pengembangan Karir	0,114	5
Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini	0,071	6
Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	0,062	7
Program Pemberdayaan Keuangan	0,050	8
PUSPA	0,035	9
Kampanye Kesadaran Organisasi	0,027	10

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 4. 54 Hasil AHP Alternatif Program Akses dan Ketersediaan Pendidikan

Berdasarkan perhitungan gabungan dari ketiga responden, didapatkan bahwa alternatif program paling penting dan menempati urutan pertama untuk meningkatkan tingkat Pendidikan perempuan adalah program pelatihan keterampilan dengan bobot

0,218. Alternatif program ini merupakan program untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian perempuan yang berpengaruh pada tingkat Pendidikan dan kedudukan perempuan di dunia kerja. Alternatif program selanjutnya adalah program mentorship dengan bobot 0,157, program pemberdayaan perempuan dengan bobot 0,136, program pengembangan jaringan professional perempuan dengan bobot 0,128, program inisiatif pengembangan karir dengan bobot 0,114, program sosialisasi pencegahan pernikahan dini dengan bobot 0,071, mendukung pembangunan pemberdayaan perempuan dengan bobot 0,062, program pemberdayaan keuangan dengan bobot 0,050, program PUSPA dengan bobot 0,035 dan program terakhir kampanye kesadaran organisasi dengan bobot 0,027.

Penilaian Alternatif Program Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka

1. Narasumber Pertama

Penilaian kriteria AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar alternatif program peluang kerja bagi perempuan terbuka dengan menggunakan skala 1-9. Nilai yang diberikan oleh responden akan menentukan tingkat kepentingan dari alternatif program peluang kerja bagi perempuan terbuka yang dibandingkan. Responden pertama adalah Ibu Atik analis kebijakan bidang PP PUG dari dinas DP2KB2. Hasil dari penilaian responden pertama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 226 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka Responden Pertama

Kriteria	Keterangan					
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Keterampilan	Program Mentorship	Program Inisiatif Pengembangan Karir
Pemberdayaan Perempuan	1	7,00	3	3	5	0,33
PUSPA	0,14	1	0,11	0,33	0,20	0,11
Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	0,33	9	1	3	3	1
Pelatihan Keterampilan	0,33	3	0,33	1	1	0,33
Program Mentorship	0,20	5	0,33	1	1	0,2
Program Inisiatif Pengembangan Karir	3,00	9	1	3	5	1

Kriteria	Keterangan					
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Keterampilan	Program Mentorship	Program Inisiatif Pengembangan Karir
Jumlah	5,01	34,00	5,78	11,33	15,20	2,98

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 227 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka Responden Pertama

Kriteria	Nilai λ						Jumlah Nilai λ	Rata-rata
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Keterampilan	Program Mentorship	Program Inisiatif Pengembangan Karir		
Pemberdayaan Perempuan	0,200	0,206	0,519	0,265	0,329	0,112	1,630	0,272
PUSPA	0,029	0,029	0,019	0,029	0,013	0,037	0,157	0,026
Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	0,067	0,265	0,173	0,265	0,197	0,336	1,302	0,217
Pelatihan Keterampilan	0,067	0,088	0,058	0,088	0,066	0,112	0,478	0,080
Program Mentorship	0,040	0,147	0,058	0,088	0,066	0,067	0,466	0,078
Program Inisiatif Pengembangan Karir	0,599	0,265	0,173	0,265	0,329	0,336	1,966	0,328
Jumlah							6,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari responden pertama diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi dilakukan untuk menyetarakan skala perhitungan dengan menjumlahkan setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan untuk mencari nilai eigen value. Nilai eigen value didapatkan dari penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

Tahapan selanjutnya dilakukan perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai λ maksimal. Nilai λ maks yang diperoleh dari perkalian tersebut adalah 6,565. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk menghitung nilai *consistency index* (CI), dimana nilai CI yang didapatkan adalah

0,113. Nilai *random index* (RI) yang digunakan adalah 1,24 karena kriteria yang dibandingkan berjumlah 6 kriteria sesuai dengan tabel *random index*. Terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai *consistency ratio* (CR) berada pada angka $\leq 0,1$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan responden dinyatakan konsisten dan dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. Perhitungan *consistency ratio* (CR) didapatkan dari hasil pembagian nilai CI dengan nilai RI. Nilai CR dari responden pertama adalah 0,091 sehingga data yang diperoleh dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penilaian AHP pada responden pertama, bobot tertinggi diberikan pada alternatif program inisiatif pengembangan karir sedangkan bobot terendah diberikan pada alternatif program PUSPA.

2. Narasumber Kedua

Penilaian kriteria AHP selanjutnya dilakukan kepada responden kedua menggunakan skala 1-9. Nilai yang diberikan oleh responden akan menentukan tingkat kepentingan dari alternatif program yang dibandingkan. Responden kedua adalah Ibu Etty analis kebijakan bidang PP PUG dari dinas DP2KB2. Hasil dari penilaian responden kedua dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 228 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka Responden Kedua

Kriteria	Keterangan					
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Keterampilan	Program Mentorship	Program Inisiatif Pengembangan Karir
Pemberdayaan Perempuan	1	9,00	3	3	1	0,33
PUSPA	0,11	1	0,20	0,14	0,20	0,11
Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	0,33	5	1	3	1	0,2
Pelatihan Keterampilan	0,33	7	0,33	1	0,33	0,33
Program Mentorship	1,00	5	1	3	1	0,33
Program Inisiatif Pengembangan Karir	3,00	9	5	3	3	1
Jumlah	5,78	36,00	10,53	13,14	6,53	2,31

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 229 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka Responden Kedua

Kriteria	Nilai λ						Jumlah Nilai λ	Rata-rata
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Keterampilan	Program Mentorship	Program Inisiatif Pengembangan Karir		
Pemberdayaan Perempuan	0,173	0,250	0,285	0,228	0,153	0,144	1,233	0,206
PUSPA	0,019	0,028	0,019	0,011	0,031	0,048	0,156	0,026
Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	0,058	0,139	0,095	0,228	0,153	0,087	0,759	0,127
Pelatihan Keterampilan	0,058	0,194	0,032	0,076	0,051	0,144	0,555	0,093
Program Mentorship	0,173	0,139	0,095	0,228	0,153	0,144	0,932	0,155
Program Inisiatif Pengembangan Karir	0,519	0,250	0,475	0,228	0,459	0,433	2,364	0,394
Jumlah							6,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari responden kedua diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Kemudian didapatkan eigen value dari penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1. Tahapan selanjutnya dilakukan perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai λ maksimal. Nilai λ maks yang diperoleh dari perkalian tersebut adalah 6,596. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk menghitung nilai *consistency index* (CI), dimana nilai CI yang didapatkan adalah 0,119. Nilai *random index* (RI) yang digunakan adalah 1,24 karena kriteria yang dibandingkan berjumlah 6 kriteria sesuai dengan tabel *random index*. Terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai *consistency ratio* (CR) berada pada angka $\leq 0,1$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan responden dinyatakan konsisten dan dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. Perhitungan *consistency ratio* (CR) didapatkan dari hasil pembagian nilai CI dengan nilai RI. Nilai CR dari responden kedua adalah 0,096 sehingga data yang diperoleh dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penilaian AHP pada responden kedua, bobot tertinggi diberikan

pada alternatif program inisiatif pengembangan karir sedangkan bobot terendah diberikan pada alternatif program PUSPA.

3. Narasumber Ketiga

Penilaian kriteria AHP dilakukan dengan responden ketiga menggunakan skala 1-9. Nilai yang diberikan oleh responden akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional yang dibandingkan. Responden kedua Ibu Endah Y. Kasubag Umum dan Kepegawaian, sekretariat dinas tenaga kerja. Hasil dari penilaian responden ketiga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 230 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka Responden Ketiga

Kriteria	Keterangan					
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Keterampilan	Program Mentorship	Program Inisiatif Pengembangan Karir
Pemberdayaan Perempuan	1	9,00	1	2	3	0,2
PUSPA	0,11	1	0,33	0,20	0,20	0,11
Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	1,00	2	1	3	3	1
Pelatihan Keterampilan	0,50	3	0,33	1	1	0,2
Program Mentorship	0,33	5	0,33	1	1	0,33
Program Inisiatif Pengembangan Karir	5,00	9	1	5	3	1
Jumlah	7,94	29,00	4,00	12,20	11,20	2,84

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 231 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka Responden Ketiga

Kriteria	Nilai λ						Jumlah Nilai λ	Rata-rata
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Keterampilan	Program Mentorship	Program Inisiatif Pengembangan Karir		
Pemberdayaan Perempuan	0,126	0,310	0,250	0,164	0,268	0,070	1,188	0,198
PUSPA	0,014	0,034	0,083	0,016	0,018	0,039	0,205	0,034
Mendukung Pembangunan	0,126	0,069	0,250	0,246	0,268	0,352	1,310	0,218

Kriteria	Nilai λ						Jumlah Nilai λ	Rata-rata
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Keterampilan	Program Mentorship	Program Inisiatif Pengembangan Karir		
Pemberdayaan Perempuan								
Pelatihan Keterampilan	0,063	0,103	0,083	0,082	0,089	0,070	0,491	0,082
Program Mentorship	0,042	0,172	0,083	0,082	0,089	0,117	0,586	0,098
Program Inisiatif Pengembangan Karir	0,629	0,310	0,250	0,410	0,268	0,352	2,219	0,370
Jumlah							6,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari responden ketiga diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Kemudian didapatkan eigen value dari penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1. Tahapan selanjutnya dilakukan perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai λ maksimal. Nilai λ maks yang diperoleh dari perkalian tersebut adalah 6,583. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk menghitung nilai *consistency index* (CI), dimana nilai CI yang didapatkan adalah 0,117. Nilai *random index* (RI) yang digunakan adalah 1,24 karena kriteria yang dibandingkan berjumlah 6 kriteria sesuai dengan tabel *random index*. Terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai *consistency ratio* (CR) berada pada angka $\leq 0,1$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan responden dinyatakan konsisten dan dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. Perhitungan *consistency ratio* (CR) didapatkan dari hasil pembagian nilai CI dengan nilai RI. Nilai CR dari responden kedua adalah 0,094 sehingga data yang diperoleh dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penilaian AHP pada responden kedua, bobot tertinggi diberikan pada alternatif program inisiatif pengembangan karir sedangkan bobot terendah diberikan pada alternatif program PUSPA.

4. Narasumber Gabungan

Ketiga responden memiliki penilaian bobot dan urutan prioritas masing-masing dari keenam kriteria. Setelah seluruh penilaian kedua responden dinyatakan konsisten untuk mencegah nilai *error*. Selanjutnya penilaian AHP perlu digabungkan untuk menentukan besaran nilai bobot dari masing-masing kriteria karena memiliki responden berjumlah lebih dari satu. Penggabungan matriks perbandingan berpasangan menggunakan rata-rata geometrik (*geomean*) seperti pada tabel berikut.

Tabel 4. 232 Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka

Kriteria	Keterangan					
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Keterampilan	Program Mentorship	Program Inisiatif Pengembangan Karir
Pemberdayaan Perempuan	1	8,28	2,08	2,62	2,47	0,28
PUSPA	0,12	1	0,19	0,21	0,20	0,11
Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	0,48	4,48	1	3,00	2,08	0,58
Pelatihan Keterampilan	0,38	3,98	0,33	1	0,69	0,28
Program Mentorship	0,41	5,00	0,48	1,44	1	0,28
Program Inisiatif Pengembangan Karir	3,56	9,00	1,71	3,56	3,56	1
Jumlah	5,95	31,74	5,80	11,83	10,00	2,54

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 233 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka

Kriteria	Nilai λ						Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Keterampilan	Program Mentorship	Program Inisiatif Pengembangan Karir		
Pemberdayaan Perempuan	0,168	0,261	0,359	0,221	0,247	0,111	1,367	0,228
PUSPA	0,020	0,032	0,034	0,018	0,020	0,044	0,167	0,028

Kriteria	Nilai λ						Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Pelatihan Keterampilan	Program Mentorship	Program Inisiatif Pengembangan Karir		
Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	0,081	0,141	0,172	0,254	0,208	0,230	1,086	0,181
Pelatihan Keterampilan	0,064	0,125	0,057	0,085	0,069	0,111	0,512	0,085
Program Mentorship	0,068	0,158	0,083	0,122	0,100	0,111	0,641	0,107
Program Inisiatif Pengembangan Karir	0,598	0,284	0,295	0,301	0,356	0,394	2,227	0,371
Jumlah							6,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Setelah mendapatkan nilai geomean pada masing-masing perbandingan, selanjutnya nilai geomean disusun ke dalam matriks perbandingan berpasangan dan dinormalisasi untuk mendapatkan nilai λ maksimal, nilai CI, nilai IR, dan nilai CR. Nilai λ maks yang didapatkan adalah 6,308 dengan nilai CI sebesar 0,062. Dengan nilai IR yang dipakai adalah 1,24 maka nilai CR dari hasil penggabungan ketiga responden terkait alternatif program peluang kerja bagi perempuan terbuka adalah 0,050 sehingga penilaiannya dinyatakan konsisten. Kemudian bobot yang diperoleh dari masing-masing kriteria diurutkan dan didapatkan urutan alternatif program yang perlu dilakukan untuk meningkatkan peluang kerja bagi perempuan terbuka sebagai berikut.

Tabel 4. 234 Hasil AHP Alternatif Program Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka

Alternatif Program	Hasil	Peringkat
Program Inisiatif Pengembangan Karir	0,371	1
Pemberdayaan Perempuan	0,228	2
Mendukung Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	0,181	3
Program Mentorship	0,107	4
Pelatihan Keterampilan	0,085	5
PUSPA	0,028	6

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 4. 55 Hasil AHP Alternatif Program Peluang Kerja Bagi Perempuan Terbuka

Berdasarkan perhitungan gabungan dari ketiga responden, didapatkan bahwa alternatif program paling penting dan menempati urutan pertama untuk meningkatkan peluang kerja bagi perempuan terbuka adalah program inisiatif pengembangan karir dengan bobot 0,317. Alternatif program selanjutnya adalah program pemberdayaan perempuan dengan bobot 0,228, program mendukung Pembangunan pemberdayaan perempuan dengan bobot 0,181, program mentorship dengan bobot 0,107, program pelatihan keterampilan dengan bobot 0,085, dan program terakhir PUSPA dengan bobot 0,028.

Penilaian Alternatif Program Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah Perempuan

1. Narasumber Pertama

Penilaian kriteria AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar alternatif program kultur organisasi pekerjaan yang ramah perempuan dengan menggunakan skala 1-9. Nilai yang diberikan oleh responden akan menentukan tingkat kepentingan dari alternatif program kultur organisasi pekerjaan yang ramah perempuan yang dibandingkan. Responden pertama adalah Ibu Atik analis kebijakan bidang PP PUG dari dinas DP2KB2. Hasil dari penilaian responden pertama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 235 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah Perempuan Responden Pertama

Kriteria	Keterangan			
	Pelatihan Keterampilan	Program Inisiatif Pengembangan Karir	Kampanye Kesadaran Organisasi	Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan
Pelatihan Keterampilan	1	0,33	2	0,2
Program Inisiatif Pengembangan Karir	3,00	1	5,00	1,00
Kampanye Kesadaran Organisasi	0,50	0,20	1	0,33
Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	5,00	1	3	1
Jumlah	9,50	2,53	11,00	2,53

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 236 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah Perempuan Responden Pertama

Kriteria	Nilai λ				Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Pelatihan Keterampilan	Program Inisiatif Pengembangan Karir	Kampanye Kesadaran Organisasi	Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan		
Pelatihan Keterampilan	0,105	0,132	0,182	0,079	0,498	0,124
Program Inisiatif Pengembangan Karir	0,316	0,395	0,455	0,395	1,560	0,390
Kampanye Kesadaran Organisasi	0,053	0,079	0,091	0,132	0,354	0,089
Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	0,526	0,395	0,273	0,395	1,589	0,397
Jumlah					4,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari responden pertama diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi dilakukan untuk menyetarakan skala perhitungan dengan menjumlahkan setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan untuk mencari nilai eigen value. Nilai eigen value didapatkan dari penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

Tahapan selanjutnya dilakukan perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai λ maksimal. Nilai λ maks yang

diperoleh dari perkalian tersebut adalah 4,149. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk menghitung nilai *consistency index* (CI), dimana nilai CI yang didapatkan adalah 0,050. Nilai *random index* (RI) yang digunakan adalah 0,9 karena kriteria yang dibandingkan berjumlah 4 kriteria sesuai dengan tabel *random index*. Terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai *consistency ratio* (CR) berada pada angka $\leq 0,1$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan responden dinyatakan konsisten dan dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. Perhitungan *consistency ratio* (CR) didapatkan dari hasil pembagian nilai CI dengan nilai RI. Nilai CR dari responden pertama adalah 0,055 sehingga data yang diperoleh dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penilaian AHP pada responden pertama, bobot tertinggi diberikan pada alternatif program pengembangan jaringan profesional perempuan sedangkan bobot terendah diberikan pada alternatif program kampanye kesadaran organisasi.

2. Narasumber Kedua

Penilaian kriteria AHP selanjutnya dilakukan kepada responden kedua menggunakan skala 1-9. Nilai yang diberikan oleh responden akan menentukan tingkat kepentingan dari alternatif program yang dibandingkan. Responden kedua adalah Ibu Etty analis kebijakan bidang PP PUG dari dinas DP2KB2. Hasil dari penilaian responden kedua dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 237 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah Perempuan Responden Kedua

Kriteria	Keterangan			
	Pelatihan Keterampilan	Program Inisiatif Pengembangan Karir	Kampanye Kesadaran Organisasi	Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan
Pelatihan Keterampilan	1	0,33	0,33	0,2
Program Inisiatif Pengembangan Karir	3,00	1	3,00	1,00
Kampanye Kesadaran Organisasi	3,00	0,33	1	1
Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	5,00	1	1	1
Jumlah	12,00	2,67	5,33	3,20

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 238 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah Perempuan Responden Kedua

Kriteria	Nilai λ				Jumlah Nilai λ	Rata-rata
	Pelatihan Keterampilan	Program Inisiatif Pengembangan Karir	Kampanye Kesadaran Organisasi	Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan		
Pelatihan Keterampilan	0,083	0,125	0,063	0,063	0,333	0,083
Program Inisiatif Pengembangan Karir	0,250	0,375	0,563	0,313	1,500	0,375
Kampanye Kesadaran Organisasi	0,250	0,125	0,188	0,313	0,875	0,219
Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	0,417	0,375	0,188	0,313	1,292	0,323
Jumlah					4,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari responden kedua diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Kemudian didapatkan eigen value dari penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1. Tahapan selanjutnya dilakukan perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai λ maksimal. Nilai λ maks yang diperoleh dari perkalian tersebut adalah 4,200. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk menghitung nilai *consistency index* (CI), dimana nilai CI yang didapatkan adalah 0,067. Nilai *random index* (RI) yang digunakan adalah 0,9 karena kriteria yang dibandingkan berjumlah 4 kriteria sesuai dengan tabel *random index*. Terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai *consistency ratio* (CR) berada pada angka $\leq 0,1$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan responden dinyatakan konsisten dan dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. Perhitungan *consistency ratio* (CR) didapatkan dari hasil pembagian nilai CI dengan nilai RI. Nilai CR dari responden kedua adalah 0,074 sehingga data yang diperoleh dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penilaian AHP pada responden kedua, bobot tertinggi diberikan pada alternatif program inisiatif pengembangan karir sedangkan bobot terendah diberikan pada alternatif program pelatihan keterampilan.

3. Narasumber Ketiga

Penilaian kriteria AHP dilakukan dengan responden ketiga menggunakan skala 1-9. Nilai yang diberikan oleh responden akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional yang dibandingkan. Responden kedua Ibu Endah Y. Kasubag Umum dan Kepegawaian, sekretariat dinas tenaga kerja. Hasil dari penilaian responden ketiga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 239 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah Perempuan Responden Ketiga

Kriteria	Keterangan			
	Pelatihan Keterampilan	Program Inisiatif Pengembangan Karir	Kampanye Kesadaran Organisasi	Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan
Pelatihan Keterampilan	1	7,00	1	0,33
Program Inisiatif Pengembangan Karir	0,14	1	0,33	0,11
Kampanye Kesadaran Organisasi	1,00	3,00	1	0,33
Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	3,00	9	3	1
Jumlah	5,14	20,00	5,33	1,78

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 240 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah Perempuan Responden Ketiga

Kriteria	Nilai λ				Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Pelatihan Keterampilan	Program Inisiatif Pengembangan Karir	Kampanye Kesadaran Organisasi	Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan		
Pelatihan Keterampilan	0,194	0,350	0,188	0,188	0,919	0,230
Program Inisiatif Pengembangan Karir	0,028	0,050	0,063	0,063	0,203	0,051
Kampanye Kesadaran Organisasi	0,194	0,150	0,188	0,188	0,719	0,180
Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	0,583	0,450	0,563	0,563	2,158	0,540
Jumlah					4,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari responden ketiga diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Kemudian didapatkan eigen value dari penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat

dari nilai eigen value harus berjumlah 1. Tahapan selanjutnya dilakukan perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai λ maksimal. Nilai λ maks yang diperoleh dari perkalian tersebut adalah 4,115. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk menghitung nilai *consistency index* (CI), dimana nilai CI yang didapatkan adalah 0,038. Nilai *random index* (RI) yang digunakan adalah 0,9 karena kriteria yang dibandingkan berjumlah 4 kriteria sesuai dengan tabel *random index*. Terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai *consistency ratio* (CR) berada pada angka $\leq 0,1$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan responden dinyatakan konsisten dan dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. Perhitungan *consistency ratio* (CR) didapatkan dari hasil pembagian nilai CI dengan nilai RI. Nilai CR dari responden kedua adalah 0,042 sehingga data yang diperoleh dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penilaian AHP pada responden ketiga, bobot tertinggi diberikan pada alternatif program pengembangan jaringan profesional perempuan sedangkan bobot terendah diberikan pada alternatif program inisiatif pengembangan karir.

4. Narasumber Gabungan

Ketiga responden memiliki penilaian bobot dan urutan prioritas masing-masing dari keempat kriteria. Setelah seluruh penilaian kedua responden dinyatakan konsisten untuk mencegah nilai *error*. Selanjutnya penilaian AHP perlu digabungkan untuk menentukan besaran nilai bobot dari masing-masing kriteria karena memiliki responden berjumlah lebih dari satu. Penggabungan matriks perbandingan berpasangan menggunakan rata-rata geometrik (*geomean*) seperti pada tabel berikut.

Tabel 4. 241 Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah

Kriteria	Keterangan			
	Pelatihan Keterampilan	Program Inisiatif Pengembangan Karir	Kampanye Kesadaran Organisasi	Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan
Pelatihan Keterampilan	1	0,92	0,87	0,24
Program Inisiatif Pengembangan Karir	1,09	1	1,71	0,48
Kampanye Kesadaran Organisasi	1,14	0,58	1	0,48

Kriteria	Keterangan			
	Pelatihan Keterampilan	Program Inisiatif Pengembangan Karir	Kampanye Kesadaran Organisasi	Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan
Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	4,22	2,08	2,08	1
Jumlah	7,45	4,58	5,66	2,20

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 242 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah

Kriteria	Nilai λ				Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Pelatihan Keterampilan	Program Inisiatif Pengembangan Karir	Kampanye Kesadaran Organisasi	Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan		
Pelatihan Keterampilan	0,134	0,201	0,154	0,108	0,597	0,149
Program Inisiatif Pengembangan Karir	0,146	0,218	0,302	0,219	0,885	0,221
Kampanye Kesadaran Organisasi	0,154	0,128	0,177	0,219	0,676	0,169
Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	0,566	0,454	0,367	0,455	1,842	0,460
Jumlah					4,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Setelah mendapatkan nilai geomean pada masing-masing perbandingan, selanjutnya nilai geomean disusun ke dalam matriks perbandingan berpasangan dan dinormalisasi untuk mendapatkan nilai λ maksimal, nilai CI, nilai IR, dan nilai CR. Nilai λ maks yang didapatkan adalah 4,096 dengan nilai CI sebesar 0,032. Dengan nilai IR yang dipakai adalah 0,9 maka nilai CR dari hasil penggabungan ketiga responden terkait alternatif program kultur organisasi pekerjaan yang ramah adalah 0,050 sehingga penilaiannya dinyatakan konsisten. Kemudian bobot yang diperoleh dari masing-masing kriteria diurutkan dan didapatkan urutan alternatif program yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kultur organisasi pekerjaan yang ramah sebagai berikut.

Tabel 4. 243 Hasil AHP Alternatif Program Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah

Alternatif Program	Hasil	Peringkat
Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	0,460	1
Program Inisiatif Pengembangan Karir	0,221	2
Kampanye Kesadaran Organisasi	0,169	3
Pelatihan Keterampilan	0,149	4

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Tabel 4. 244 Hasil AHP Alternatif Program Kultur Organisasi Pekerjaan yang Ramah Perempuan

Berdasarkan perhitungan gabungan dari ketiga responden, didapatkan bahwa alternatif program paling penting dan menempati urutan pertama untuk meningkatkan kultur organisasi pekerjaan yang ramah perempuan adalah program pengembangan jaringan profesional perempuan dengan bobot 0,458. Alternatif program selanjutnya adalah program inisiatif pengembangan karir dengan bobot 0,222, program kampanye kesadaran organisasi dengan bobot 0,179, dan program terakhir pelatihan keterampilan dengan bobot 0,141.

F. Sumbangan Pendapatan Perempuan

Keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam menghitung Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Indonesia. Berbanding terbalik dengan keterlibatan perempuan dalam pekerjaan, persentase sumbangan pendapatan kerja laki – laki lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan. Lebih tingginya nilai partisipasi wanita menjadi tenaga profesional, teknis, kepemimpinan dan ketatalaksanaan dari pada nilai proporsi wanita di pendapatan kerja menunjukkan bahwa upah yang diterima wanita pada bidang pekerjaannya tidak sebanyak laki-laki. Di sisi lain, secara kodrati, wanita memiliki

tanggung jawab di ranah domestik dan kondisi fisik wanita cenderung lebih lemah dibanding dengan laki-laki. Untuk meningkatkan indikator sumbangan pendapatan perempuan telah dilakukan perhitungan analisis AHP ke instansi terkait dengan menggunakan 3 kriteria yaitu kesetaraan pendidikan dan pelatihan, akses dan kesempatan yang sama dalam pekerjaan, dan wawasan dan kemampuan bisnis perempuan. Berikut merupakan hasil analisis AHP yang digunakan untuk menentukan program prioritas indikator sumbangan pendapatan perempuan.

1. Narasumber Pertama

Penilaian kriteria AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria sumbangan pendapatan perempuan dengan menggunakan skala 1-9. Nilai yang diberikan oleh responden akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria sumbangan pendapatan perempuan yang dibandingkan. Responden pertama adalah Ibu Reni JF. Analis dari Dinas Tenaga Kerja. Hasil dari penilaian responden pertama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 245 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Sumbangan Pendapatan Perempuan Responden Pertama

Kriteria	Keterangan		
	Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan	Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan	Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan
Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan	1	9,00	5,00
Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan	0,11	1	0,33
Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan	0,20	3,00	1
Jumlah	1,31	13,00	6,333

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari responden pertama diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi dilakukan untuk menyetarakan skala perhitungan dengan menjumlahkan setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan untuk mencari nilai eigen value. Nilai eigen value didapatkan dari penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

Tabel 4. 246 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Sumbangan Pendapatan Perempuan Responden Pertama

Kriteria	Nilai λ	Eigen
----------	-----------------	-------

	Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan	Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan	Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan	Jumlah Nilai λ	Value
Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan	0,763	0,692	0,789	2,244	0,748
Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan	0,085	0,077	0,053	0,214	0,071
Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan	0,153	0,231	0,158	0,541	0,180
Jumlah				3,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tahapan selanjutnya dilakukan perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai λ maksimal. Nilai λ maks yang diperoleh dari perkalian tersebut adalah 3,052. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk menghitung nilai *consistency index* (CI), dimana nilai CI yang didapatkan adalah 0,026. Nilai *random index* (RI) yang digunakan adalah 0,58 karena kriteria yang dibandingkan berjumlah 3 kriteria sesuai dengan tabel *random index*. Terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai *consistency ratio* (CR) berada pada angka $\leq 0,1$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan narasumber dinyatakan konsisten dan dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. Perhitungan *consistency ratio* (CR) didapatkan dari hasil pembagian nilai CI dengan nilai RI. Nilai CR dari responden pertama adalah 0,045 sehingga data yang diperoleh dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penilaian AHP pada responden pertama, bobot tertinggi diberikan pada kriteria kesetaraan Pendidikan dan pelatihan sedangkan bobot terendah diberikan pada kriteria akses dan kesempatan yang sama dalam pekerjaan.

2. Narasumber Kedua

Penilaian kriteria AHP dilakukan dengan responden kedua menggunakan skala 1-9. Nilai yang diberikan oleh responden akan menentukan tingkat kepentingan dari kriteria keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional yang dibandingkan. Responden kedua Leny Raficha Fatjerin, S.Sos Penyuluh Penanganan Masalah Sosial dari Dinas Sosial. Hasil dari penilaian responden kedua dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 247 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Sumbangan Pendapatan Perempuan Responden Kedua

Kriteria	Keterangan		
	Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan	Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan	Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan
Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan	1	9,00	3,00
Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan	0,11	1	0,20
Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan	0,33	5,00	1
Jumlah	1,44	15,00	4,2

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 248 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional Responden Kedua

Kriteria	Nilai λ			Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan	Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan	Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan		
Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan	0,692	0,600	0,714	2,007	0,669
Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan	0,077	0,067	0,048	0,191	0,064
Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan	0,231	0,333	0,238	0,802	0,267
Jumlah				3,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari responden kedua diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi dilakukan untuk menyetarakan skala perhitungan dengan menjumlahkan setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan untuk mencari nilai eigen value. Nilai eigen value didapatkan dari penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

Tahapan selanjutnya dilakukan perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai λ maksimal. Nilai λ maks yang diperoleh dari perkalian tersebut adalah 3,045 dan nilai CI yang didapatkan adalah 0,023. Nilai *random index* (RI) yang digunakan adalah 0,58 karena kriteria yang

dibandingkan berjumlah 3 kriteria sesuai dengan tabel *random index*. Angka *consistency ratio* (CR) yang didapatkan dari perhitungan responden kedua adalah 0,039 sehingga data yang diperoleh dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat karena angka yang didapatkan kurang dari 0,1. Berdasarkan hasil penilaian AHP pada responden kedua, bobot tertinggi diberikan pada kriteria Kesetaraan Pendidikan dan pelatihan yaitu 0,669 sedangkan bobot terendah diberikan pada kriteria akses dan kesempatan yang sama dalam pekerjaan yaitu 0,064.

3. Narasumber Gabungan

Kedua responden memiliki penilaian bobot dan urutan prioritas masing-masing dari ketiga kriteria. Setelah seluruh penilaian kedua responden dinyatakan konsisten untuk mencegah nilai *error*. Selanjutnya penilaian AHP perlu digabungkan untuk menentukan besaran nilai bobot dari masing-masing kriteria karena memiliki responden berjumlah lebih dari satu. Penggabungan matriks perbandingan berpasangan menggunakan rata-rata geometric (*geomean*) seperti pada tabel berikut.

Tabel 4. 249 Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Kriteria Sumbangan Pendapatan Perempuan

Kriteria	Keterangan		
	Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan	Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan	Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan
Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan	1	9,00	3,87
Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan	0,11	1	0,26
Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan	0,26	3,87	1
Jumlah	1,37	13,87	5,131

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 250 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Kriteria Sumbangan Pendapatan Perempuan

Kriteria	Nilai λ			Jumlah Nilai λ	Rata-rata
	Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan	Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan	Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan		
Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan	0,730	0,649	0,755	2,134	0,711

Kriteria	Nilai λ			Jumlah Nilai λ	Rata-rata
	Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan	Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan	Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan		
Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan	0,081	0,072	0,050	0,204	0,068
Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan	0,189	0,279	0,195	0,663	0,221
Jumlah				3,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Setelah mendapatkan nilai geomean pada masing-masing perbandingan, selanjutnya nilai geomean disusun ke dalam matriks perbandingan berpasangan dan dinormalisasi untuk mendapatkan nilai λ maksimal, nilai CI, nilai IR, dan nilai CR. Nilai λ maks yang didapatkan adalah 3,049 dengan nilai CI sebesar 0,024. Dengan nilai IR yang dipakai adalah 0,58 maka nilai CR dari hasil penggabungan kedua responden terkait kriteria sumbangan pendapatan perempuan adalah 0,042 sehingga penilaiannya dinyatakan konsisten. Kemudian bobot yang diperoleh dari masing-masing kriteria diurutkan dan didapatkan kriteria yang paling penting dalam peningkatan sumbangan pendapatan perempuan.

Tabel 4. 251 Hasil AHP Kriteria Sumbangan Pendapatan Perempuan

Kriteria	Hasil	Peringkat
Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan	0,711	1
Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan	0,221	2
Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan	0,068	3



Gambar 4. 56 Hasil AHP Kriteria Sumbangan Pendapatan Perempuan

Berdasarkan perhitungan gabungan dari kedua responden, didapatkan bahwa kriteria paling penting dan menempati urutan pertama dalam peningkatan sumbangan pendapatan perempuan adalah kesetaraan Pendidikan pelatihan dengan bobot 0,711. Peringkat kedua yang penting untuk ditingkatkan adalah kriteria wawasan dan kemampuan bisnis perempuan dengan bobot sebesar 0,221. Kriteria terakhir yang dilakukan untuk peningkatan sumbangan pendapatan perempuan adalah akses dan kesempatan yang sama dalam pekerjaan dengan bobot sebesar 0,068.

Penilaian Alternatif Program Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan

1. Narasumber Pertama

Penilaian kriteria AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar alternatif program kesetaraan Pendidikan dan pelatihan dengan menggunakan skala 1-9. Nilai yang diberikan oleh responden akan menentukan tingkat kepentingan dari alternatif program kesetaraan Pendidikan dan pelatihan yang dibandingkan. Responden pertama adalah Ibu Reni TF. Analis dari Dinas Tenaga Kerja. Hasil dari penilaian responden pertama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 252 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan Responden Pertama

Kriteria	Keterangan					
	Pelatihan Keterampilan Perempuan	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	Pengembangan Karier
Pelatihan Keterampilan Perempuan	1	5	3	5	3	2
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	0,20	1	1	3	1,00	1
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	0,33	1,00	1	5	3	3
Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	0,20	0,33	0,2	1	0,33	0,14

Kriteria	Keterangan					
	Pelatihan Keterampilan Perempuan	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	Pengembangan Karier
Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	0,33	1,00	0,33	3	1	0,33
Pengembangan Karier	0,50	1	0,33	7,00	3,00	1
Jumlah	2,57	9,33	5,87	24,00	11,33	7,48

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 253 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan Responden Pertama

Kriteria	Nilai λ						Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Pelatihan Keterampilan Perempuan	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	Pengembangan Karier		
Pelatihan Keterampilan Perempuan	0,390	0,536	0,511	0,208	0,265	0,268	2,177	0,363
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	0,078	0,107	0,170	0,125	0,088	0,134	0,703	0,117
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	0,130	0,107	0,170	0,208	0,265	0,401	1,282	0,214
Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	0,078	0,036	0,034	0,042	0,029	0,019	0,238	0,040
Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	0,130	0,107	0,057	0,125	0,088	0,045	0,552	0,092
Pengembangan Karier	0,195	0,107	0,057	0,292	0,265	0,134	1,049	0,175
Jumlah							6,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari responden pertama diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi dilakukan untuk menyetarakan skala perhitungan dengan menjumlahkan setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan untuk mencari nilai eigen value. Nilai eigen value didapatkan dari penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

Tahapan selanjutnya dilakukan perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai λ maksimal. Nilai λ maks yang diperoleh dari perkalian tersebut adalah 6,578. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk menghitung nilai *consistency index* (CI), dimana nilai CI yang didapatkan adalah 0,116. Nilai *random index* (RI) yang digunakan adalah 1,24 karena kriteria yang dibandingkan berjumlah 6 kriteria sesuai dengan tabel *random index*. Terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai *consistency ratio* (CR) berada pada angka $\leq 0,1$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan responden dinyatakan konsisten dan dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. Perhitungan *consistency ratio* (CR) didapatkan dari hasil pembagian nilai CI dengan nilai RI. Nilai CR dari responden pertama adalah 0,093 sehingga data yang diperoleh dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penilaian AHP pada responden pertama, bobot tertinggi diberikan pada alternatif program pelatihan keterampilan perempuan sedangkan bobot terendah diberikan pada alternatif program akses perempuan terhadap teknologi dan pasar online.

2. Narasumber Kedua

Penilaian kriteria AHP selanjutnya dilakukan kepada responden kedua menggunakan skala 1-9. Nilai yang diberikan oleh responden akan menentukan tingkat kepentingan dari alternatif program yang dibandingkan. Responden kedua adalah Ibu Leny Raficha Fatjerin, S.Sos Penyuluh Penanganan Masalah Sosial dari Dinas Sosial. Hasil dari penilaian responden kedua dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 254 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan Responden Kedua

Kriteria	Keterangan
----------	------------

	Pelatihan Keterampilan Perempuan	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	Pengembangan Karier
Pelatihan Keterampilan Perempuan	1	5	5	9	5	1
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	0,20	1	1	7	1,00	1
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	0,20	1,00	1	1	1	1
Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	0,11	0,14	1	1	0,33	0,33
Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	0,20	1,00	1,00	3	1	3
Pengembangan Karier	0,11	1	1,00	3,00	0,33	1
Jumlah	1,82	9,14	10,00	24,00	8,67	7,33

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 255 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan Responden Kedua

Kriteria	Nilai λ						Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Pelatihan Keterampilan Perempuan	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	Pengembangan Karier		
Pelatihan Keterampilan Perempuan	0,549	0,547	0,500	0,375	0,577	0,136	2,684	0,447
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	0,110	0,109	0,100	0,292	0,115	0,136	0,863	0,144
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	0,110	0,109	0,100	0,042	0,115	0,136	0,613	0,102
Akses Perempuan terhadap	0,061	0,016	0,100	0,042	0,038	0,045	0,302	0,050

Kriteria	Nilai λ						Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Pelatihan Keterampilan Perempuan	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	Pengembangan Karier		
Teknologi dan Pasar Online								
Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	0,110	0,109	0,100	0,125	0,115	0,409	0,969	0,161
Pengembangan Karier	0,061	0,109	0,100	0,125	0,038	0,136	0,570	0,095
Jumlah							6,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari responden kedua diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Kemudian didapatkan eigen value dari penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1. Tahapan selanjutnya dilakukan perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai λ maksimal. Nilai λ maks yang diperoleh dari perkalian tersebut adalah 6,455. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk menghitung nilai *consistency index* (CI), dimana nilai CI yang didapatkan adalah 0,091. Nilai *random index* (RI) yang digunakan adalah 1,24 karena kriteria yang dibandingkan berjumlah 6 kriteria sesuai dengan tabel *random index*. Terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai *consistency ratio* (CR) berada pada angka $\leq 0,1$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan responden dinyatakan konsisten dan dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. Perhitungan *consistency ratio* (CR) didapatkan dari hasil pembagian nilai CI dengan nilai RI. Nilai CR dari responden kedua adalah 0,073 sehingga data yang diperoleh dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penilaian AHP pada responden kedua, bobot tertinggi diberikan pada alternatif program pelatihan keterampilan perempuan sedangkan bobot terendah diberikan pada alternatif program akses perempuan terhadap teknologi dan pasar online.

3. Narasumber Gabungan

Kedua responden memiliki penilaian bobot dan urutan prioritas masing-masing dari keenam kriteria. Setelah seluruh penilaian kedua responden dinyatakan konsisten untuk mencegah nilai *error*. Selanjutnya penilaian AHP perlu digabungkan untuk menentukan besaran nilai bobot dari masing-masing kriteria karena memiliki responden berjumlah lebih dari satu. Penggabungan matriks perbandingan berpasangan menggunakan rata-rata geometric (*geomean*) seperti pada tabel berikut.

Tabel 4. 256 Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan

Kriteria	Keterangan					
	Pelatihan Keterampilan Perempuan	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	Pengembangan Karier
Pelatihan Keterampilan Perempuan	1	5	4	7	4	1
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	0,200	1	1	5	1	1
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	0,258	1	1	2,236	1,732	1,732
Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	0,149	0,218	0,447	1	0,33	0,22
Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	0,258	1	0,577	3	1	1
Pengembangan Karier	0,236	1	0,577	4,583	1	1
Jumlah	2,10	9,22	7,47	22,11	8,94	6,36

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 257 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan

Kriteria	Nilai λ						Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Pelatihan Keterampilan Perempuan	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan	Pengembangan Karier		
Pelatihan Keterampilan Perempuan	0,476	0,542	0,518	0,303	0,433	0,222	2,495	0,416
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	0,095	0,108	0,134	0,207	0,112	0,157	0,814	0,136
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	0,123	0,108	0,134	0,101	0,194	0,272	0,932	0,155
Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	0,071	0,024	0,060	0,045	0,037	0,034	0,271	0,045
Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	0,123	0,108	0,077	0,136	0,112	0,157	0,713	0,119
Pengembangan Karier	0,112	0,108	0,077	0,207	0,112	0,157	0,774	0,129
Jumlah							6,000	1,000

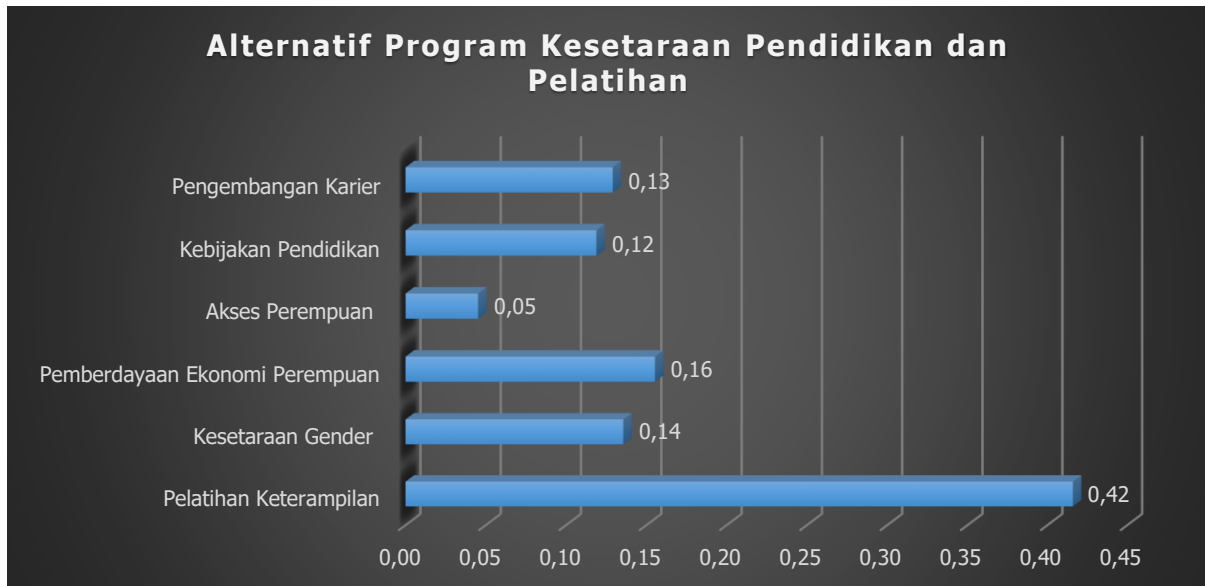
Sumber : Hasil Analisis, 2023

Setelah mendapatkan nilai geomean pada masing-masing perbandingan, selanjutnya nilai geomean disusun ke dalam matriks perbandingan berpasangan dan dinormalisasi untuk mendapatkan nilai λ maksimal, nilai CI, nilai IR, dan nilai CR. Nilai λ maks yang didapatkan adalah 6,169 dengan nilai CI sebesar 0,033. Dengan nilai IR yang dipakai adalah 1,24 maka nilai CR dari hasil penggabungan ketiga responden terkait alternatif program kultur organisasi pekerjaan yang ramah adalah 0,027 sehingga penilaiannya dinyatakan konsisten. Kemudian bobot yang diperoleh dari masing-masing kriteria diurutkan dan didapatkan urutan alternatif program yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kultur organisasi pekerjaan yang ramah sebagai berikut.

Tabel 4. 258 Hasil AHP Alternatif Program Kesenjangan Pendidikan dan Pelatihan

Alternatif Program	Hasil	Peringkat
Pelatihan Keterampilan Perempuan	0,416	1
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	0,155	2
Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	0,136	3
Pengembangan Karier	0,129	4
Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	0,119	5
Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	0,045	6

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 4. 57 Hasil AHP Alternatif Program Kesenjangan Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan perhitungan gabungan dari ketiga responden, didapatkan bahwa alternatif program paling penting dan menempati urutan pertama untuk meningkatkan kesetaraan Pendidikan dan pelatihan adalah program pelatihan keterampilan perempuan dengan bobot 0,416. Alternatif program selanjutnya adalah program pemberdayaan ekonomi perempuan dengan bobot 0,155, program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan bobot 0,136, program pengembangan karier dengan bobot 0,129, program kebijakan Pendidikan dan perlindungan pekerja dengan bobot 0,119 dan program terakhir akses perempuan terhadap teknologi dan pasar online dengan bobot 0,045.

Penilaian Alternatif Program Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan

1. Narasumber Pertama

Penilaian kriteria AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar alternatif program wawasan dan kemampuan bisnis perempuan dengan menggunakan skala 1-9. Nilai yang diberikan oleh responden akan menentukan tingkat kepentingan dari alternatif program wawasan dan kemampuan bisnis

perempuan yang dibandingkan. Responden pertama adalah Ibu Reni TF. Analis dari Dinas Tenaga Kerja. Hasil dari penilaian responden pertama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 259 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan Responden Pertama

Kriteria	Keterangan					
	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	Pengembangan Karier	Keterampilan Wirausaha	Membangun Kepercayaan Diri Perempuan dalam Bisnis	Kewirausahaan Perempuan Korban KDRT
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	1	0,33	0,11	0,14	0,11	0,33
Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	3,00	1	0,11	0,33	0,20	1
Pengembangan Karier	9,00	9,00	1	3	1	7
Keterampilan Wirausaha	9,00	3,00	0,33	1	1,00	1,00
Membangun Kepercayaan Diri Perempuan dalam Bisnis	9,00	5,00	1,00	1	1	1
Kewirausahaan Perempuan Korban KDRT	3,00	1,00	0,14	1,00	1,00	1
Jumlah	34,00	19,33	2,70	6,48	4,31	11,33

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 260 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan Responden Pertama

Kriteria	Nilai λ						Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	Pengembangan Karier	Keterampilan Wirausaha	Membangun Kepercayaan Diri Perempuan dalam	Kewirausahaan Perempuan Korban KDRT		
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	0,029	0,017	0,041	0,022	0,026	0,029	0,165	0,028
Akses Perempuan terhadap	0,088	0,052	0,041	0,051	0,046	0,088	0,367	0,061

Kriteria	Nilai λ						Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	Pengembangan Karier	Keterampilan Wirausaha	Membangun Kepercayaan Diri Perempuan dalam	Kewirausahaan Perempuan Korban KDRT		
Teknologi dan Pasar Online								
Pengembangan Karier	0,265	0,466	0,371	0,463	0,232	0,618	2,414	0,402
Keterampilan Wirausaha	0,265	0,155	0,124	0,154	0,232	0,088	1,018	0,170
Membangun Kepercayaan Diri Perempuan dalam Bisnis	0,265	0,259	0,371	0,154	0,232	0,088	1,369	0,228
Kewirausahaan Perempuan Korban KDRT	0,088	0,052	0,053	0,154	0,232	0,088	0,668	0,111
Jumlah							6,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari responden pertama diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi dilakukan untuk menyetarakan skala perhitungan dengan menjumlahkan setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan untuk mencari nilai eigen value. Nilai eigen value didapatkan dari penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

Tahapan selanjutnya dilakukan perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai λ maksimal. Nilai λ maks yang diperoleh dari perkalian tersebut adalah 6,547. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk menghitung nilai *consistency index* (CI), dimana nilai CI yang didapatkan adalah 0,1094. Nilai *random index* (RI) yang digunakan adalah 1,24 karena kriteria yang dibandingkan berjumlah 6 kriteria sesuai dengan tabel *random index*. Terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai *consistency ratio* (CR) berada pada angka $\leq 0,1$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan responden dinyatakan konsisten dan dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. Perhitungan *consistency ratio* (CR) didapatkan dari hasil pembagian nilai CI dengan nilai RI. Nilai CR dari responden pertama adalah 0,088 sehingga data yang diperoleh dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penilaian AHP pada

responden pertama, bobot tertinggi diberikan pada alternatif program Pengembangan Karier sedangkan bobot terendah diberikan pada alternatif program Pemberdayaan ekonomi perempuan.

2. Narasumber Kedua

Penilaian kriteria AHP selanjutnya dilakukan kepada responden kedua menggunakan skala 1-9. Nilai yang diberikan oleh responden akan menentukan tingkat kepentingan dari alternatif program yang dibandingkan. Responden kedua adalah Ibu Leny Raficha Fatjerin, S.Sos Penyuluh Penanganan Masalah Sosial dari Dinas Sosial. Hasil dari penilaian responden kedua dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 261 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan Responden Kedua

Kriteria	Keterangan					
	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	Pengembangan Karier	Keterampilan Wirausaha	Membangun Kepercayaan Diri Perempuan dalam Bisnis	Kewirausahaan Perempuan Korban KDRT
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	1	0,11	0,11	0,11	0,11	1
Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	9,00	1	1	0,33	0,14	3
Pengembangan Karier	9,00	1,00	1	1	1	5
Keterampilan Wirausaha	9,00	3,00	1	1	1,00	7,00
Membangun Kepercayaan Diri Perempuan dalam Bisnis	9,00	7,00	1,00	1	1	7
Kewirausahaan Perempuan Korban KDRT	1,00	0,33	0,20	0,14	0,14	1
Jumlah	38,00	12,44	4,31	3,59	3,40	24,00

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 262 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan Responden Kedua

Kriteria	Nilai λ						Jumlah Nilai λ	Rata-rata
	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	Pengembangan Karier	Keterampilan Wirausaha	Membangun Kepercayaan Diri Perempuan dalam	Kewirausahaan Perempuan Korban KDRT		
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	0,026	0,009	0,026	0,031	0,033	0,042	0,166	0,028
Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	0,237	0,080	0,232	0,093	0,042	0,125	0,809	0,135
Pengembangan Karier	0,237	0,080	0,232	0,279	0,294	0,208	1,331	0,222
Keterampilan Wirausaha	0,237	0,241	0,232	0,279	0,294	0,292	1,575	0,262
Membangun Kepercayaan Diri Perempuan dalam Bisnis	0,237	0,563	0,232	0,279	0,294	0,292	1,896	0,316
Kewirausahaan Perempuan Korban KDRT	0,026	0,027	0,046	0,040	0,042	0,042	0,223	0,037
Jumlah							6,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari responden kedua diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Kemudian didapatkan eigen value dari penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1. Tahapan selanjutnya dilakukan perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai λ maksimal. Nilai λ maks yang diperoleh dari perkalian tersebut adalah 6,595. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk menghitung nilai *consistency index* (CI), dimana nilai CI yang didapatkan adalah 0,119. Nilai *random index* (RI) yang digunakan adalah 1,24 karena kriteria yang dibandingkan berjumlah 6 kriteria sesuai dengan tabel *random index*. Terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai *consistency ratio* (CR) berada pada angka $\leq 0,1$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan responden dinyatakan konsisten dan dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. Perhitungan *consistency ratio* (CR) didapatkan

dari hasil pembagian nilai CI dengan nilai RI. Nilai CR dari responden kedua adalah 0,096 sehingga data yang diperoleh dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penilaian AHP pada responden kedua, bobot tertinggi diberikan pada alternatif program membangun kepercayaan diri perempuan dalam bisnis sedangkan bobot terendah diberikan pada alternatif program pemberdayaan ekonomi perempuan.

3. Narasumber Gabungan

Kedua responden memiliki penilaian bobot dan urutan prioritas masing-masing dari keenam kriteria. Setelah seluruh penilaian kedua responden dinyatakan konsisten untuk mencegah nilai *error*. Selanjutnya penilaian AHP perlu digabungkan untuk menentukan besaran nilai bobot dari masing-masing kriteria karena memiliki responden berjumlah lebih dari satu. Penggabungan matriks perbandingan berpasangan menggunakan rata-rata geometric (*geomean*) seperti pada tabel berikut.

Tabel 4. 263 Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan

Kriteria	Keterangan					
	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	Pengembangan Karier	Keterampilan Wirausaha	Membangun Kepercayaan Diri Perempuan dalam Bisnis	Kewirausahaan Perempuan Korban KDRT
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	1	0,33	0,11	0,14	0,11	0,33
Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	3,00	1	0,11	0,33	0,20	1
Pengembangan Karier	9,00	9,00	1	3	1	7
Keterampilan Wirausaha	9,00	3,00	0,33	1	1,00	1,00
Membangun Kepercayaan Diri Perempuan dalam Bisnis	9,00	5,00	1,00	1	1	1
Kewirausahaan Perempuan Korban KDRT	3,00	1,00	0,14	1,00	1,00	1
Jumlah	34,00	19,33	2,70	6,48	4,31	11,33

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 264 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan

Kriteria	Nilai λ						Jumlah Nilai λ	Rata-rata
	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	Pengembangan Karier	Keterampilan Wirausaha	Membangun Kepercayaan Diri Perempuan dalam Bisnis	Kewirausahaan Perempuan Korban KDRT		
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	0,029	0,017	0,041	0,022	0,026	0,029	0,165	0,028
Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	0,088	0,052	0,041	0,051	0,046	0,088	0,367	0,061
Pengembangan Karier	0,265	0,466	0,371	0,463	0,232	0,618	2,414	0,402
Keterampilan Wirausaha	0,265	0,155	0,124	0,154	0,232	0,088	1,018	0,170
Membangun Kepercayaan Diri Perempuan dalam Bisnis	0,265	0,259	0,371	0,154	0,232	0,088	1,369	0,228
Kewirausahaan Perempuan Korban KDRT	0,088	0,052	0,053	0,154	0,232	0,088	0,668	0,111
Jumlah							6,000	1,000

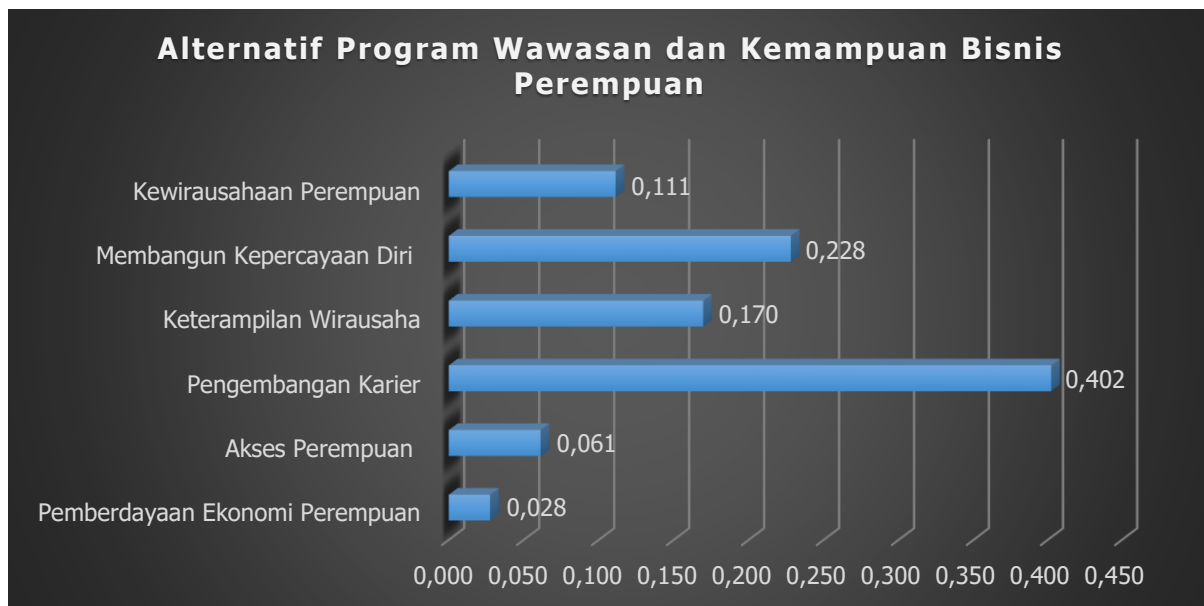
Sumber : Hasil Analisis, 2023

Setelah mendapatkan nilai geomean pada masing-masing perbandingan, selanjutnya nilai geomean disusun ke dalam matriks perbandingan berpasangan dan dinormalisasi untuk mendapatkan nilai λ maksimal, nilai CI, nilai IR, dan nilai CR. Kemudian bobot yang diperoleh dari masing-masing kriteria diurutkan dan didapatkan urutan alternatif program yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kultur organisasi pekerjaan yang ramah sebagai berikut.

Tabel 4. 265 Hasil AHP Alternatif Program Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan

Alternatif Program	Hasil	Peringkat
Pengembangan Karier	0,402	1
Membangun Kepercayaan Diri Perempuan dalam Bisnis	0,228	2
Keterampilan Wirausaha	0,170	3
Kewirausahaan Perempuan Korban KDRT	0,111	4
Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	0,061	5
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	0,028	6

Sumber : Hasil Analisis, 2023



Gambar 4. 58 Hasil AHP Alternatif Program Wawasan dan Kemampuan Bisnis Perempuan

Berdasarkan perhitungan gabungan dari ketiga responden, didapatkan bahwa alternatif program paling penting dan menempati urutan pertama untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan bisnis perempuan adalah program pengembangan karier dengan bobot 0,402. Alternatif program selanjutnya adalah program membangun kepercayaan diri perempuan dalam bisnis dengan bobot 0,228, program keterampilan wirausaha dengan bobot 0,170, program kewirausahaan perempuan dengan bobot 0,111, program akses perempuan dalam teknologi dan pasar online dengan bobot 0,061 dan program terakhir pemberdayaan ekonomi perempuan dengan bobot 0,028.

Penilaian Alternatif Program Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan

1. Narasumber Pertama

Penilaian kriteria AHP dilakukan dengan membandingkan tingkat kepentingan antar alternatif program akses dan kesempatan yang sama dalam pekerjaan dengan menggunakan skala 1-9. Nilai yang diberikan oleh responden akan menentukan tingkat kepentingan dari alternatif program akses dan kesempatan yang sama dalam pekerjaan yang dibandingkan. Responden pertama adalah Ibu Reni TF. Analis dari Dinas Tenaga Kerja. Hasil dari penilaian responden pertama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 266 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan Responden Pertama

Kriteria	Keterangan								
	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	Pengembangan Karier	Pengurangan Kesenjangan Upah Gender	PUSPA	Akses Terhadap Pekerjaan Formal	Kewirausahaan Perempuan
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1	1	5	9	1	1	7	1	3
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	1,00	1	5	9	1,00	1	7	1	1
Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	0,20	0,20	1	7	0,11	0,14	5	0,2	0,33
Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	0,11	0,11	0,14	1	0,11	0,11	0,20	0,11	0,20
Pengembangan Karier	1,00	1,00	9,00	9	1	1	9	1	1
Pengurangan Kesenjangan Upah Gender	1,00	1	7,00	9,00	1,00	1	7	1	1
PUSPA	0,14	0,14	0,20	5,00	0,14	0,14	1	0,33	0,2
Akses Terhadap Pekerjaan Formal	1,00	1	5,00	9,00	1,00	1	3	1	1
Kewirausahaan Perempuan	0,33	1	3,00	5,00	1,00	1	5	1	1
Jumlah	5,79	6,45	35,34	63,00	6,37	6,40	44,20	6,64	8,73

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 267 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan Responden Pertama

Kriteria	Nilai λ									Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	Pengembangan Karier	Pengurangan Kesenjangan Upah Gender	PUSPA	Akses Terhadap Pekerjaan Formal	Kewirausahaan Perempuan		
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	0,17 3	0,15 5	0,14 1	0,14 3	0,15 7	0,15 6	0,15 8	0,15 1	0,34 4	1,578	0,175

Kriteria	Nilai λ									Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	Pengembangan Karier	Pengurangan Kesenjangan Upah Gender	PUSPA	Akses Terhadap Pekerjaan Formal	Kewirausahaan Perempuan		
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	0,17 3	0,15 5	0,14 1	0,14 3	0,15 7	0,15 6	0,15 8	0,15 1	0,11 5	1,349	0,150
Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	0,03 5	0,03 1	0,02 8	0,11 1	0,01 7	0,02 2	0,11 3	0,03 0	0,03 8	0,426	0,047
Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	0,01 9	0,01 7	0,00 4	0,01 6	0,01 7	0,01 7	0,00 5	0,01 7	0,02 3	0,135	0,015
Pengembangan Karier	0,17 3	0,15 5	0,25 5	0,14 3	0,15 7	0,15 6	0,20 4	0,15 1	0,11 5	1,507	0,167
Pengurangan Kesenjangan Upah Gender	0,17 3	0,15 5	0,19 8	0,14 3	0,15 7	0,15 6	0,15 8	0,15 1	0,11 5	1,405	0,156
PUSPA	0,02 5	0,02 2	0,00 6	0,07 9	0,02 2	0,02 2	0,02 3	0,05 0	0,02 3	0,272	0,030
Akses Terhadap Pekerjaan Formal	0,17 3	0,15 5	0,14 1	0,14 3	0,15 7	0,15 6	0,06 8	0,15 1	0,11 5	1,258	0,140
Kewirausahaan Perempuan	0,05 8	0,15 5	0,08 5	0,07 9	0,15 7	0,15 6	0,11 3	0,15 1	0,11 5	1,068	0,119
Jumlah										9,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari responden pertama diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Normalisasi dilakukan untuk menyetarakan skala perhitungan dengan menjumlahkan setiap kolom menjadi satu sehingga dapat digunakan untuk mencari nilai eigen value. Nilai eigen value didapatkan dari penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1.

Tahapan selanjutnya dilakukan perkalian matriks perbandingan berpasangan

dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai λ maksimal. Nilai λ maks yang diperoleh dari perkalian tersebut adalah 9,970. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk menghitung nilai *consistency index* (CI), dimana nilai CI yang didapatkan adalah 0,121. Nilai *random index* (RI) yang digunakan adalah 1,45 karena kriteria yang dibandingkan berjumlah 9 kriteria sesuai dengan tabel *random index*. Terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai *consistency ratio* (CR) berada pada angka $\leq 0,1$. Apabila nilai rasio berada pada rentang ideal, maka data yang didapatkan responden dinyatakan konsisten dan dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. Perhitungan *consistency ratio* (CR) didapatkan dari hasil pembagian nilai CI dengan nilai RI. Nilai CR dari responden pertama adalah 0,84 sehingga data yang diperoleh dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penilaian AHP pada responden pertama, bobot tertinggi diberikan pada alternatif program Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sedangkan bobot terendah diberikan pada alternatif program kebijakan Pendidikan dan perlindungan pekerja.

2. Narasumber Kedua

Penilaian kriteria AHP selanjutnya dilakukan kepada responden kedua menggunakan skala 1-9. Nilai yang diberikan oleh responden akan menentukan tingkat kepentingan dari alternatif program yang dibandingkan. Responden kedua adalah Ibu Leny Raficha Fatjerin, S.Sos Penyuluh Penanganan Masalah Sosial dari Dinas Sosial. Hasil dari penilaian responden kedua dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 268 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan Responden Kedua

Kriteria	Keterangan								
	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	Pengembangan Karier	Pengurangan Kesenjangan Upah Gender	PUSPA	Akses Terhadap Pekerjaan Formal	Kewirausahaan Perempuan
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1	1	3	9	9	3	7	3	5
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	1,00	1	1	9	1,00	1	5	1	7

Kriteria	Keterangan								
	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	Pengembangan Karier	Pengurangan Kesenjangan Upah Gender	PUSPA	Akses Terhadap Pekerjaan Formal	Kewirausahaan Perempuan
Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	0,33	1,00	1	7	1	1	3	0,33	3
Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	0,11	0,11	0,14	1	0,20	0,11	0,33	0,11	0,11
Pengembangan Karier	0,11	1,00	1,00	5	1	1	7	1	1
Pengurangan Kesenjangan Upah Gender	0,33	1	1,00	9,00	1,00	1	5	1	1
PUSPA	0,14	0	0,33	3,00	0,14	0,2	1	0,14	0,33
Akses Terhadap Pekerjaan Formal	0,33	1	3,00	9,00	1,00	1	7	1	1
Kewirausahaan Perempuan	0,20	0	0,33	9,00	1,00	1	3	1	1
Jumlah	3,57	6,45	10,81	61,00	15,34	9,31	38,33	8,59	19,44

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 269 Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif Program Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan Responden Kedua

Kriteria	Nilai λ									Jumlah Nilai λ	Rata-rata
	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	Pengembangan Karier	Pengurangan Kesenjangan Upah Gender	PUSPA	Akses Terhadap Pekerjaan Formal	Kewirausahaan Perempuan		
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	0,280	0,155	0,278	0,148	0,587	0,322	0,183	0,349	0,257	2,558	0,284
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	0,280	0,155	0,093	0,148	0,065	0,107	0,130	0,116	0,360	1,455	0,162
Akses Perempuan terhadap	0,093	0,155	0,093	0,115	0,065	0,107	0,078	0,039	0,154	0,900	0,100

Kriteria	Nilai λ									Jumlah Nilai λ	Rata- rata
	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	Pengembangan Karier	Pengurangan Kesenjangan Upah Gender	PUSPA	Akses Terhadap Pekerjaan Formal	Kewirausahaan Perempuan		
Teknologi dan Pasar Online											
Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	0,03 1	0,01 7	0,01 3	0,01 6	0,01 3	0,01 2	0,00 9	0,01 3	0,00 6	0,130	0,014
Pengembang an Karier	0,03 1	0,15 5	0,09 3	0,08 2	0,06 5	0,10 7	0,18 3	0,11 6	0,05 1	0,884	0,098
Pengurang an Kesenjangan Upah Gender	0,09 3	0,15 5	0,09 3	0,14 8	0,06 5	0,10 7	0,13 0	0,11 6	0,05 1	0,959	0,107
PUSPA	0,04 0	0,03 1	0,03 1	0,04 9	0,00 9	0,02 1	0,02 6	0,01 7	0,01 7	0,242	0,027
Akses Terhadap Pekerjaan Formal	0,09 3	0,15 5	0,27 8	0,14 8	0,06 5	0,10 7	0,18 3	0,11 6	0,05 1	1,197	0,133
Kewirausaha an Perempuan	0,05 6	0,02 2	0,03 1	0,14 8	0,06 5	0,10 7	0,07 8	0,11 6	0,05 1	0,675	0,075
Jumlah										9,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Hasil matriks perbandingan berpasangan dari responden kedua diolah terlebih dahulu dengan normalisasi data. Kemudian didapatkan eigen value dari penjumlahan pada setiap baris matriks hasil normalisasi dan dibagi dengan jumlah kriteria. Syarat dari nilai eigen value harus berjumlah 1. Tahapan selanjutnya dilakukan perkalian matriks perbandingan berpasangan dan matriks dari eigen value untuk mendapatkan nilai λ maksimal. Nilai λ maks yang diperoleh dari perkalian tersebut adalah 10,150. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk menghitung nilai *consistency index* (CI), dimana nilai CI yang didapatkan adalah 0,144. Nilai *random index* (RI) yang digunakan adalah 1,45 karena kriteria yang dibandingkan berjumlah 9 kriteria sesuai dengan tabel *random index*. Terdapat persyaratan nilai rasio konsistensi dengan nilai *consistency ratio* (CR) berada pada angka $\leq 0,1$. Apabila nilai rasio berada pada

rentang ideal, maka data yang didapatkan responden dinyatakan konsisten dan dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. Perhitungan *consistency ratio* (CR) didapatkan dari hasil pembagian nilai CI dengan nilai RI. Nilai CR dari responden kedua adalah 0,099 sehingga data yang diperoleh dinyatakan konsisten dan memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penilaian AHP pada responden kedua, bobot tertinggi diberikan pada alternatif program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sedangkan bobot terendah diberikan pada alternatif program kebijakan Pendidikan dan perlindungan pekerja.

3. Narasumber Gabungan

Kedua responden memiliki penilaian bobot dan urutan prioritas masing-masing dari keenam kriteria. Setelah seluruh penilaian kedua responden dinyatakan konsisten untuk mencegah nilai *error*. Selanjutnya penilaian AHP perlu digabungkan untuk menentukan besaran nilai bobot dari masing-masing kriteria karena memiliki responden berjumlah lebih dari satu. Penggabungan matriks perbandingan berpasangan menggunakan rata-rata geometric (*geomean*) seperti pada tabel berikut.

Tabel 4. 270 Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan

Kriteria	Keterangan								
	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	Pengembangan Karier	Pengurangan Kesenjangan Upah Gender	PUSPA	Akses Terhadap Pekerjaan Formal	Kewirausahaan Perempuan
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1	1	5	9	1	1	7	1	3
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	1	1	5	9	1	1	7	1	1
Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	0,2	0,2	1	7	0,11	0,14	5	0,2	0,33
Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	0,11	0,11	0,14	1	0,11	0,11	0,2	0,11	0,2

Kriteria	Keterangan								
	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	Pengembangan Karier	Pengurangan Kesenjangan Upah Gender	PUSPA	Akses Terhadap Pekerjaan Formal	Kewirausahaan Perempuan
Pengembangan Karier	1	1	9	9	1	1	9	1	1
Pengurangan Kesenjangan Upah Gender	1	1	7	9	1	1	7	1	1
PUSPA	0,14	0,14	0,2	5	0,14	0,14	1	0,33	0,2
Akses Terhadap Pekerjaan Formal	1	1	5	9	1	1	3	1	1
Kewirausahaan Perempuan	0,33	1	3	5	1	1	5	1	1
Jumlah	5,79	6,45	35,34	63	6,37	6,40	44,2	6,64	8,73

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 271 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan Gabungan Alternatif Program Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan

Kriteria	Nilai λ									Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	Pengembangan Karier	Pengurangan Kesenjangan Upah Gender	PUSPA	Akses Terhadap Pekerjaan Formal	Kewirausahaan Perempuan		
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	0,173	0,155	0,141	0,143	0,157	0,156	0,158	0,151	0,344	1,578	0,175
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	0,173	0,155	0,141	0,143	0,157	0,156	0,158	0,151	0,115	1,349	0,150
Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	0,035	0,031	0,028	0,111	0,017	0,022	0,113	0,030	0,038	0,426	0,047

Kriteria	Nilai λ									Jumlah Nilai λ	Eigen Value
	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	Pengembangan Karier	Pengurangan Kesenjangan Upah Gender	PUSPA	Akses Terhadap Pekerjaan Formal	Kewirausahaan Perempuan		
Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	0,019	0,017	0,004	0,016	0,017	0,017	0,005	0,017	0,023	0,135	0,015
Pengembangan Karier	0,173	0,155	0,255	0,143	0,157	0,156	0,204	0,151	0,115	1,507	0,167
Pengurangan Kesenjangan Upah Gender	0,173	0,155	0,198	0,143	0,157	0,156	0,158	0,151	0,115	1,405	0,156
PUSPA	0,025	0,022	0,006	0,079	0,022	0,022	0,023	0,050	0,023	0,272	0,030
Akses Terhadap Pekerjaan Formal	0,173	0,155	0,141	0,143	0,157	0,156	0,068	0,151	0,115	1,258	0,140
Kewirausahaan Perempuan	0,058	0,155	0,085	0,079	0,157	0,156	0,113	0,151	0,115	1,068	0,119
Jumlah										9,000	1,000

Sumber : Hasil Analisis, 2023

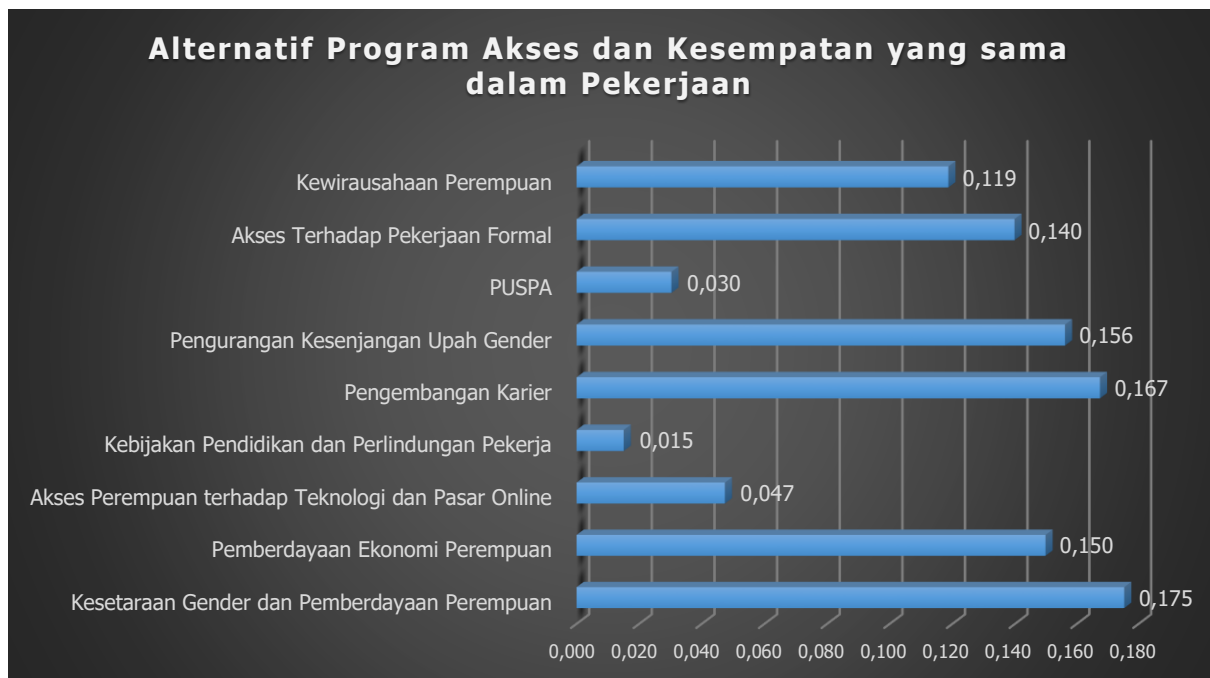
Setelah mendapatkan nilai geomean pada masing-masing perbandingan, selanjutnya nilai geomean disusun ke dalam matriks perbandingan berpasangan dan dinormalisasi untuk mendapatkan nilai λ maksimal, nilai CI, nilai IR, dan nilai CR. Kemudian bobot yang diperoleh dari masing-masing kriteria diurutkan dan didapatkan urutan alternatif program yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kultur organisasi pekerjaan yang ramah sebagai berikut.

Tabel 4. 272 Hasil AHP Alternatif Program Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan

Alternatif Program	Hasil	Peringkat
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	0,175	1
Pengembangan Karier	0,167	2
Pengurangan Kesenjangan Upah Gender	0,156	3
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	0,150	4
Akses Terhadap Pekerjaan Formal	0,140	5
Kewirausahaan Perempuan	0,119	6
Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	0,047	7
PUSPA	0,030	8

Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	0,015	9
---	-------	---

Sumber : Hasil Analisis, 2023



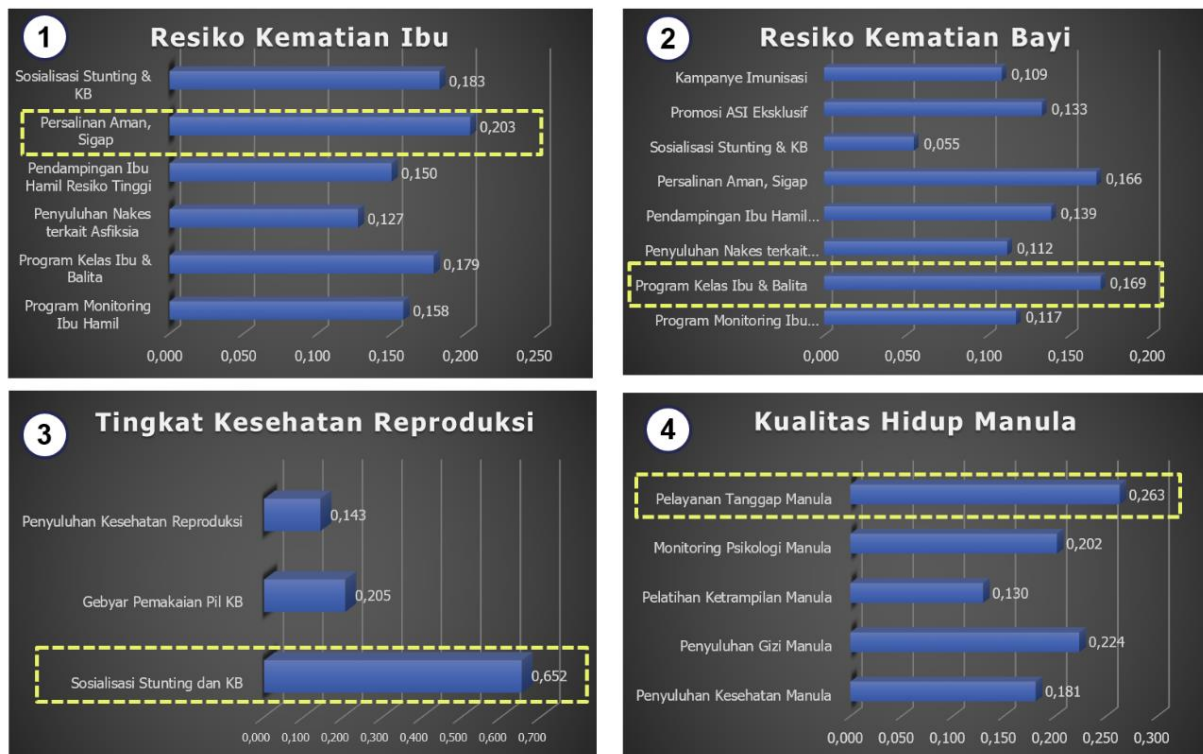
Gambar 4. 59 Hasil AHP Alternatif Program Akses dan Kesempatan yang sama dalam Pekerjaan

Berdasarkan perhitungan gabungan dari ketiga responden, didapatkan bahwa alternatif program paling penting dan menempati urutan pertama untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan bisnis perempuan adalah program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan bobot 0,175. Alternatif program selanjutnya adalah program Pengembangan Karier dengan bobot 0,167, program Pengurangan Kesenjangan Upah Gender dengan bobot 0,156, program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dengan bobot 0,150, program Akses Terhadap Pekerjaan Formal dengan bobot 0,140, program Kewirausahaan Perempuan dengan bobot 0,119, program Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online dengan bobot 0,047, program PUSPA dengan bobot 0,030 dan program terakhir Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja dengan bobot 0,015.

G. Kesimpulan Prioritas Program berdasarkan Analisis AHP

1. Angka Harapan Hidup

ANGKA HARAPAN HIDUP



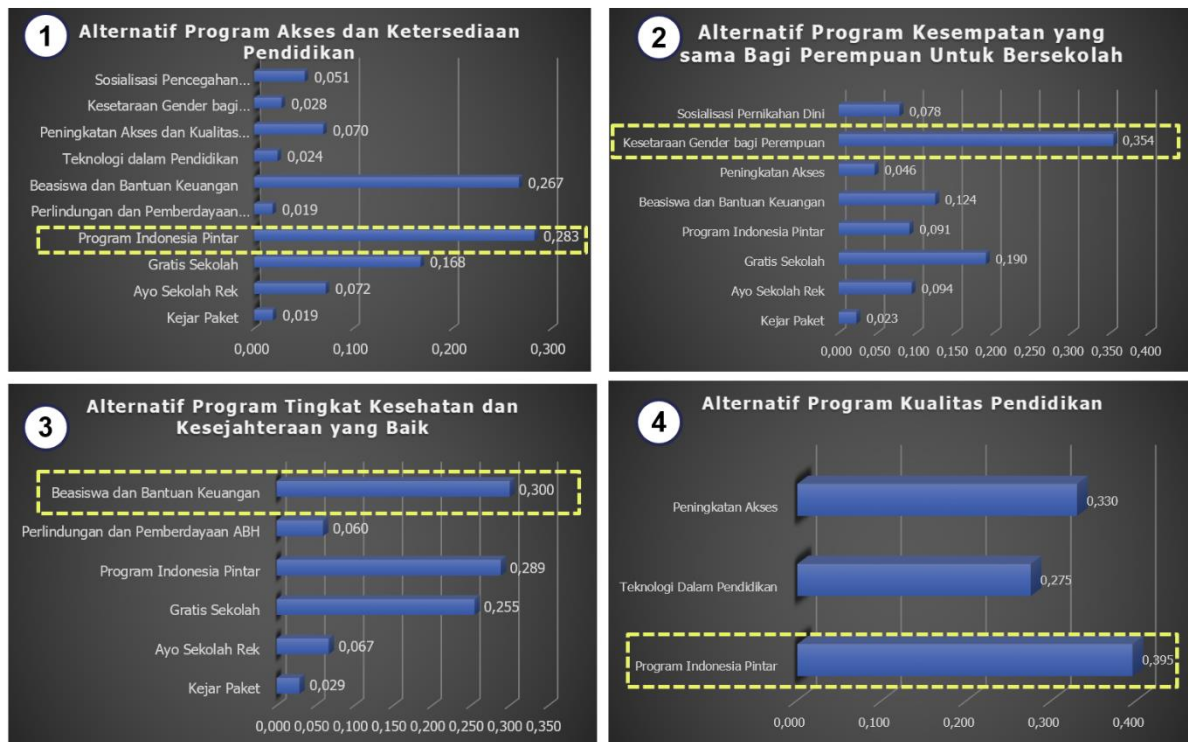
Gambar 4. 60 Kesimpulan Prioritas Alternatif Program Analisis AHP Angka Harapan Hidup

Berdasarkan hasil analisis AHP Angka Harapan Hidup (AHH) yang sudah dilakukan pada sub bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ❑ Apabila ingin meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Mojokerto dapat mendahulukan program-program yang terdapat pada Kriteria Resiko Kematian Ibu dikarenakan memiliki angka tertinggi yakni (0,388).
- ❑ Program yang dapat diprioritaskan atau yang memiliki nilai tertinggi sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu yang terdapat di kriteria Resiko Kematian Ibu adalah program Persalinan Aman dan Sigap. Dengan mendahulukan resiko kematian ibu akan dapat berdampak pada beberapa hal yang salah satunya adalah akan menurunkan pula angka kematian bayi.

2. Harapan Lama Sekolah & Rata-Rata Lama Sekolah

HARAPAN LAMA SEKOLAH & RATA-RATA LAMA SEKOLAH

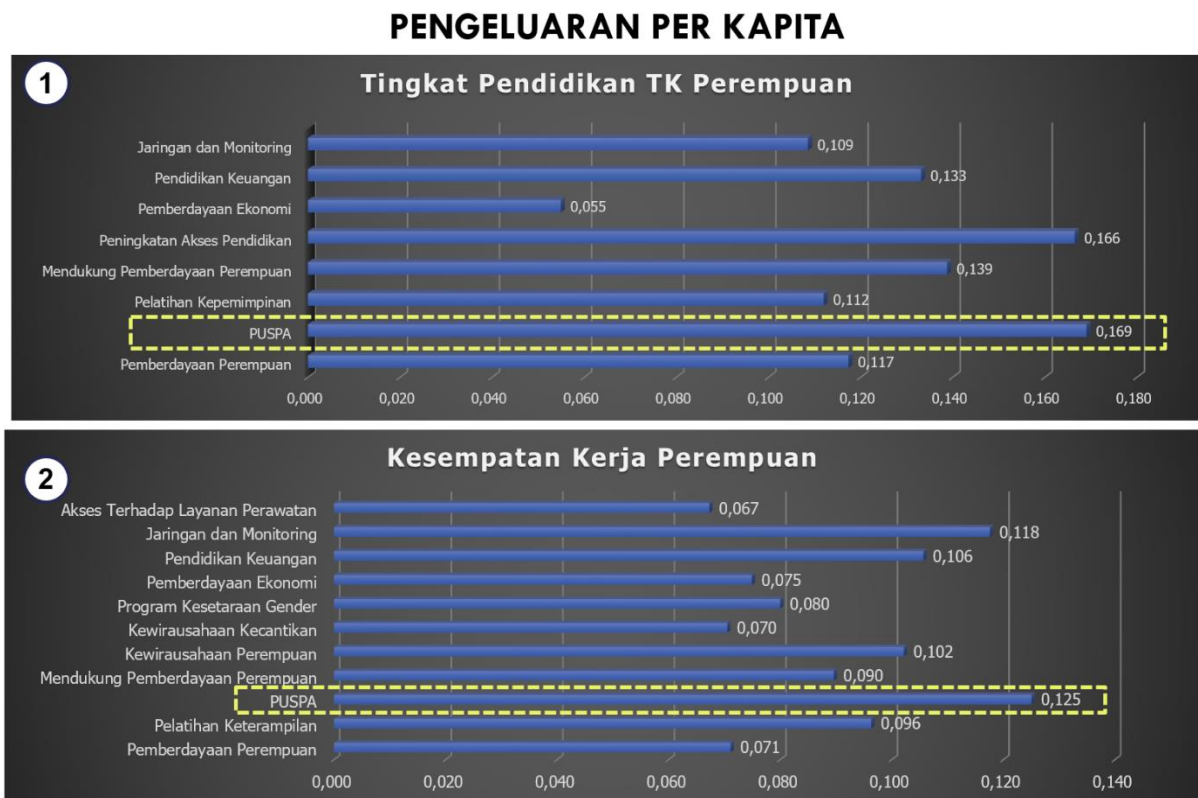


Gambar 4. 61 Kesimpulan Prioritas Alternatif Program Analisis AHP Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

Berdasarkan hasil analisis AHP Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang sudah dilakukan pada sub bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ❑ Apabila ingin meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Mojokerto dapat mendahulukan program-program yang terdapat pada Kriteria Akses dan Ketersediaan Pendidikan memiliki angka tertinggi apabila dibandingkan dengan kriteria yang lain. Sehingga dengan memprioritaskan akses dan ketersediaan pendidikan di Kabupaten Mojokerto dapat lebih cepat meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).
- ❑ Program yang dapat diprioritaskan atau yang memiliki nilai tertinggi sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu yang terdapat di kriteria Akses dan Ketersediaan Pendidikan adalah Program Indonesia Pintar. Dengan mendahulukan Program Indonesia Pintar dapat lebih cepat meningkatkan angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

3. Pengeluaran Per Kapita



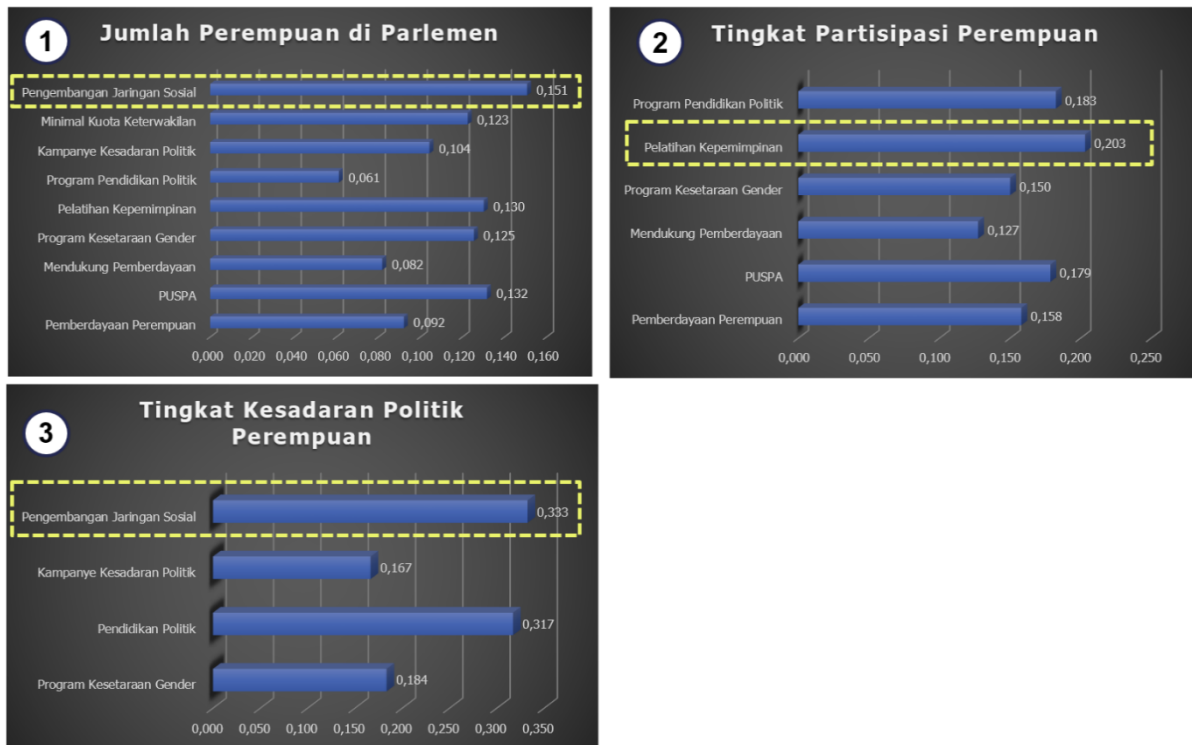
Gambar 4. 62 Kesimpulan Prioritas Alternatif Program Analisis AHP Pengeluaran Per Kapita

Berdasarkan hasil analisis AHP pada Pengeluaran Per Kapita yang sudah dilakukan pada sub bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ❑ Apabila ingin menyetarakan Pengeluaran Per Kapita di Kabupaten Mojokerto dapat mendahulukan program-program yang terdapat pada Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Perempuan yang memiliki angka tertinggi apabila dibandingkan dengan kriteria Kesempatan Kerja Perempuan.
- ❑ Program yang dapat diprioritaskan atau yang memiliki nilai tertinggi sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu yang terdapat di kriteria Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Perempuan adalah program PUSPA (Pemberdayaan Untuk Perempuan dan Anak). Pada kedua kriteria tersebut, PUSPA menjadi program yang memiliki angka paling tinggi dibandingkan dengan program lainnya, sehingga PUSPA tergolong sebagai program yang apabila tetap dilaksanakan dan diprioritaskan akan dapat meningkatkan angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Mojokerto.

4. Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen

KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN



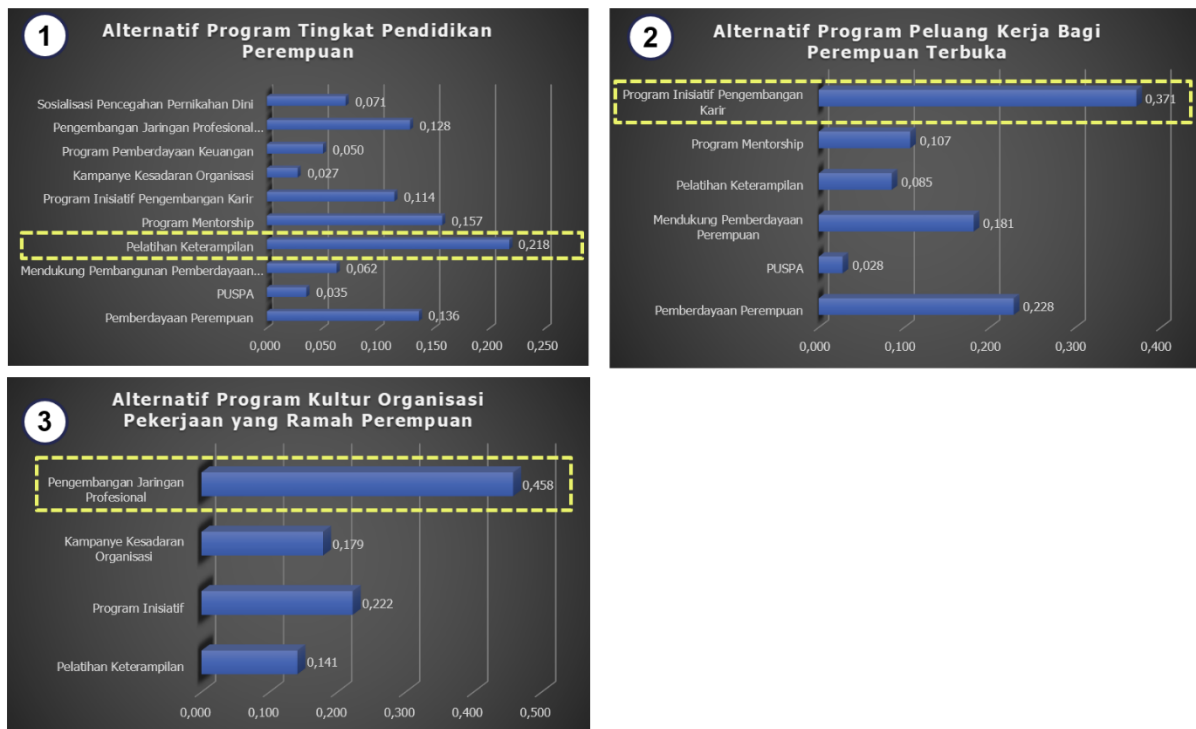
Gambar 4. 63 Kesimpulan Prioritas Alternatif Program Analisis AHP Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen

Berdasarkan hasil analisis AHP pada Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen yang sudah dilakukan pada sub bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ❑ Apabila ingin meningkatkan angka Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen di Kabupaten Mojokerto dapat mendahulukan program-program yang terdapat pada kriteria Jumlah Perempuan dalam Parlemen Tinggi yang memiliki angka tertinggi apabila dibandingkan dengan kriteria lainnya sehingga kriteria tersebut menjadi kriteria nomor 1.
- ❑ Program yang dapat diprioritaskan atau yang memiliki nilai tertinggi sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu yang terdapat di kriteria Jumlah Perempuan dalam Parlemen Tinggi adalah program Pengembangan Jaringan Perempuan. Dengan melaksanakan program Pengembangan Jaringan Perempuan yang tergolong sebagai program prioritas akan dapat meningkatkan angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Mojokerto.

5. Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional

KETERLIBATAN PEREMPUAN SEBAGAI TENAGA PROFESIONAL



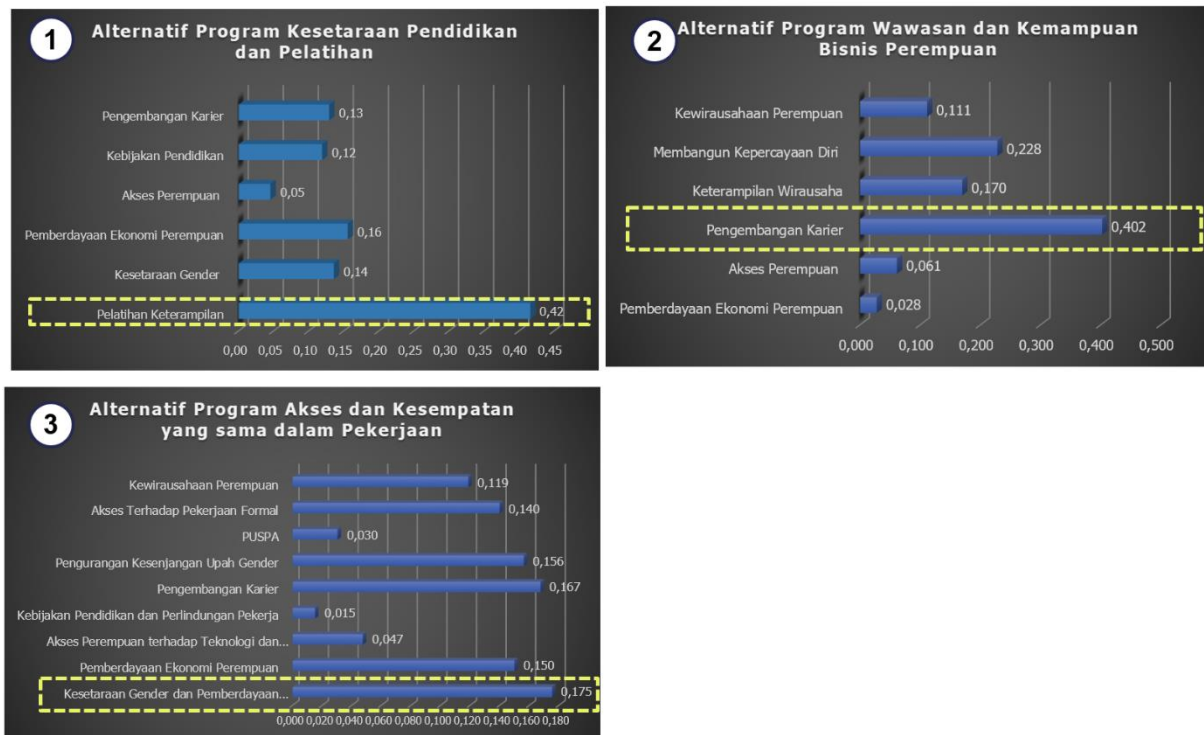
Gambar 4. 64 Kesimpulan Prioritas Alternatif Program Analisis AHP Angka Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional

Berdasarkan hasil analisis AHP pada Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional yang sudah dilakukan pada sub bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ❑ Apabila ingin meningkatkan angka Keterlibatan Perempuan sebagai Tenaga Profesional di Kabupaten Mojokerto dapat mendahulukan program-program yang terdapat pada kriteria Tingkat Pendidikan Perempuan yang memiliki angka tertinggi apabila dibandingkan dengan kriteria lainnya sehingga kriteria tersebut menjadi kriteria nomor 1.
- ❑ Program yang dapat diprioritaskan atau yang memiliki nilai tertinggi sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu yang terdapat di kriteria Tingkat Pendidikan Perempuan adalah Pelatihan Keterampilan pada Perempuan. Dengan melaksanakan program Pelatihan Keterampilan pada Perempuan yang tergolong sebagai program prioritas akan dapat meningkatkan angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Mojokerto.

6. Sumbangan Pendapatan Perempuan

SUMBANGAN PENDAPATAN PEREMPUAN



Gambar 4. 65 Kesimpulan Prioritas Alternatif Program Analisis AHP Sumbangan Pendapatan Perempuan

Berdasarkan hasil analisis AHP pada Sumbangan Pendapatan Perempuan yang sudah dilakukan pada sub bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ❑ Apabila ingin meningkatkan angka Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kabupaten Mojokerto dapat mendahulukan program-program yang terdapat pada kriteria Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan Perempuan yang memiliki angka tertinggi apabila dibandingkan dengan kriteria lainnya sehingga kriteria tersebut menjadi kriteria nomor 1.
- ❑ Program yang dapat diprioritaskan atau yang memiliki nilai tertinggi sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu yang terdapat di kriteria Kesetaraan Pendidikan dan Pelatihan Perempuan adalah Pelatihan Keterampilan pada Perempuan. Dengan melaksanakan program Pelatihan Keterampilan pada Perempuan yang tergolong sebagai program prioritas akan dapat meningkatkan angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Mojokerto.

4.10.2 Penentuan Aktor Utama dalam Pelaksanaan Program Prioritas

Berdasarkan analisis AHP yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya, maka dihasilkan beberapa program-program prioritas dan program pendukung yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 273 Program Prioritas

Program Prioritas	Tujuan	Dinas Utama	Dinas Terkait
Program Kelas Ibu dan Balita	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, merubah sikap dan perilaku ibu hamil tentang Kesehatan balita, gizi dan stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak.	Dinas Kesehatan	- Pemerintah Desa - Lembaga Masyarakat
Persalinan Aman, Sigap	Mempermudah persalinan Ibu Hamil, menjamin kesehatan masyarakat, serta meminimalisir angka kematian ibu dan kematian bayi.	Dinas Kesehatan	- Pemerintah Desa - Lembaga Masyarakat
Sosialisasi Stunting & KB	Meningkatkan pengetahuan masyarakat di Kabupaten Mojokerto tentang Stunting dan penyebab gejalanya, meningkatkan pengetahuan peserta tentang pengendalian Keluarga Berencana.	Dinas Kesehatan	- Pemerintah Desa - Lembaga Masyarakat
Program Indonesia Pintar	Mencegah peserta didik di Kabupaten Mojokerto dari putus sekolah dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya.	Dinas Pendidikan	Dinas Sosial
PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak)	Meningkatkan kemampuan perempuan dan anak untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, dan budaya.	DP2KBP2	- BAPPEDA - Dinsos - Dinas Pendidikan - Dinas Tenaga Kerja - Pemerintah Desa - Lembaga Masyarakat
Pelatihan Keterampilan	Meningkatkan kemampuan kaum perempuan agar mampu berpikir analitik, aktif, inovatif, kreatif, penuh inisiatif,	Dinas Tenaga Kerja	- Pemerintah Desa - Lembaga Masyarakat
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Memperkuat kemampuan perempuan untuk berkembang, mengurangi kemiskinan melalui perentasan pengangguran yang mayoritas terdapat pada perempuan, memberdayakan semua perempuan di Kabupaten Mojokerto.	DP2KBP2	- BAPPEDA - Dinas Sosial - Pemerintah Desa - Lembaga Masyarakat

Program Prioritas	Tujuan	Dinas Utama	Dinas Terkait
Pelayanan Tanggap Manula	Meningkatkan kualitas hidup lansia dan kesejahteraan keseluruhan kelompok lansia, membantu mereka tetap aktif secara sosial dan fisik, serta mengatasi tantangan yang seringkali dihadapi oleh kelompok ini.	Dinas Sosial	• Dinas Kesehatan • DP2KBP2 • Dinas Pendidikan
Beasiswa dan Bantuan Keuangan	Memberikan akses yang lebih merata terhadap Pendidikan atau pelatihan baik Perempuan maupun laki-laki yang memiliki potensi akademis atau keterampilan tetapi menghadapi kendala finansial, dan meningkatkan peluang kesuksesan dalam karir atau kehidupan.	Dinas Pendidikan	• BAPPEDA • Dinas Sosial • Dinas Tenaga Kerja
Pelatihan Kepemimpinan	Meningkatkan keterwakilan dan pengaruh Perempuan dalam proses pembuatan keputusan politik, meningkatkan keterampilan komunikasi dan strategi kampanye, meningkatkan kepercayaan diri dan pengetahuan politik, serta memperkuat kapasitas Perempuan dalam memahami dan terlibat dalam dinamika politik.	DP2KBP2	• Dinas Sosial • Dinas Pendidikan • BAPPEDA
Program Inisiatif Pengembangan Karir	Membantu perempuan anggota parlemen memperluas jejaringnya, memperoleh dukungan, mendapatkan mentor, dan berbagi pengalaman dalam upaya mereka untuk meningkatkan partisipasi dalam parlemen, serta memberi dukungan dalam mempromosikan isu-isu gender.	Dinas Sosial	DP2KBP2
Pengembangan Jaringan Profesional Perempuan	Membantu individu merencanakan, mengembangkan, dan mengelola karir mereka dengan lebih efektif. Meningkatkan produktivitas dan kinerja, meningkatkan kesetaraan dan diversitas serta pencapaian tertinggi dalam karir.	Dinas Tenaga Kerja	• BKPSDM • DP2KBP2 • Dinas Pendidikan • UPT Balai Latihan Kerja/ Lembaga Masyarakat

Tabel 4. 274 Program Pendukung

Program Pendukung	Tujuan	Dinas Utama	Dinas Terkait
Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	Meningkatkan Kesehatan ibu hamil dan bayi yang dikandungnya, mengurangi resiko komplikasi dan kematian yang terjadi pada ibu hamil berisiko tinggi, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan	Dinas Kesehatan	• DP2KBP2 • Dinas Sosial

Program Pendukung	Tujuan	Dinas Utama	Dinas Terkait
	angka harapan hidup secara keseluruhan.		
Program Monitoring Ibu Hamil	Mengurangi risiko komplikasi Kesehatan ibu hamil, meningkatkan akses layanan Kesehatan, mendeteksi dini dan intervensi cepat, meningkatkan pemantauan Kesehatan serta kualitas perawatan Kesehatan.	Dinas Kesehatan	• DP2KBP2 • Dinas Sosial
Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	Memberikan pelatihan dan edukasi kepada tenaga Kesehatan mengenai deteksi dini, penanganan, dan pencegahan asfiksia pada bayi baru lahir untuk mengurangi angka kematian bayi dan meningkatkan angka harapan hidup.	Dinas Kesehatan	Dinas Pendidikan
Gebyar Pemakaian Pil KB	meningkatkan kesadaran dan akses masyarakat terhadap penggunaan pil KB sebagai salah satu metode kontrasepsi yang efektif, sehingga dapat berkontribusi pada penurunan angka kelahiran yang tidak diinginkan dan peningkatan kesehatan ibu dan bayi.	DP2KBP2	• Dinas Kesehatan
Penyuluhan Kesehatan Reproduksi	Memberikan informasi, edukasi, dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kesehatan reproduksi, termasuk aspek-aspek seperti perencanaan keluarga, kontrasepsi, kehamilan yang sehat, pencegahan penyakit menular seksual (PMS), dan pemahaman tentang hak dan kesehatan seksual serta reproduksi.	BKKBN	• Dinas Kesehatan • DP2KBP2
Gratis Sekolah	Memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan merata kepada masyarakat dengan cara menghapuskan atau mengurangi biaya-biaya sekolah yang dapat menjadi hambatan bagi akses pendidikan. Menghilangkan atau mengurangi hambatan biaya Pendidikan dapat mendorong lebih banyak siswa untuk melanjutkan pendidikan mereka lebih lama, serta meningkatkan kualitas pendidikan yang diterima.	Dinas Pendidikan	• Dinas Sosial • DP2KBP2
Ayo Sekolah Rek	Mendorong anak-anak agar lebih antusias dan termotivasi untuk sekolah, dengan menghadirkan	Dinas Pendidikan	• Dinas Sosial • DP2KBP2

Program Pendukung	Tujuan	Dinas Utama	Dinas Terkait
	metode pembelajaran yang lebih menarik dan berbasis pada kegiatan-kegiatan yang menyenangkan.		
Kejar Paket	Memfasilitasi individu-individu yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan atau terhalang untuk bersekolah secara reguler agar tetap memiliki akses ke pendidikan, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan memperluas peluang di berbagai bidang.	Dinas Pendidikan	• Dinas Sosial • DP2KBP2 • Dinas Tenaga Kerja
Perlindungan dan Pemberdayaan ABH	Melindungi hak-hak anak, memberikan perlindungan yang adekuat, dan memberdayakan anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana atau berhadapan dengan hukum. Menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan mendukung bagi anak-anak dalam menghadapi proses hukum.	Dinas Sosial	• Lembaga Bantuan Hukum • DP2KBP2 • Dinas Pendidikan • Dinas Kesehatan
Pemberdayaan Perempuan	Menciptakan kondisi perempuan memiliki kesempatan yang setara dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan, memiliki akses terhadap sumber daya dan peluang yang sama, serta memiliki kontrol atas keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.	Dinas Sosial	• DP2KBP2 • Dinas Tenaga Kerja • Dinas Pendidikan
Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Meningkatkan status, hak, dan kesejahteraan perempuan serta melindungi hak-hak anak, mencapai kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, dan budaya.	Dinas Sosial	• DP2KBP2 • Pemerintah Desa • Lembaga Masyarakat
Kewirausahaan Perempuan Korban KDRT	Memberdayakan perempuan yang telah mengalami KDRT agar mereka dapat mandiri secara ekonomi dan meraih kemandirian secara menyeluruh. Serta Membantu perempuan korban KDRT mengembangkan keterampilan kewirausahaan sehingga mereka dapat memulai usaha sendiri atau terlibat dalam pekerjaan yang memberikan pendapatan yang layak.	Dinas Sosial	• Dinas Tenaga Kerja • DP2KBP2 • Pemerintah Desa • Lembaga Masyarakat

Program Pendukung	Tujuan	Dinas Utama	Dinas Terkait
Kewirausahaan Kecantikan	Mendorong masyarakat perempuan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam industri kecantikan, sehingga mereka dapat memulai usaha sendiri atau bekerja dalam bidang tersebut. Memberikan pelatihan dalam berbagai aspek bisnis, seperti manajemen salon, pemasaran produk kecantikan, dan layanan pelanggan	Dinas Tenaga Kerja	• DP2KBP2 • Pemerintah Desa • Lembaga Masyarakat
Program Pendukung Tambahan	Tujuan	Dinas Utama	Dinas Terkait
Promosi ASI Eksklusif	Meningkatkan pemahaman dan praktik pemberian ASI eksklusif kepada bayi dalam enam bulan pertama kehidupan bayi, Memberikan nutrisi yang optimal kepada bayi dalam enam bulan pertama kehidupan mereka untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Mengurangi risiko infeksi dan penyakit pada bayi, karena ASI mengandung antibodi dan nutrisi penting.	Dinas Kesehatan	• Pemerintah Desa • Lembaga Masyarakat
Kampanye Imunisasi	Melindungi individu dan masyarakat dari penyakit-penyakit infeksi yang dapat dicegah melalui vaksinasi, Mendukung upaya global dalam pemberantasan penyakit tertentu, seperti polio. Dengan mencapai tingkat vaksinasi yang tinggi, penyakit tersebut dapat dieliminasi dari populasi.	Dinas Kesehatan	• Pemerintah Desa • Lembaga Masyarakat
Penyuluhan Gizi Manula	Memberikan informasi dan pengetahuan kepada populasi lansia (manula) dalam rangka meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya menjaga kesehatan dan mendorong gaya hidup sehat di usia lanjut.	Dinas Kesehatan	• Pemerintah Desa • Lembaga Masyarakat
Monitoring Psikologi Manula	Memantau dan mendukung kesejahteraan mental dan emosional orang tua yang telah memasuki usia lanjut.	Dinas Kesehatan	• Pemerintah Desa • Lembaga Masyarakat
Penyuluhan Kesehatan Manula	Memberikan informasi, edukasi, dan keterampilan kepada lansia agar mereka dapat menjalani gaya hidup sehat, menjaga	Dinas Kesehatan	• Pemerintah Desa

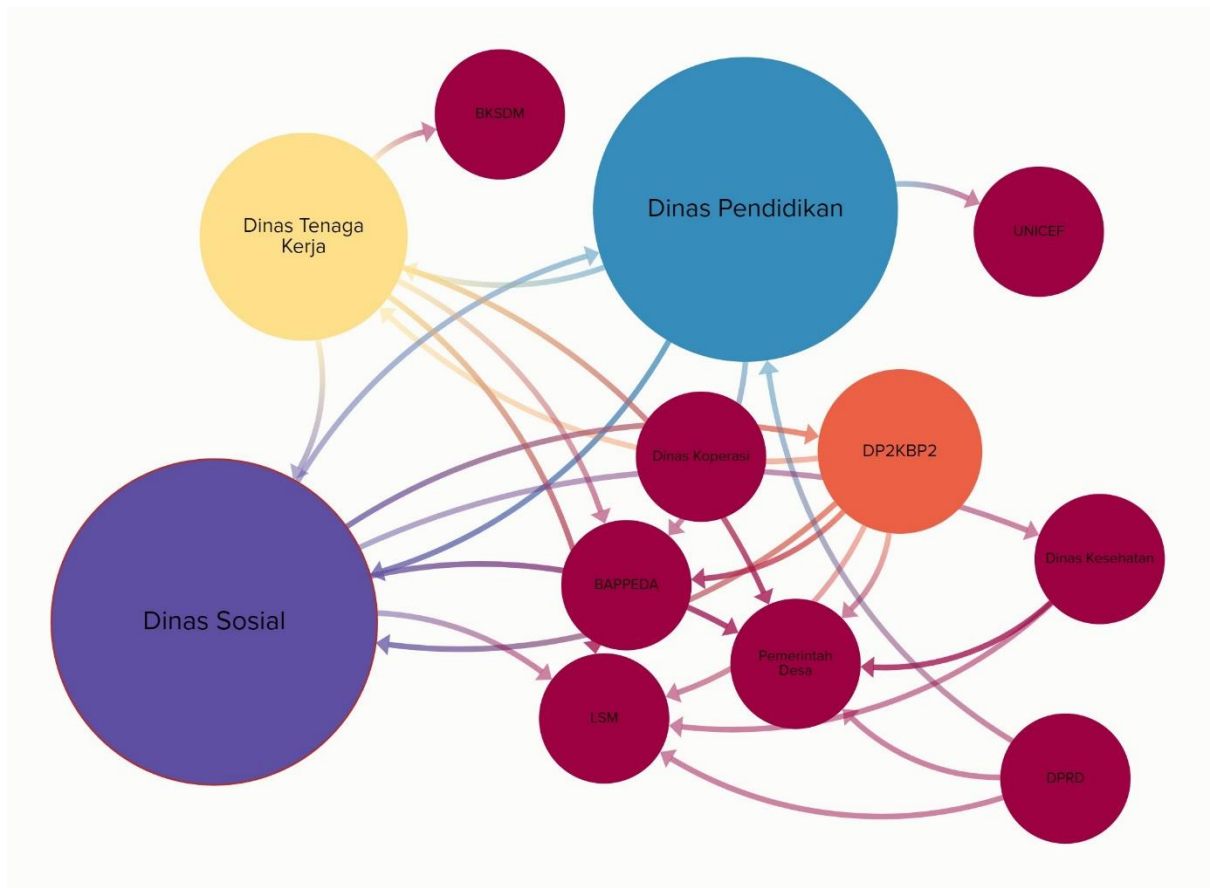
Program Pendukung	Tujuan	Dinas Utama	Dinas Terkait
	kesehatan fisik dan mental, serta mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi di usia lanjut.		Lembaga Masyarakat
Pelatihan Ketrampilan Manula	Meningkatkan kemandirian, kualitas hidup, dan partisipasi aktif lansia dalam berbagai aspek kehidupan	Dinas Kesehatan	- Pemerintah Desa - Lembaga Masyarakat
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan kesempatan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua individu, terutama kelompok yang kurang terlayani.	Dinas Pendidikan	- UNICEF - Lembaga Masyarakat
Sosialisasi Pendidikan Untuk Pencegahan Pernikahan Dini	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, terutama kaum muda, tentang bahaya dan dampak negatif pernikahan dini, serta mengedukasi mereka tentang pentingnya mendapatkan pendidikan yang berkualitas sebelum menikah.	DP2KBP2	- Dinas Pendidikan - Pemerintah Desa - Lembaga Masyarakat
Teknologi dalam Pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan dunia modern, serta meningkatkan efektivitas pembelajaran.	Dinas Pendidikan	- UNICEFF - Lembaga Masyarakat
Jaringan dan Monitoring	Memberikan dukungan, melindungi hak-hak, dan meningkatkan kesejahteraan perempuan melalui pembentukan jaringan, pengawasan, dan pelaporan terkait isu-isu yang berkaitan dengan gender dan hak-hak perempuan.	Dinas Sosial	- DP2KBP2 - Pemerintah Desa - Lembaga Masyarakat
Akses Terhadap Layanan Perawatan	Memastikan bahwa individu, terutama kelompok yang rentan, memiliki akses yang merata dan adil terhadap layanan perawatan kesehatan yang berkualitas.	DP2KBP2	- Pemerintah Desa - Lembaga Masyarakat
Program Pendidikan Politik/Hukum	Meningkatkan partisipasi, pengetahuan, keterampilan, dan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan pengambilan keputusan.	DPRD	- Dinas Pendidikan - Pemerintah Desa - Lembaga Masyarakat
Kampanye Kesadaran Politik/Hukum	Menginformasikan, membudayakan, dan membangkitkan kesadaran politik di kalangan perempuan. Kampanye semacam ini bertujuan untuk mendorong	DPRD	- Dinas Pendidikan - Pemerintah Desa

Program Pendukung	Tujuan	Dinas Utama	Dinas Terkait
	partisipasi aktif, keterlibatan, dan pengaruh perempuan dalam proses politik dan pengambilan keputusan.		• Lembaga Masyarakat
Minimal Kuota Keterwakilan	Mendorong partisipasi aktif perempuan dalam politik, kepemimpinan, dan berbagai bidang profesional, memastikan bahwa perempuan memiliki representasi yang setara dan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam kebijakan publik, lembaga pemerintahan, dan organisasi.	DPRD	• Pemerintah Desa • Lembaga Masyarakat
Program Mentorship	Membantu perempuan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin mereka hadapi dalam mencapai kesuksesan di dunia kerja dan memastikan bahwa mereka memiliki peluang yang setara dengan rekan laki-laki mereka.	Dinas Tenaga Kerja	• DP2KBP2 • Dinas Pendidikan • Dinas Koperasi dan Usaha Mikro LSM
Program Pemberdayaan Keuangan	Memberikan perempuan akses, pemahaman, dan keterampilan dalam mengelola keuangan pribadi dan profesional mereka dengan baik. Mendorong keterlibatan dan kesuksesan perempuan sebagai tenaga profesional di berbagai sektor dan bidang pekerjaan.	Dinas Sosial	• Dinas Pendidikan • Dinas Koperasi dan Usaha Mikro • LSM • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kampanye Kesadaran Organisasi	Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, tentang pentingnya partisipasi aktif dan sukses perempuan di berbagai bidang profesional.	Dinas Komunikasi dan Informatika	• DP2KBP2 • Dinas Sosial • LSM • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Pekerja	Memberikan perempuan akses yang lebih baik ke pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan yang aman dan layak, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang meningkatkan potensi pendapatan mereka.	Dinas Tenaga Kerja	• DP2KBP2 • Dinas Sosial • LSM • Dinas Pendidikan
Akses Perempuan terhadap Teknologi dan Pasar Online	Mengatasi kesenjangan gender dalam akses dan pemanfaatan teknologi serta memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan bisnis online, mengakses informasi, dan	Dinas Sosial	• DP2KBP2 • Dinas Komunikasi dan Informatika • Dinas Perindustrian

Program Pendukung	Tujuan	Dinas Utama	Dinas Terkait
	berpartisipasi dalam inovasi digital.		dan perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha
Membangun Kepercayaan Diri Perempuan dalam Bisnis	Memberikan dukungan, keterampilan, dan motivasi kepada perempuan agar mereka merasa lebih percaya diri dalam mengembangkan dan menjalankan bisnis.	Dinas Tenaga Kerja	• DP2KBP2 • Dinas Koperasi dan Usaha - Dinas Sosial
Keterampilan Wirausaha	Memberikan perempuan keterampilan dan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka sendiri dan meningkatkan pendapatan secara signifikan, dan memiliki peran yang lebih aktif dalam ekonomi lokal maupun global.	Dinas Tenaga Kerja	• DP2KBP2 - Dinas Koperasi dan Usaha
Pengurangan Kesenjangan Upah Gender	Mengatasi diskriminasi upah berdasarkan jenis kelamin, memastikan bahwa perempuan diberi kompensasi yang setara dengan laki-laki atas pekerjaan yang setara, dan mendorong lingkungan kerja yang adil dan inklusif.	Dinas Tenaga Kerja	• DP2KBP2 • Dinas Koperasi dan Usaha - UPT Balai Latihan Kerja
Akses Terhadap Pekerjaan Formal	Meningkatkan penghasilan perempuan secara signifikan dengan cara memberikan mereka kesempatan untuk bekerja dalam pekerjaan formal yang memiliki gaji yang kompetitif dan kondisi kerja yang menguntungkan.	Dinas Tenaga Kerja	• DP2KBP2 • Dinas Koperasi dan Usaha - UPT Balai Latihan Kerja

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan analisis diatas diketahui bahwa masing-masing program kerja untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) masing-masing telah memiliki instansi utama yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakannya. Salah satu contohnya adalah program prioritas utama terkait Program Kelas Ibu dan Balita yang memiliki tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, merubah sikap dan perilaku ibu hamil tentang Kesehatan balita, gizi dan stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak, akan dilaksanakan oleh instansi berwenang yakni Dinas Kesehatan. Adapun berikut merupakan rangkuman dari penentuan aktor utama dan pendukung dari masing-masing program yang dilakukan melalui Analisis Social Network Analysis (SNA).



Gambar 4. 66 Graph Penentuan Aktor Utama melalui Social Network Analyst (SNA)

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan analisis diatas diketahui bahwa Aktor Utama dari Program-Program diatas terdapat pada Dinas Sosial. Dinas sosial menjadi aktor utama dalam program-programnya dinas sosial memiliki kepada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dimana mereka berperan dalam memberikan akses ke layanan sosial dan dukungan bagi perempuan yang terpinggirkan, termasuk korban kekerasan, trafficking, dan eksploitasi. Dinas Sosial juga terlibat dalam program-program yang bertujuan mengatasi kekerasan berbasis gender, seperti KDRT dan pelecehan seksual. Ini penting dalam meningkatkan keamanan dan kesejahteraan perempuan. Dinas Sosial memberikan layanan kesejahteraan sosial kepada kelompok yang rentan, termasuk perempuan dan anak-anak, melalui pemberian bantuan finansial, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan layanan lainnya. Dinas Sosial juga seringkali mengadakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan perempuan, termasuk keterampilan ekonomi. Sehingga banyak sekali program yang berkaitan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Gender menjadikan Dinas Sosial sebagai aktor utama yang didukung oleh Instansi lainnya seperti Dinas Pendidikan

untuk mengentaskan terkait permasalahan pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Bappeda sebagai pengawas serta instansi lainnya yang terkait. Sehingga para instansi harus bekerja sama untuk dapat meningkatkan angka Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Mojokerto. Dikarenakan Kerja sama antara berbagai instansi atau dinas merupakan kunci untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) secara holistik dan efektif. Setiap instansi atau dinas memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam mempengaruhi aspek pembangunan gender. Dengan bekerja sama, mereka dapat menggabungkan kekuatan dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.

4.10.3 Strategi Inovatif/Strategi Lainnya Dalam Peningkatan Kesetaraan Gender yang dapat diaplikasikan di Kabupaten Mojokerto

Berikut merupakan beberapa strategi yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Mojokerto.

- a) Penguatan komitmen baik pada pemerintahan maupun masyarakat di Kabupaten Mojokerto.
- b) Penguatan kebijakan terutama pada kebijakan yang mengatur terkait kesetaraan gender dan kebijakan yang meminimalisir pernikahan dini di Kabupaten Mojokerto.
- c) Penguatan kelembagaan, baik pada lembaga pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan di Kabupaten Mojokerto.
- d) Penguatan sumber daya manusia dan anggaran di Kabupaten Mojokerto.
- e) Penguatan partisipasi masyarakat di Kabupaten Mojokerto.
- f) Teknologi Kesehatan Digital: Memanfaatkan kemajuan teknologi kesehatan digital, seperti telemedicine dan aplikasi kesehatan, untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Ini memungkinkan pendeteksian dini penyakit, pemantauan kondisi kesehatan secara real-time, dan konsultasi medis jarak jauh, yang dapat membantu mencegah dan mengelola penyakit dengan lebih efektif.
- g) Pendidikan Kesehatan Berbasis Teknologi: Menggunakan teknologi, seperti video pembelajaran interaktif, aplikasi pendidikan kesehatan, dan platform online, untuk menyediakan informasi kesehatan yang mudah diakses dan

dipahami oleh masyarakat. Ini dapat meningkatkan literasi kesehatan, kesadaran akan praktik kesehatan yang baik, dan pencegahan penyakit.

- h) Penggunaan Data dan Analitik Kesehatan: Memanfaatkan analitik kesehatan dan big data untuk mengidentifikasi pola dan tren kesehatan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan menggunakan data kesehatan secara efektif, pemerintah dan organisasi kesehatan dapat merencanakan intervensi yang lebih efektif, memprioritaskan sumber daya, dan meningkatkan pemantauan dan evaluasi program kesehatan.
- i) Kolaborasi Antar-Sektor: Mendorong kolaborasi antara sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan, infrastruktur, dan sektor lainnya untuk menciptakan pendekatan yang holistik dalam meningkatkan harapan hidup. Dalam melawan penyakit, misalnya, kolaborasi antara sektor kesehatan dan lingkungan dapat membantu mengatasi faktor risiko lingkungan yang berdampak pada kesehatan.
- j) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan: Memperkuat kualitas pelayanan kesehatan melalui pelatihan dan pengembangan tenaga medis, perbaikan infrastruktur kesehatan, dan peningkatan manajemen rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan akan meningkatkan keselamatan pasien, akurasi diagnosis, dan efektivitas pengobatan.
- k) Pendekatan Holistik dalam Kesehatan Mental: Mengakui pentingnya kesehatan mental dan memperkuat layanan kesehatan mental dalam sistem kesehatan. Ini melibatkan integrasi layanan kesehatan mental dalam perawatan primer, pendidikan tentang kesehatan mental, dukungan psikososial, dan pengurangan stigma terkait dengan masalah kesehatan mental.
- l) Kebijakan Publik Progresif: Mengembangkan kebijakan publik yang progresif dan berfokus pada upaya pencegahan penyakit, aksesibilitas pelayanan kesehatan, pengendalian polusi, peningkatan akses ke air bersih dan sanitasi, serta promosi gaya hidup sehat

Adapun berikut merupakan beberapa strategi lain yang dapat diaplikasikan di Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut.

STRATEGI PENINGKATAN HARAPAN & RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Terdapat beberapa strategi inovatif yang dapat meningkatkan harapan lama sekolah anak perempuan. Berikut adalah beberapa contoh strategi tersebut:

NO	STRATEGI	OPD penanggungjawab	OPD pendukung
1	Pendidikan Komprehensif tentang Kesehatan Reproduksi: Mengintegrasikan pendidikan tentang kesehatan reproduksi, hak-hak perempuan, dan konsekuensi pernikahan dini ke dalam kurikulum sekolah. Menyediakan informasi yang akurat dan terperinci tentang pentingnya pendidikan, perkawinan yang sehat, dan kesadaran akan hak-hak mereka dapat membantu anak perempuan mengambil keputusan yang berdaya dan menunda pernikahan	Dinas Pendidikan	Dinas Kesehatan Dinas Sosial Dinas Pendidikan Dp2kbp2 LPMD
2	Program Pendidikan Keterampilan dan Kesempatan Ekonomi: Menyediakan program pendidikan keterampilan dan pelatihan yang memungkinkan anak perempuan untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja. Memberikan kesempatan ekonomi kepada anak perempuan dapat meningkatkan mandiri mereka secara finansial dan memberikan motivasi untuk mengejar karier sebelum memikirkan pernikahan	Dinas Pendidikan	Dinas Sosial disnaker Dp2kbp2 LPMD
3	Advokasi dan Pengaruh Sosial: Melakukan kampanye advokasi dan sosialisasi di tingkat masyarakat untuk mengubah norma dan budaya yang mendukung pernikahan dini. Melibatkan pemimpin masyarakat, tokoh agama, dan kelompok-kelompok masyarakat dalam memberikan dukungan dan menyampaikan pesan yang kuat tentang pentingnya pendidikan dan penundaan pernikahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Disnaker Dp2kbp2 LPMD
4	Pemberdayaan Perempuan: Memberikan dukungan dan pelatihan khusus kepada anak perempuan untuk memperkuat kemandirian mereka dan meningkatkan kesadaran diri. Ini meliputi pengembangan keterampilan kepemimpinan, pelatihan keterampilan hidup, dan peningkatan pemahaman tentang hak-hak mereka sebagai perempuan	Dinas Sosial	Dinas Tenaga Kerja Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dp2kbp2 LPMD
5	Pendekatan Keluarga dan Komunitas: Melibatkan keluarga dan komunitas dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada orang tua dan keluarga tentang pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi, dan pernikahan yang sehat. Mendorong keluarga untuk mendukung anak perempuan mereka dalam mengejar pendidikan dan meraih impian mereka	Dp2kbp2	Kelurahan Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan

NO	STRATEGI	OPD penanggungjawab	OPD pendukung
6	Layanan Kesehatan yang Ramah Remaja: Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan yang ramah remaja, termasuk layanan kesehatan reproduksi, konseling, dan informasi tentang kontrasepsi. Dengan menyediakan layanan yang terjangkau, mudah diakses, dan bebas dari stigma, anak perempuan dapat mendapatkan bantuan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk menjaga kesehatan reproduksi dan menunda pernikahan	Dinas Kesehatan	Dinas Tenaga Kerja Dinas Sosial Dinas Pendidikan Dp2kbp2 LPMD
7	Kampanye Media Sosial dan Digital: Memanfaatkan kekuatan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi tentang dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya pendidikan. Melalui kampanye yang kreatif dan berfokus pada anak muda, pesan-pesan ini dapat mencapai audiens yang lebih luas dan menginspirasi perubahan. Kampanye ini dapat menyoroti kisah-kisah inspiratif perempuan yang telah berhasil menunda pernikahan dan mencapai prestasi melalui pendidikan	Dinas Pendidikan	Dinas Sosial Kelurahan
8	Kolaborasi dengan Komunitas dan Pemimpin Lokal: Melibatkan komunitas dan pemimpin lokal dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Dengan bekerja sama dengan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan kelompok masyarakat, dapat dilakukan advokasi, kampanye sosial, dan program penyuluhan yang bertujuan mengubah norma dan budaya yang mendukung pernikahan dini	Kelurahan/Kades/ Kecamatan	LPMD
9	Penguatan Sistem Hukum: Meningkatkan perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap pernikahan dini. Mendorong pengesahan dan penguatan undang-undang yang melarang pernikahan anak di bawah umur, serta memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hukum terkait pernikahan dini	Pemerintah Kabupaten	Dinas Kesehatan Dinas Tenaga Kerja Dinas Sosial Dinas Pendidikan Dp2kbp2 LPMD
10	Program Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi: Mengembangkan program kesejahteraan sosial dan ekonomi yang mendukung keluarga dan perempuan yang rentan terhadap pernikahan dini. Ini dapat mencakup pemberian bantuan finansial, pelatihan keterampilan, bantuan kesehatan, dan program pengembangan ekonomi untuk mendorong kemandirian ekonomi perempuan	Dinas Sosial	Dp2kbp2 Disnaker
11	Program beasiswa dan bantuan pendidikan: Mengembangkan program beasiswa dan bantuan pendidikan khusus untuk anak perempuan dari keluarga yang kurang mampu dapat membantu mengurangi beban finansial dan mendorong mereka untuk tetap bersekolah. Program ini dapat mencakup biaya pendidikan, buku teks, seragam sekolah, transportasi, atau bantuan kebutuhan sehari-hari	Dinas Pendidikan	Dinsos
12	Membangun fasilitas pendidikan yang inklusif: Membangun fasilitas pendidikan yang ramah perempuan, seperti toilet terpisah untuk perempuan, ruang menyusui, dan aksesibilitas yang memadai, dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung bagi anak perempuan untuk belajar	Dinas Pendidikan	Bappeda

NO	STRATEGI	OPD penanggungjawab	OPD pendukung
13	Pelatihan dan dukungan bagi keluarga dan masyarakat: Memberikan pelatihan kepada keluarga dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak perempuan serta menghilangkan stereotip gender yang membatasi harapan mereka. Dukungan ini dapat melibatkan sesi informasi, diskusi, dan workshop yang membahas manfaat dan peluang pendidikan bagi anak perempuan	Dinsos	Dp2kbp2 Kelurahan
14	Pemberdayaan perempuan dan peran model: Membangun program yang mendorong pemberdayaan perempuan dan menciptakan peran model yang menginspirasi dapat membantu meningkatkan harapan lama sekolah anak perempuan. Ini bisa dilakukan melalui mentoring, pelatihan kepemimpinan, program role model, dan pengenalan perempuan sukses yang berkarier di bidang-bidang yang terkait dengan pendidikan	Disnaker	Kelurahan PKK Balai pelatihan
15	Penggunaan teknologi pendidikan: Memanfaatkan teknologi pendidikan seperti e-learning, pembelajaran online, dan aplikasi mobile dapat memberikan akses yang lebih luas dan fleksibel bagi anak perempuan. Dengan menggunakan teknologi ini, anak perempuan dapat belajar di luar lingkungan sekolah, mengakses materi pembelajaran yang relevan, dan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan digital	Dinas Pendidikan	Kelurahan
16	Pendekatan komprehensif dan holistik: Mengadopsi pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, dapat memperkuat upaya meningkatkan harapan lama sekolah anak perempuan. Pendekatan ini harus melibatkan penghapusan diskriminasi gender, perubahan norma dan budaya, peningkatan kualitas pendidikan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif semua pihak terkait.	Dinsos	Kelurahan PKK



STRATEGI PENINGKATAN USIA HARAPAN HIDUP & PENGELUARAN PER KAPITA

Terdapat beberapa strategi inovatif yang dapat meningkatkan Umur Harapan Hidup Perempuan. Peningkatan Usia Harapan Hidup di antaranya adalah kepada Manula dan kepada Berikut adalah beberapa contoh strategi tersebut:

Faktor Penyebab	STRATEGI	OPD penanggungjawab	OPD pendukung
Kesehatan dan Nutrisi	Fokus pada upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan secara menyeluruh. Ini meliputi akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan dasar, vaksinasi, perawatan prenatal dan natal, perawatan kesehatan reproduksi, serta kampanye edukasi tentang pola makan sehat dan gizi yang tepat.	Dinkes	Kelurahan, Lembaga Kelurahan (PKK)
Kualitas Kesehatan Penduduk Usia Manula	Program Kesehatan Manula Terintegrasi: Mengembangkan program kesehatan yang terintegrasi khusus untuk populasi manula, dengan fokus pada pencegahan penyakit, pemantauan kesehatan secara teratur, pengelolaan penyakit kronis, dan perawatan jangka panjang. Program ini harus melibatkan berbagai sektor, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial	Dinkes	Kelurahan, Lembaga Kelurahan (PKK)
Pendidikan Kesehatan	Mengimplementasikan program pendidikan kesehatan yang efektif untuk anak perempuan, termasuk edukasi tentang kebersihan, sanitasi, penyakit menular, dan praktik kesehatan yang sehat. Hal ini dapat dilakukan melalui sekolah, pusat masyarakat, dan media sosial.	Dinas Pendidikan	Dinkes
Pengembangan ekonomi Masyarakat	Pengurangan Kemiskinan: Mengimplementasikan program yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Ini melibatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, akses ke peluang kerja yang layak, dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan melalui pelatihan, kredit usaha mikro, dan program bantuan ekonomi	Disnaker	Dp2kbp2
Akses Pelayanan kesehatan	Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Memastikan akses yang mudah dan terjangkau terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk layanan keluarga berencana, pemeriksaan kehamilan, dan perawatan kehamilan yang adekuat. Ini melibatkan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perawatan kesehatan reproduksi dan mengurangi stigma terkait dengan masalah-masalah tersebut	Dinkes	Dp2kbp2



STRATEGI INNOVATIF PENINGKATAN USIA HARAPAN HIDUP

Faktor Penyebab	STRATEGI	OPD penanggungjawab
Teknologi Kesehatan Digital	Memanfaatkan kemajuan teknologi kesehatan digital, seperti telemedicine dan aplikasi kesehatan, untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Ini memungkinkan pendeteksian dini penyakit, pemantauan kondisi kesehatan secara real-time, dan konsultasi medis jarak jauh, yang dapat membantu mencegah dan mengelola penyakit dengan lebih efektif	Dinkes
Pendidikan Kesehatan Berbasis Teknologi	Menggunakan teknologi, seperti video pembelajaran interaktif, aplikasi pendidikan kesehatan, dan platform online, untuk menyediakan informasi kesehatan yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Ini dapat meningkatkan literasi kesehatan, kesadaran akan praktik kesehatan yang baik, dan pencegahan penyakit	Dinas Pendidikan
Penggunaan Data dan Analitik Kesehatan	Memanfaatkan analitik kesehatan dan big data untuk mengidentifikasi pola dan tren kesehatan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan menggunakan data kesehatan secara efektif, pemerintah dan organisasi kesehatan dapat merencanakan intervensi yang lebih efektif, memprioritaskan sumber daya, dan meningkatkan pemantauan dan evaluasi program kesehatan	Dinkes, Pemerintah Daerah
Kolaborasi Antar-Sektor	Mendorong kolaborasi antara sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan, infrastruktur, dan sektor lainnya untuk menciptakan pendekatan yang holistik dalam meningkatkan harapan hidup. Dalam melawan penyakit, misalnya, kolaborasi antara sektor kesehatan dan lingkungan dapat membantu mengatasi faktor risiko lingkungan yang berdampak pada kesehatan	Dinkes, Dinas Pendidikan, dinas Sosial,
Kebijakan Publik Progresif	Mengembangkan kebijakan publik yang progresif dan berfokus pada upaya pencegahan penyakit, aksesibilitas pelayanan kesehatan, pengendalian polusi, peningkatan akses ke air bersih dan sanitasi, serta promosi gaya hidup sehat	Dinkes dan Dinas Sosial

Lampiran

Responden 1 Bidang Kesehatan Masyarakat-Dinas Kesehatan

Tabel 4. 275 Analisis AHP Perbandingan Berpasaran Kriteria Angka Harapan Hidup (AHH)

Unsur	Keterangan				Nilai λ				Jumlah Nilai λ	Rata-rata
	Resiko Kematian Bayi	Resiko Kematian Ibu	Kesehatan Reproduksi Ibu	Kualitas Hidup Manula	Resiko Kematian Bayi	Resiko Kematian Ibu	Kesehatan Reproduksi Ibu	Kualitas Hidup Manula		
Resiko Kematian Bayi	1	0,33	3,00	3,00	0,214	0,125	0,375	0,500	1,214	0,30
Resiko Kematian Ibu	3,00	1	3,00	1,00	0,643	0,375	0,375	0,167	1,560	0,39
Kesehatan Reproduksi Ibu	0,33	0,33	1	1,00	0,071	0,375	0,125	0,167	0,738	0,18
Kualitas Hidup Manula	0,33	1,00	1,00	1	0,071	0,375	0,125	0,167	0,738	0,18
Jumlah	4,67	2,67	8,00	6,00					3,512	1

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Responden 2 Bidang Kesehatan Masyarakat-Dinas Kesehatan

Tabel 4. 276 Analisis AHP Perbandingan Berpasaran Kriteria Angka Harapan Hidup (AHH)

Unsur	Keterangan				Nilai λ				Jumlah Nilai λ	Rata-rata
	Resiko Kematian Bayi	Resiko Kematian Ibu	Kesehatan Reproduksi Ibu	Kualitas Hidup Manula	Resiko Kematian Bayi	Resiko Kematian Ibu	Kesehatan Reproduksi Ibu	Kualitas Hidup Manula		
Resiko Kematian Bayi	1	0,33	5,00	3,00	0,221	0,125	0,500	0,500	1,346	0,34
Resiko Kematian Ibu	3,00	1	3,00	1,00	0,662	0,375	0,300	0,167	1,503	0,38
Kesehatan Reproduksi Ibu	0,20	0,33	1	1,00	0,074	0,375	0,100	0,167	0,715	0,18
Kualitas Hidup Manula	0,33	1,00	1,00	1	0,074	0,375	0,100	0,167	0,715	0,18



Jumlah	4,53	2,67	10,00	6,00		3,564	1
--------	------	------	-------	------	--	-------	---

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Unsur Risiko Kematian Bayi

Responden 1 Bidang Kesehatan Masyarakat-Dinas Kesehatan

Tabel 4. 277 Analisis AHP Perbandingan Berpasaran Unsur Risiko Kematian Bayi

Unsur	Keterangan							
	Program Monitoring Ibu Hamil	Program Kelas Ibu & Balita	Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	Persalinan Aman, Sigap	Sosialisasi Stunting & KB	Promosi ASI Eksklusif	Kampanye Imunisasi
Program Monitoring Ibu Hamil	1	1,00	1	9,00	0,33	3,00	1,00	1,00
Program Kelas Ibu & Balita	1	1	9	0,14	1,00	5	0,14	5
Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	1,00	0,11	1	3	0,33	0,20	3	3
Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	0,11	7	0,33	1	0,20	1,00	7	1
Persalinan Aman, Sigap	3	1	3	5	1	9	1,00	0,33
Sosialisasi Stunting & KB	0,33	0,20	5	1	0,11	1	0,14	0,33
Promosi ASI Eksklusif	1	7	0,33	0,14	1	7	1	1
Kampanye Imunisasi	1	0,20	0,33	1,00	3	3	1,00	1
Jumlah	8,44	17,51	20,00	20,29	6,98	29,20	14,286	12,667

Lanjutan Tabel

Nilai λ								Jumlah Nilai λ	Rata-rata
Program Monitoring Ibu Hamil	Program Kelas Ibu & Balita	Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	Persalinan Aman, Sigap	Sosialisasi Stunting & KB	Promosi ASI Eksklusif	Kampanye Imunisasi		
0,12	0,06	0,05	0,44	0,05	0,10	0,07	0,08	0,969	0,121
0,12	0,06	0,45	0,01	0,14	0,17	0,01	0,39	1,352	0,169
0,12	0,01	0,05	0,15	0,05	0,01	0,21	0,24	0,824	0,103
0,01	0,40	0,02	0,05	0,03	0,03	0,49	0,08	1,111	0,139
0,36	0,06	0,15	0,25	0,14	0,31	0,07	0,03	1,357	0,170
0,04	0,01	0,25	0,05	0,02	0,03	0,01	0,03	0,437	0,055
0,12	0,40	0,02	0,01	0,14	0,24	0,07	0,08	1,074	0,134
0,12	0,01	0,02	0,05	0,43	0,10	0,07	0,08	0,877	0,110
									1,00

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Responden 2 Bidang Kesehatan Masyarakat-Dinas Kesehatan

Tabel 4. 278 Analisis AHP Perbandingan Berpasaranan Unsur Risiko Kematian Bayi

Unsur	Keterangan							
	Program Monitoring Ibu Hamil	Program Kelas Ibu & Balita	Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	Persalinan Aman, Sigap	Sosialisasi Stunting & KB	Promosi ASI Eksklusif	Kampanye Imunisasi
Program Monitoring Ibu Hamil	1	1,00	0	9,00	0,33	3,00	1,00	1,00
Program Kelas Ibu & Balita	3	1	9	0,14	1,00	5	0,14	5
Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	1,00	0,11	1	3	0,33	0,20	3	3
Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	0,11	7	0,33	1	0,20	1,00	7	1
Persalinan Aman, Sigap	3	1	3	5	1	9	1,00	0,33



Sosialisasi Stunting & KB	0,33	0,20	5	1	0,11	1	0,14	0,33
Promosi ASI Eksklusif	1	7	0,33	0,14	1	7	1	1
Kampanye Imunisasi	1	0,20	0,33	1,00	3	3	1,00	1
Jumlah	10,44	17,51	19,33	20,29	6,98	29,20	14,286	12,667

Lanjutan Tabel

Nilai λ								Jumlah Nilai λ	Rata-rata
Program Monitoring Ibu Hamil	Program Kelas Ibu & Balita	Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	Persalinan Aman, Sigap	Sosialisasi Stunting & KB	Promosi ASI Eksklusif	Kampanye Imunisasi		
0,10	0,06	0,02	0,44	0,05	0,10	0,07	0,08	0,10	0,06
0,29	0,06	0,47	0,01	0,14	0,17	0,01	0,39	0,29	0,06
0,10	0,01	0,05	0,15	0,05	0,01	0,21	0,24	0,10	0,01
0,01	0,40	0,02	0,05	0,03	0,03	0,49	0,08	0,01	0,40
0,29	0,06	0,16	0,25	0,14	0,31	0,07	0,03	0,29	0,06
0,03	0,01	0,26	0,05	0,02	0,03	0,01	0,03	0,03	0,01
0,10	0,40	0,02	0,01	0,14	0,24	0,07	0,08	0,10	0,40
0,10	0,01	0,02	0,05	0,43	0,10	0,07	0,08	0,10	0,01
									1,00

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Unsur Resiko Kematian Ibu

Responden 1 Bidang Kesehatan Masyarakat-Dinas Kesehatan

Tabel 4. 279 Analisis AHP Perbandingan Berpasaran Unsur Risiko Kematian Ibu

Unsur	Keterangan					
	Program Monitoring Ibu Hamil	Program Kelas Ibu & Balita	Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	Persalinan Aman, Sigap	Sosialisasi Stunting & KB

Program Monitoring Ibu Hamil	1	1,00	3	0,33	1,00	0,33
Program Kelas Ibu & Balita	0,33	1	3	1,00	1,00	1,00
Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	0,33	0,33	1	1	1,00	1,00
Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	3,00	1	1,00	1	0,33	1,00
Persalinan Aman, Sigap	1	1	1	3	1	1
Sosialisasi Stunting & KB	3,00	1,00	1,00	0,33	1,00	1
Jumlah	8,67	5,33	10,00	6,67	5,33	5,33

Lanjutan Tabel

Nilai λ						Jumlah Nilai λ	Rata-rata
Program Monitoring Ibu Hamil	Program Kelas Ibu & Balita	Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	Persalinan Aman, Sigap	Sosialisasi Stunting & KB		
0,12	0,19	0,30	0,05	0,19	0,06	0,903	0,150
0,04	0,19	0,30	0,15	0,19	0,19	1,051	0,175
0,04	0,06	0,10	0,15	0,19	0,19	0,726	0,121
0,35	0,19	0,10	0,15	0,06	0,19	1,034	0,172
0,12	0,19	0,10	0,45	0,19	0,19	1,228	0,205
0,35	0,19	0,10	0,05	0,19	0,19	1,059	0,176
							1,00

Responden 2 Bidang Kesehatan Masyarakat-Dinas Kesehatan

Tabel 4. 280 Analisis AHP Perbandingan Berpasaran Unsur Risiko Kematian Ibu

Unsur	Keterangan					
	Program Monitoring Ibu Hamil	Program Kelas Ibu & Balita	Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	Persalinan Aman, Sigap	Sosialisasi Stunting & KB



Program Monitoring Ibu Hamil	1	3,00	1	1,00	1,00	0,33
Program Kelas Ibu & Balita	0,33	1	3	1,00	1,00	1,00
Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	1,00	0,33	1	1	1,00	1,00
Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	1,00	1	1,00	1	0,33	1,00
Persalinan Aman, Sigap	1	1	1	3	1	1
Sosialisasi Stunting & KB	3,00	1,00	1,00	0,33	1,00	1
Jumlah	7,33	7,33	8,00	7,33	5,33	5,33

Lanjutan Tabel

Nilai λ						Jumlah Nilai λ	Rata-rata
Program Monitoring Ibu Hamil	Program Kelas Ibu & Balita	Penyuluhan Nakes terkait Asfiksia	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	Persalinan Aman, Sigap	Sosialisasi Stunting & KB		
0,14	0,41	0,13	0,14	0,19	0,06	1,057	0,176
0,05	0,14	0,38	0,14	0,19	0,19	1,068	0,178
0,14	0,05	0,13	0,14	0,19	0,19	0,818	0,136
0,14	0,14	0,13	0,14	0,06	0,19	0,784	0,131
0,14	0,14	0,13	0,41	0,19	0,19	1,182	0,197
0,41	0,14	0,13	0,05	0,19	0,19	1,091	0,182
							1,00



Unsur Tingkat Kesehatan Reproduksi

Responden 1 Bidang Kesehatan Masyarakat-Dinas Kesehatan

Tabel 4. 281 Analisis AHP Perbandingan Berpasaran Unsur Tingkat Kesehatan Reproduksi

Unsur	Keterangan			Nilai λ			Jumlah Nilai λ	Rata-rata
	Sosialisasi Stunting dan KB	Gebyar Pemakaian Pil KB	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi	Sosialisasi Stunting dan KB	Gebyar Pemakaian Pil KB	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi		
Sosialisasi Stunting dan KB	1	5	3,00	0,652	0,714	0,600	1,966	0,655
Gebyar Pemakaian Pil KB	0,20	1	1	0,130	0,143	0,200	0,473	0,158
Penyuluhan Kesehatan Reproduksi	0,33	1,00	1	0,217	0,143	0,200	0,560	0,187
Jumlah	1,53	7,00	5,00				3,000	1,000

Responden 2 Bidang Kesehatan Masyarakat-Dinas Kesehatan

Tabel 4. 282 Analisis AHP Perbandingan Berpasaran Unsur Tingkat Kesehatan Reproduksi

Unsur	Keterangan			Nilai λ			Jumlah Nilai λ	Rata-rata
	Sosialisasi Stunting dan KB	Gebyar Pemakaian Pil KB	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi	Sosialisasi Stunting dan KB	Gebyar Pemakaian Pil KB	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi		
Sosialisasi Stunting dan KB	1	3	5	0,652	0,692	0,556	1,900	0,633
Gebyar Pemakaian Pil KB	0,33	1	3	0,217	0,231	0,333	0,781	0,260
Penyuluhan Kesehatan Reproduksi	0,20	0,33	1	0,130	0,077	0,111	0,318	0,106
Jumlah	1,53	4,33	9,00				3,000	1,000

Unsur Kualitas Hidup Manula

Responden 1 Bidang Kesehatan Masyarakat-Dinas Kesehatan

Tabel 4. 283 Analisis AHP Perbandingan Berpasaran Unsur Tingkat Kualitas Hidup Manula

Unsur	Keterangan					Nilai λ					Jumlah Nilai λ	Rata-rata
	Penyuluhan Kesehatan Manula	Penyuluhan Gizi Manula	Pelatihan Ketrampilan Manula	Monitoring Psikologi	Pelayanan Tanggap Manula	Penyuluhan Kesehatan Manula	Penyuluhan Gizi Manula	Pelatihan Ketrampilan Manula	Monitoring Psikologi	Pelayanan Tanggap Manula		
Penyuluhan Kesehatan Manula	1	1,00	3	0,33	0,33	0,13	0,23	0,33	0,05	0,09	0,838	0,168
Penyuluhan Gizi Manula	0,33	1	3	1,00	1,00	0,04	0,23	0,33	0,16	0,27	1,038	0,208
Pelatihan Ketrampilan Manula	0,33	0,33	1	1	1,00	0,04	0,08	0,11	0,16	0,27	0,662	0,132
Monitoring Psikologi Manula	3,00	1	1,00	1	0,33	0,39	0,23	0,11	0,16	0,09	0,982	0,196
Pelayanan Tanggap Manula	3,00	1	1	3	1	0,39	0,23	0,11	0,47	0,27	1,480	0,296
Jumlah	7,67	4,33	9,00	6,33	3,67							1,000

Responden 2 Bidang Kesehatan Masyarakat-Dinas Kesehatan

Tabel 4. 284 Analisis AHP Perbandingan Berpasaran Unsur Tingkat Kualitas Hidup Manula

Unsur	Keterangan					Nilai λ					Jumlah Nilai λ	Rata-rata
	Penyuluhan Kesehatan Manula	Penyuluhan Gizi Manula	Pelatihan Ketrampilan Manula	Monitoring Psikologi	Pelayanan Tanggap Manula	Penyuluhan Kesehatan Manula	Penyuluhan Gizi Manula	Pelatihan Ketrampilan Manula	Monitoring Psikologi	Pelayanan Tanggap Manula		
Penyuluhan Kesehatan Manula	1	1,00	3	0,33	1,00	0,18	0,23	0,33	0,05	0,23	1,024	0,205

Unsur	Keterangan					Nilai λ					Jumlah Nilai λ	Rata-rata
	Penyuluhan Kesehatan Manula	Penyuluhan Gizi Manula	Pelatihan Ketrampilan Manula	Monitoring Psikologi	Pelayanan Tanggap Manula	Penyuluhan Kesehatan Manula	Penyuluhan Gizi Manula	Pelatihan Ketrampilan Manula	Monitoring Psikologi	Pelayanan Tanggap Manula		
Penyuluhan Gizi Manula	0,33	1	3	1,00	1,00	0,06	0,23	0,33	0,16	0,23	1,012	0,202
Pelatihan Ketrampilan Manula	0,33	0,33	1	1	1,00	0,06	0,08	0,11	0,16	0,23	0,636	0,127
Monitoring Psikologi Manula	3,00	1	1,00	1	0,33	0,53	0,23	0,11	0,16	0,08	1,106	0,221
Pelayanan Tanggap Manula	1,00	1	1	3	1	0,18	0,23	0,11	0,47	0,23	1,223	0,245
Jumlah	5,67	4,33	9,00	6,33	4,33							1,000

Responden 1 Bu Lenny Raficha Fatjerin, S.Sos (Penyuluh Penanganan Masalah Sosial)-Dinas Sosial

Tabel 4. 285 Analisis AHP Perbandingan Berpasaran Kriteria Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen

Unsur	Keterangan			Nilai λ			Jumlah Nilai λ	Rata-rata
	Jumlah Perempuan di Parlemen Tinggi	Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi	Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi	Jumlah Perempuan di Parlemen Tinggi	Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi	Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi		
Jumlah Perempuan di Parlemen Tinggi	1	3	5	0,652	0,692	0,556	1,900	0,633
Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi	0,33	1	3	0,217	0,231	0,333	0,781	0,260
Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi	0,20	0,33	1	0,130	0,077	0,111	0,318	0,106
Jumlah	1,53	4,33	9,00				3,000	1,000



Responden 2 Bapak Agus Purwoto, S.Sos (Penyuluh Sosial Ahli Muda)-Dinas Sosial

Tabel 4. 286 Analisis AHP Perbandingan Berpasaran Kriteria Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen

Unsur	Keterangan			Nilai λ			Jumlah Nilai λ	Rata-rata
	Jumlah Perempuan di Parlemen Tinggi	Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi	Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi	Jumlah Perempuan di Parlemen Tinggi	Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi	Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi		
Jumlah Perempuan di Parlemen Tinggi	1	5	3,00	0,652	0,714	0,600	1,966	0,655
Tingkat Partisipasi Perempuan Tinggi	0,20	1	1	0,130	0,143	0,200	0,473	0,158
Tingkat Kesadaran Politik Perempuan Tinggi	0,33	1,00	1	0,217	0,143	0,200	0,560	0,187
Jumlah	1,53	7,00	5,00				3,000	1,000

Jumlah Perempuan dalam Parlemen Tinggi

Responden 1 Bu Lenny Raficha Fatjirin, S.Sos (Penyuluh Penanganan Masalah Sosial)-Dinas Sosial

Tabel 4. 287 Analisis AHP Perbandingan Berpasaran Unsur Jumlah Perempuan dalam Parlemen Tinggi

Unsur	Keterangan								
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pemberdayaan	Program Kesetaraan Gender	Pelatihan Kepemimpinan	Program Pendidikan Politik	Kampanye Kesadaran Politik	Minimal Kuota Keterwakilan	Pengembangan Jaringan Sosial
Pemberdayaan Perempuan	1	1,00	1	9,00	0,20	3,00	1,00	1,00	0,11
PUSPA	1	1	9	0,14	1,00	5	0,14	5	1
Mendukung Pemberdayaan	1,00	0,11	1	3	0,33	0,20	3	3	0,33
Program Kesetaraan Gender	0,11	7	0,33	1	0,20	1,00	7	1	1



Unsur	Keterangan								
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pemberdayaan	Program Kesetaraan Gender	Pelatihan Kepemimpinan	Program Pendidikan Politik	Kampanye Kesadaran Politik	Minimal Kuota Keterwakilan	Pengembangan Jaringan Sosial
Pelatihan Kepemimpinan	5	1	3	5	1	9	1,00	0,33	0,14
Program Pendidikan Politik	0,33	0,20	5	1	0,11	1	0,14	0,33	1
Kampanye Kesadaran Politik	1	7	0,33	0,14	1	7	1	1	0,11
Minimal Kuota Keterwakilan	1	0,20	0,33	1,00	3	3	1,00	1	5
Pengembangan Jaringan Sosial	9	0,20	3	1,00	7	0,11	1	0,20	1
Jumlah	19,44	17,71	23,00	21,29	13,84	29,31	15,286	12,867	9,70

Lanjutan Tabel

Nilai λ									Jumlah Nilai λ	Rata-rata
Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pemberdayaan	Program Kesetaraan Gender	Pelatihan Kepemimpinan	Program Pendidikan Politik	Kampanye Kesadaran Politik	Minimal Kuota Keterwakilan	Pengembangan Jaringan Sosial		
0,05	0,06	0,04	0,42	0,01	0,10	0,07	0,08	0,01	0,846	0,094
0,05	0,06	0,39	0,01	0,07	0,17	0,01	0,39	0,10	1,250	0,139
0,05	0,01	0,04	0,14	0,02	0,01	0,20	0,23	0,03	0,737	0,082
0,01	0,40	0,01	0,05	0,01	0,03	0,46	0,08	0,10	1,150	0,128
0,26	0,06	0,13	0,23	0,07	0,31	0,07	0,03	0,01	1,164	0,129
0,02	0,01	0,22	0,05	0,01	0,03	0,01	0,03	0,10	0,473	0,053
0,05	0,40	0,01	0,01	0,07	0,24	0,07	0,08	0,01	0,934	0,104
0,05	0,01	0,01	0,05	0,22	0,10	0,07	0,08	0,52	1,102	0,122



Nilai λ									Jumlah Nilai λ	Rata-rata
Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pemberdayaan	Program Kesetaraan Gender	Pelatihan Kepemimpinan	Program Pendidikan Politik	Kampanye Kesadaran Politik	Minimal Kuota Keterwakilan	Pengembangan Jaringan Sosial		
0,46	0,01	0,13	0,05	0,51	0,00	0,07	0,02	0,10	1,345	0,149
										1,00

Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Parlemen

Responden 1 Bu Lenny Raficha Fatjirin, S.Sos (Penyuluh Penanganan Masalah Sosial)-Dinas Sosial

Tabel 4. 288 Analisis AHP Perbandingan Berpasaran Unsur Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Parlemen

Unsur	Keterangan		Mendukung Pemberdayaan	Program Kesetaraan Gender	Pelatihan Kepemimpinan	Program Pendidikan Politik
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA				
Pemberdayaan Perempuan	1	1,00	3	0,33	1,00	0,33
PUSPA	0,33	1	3	1,00	1,00	1,00
Mendukung Pemberdayaan	0,33	0,33	1	1	1,00	1,00
Program Kesetaraan Gender	3,00	1	1,00	1	0,33	1,00
Pelatihan Kepemimpinan	1	1	1	3	1	1
Program Pendidikan Politik	3,00	1,00	1,00	0,33	1,00	1
Jumlah	8,67	5,33	10,00	6,67	5,33	5,33

Lanjutan Tabel

Nilai λ						Jumlah Nilai λ	Rata-rata
Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pemberdayaan	Program Kesetaraan Gender	Pelatihan Kepemimpinan	Program Pendidikan Politik		
0,12	0,19	0,30	0,05	0,19	0,06	0,903	0,150



Nilai λ						Jumlah Nilai λ	Rata-rata
Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pemberdayaan	Program Kesetaraan Gender	Pelatihan Kepemimpinan	Program Pendidikan Politik		
0,04	0,19	0,30	0,15	0,19	0,19	1,051	0,175
0,04	0,06	0,10	0,15	0,19	0,19	0,726	0,121
0,35	0,19	0,10	0,15	0,06	0,19	1,034	0,172
0,12	0,19	0,10	0,45	0,19	0,19	1,228	0,205
0,35	0,19	0,10	0,05	0,19	0,19	1,059	0,176
							1,00

Responden 2 Bapak Agus Purwoto, S.Sos (Penyuluh Sosial Ahli Muda)-Dinas Sosial

Tabel 4. 289 Analisis AHP Perbandingan Berpasaran Unsur Jumlah Perempuan dalam Parlemen Tinggi

Unsur	Keterangan					
	Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pemberdayaan	Program Kesetaraan Gender	Pelatihan Kepemimpinan	Program Pendidikan Politik
Pemberdayaan Perempuan	1	3,00	1	1,00	1,00	0,33
PUSPA	0,33	1	3	1,00	1,00	1,00
Mendukung Pemberdayaan	1,00	0,33	1	1	1,00	1,00
Program Kesetaraan Gender	1,00	1	1,00	1	0,33	1,00
Pelatihan Kepemimpinan	1	1	1	3	1	1
Program Pendidikan Politik	3,00	1,00	1,00	0,33	1,00	1
Jumlah	7,33	7,33	8,00	7,33	5,33	5,33



Lanjutan Tabel

Nilai λ						Jumlah Nilai λ	Rata-rata
Pemberdayaan Perempuan	PUSPA	Mendukung Pemberdayaan	Program Kesetaraan Gender	Pelatihan Kepemimpinan	Program Pendidikan Politik		
0,14	0,41	0,13	0,14	0,19	0,06	1,057	0,176
0,05	0,14	0,38	0,14	0,19	0,19	1,068	0,178
0,14	0,05	0,13	0,14	0,19	0,19	0,818	0,136
0,14	0,14	0,13	0,14	0,06	0,19	0,784	0,131
0,14	0,14	0,13	0,41	0,19	0,19	1,182	0,197
0,41	0,14	0,13	0,05	0,19	0,19	1,091	0,182
							1,00

Kesadaran Politik Perempuan

Responden 1 Bu Lenny Raficha Fatjerin, S.Sos (Penyuluh Penanganan Masalah Sosial)-Dinas Sosial

Tabel 4. 290 Analisis AHP Perbandingan Berpasangan Unsur Kesadaran Politik Perempuan dalam Parlemen

Unsur	Keterangan				Nilai λ				Jumlah Nilai λ	Rata-rata
	Program Kesetaraan Gender	Pendidikan Politik	Kampanye Kesadaran Politik	Pengembangan Jaringan Sosial	Program Kesetaraan Gender	Pendidikan Politik	Kampanye Kesadaran Politik	Pengembangan Jaringan Sosial		
Program Kesetaraan Gender	1	1,00	3	0,33	0,21	0,30	0,38	0,10	0,989	0,247
Pendidikan Politik	0,33	1	3	1,00	0,07	0,30	0,38	0,30	1,046	0,262
Kampanye Kesadaran Politik	0,33	0,33	1	1	0,07	0,10	0,13	0,30	0,596	0,149
Pengembangan Jaringan Sosial	3,00	1	1,00	1	0,64	0,30	0,13	0,30	1,368	0,342
Jumlah	4,67	3,33	8,00	3,33						1,000



Responden 2 Bapak Agus Purwoto, S.Sos (Penyuluh Sosial Ahli Muda)-Dinas Sosial

Tabel 4. 291 Analisis AHP Perbandingan Berpasaranan Unsur Kesadaran Politik Perempuan dalam Parlemen

Unsur	Keterangan				Nilai λ				Jumlah Nilai λ	Rata-rata
	Program Kesetaraan Gender	Pendidikan Politik	Kampanye Kesadaran Politik	Pengembangan Jaringan Sosial	Program Kesetaraan Gender	Pendidikan Politik	Kampanye Kesadaran Politik	Pengembangan Jaringan Sosial		
Program Kesetaraan Gender	1	0,33	1	0,33	0,13	0,12	0,17	0,10	0,516	0,129
Pendidikan Politik	3,00	1	3	1,00	0,38	0,38	0,50	0,30	1,550	0,388
Kampanye Kesadaran Politik	1,00	0,33	1	1	0,13	0,13	0,17	0,30	0,717	0,179
Pengembangan Jaringan Sosial	3,00	1	1,00	1	0,38	0,38	0,17	0,30	1,217	0,304
Jumlah	8,00	2,66	6,00	3,33						1,000